BUKU I

ANALISIS STRATEGIS

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KOMINFO

G-MULTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku 1: Analisis Strategis Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen awal masterplan *Smart City* yang dijadikan sebagai acuan pembangunan untuk mencapai tujuan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Buku 1 disusun untuk menganalisis kondisi dan tantangan dalam mempersiapkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang termasuk dalam Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) yang rencananya akan berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur.

Buku 1: Analisis Strategis Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara ini berisi analisis masa depan (analisis visi masa depan dan analisis kondisi eksternal), analisis kesiapan daerah (*nature*, *structure*, infrastruktur, suprastruktur, dan *culture*), analisis strategi pembangunan *Smart City*, serta analisis visi pembangunan *Smart City*. Analisis strategi pembangunan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara diidentifikasi berdasarkan analisis GAP, SWOT, dan TOWS untuk masing-masing dimensi yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living,* dan *smart environment.* Penyusunan Dokumen Masterplan *Smart City* menjadi salah satu hal penting dalam pencapaian percepatan pembangunan wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan persiapan awal implementasi *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kawasan Ibu Kota Negara.

Tim Penyusun Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I ANALISIS MASA DEPAN 1

1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah 1

1.2 Analisis Kondisi Eksternal 12

1.2.1 Analisis Trend Pembangunan Politik 12

1.2.2 Analisis Trend Pembangunan Ekonomi 12

1.2.3 Analisis Trend Pembangunan Sosial 14

1.2.4 Analisis Trend Pembangunan Teknologi 17

1.2.5 Analisis *Trend* Pembangunan Lingkungan 18

1.2.6 Analisis *Trend* Pembangunan Law/Legal 20

BAB II ANALISIS KESIAPAN DAERAH 21

2.1 Nature 21

2.2 Struktur 24

2.2.1 Kesiapan Sumber Daya Manusia 24

2.2.2 Kemampuan Birokrasi 29

2.2.3 Kemampuan Anggaran 33

2.3 Infrastruktur 37

2.3.1 Fisik 37

2.3.2 Digital 39

2.3.3 Sosial 41

2.4 Suprastruktur 46

2.4.1 Kebijakan 46

2.4.2 Kelembagaan 48

2.5 Culture 59

BAB III ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* 61

3.1 Analisis GAP 61

3.2 Analisis SWOT 65

3.3 Analisis TOWS 66

3.3.1 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Governance* 66

3.3.2 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Branding* 67

3.3.3 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Economy* 68

3.3.4 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Living* 69

3.3.5 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Society* 70

3.3.6 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Environment* 71

BAB IV ANALISIS VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY* 73

4.1 Visi, Misi, Smart City 73

4.2 Sasaran Smart City Daerah 74

REFERENSI 78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2009-2019 15
Gambar 1.2 Indeks Literasi Digital Indonesia 16
Gambar 1.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kaltim dengan Indonesia 17
Gambar 1.4 Keterjangkauan Akses Internet di Indonesia 18
Gambar 1.5 Persentase Jenis dan Integrasi Aplikasi Kabupaten Kutai Kartanegara 18
Gambar 1.6 *Stakeholder* yang terlibat dalam *Indonesia Global Green Growth* 19
Gambar 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kecamatan Tahun 2020 21
Gambar 2.2. Diagram Jumlah Curah hujan menurut Bulan di Kabupaten Kutai Kartanegara 22
Gambar 2.3. Diagram Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kecamatan 24
Gambar 2.4. Diagram Jumlah Sekolah Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 27
Gambar 2.5 .Diagram Jumlah Prasarana Kesehatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara 28
Gambar 2.6. Diagram Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kutai 29
Gambar 2.7. Diagram Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Kutai 30
Gambar 2.8. Diagram Jumlah Pegawai Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 30
Gambar 2.9. Grafik Jumlah Proyek pada Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di 36
Gambar 2.10. Diagram Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di di Kabupaten Kutai 37
Gambar 2.11. Diagram Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di di Kabupaten Kutai 38
Gambar 2.12. Jaringan Fiber Optic (FO) Kabupaten Kutai Kartanegara 39
Gambar 2.13. DC Network Kutai Kartanegara 40
Gambar 2.14. Sistem aplikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara 41
Gambar 2.15. Diagram Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Dan Jenis 42
Gambar 2.16. Diagram Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Usia Dan Jenis 43
Gambar 2.17. Diagram Banyaknya Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara 44
Gambar 2.18. Diagram Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut di Kabupaten Kutai 44
Gambar. 2.19. Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 4
Tabel 1.2 Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 8
Tabel 1.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kutai Kartanegara 13
Tabel 1.4 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2019 20
Tabel 2.1. Luas Area Kebun dan Jumlah Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2020 23
Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi 25
Tabel 2.3. Banyaknya Perkara Yang Masuk Di Kejaksaan Negeri Menurut Jenis Perkara Di 26
Tabel 2.4. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia 26
Tabel 2.5. Analisis Kualitas Sumberdaya Pemerintah 31
Tabel 2.6. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara 33
Tabel 2.7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara 34
Tabel 2.8. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah 36
Tabel 2.9. Analisis Infrastruktur Fisik 38
Tabel 2.10. Analisis Infrastruktur Telekomunikasi 41
Tabel 2.11. Analisis Infrastruktur Sosial Daerah 45
Tabel 2.12. Analisis Kesiapan Kebijakan Dan Kelembagaan 48
Tabel 2.13. Susunan Keanggotaan Dewan Smart City Pemerintahan Kabupaten Kutai 50
Tabel 2.14. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara 54
Tabel 2.15. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah 58
Tabel 2.16. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah 59
Tabel 3.1 Analisis GAP 61
Tabel 3.2 Analisis SWOT 65
Tabel 3.3 Analisis Kesenjangan *Smart Governance* 66
Tabel 3.4 Analisa Kesenjangan *Smart Branding* 67
Tabel 3.5 Analisa Kesenjangan *Smart Economy* 68
Tabel 3.6. Analisa Kesenjangan *Smart Living* 69
Tabel 3.7 Analisa Kesenjangan *Smart Society* 70
Tabel 3.8 Analisa Kesenjangan *Smart Environment* 71
Tabel 4.1 Dimensi, Sub-Dimensi, Sasaran dan dasar Pemikiran 75

BAB I
ANALISIS MASA DEPAN

Perkembangan atau tren sebuah daerah dapat dilakukan dengan menggunakan analisis masa depan. Analisis masa depan dalam *Smart City* mencakup analisis trend politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta tren pembangunan law/legal. Selain itu, analisis masa depan digunakan untuk mengidentifikasi daya saing daerah dibandingkan dengan daerah lainnya hingga daya saing di tingkat global.

1.1 Analisis Visi Pembangunan Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115º26' Bujur Timur dan 117º36' Bujur Timur serta diantara 1º28' Lintang Utara dan 1º08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang dipersiapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen untuk berkembang menjadi kabupaten cerdas yang mampu memenuhi dan meminimalisir permasalahan kabupaten dengan cara dan solusi alternatif sehingga mampu melayani masyarakat lebih baik, tercapainya kehidupan yang nyaman dan aman bagi

masyarakat dan berkelanjutan. Wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengimplementasikan Smart City/Smart Regency sudah terlihat dari Tahun 2017. Melalui Program Gerakan Menuju 100 Smart City bersama 24 Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih sebagai salah satu Kabupaten dalam menyusun Masterplan Smart Regency Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen rencana induk Masterplan Smart Regency ini diperlukan sebagai fondasi awal dalam menerapkan Smart City di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Masterplan Smart City Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan sebagai arah pengembangan dan acuan dalam mengelola sumber daya (sumberdaya manusia, alam, teknologi), kesiapan infrastruktur, serta budaya yang ada di masyarakat didasarkan dengan kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Masterplan Smart City Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada dokumen pembangunan yang telah dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selain itu, arah pengembangan Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu juga pada dokumen perencanaan dalam lingkup yang lebih luas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi program kerja pemerintah sehingga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada tahapan terakhir (IV) dari pelaksanaan perencanaan jangka panjang daerah dimana periode pembangunan daerah tahun 2021-2026 akan dilaksanakan. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Berdasarkan visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 tersebut menunjukkan bahwa adanya keselarasan dengan konsep *Smart City*, karena dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya

sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehingga memberikan kemudahan bagi Pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berbahagia. Inovasi baik yang bersumber dari Pemerintah atau masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi menjadi 2 frase (bagian), yaitu Masyarakat yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- **Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara menjadi salah satu gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan isu strategis seperti: belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat, belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah, belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Arah Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirumuskan harus mampu menjadi "akhir" dari pencapaian visi "**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**". Terlebih lagi dengan adanya perwujudan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara mengharuskan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan. Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki "pekerjaan rumah" dalam melaksanakan

pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Lebih lanjut, berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan kedalam 5 Misi yaitu:

Misi 1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
Misi 2	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
Misi 3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
Misi 5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Lebih jauh lagi, kelima misi di detailkan kembali dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP dengan pencapaian predikat A (80,01) pada akhir tahun 2026	Indeks Reformasi Birokrasi

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan pencapaian sebesar 7,00 pada akhir tahun 2026.	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 9,05 pada akhir tahun 2026	
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pendidikan sebesar 0,706 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 53,00 pada tahun 2026.	Indeks Pembangunan Manusia
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kesehatan dengan pencapaian sebesar 0,824 pada akhir tahun 2026.	
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 79,20 pada akhir tahun 2026.	
	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indikator Indeks Gini sebesar 0,270 dan Indeks Desa Membangun sebesar 0,785 pada	Tingkat Kebahagiaan

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
		akhir tahun 2026	
		Menurunnya pengangguran di masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,22% dan PDRB per Kapita sebesar 204,69 (Juta Rupiah) pada akhir tahun 2023	Tingkat Kemiskinan
Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,5% pada tahun 2026	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata sebesar 4,23% pada tahun 2026.	
		Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebesar 7,56% pada tahun 2026.	
		Meningkatnya daya saing investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Tingkat Pertumbuhan Investasi sebesar 1,79% pada tahun 2026.	
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Cakupan layanan air bersih sebesar 95% dan Persentase rumah layak huni sebesar 91,44% pada akhir tahun 2026.	Indeks Kesulitan Geografis

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
		Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Aksesibilitas Wilayah sebesar 88,18% pada akhir tahun 2026	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,10 pada tahun 2026	Persentase Penurunan Emisi GRK
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari Indeks Risiko Bencana sebesar 100 pada tahun 2026	

Sumber: Ranwal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

Tabel 1.2
Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan Dimensi Smart City

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Layanan Publik	✔					
				Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Persepsi Korupsi	✔					
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	✔					
2	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan				✔		

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
	Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Berdaya Saing		Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender					✓	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan					✓	
					Indeks Pembangunan Kebudayaan		✓			✓	
		Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat	Indeks Gini			✓	✓		
					Indeks Desa Membangun					✓	
			Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pengangguran Di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			✓		✓	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
					PDRB per Kapita			✓			
3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi		✓	✓			
				Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			✓			
				Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		✓				
				Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif			✓			

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat Dan Ketersediaan Air Bersih	Cakupan layanan air bersih				✓		✓
			Persentase penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah					✓		
5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Emisi GRK	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana				✓		✓
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						✓

1.2 Analisis Kondisi Eksternal

Kondisi eksternal menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah. Analisis kondisi eksternal bertujuan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis yang mempengaruhi pembangunan sebuah daerah. Analisis kondisi eksternal meliputi analisis trend pembangunan politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta law/legal. Dengan analisis kondisi eksternal pembangunan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan dan melibatkan berbagai faktor eksternal agar terciptanya daerah yang berdaya saing, inovatif, kreatif, dan berkelanjutan dapat segera terwujud.

1.2.1 Analisis Trend Pembangunan Politik

Trend perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang berdampak pada berbagai kemudahan aktivitas dalam memperoleh informasi, pelayanan, serta mengatasi berbagai persoalan menjadi salah satu hal wajib yang dimiliki dalam membangun sebuah kota. Tidak terkecuali di Indonesia, Pembangunan Ibukota Negara Baru di Indonesia diharapkan dapat mengadopsi konsep Smart City dalam implementasinya. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik IndonesiaPengembangan Smart City di Indonesia melalui Direktorat Layanan Aptika Pemerintahan (LAIP) bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian PANRB menginisiasi penyelenggaraan Gerakan Menuju 100 Smart City. Gerakan Menuju 100 Smart City dilaksanakan dalam rentang waktu tiga tahun (2017-2019).

Dewasa ini, pembangunan *Smart City* di Indonesia sudah banyak diimplementasikan tidak hanya sebatas untuk kota melainkan sudah banyak kabupaten-kabupaten yang sudah menerapkan konsep Smart City, salah satunya Kabupaten Kutai Kartanegara. Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih menjadi salah satu wilayah yang masuk dalam Program Gerakan Menuju 100 Smart City bersama 24 Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia. Hal tersebut menjadi modal awal bagi Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon Ibukota Negara (IKN) dalam pengembangan Smart City khususnya untuk Kawasan IKN.

1.2.2 Analisis Trend Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, serta pembangunan suatu negara. Perubahan sistem ekonomi yang mengarah kepada ekonomi digital menjadi *trend* utama saat ini. Kemudahan akses jaringan internet mampu meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi sehingga lebih

efektif dan efisien. Sejalan dengan perkembangan TIK dan Smart City melalui berbagai platform dan sistem informasi baik *e-commerce* maupun *fintech* memberikan kemudahan masyarakat dalam bertransaksi. Secara keseluruhan, trend pembangunan ekonomi digital memberikan dampak positif dalam pembangunan ekonomi sebuah daerah.

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh perekonomian global. Secara umum, perekonomian Kutai Kartanegara yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 sebesar Rp.162.022,59 miliar, mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Sumbangan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan peringkat pertama dalam sumbangan terhadap PDRB Kalimantan Timur. PDRB perkapita Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat ketiga setelah Kabupaten Kutai Timur dan Kota Samarinda. Kedepan, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Ibukota Negara memiliki tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat.

Tabel 1.3 Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13.10	12.89	12.90	13.41	14.92
2. Pertambangan dan Penggalian	64.44	65.58	65.37	63.26	59.81
3. Industri Pengolahan	4.07	4.10	4.08	4.26	4.49
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
6. Konstruksi	7.98	7.55	7.64	8.18	8.56
7. Pedaganagn Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.66	3.52	3.59	3.92	4.33
8. Transportasi dan Pergudangan	1.01	0.97	0.99	1.08	1.2
9. Penyediaan Akomodasi & Makan Minum	0.27	0.27	0.29	0.33	0.35
10. Informasi dan Komunikasi	0.68	0.64	0.65	0.73	0.86
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.32	0.30	0.31	0.33	0.38
12. Real Estate	0.52	0.47	0.46	0.48	0.53

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
13. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
14. Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, & Jaminan Sosial Wajib	1.87	1.65	1.57	1.67	1.76
15. Jasa Pendidikan	1.12	1.12	1.14	1.22	1.36
16. Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial	0.63	0.61	0.66	0.76	1.04
17. Jasa Lainnya	0.22	0.22	0.23	0.26	0.28
Produk Domestik Regional Bruto	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2021

1.2.3 Analisis Trend Pembangunan Sosial

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan konsep pembangunan berkelanjutan dari Agenda 2030 yang didasarkan atas hak asasi manusia dan kesetaraan dengan prinsip Universal, Integrasi dan Inklusif. Trend pilar pembangunan sosial berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs di Indonesia menyasar pada Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas), dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender). Jumlah penduduk dunia Tahun 2009-2019 mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan. Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Tahun 2019 diperkirakan sudah mencapai 7,7 Miliar. Transisi demografi dunia secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi proses pembangunan terutama dalam pemerataan pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sebanding dengan kebutuhan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan. Pertumbuhan penduduk yang tidak dikendalikan dapat menimbulkan dampak pada angka kemiskinan, akses pangan penduduk, kehidupan yang sehat dan sejahtera, akses fasilitas pendidikan, serta kesetaraan gender.

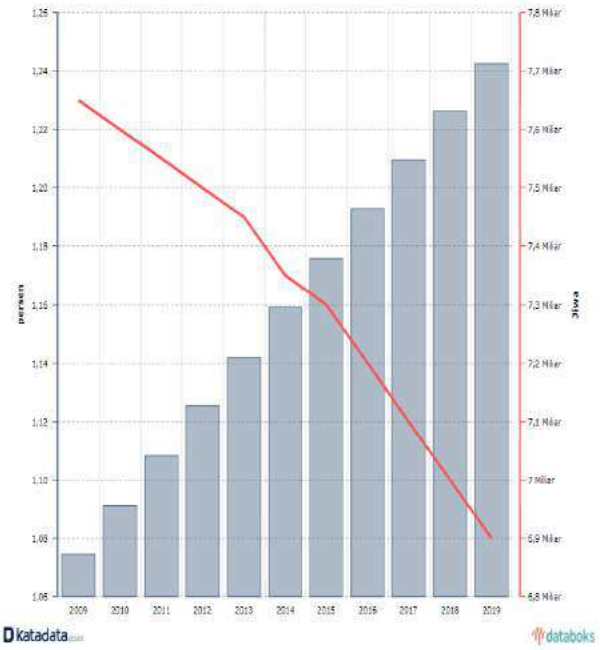

Gambar 1.1 Jumlah Penduduk Dunia Tahun 2009-2019
Sumber: https://databoks.katadata.co.id/ diakses tanggal 09 Agustus 2021 pukul 09.33 WIB

Literasi digital menjadi *basic digital skill* ketika masyarakat Indonesia ingin mengetahui dan ingin meningkatkan kecakapannya untuk menggunakan ruang digital. Salah satu trend tantangan global saat ini dalam aspek sosial ialah tersedianya ruang digital yang semakin intensif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dunia. Berdasarkan hasil survei literasi digital nasional Tahun 2020, secara nasional, indeks literasi digital di Indonesia masih berada pada level "sedang" yaitu sebesar 3, 47. Berdasarkan Gambar 1.2 menunjukkan bahwa Subindex 1 Informasi dan Literasi Data memiliki nilai 3,17; sub indeks 2 Komunikasi dan Kolaborasi memiliki nilai 3,38; sub indeks 3 Keamanan memiliki nilai 3,66 dan subindex 4 Kemampuan Teknologi memiliki nilai 3,66. Indeks literasi digital Indonesia Wilayah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi) memiliki status Literasi Digital yang relatif lebih baik dan tinggi dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat dan Timur. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Indonesia Wilayah Tengah (Bali, Kalimantan, Sulawesi) sudah bisa dan terbiasa mengakses internet dan media sosial.

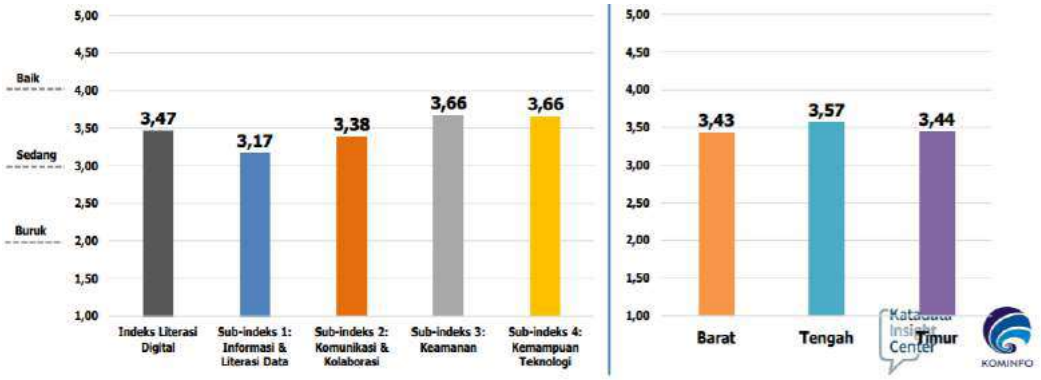

Gambar 1.2 Indeks Literasi Digital Indonesia
Sumber: Katadata Insight Center dan Kominfo RI, 2020

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Perkembangan angka IPM di Provinsi Kalimantan Timur terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ditinjau berdasarkan Gambar 1.3 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur diatas rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Nasional. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Timur meningkat dari Tahun 2015 sebesar 74.17 menjadi 75.81 pada Tahun 2018. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 73,78 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 73,15, dengan pertumbuhan sebesar 0,63 poin. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19, angka IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 73,59.Jika melihat tingginya IPM khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka tantangan lima tahun ke depan lebih kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, profesional, terampil dan terdidik terutama yang menguasai pengetahuan dan teknologi, dan keahlian manajemen keuangan, manajemen informasi, manajemen transportasi, dan kemampuan manajerial lainnya, dan revitalisasi inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian utama dari pengembangan Ibu Kota Negara.

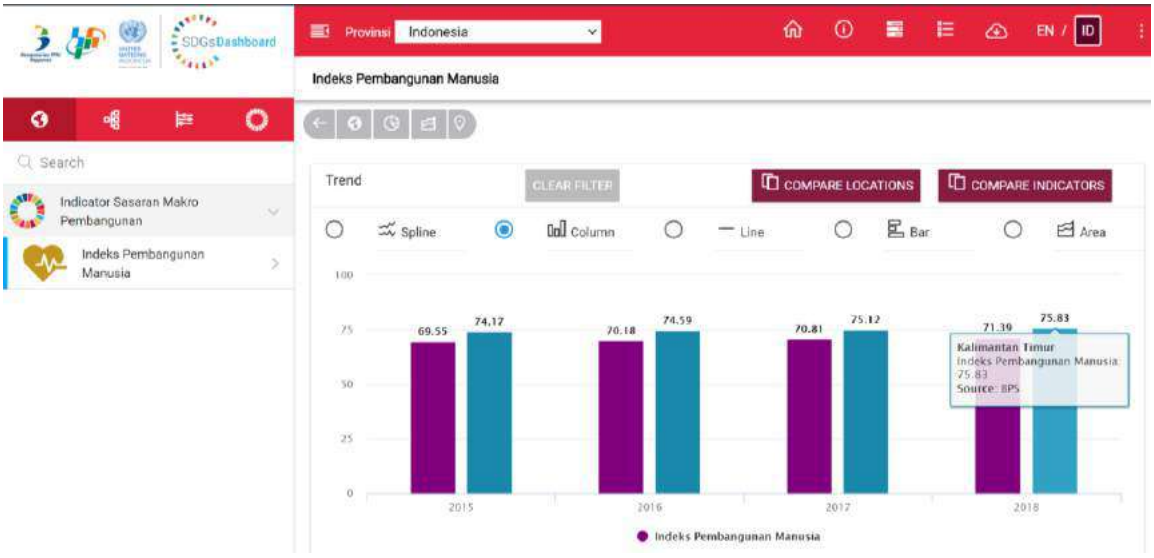

Gambar 1.3 Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kaltim dengan Indonesia
http://sdgs.bappenas.go.id

1.2.4 Analisis Trend Pembangunan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di tingkat global memberikan pengaruh terhadap tatanan kehidupan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi salah satu dampak dari adanya globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dioptimalkan dan dikelola dengan baik dapat memberikan dampak percepatan pembangunan di sebuah daerah. Tren perkembangan teknologi ditandai dengan berbagai terobosan inovasi seperti artificial intelligence (AI), komputasi awan atau cloud, blockchain, data intelligence dan 5G. Transformasi perkembangan teknologi di Indonesia lebih banyak diimplementasikan dalam teknologi digital (internet seluler, otomatisasi, dan cloud technology), teknologi yang mengurangi keterbatasan fisik dan jarak (IoT, transportasi dan distribusi), perdagangan elektronik, industri 4.0, dan masih banyak lagi.

Teknologi menjadi salah satu elemen infrastruktur yang mendukung implementasi *Smart City* suatu daerah. Keterjangkauan akses internet, *coverage signal*, serta pemanfaatan teknologi menjadi salah satu faktor pendorong keberhasilan dalam *Smart City*. Berdasarkan Gambar 1.4 menunjukkan bahwa 74,7% masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat mengakses jaringan internet. Kemampuan masyarakat dalam mengakses internet menjadi salah satu indikator kemudahan masyarakat dalam akses internet terutama dalam menjalankan program-program pendukung implementasi *Smart City*.

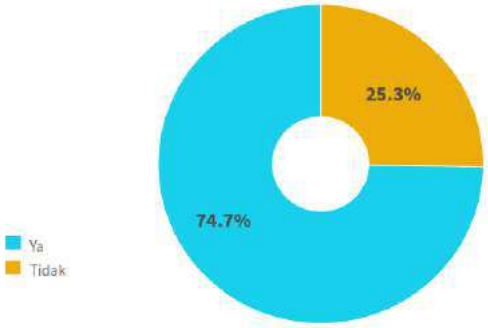

Gambar 1.4 Keterjangkauan Akses Internet di Indonesia
Sumber: Katadata Insight Center dan Kominfo RI, 2020

Sejalan dengan hal tersebut, ketersediaan infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh peran serta dari berbagai perusahaan telekomunikasi dengan dukungan pembangunan infrastruktur seperti tower seluler, PSTN, *fiber optic* dan *microwave*. Terdapat 4 *provider* seluler, serta 1 provider PSTN & ADSL yang beroperasional di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan jumlah website di Kabupaten Kutai Kartanegara, 91% website aktif dan 9% tidak aktif (dimana 30% total website sudah terupdate). Lebih lanjut, sampai dengan 05 Maret 2021, jumlah aplikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 93 aplikasi yang terdiri dari aplikasi umum (digunakan seluruh OPD) sebesar 63% dan 37% merupakan aplikasi khusus untuk OPD tertentu. Namun demikian, sebagian besar aplikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara belum terintegrasi satu dengan lainnya, berdasarkan data Maret 2021 aplikasi yang sudah terintegrasi hanya mencapai 44%.

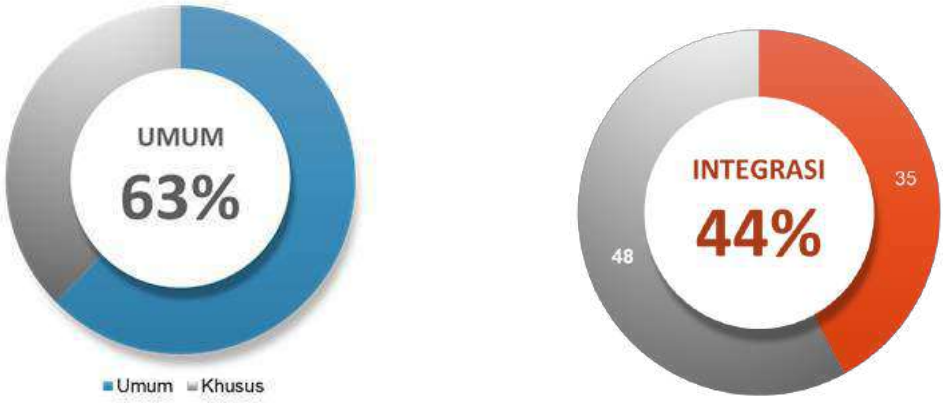

Gambar 1.5 Persentase Jenis dan Integrasi Aplikasi Kabupaten Kutai Kartanegara
Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Kartanegara, 2021

1.2.5 Analisis *Trend* Pembangunan Lingkungan

Rencana aksi global yang dikemas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan salah satu kesepakatan para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan,

mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Berdasarkan Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II, pilar pembangunan lingkungan mencakup pada Tujuan 6 (akses air bersih dan sanitasi), Tujuan 11 (kota dan komunitas yang berkelanjutan), Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), Tujuan 13 (penanganan perubahan iklim), Tujuan 14 (menjaga ekosistem laut), dan Tujuan 15 (menjaga ekosistem darat). Indonesia menjadi salah satu pendiri *Global Green Growth Institute* (GGGI) dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau yang dapat mengurangi kemiskinan serta memastikan inklusi sosial, kelestarian lingkungan dan efisiensi sumber daya. *Indonesia Green Growth Program* melakukan upaya serius untuk memastikan pertumbuhan yang lebih hijau sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang mendesak serta komitmen internasional negara Indonesia untuk mewujudkan Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional/*Nationally Determined Contribution/NDC*) dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals/SDGs* (http://greengrowth.bappenas.go.id).

Berdasarkan Gambar 1.6 menunjukkan bahwa dalam implementasi *Indonesia Green Growth Program,* Kementerian PPN/Bappenas memiliki mitra pemerintah dan non pemerintah. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur menjadi salah satu mitra yang terlibat dalam *Indonesia Green Growth Program.* Adapun instansi pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terlibat antara lain yaitu Bappeda, Pemerintah Provinsi, DPRD, Dinas Kehutanan, ESDM, dan Universitas Mulawarman.

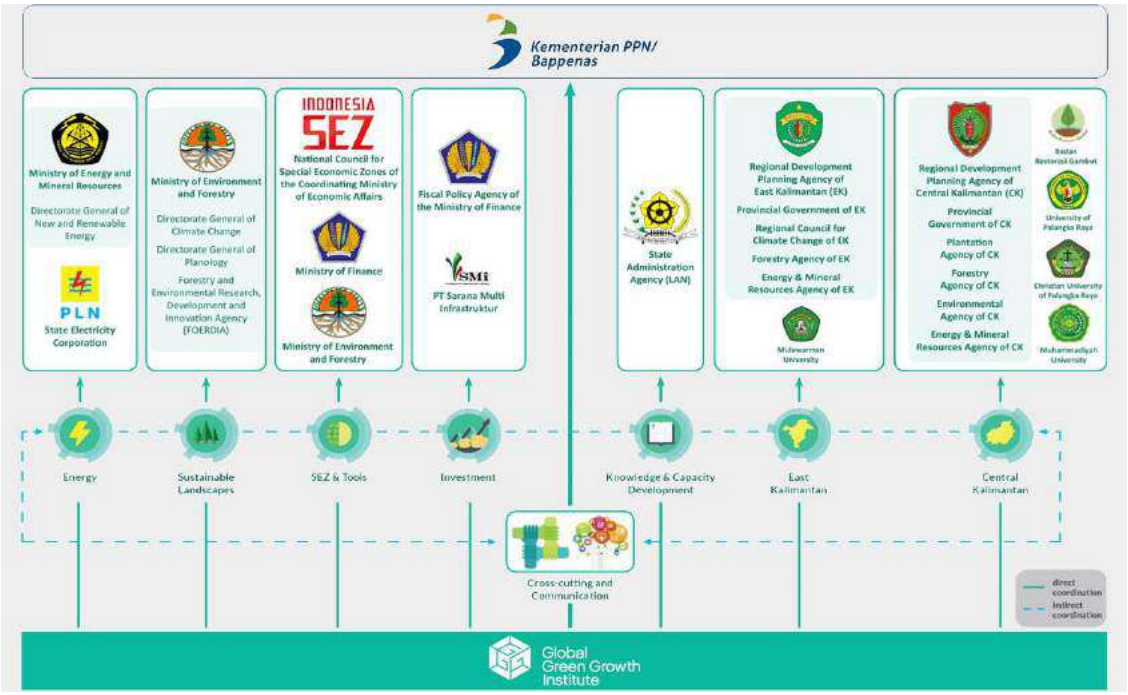

Gambar 1.6 *Stakeholder* yang terlibat dalam *Indonesia Global Green Growth*

Sumber: http://greengrowth.bappenas.go.id

Sejalan dengan *Indonesia Green Growth Program*, aspek lingkungan di Kabupaten Kutai Kartanegara terutama dalam pengelolaan dan penanganan persampahan mengalami perkembangan positif. Tahun 2019, volume sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 255,5 ribu m3 dimana 81.25% volume sampah dapat dikelola. Hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pada tahun 2017 dimana hanya sebesar 73.92% sampah yang dapat ditangani dari volume total sampah sebanyak 138,70 ribu m3. Adapun data pengelolaan sampah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Tahun 2017-2019 sebagai berikut.

Tabel 1.4 Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2019

Tahun	Volume (ribu m3)	Penanganan (%)
2017	138.7	73.92
2018	146.04	74.79
2019	255.5	81.25

Sumber: Rancangan Awal RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

1.2.6 Analisis *Trend* Pembangunan Law/Legal

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika memberikan kesempatan daerah untuk bisa berinovasi dengan leluasa. Adanya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi salah satu regulasi kebijakan dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia. Trend pembangunan *Smart City* di Indonesia dimulai dari pengembangan konsep *e-government* dalam memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat. Lebih jauh, perkembangan *Smart City* di Indonesia diwadahi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Secara khusus, kebijakan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara secara tersirat terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016. Selain itu, keseriusan implementasi *Smart City* juga diwujudkan dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Dewan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB II
ANALISIS KESIAPAN DAERAH

Analisis kesiapan daerah berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021-Gerakan Menuju *Smart City* yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2021, kesiapan Daerah Pintar *Smart City Readiness* menjadi bagian penting dalam komponen *Smart City*. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastruktur*), suprastruktur (*superstructure*), dan budaya (*culture*).

2.1 Nature

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki wilayah dengan luas 27.263,10 km², dengan lokasi geografi terletak pada 115º26' Bujur Timur dan 117º36' Bujur Timur serta di antara 1º28' Lintang Utara dan 1º08' Lintang Selatan. Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan, dimana kecamatan yang ada terdiri dari Samboja, Muara Jawa, Sanga Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berbatasan langsung dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat daya. Luas wilayah kecamatan paling luas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Kecamatan Tabang seluas 7764.5 km² (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut luas wilayah kabupaten Kutai Kartanegara menurut kecamatan.

Gambar 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kecamatan Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Kabupaten Kutai Kartanegara terkenal dengan kenampakan sungai yang mengaliri setiap kecamatan yang ada, terdapat sungai terpanjang yaitu Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer, selain sungai terdapat pula sekitar 16 Danau dan yang paling luas adalah Danau Semayang (13.000 hektar). Seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kenampakan yang paling menonjol berupa pegunungan, hampir sebagian besar dikelilingi oleh pegunungan, sekitar 10 gunung dan yang paling tinggi yaitu Gunung Lengkup (485 meter) yang berada di Kecamatan Loa Kulu. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi curah hujan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara berbeda di tiap kecamatannya, tercatat pada tahun 2020 curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu 291 mm dengan jumlah hari hujan yaitu 14 hari (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut merupakan jumlah curah hujan dan jumlah hari hujan menurut Bulan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

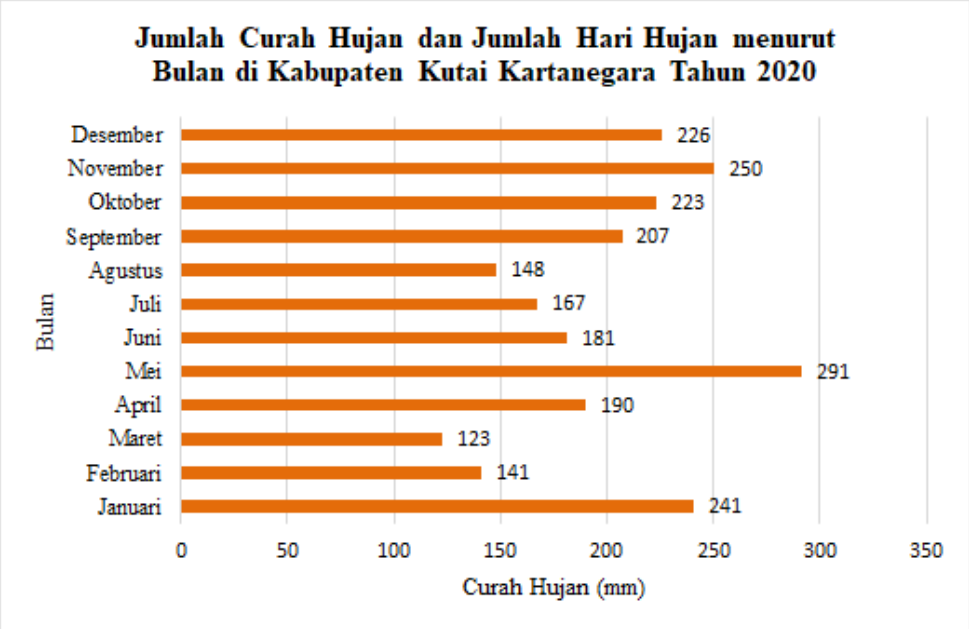

Gambar 2.2. Diagram Jumlah Curah hujan menurut Bulan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Sumberdaya tersebut terdiri dari sumber daya alam seperti pertambangan, minyak dan gas alam. Kondisi hutan yang luas menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa hutan baik berupa cagar alam, taman nasional, taman hutan raya dan hutan lindung. Kondisi topografi dan curah hujan yang ada memberikan dampak positif pada perkembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Terdapat berbagai macam jenis komoditas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan biofarmaka dan tanaman hias. Data menunjukkan bahwa pada

tahun 2020 jumlah produksi buah-buahan (dalam kwintal) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara cukup beragam mulai dari mangga (15374), durian (43435), jeruk (21034), pisang (372352), pepaya (54872), salak (31403), belimbing (4609), duku (20524), jambu air (7832), jambu biji (8834), manggis (3371), nangka (56101), nanas (203993), rambutan (35909), sawo (27913), sirsak (3448), dan sukun (7788). sedangkan untuk berbagai macam tanaman biofarmaka terdiri dari jahe, pace, temulawak, lidah buaya, kapulaga dan lain-lain. Selain komoditas hortikultura, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga dikenal dengan komoditas perkebunannya seperti kelapa sawit, karet, lada, kopi, kakao, aren dan kemiri. Berikut luasan area, jumlah produksi dan produktivitas perkebunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

Tabel 2.1. Luas Area Kebun dan Jumlah Produktivitas Komoditas Perkebunan Tahun 2020

Komoditas	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (kg/Ha)	Petani
Kelapa Sawit	28291.65	274235.71	14348.76	12990
Karet	17686.74	11974.28	1225	8688
Lada	3804.99	1085.07	348.47	1940
Kelapa Dalam	7977.02	11513.34	1956.85	4874
Kopi	70	11.31	538.43	125
Kakao	71.25	62.66	1519.1	63
Aren	246.69	487.53	3322.4	515
Kemiri	52.15	8.73	307.94	165
Kuta Kartanegara	58200.49	299378.63	23566.95	29360

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki budidaya perikanan baik di laut, tambak, kolam, keramba, jaring apung dan sawah, namun yang dominan adalah keramba dengan total produksi sekitar 70.520 ton pada tahun 2020, sedangkan untuk total keseluruhan produksi perikanan budidaya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 125.428,65 ton. Selain kegiatan budidaya perikanan, di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat kegiatan pertambangan yang mencakup pertambangan migas dan non migas. Dari kegiatan tersebut, salah satu hasil tambang yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian Kutai Kartanegara adalah komoditas batu bara. Berdasarkan data dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, total produksi batu bara di Kutai Kartanegara tahun 2019 mencapai 69.484.736 Mton. Sementara untuk penjualan batubara mencapai 9.706.153 Mton untuk domestik dan 56.226.728 Mton untuk ekspor.

2.2 Struktur

2.2.1 Kesiapan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek penting dalam menyiapkan suatu wilayah menuju Smart City, Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 729.382 jiwa pada tahun 2020. Menurut data BPS, persebaran penduduk yang ada tersebar di masing-masing kecamatan dan jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Tenggarong sebanyak 106.480 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Muara Wis dengan jumlah 9.398 jiwa. Proporsi antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki cenderung seimbang namun jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 380.560 jiwa dan perempuan 348.822 jiwa. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif dan kepadatan penduduk sekitar 27 jiwa/km² (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut jumlah penduduk kabupaten Kutai Kartanegara menurut Kecamatan tahun 2020.

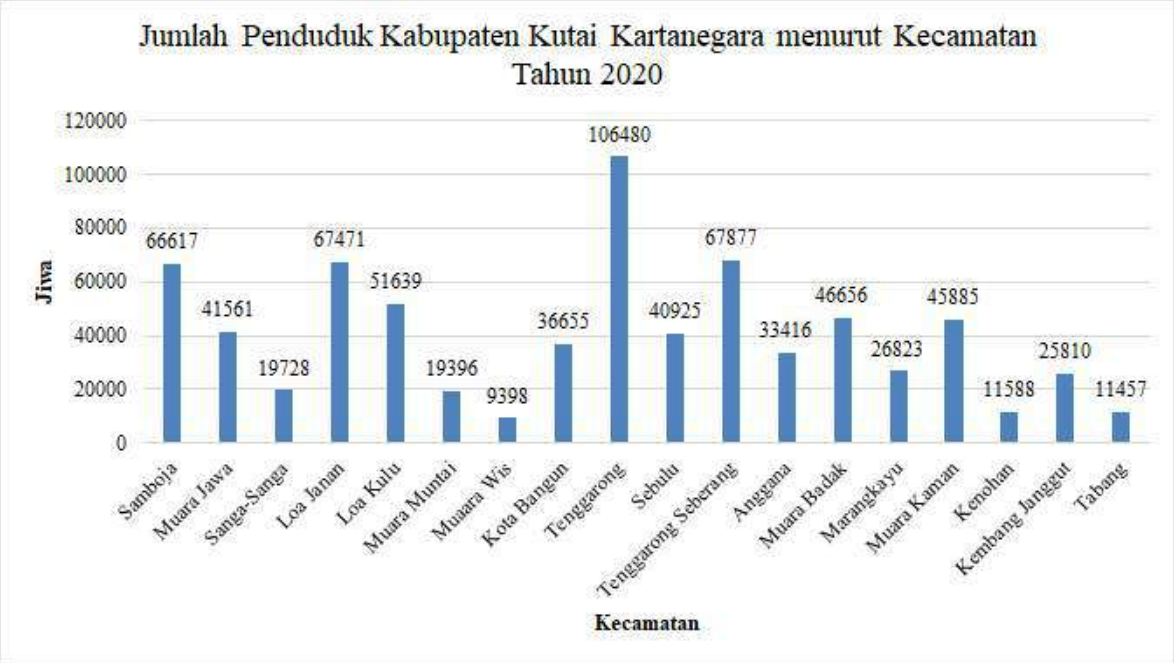

Gambar 2.3. Diagram Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Kecamatan Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Pendidikan merupakan aspek penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, begitu pula dalam hal membangun dan mewujudkan Smart City diperlukan dukungan dari dalam berupa masyarakat lokal yang memiliki kapasitas dan kualitas yang baik. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 terdapat hampir 12 persen penduduk yang berusia 15 tahun ke atas masih belum mengenyam pendidikan sedangkan sekitar 10 persen memiliki

pendidikan terakhir sampai jenjang universitas. apabila ditelusuri penduduk yang masuk ke dalam kategori belum pernah sekolah ataupun belum taman Sekolah Dasar merupakan masyarakat lanjut usia, seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta didukung dengan sarana dan prasarana yang baik secara langsung berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah dan banyaknya penduduk yang menamatkan sampai ke jenjang universitas. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja sebanyak 339.369 orang yang terdiri dari masyarakat yang menamatkan universitas sebanyak 31.317 orang. Sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 220.767 orang (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut data jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2020 dan kegiatan selama seminggu.

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	Angkatan Kerja			Bukan Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah	
Tidak/Belum pernah sekolah	39285	930	40215	28160
Tidak/Belum tamat SD	85076	1883	86959	53847
SD	61545	2052	63597	66950
SMP	82779	9918	92697	45589
SMA	32562	4315	36877	16805
SMK	6127	352	6479	3681
Diploma I, II, III/Akademi	678	308	986	0
Universitas	31317	739	32056	5735
Kutai Kartanegara	339369	20497	359866	220767

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Tingkat kriminalitas suatu daerah mencerminkan seberapa besar angka kesejahteraan yang dimiliki. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 menunjukkan bahwa banyaknya perkara yang ada di dominasi oleh pelanggaran ringan atau berupa tilang lalu lintas sebanyak 5119 kasus dalam satu tahun, sedangkan jenis perkara lainnya berupa narkotika sebanyak

217 kasus. Kasus terendah berupa uang palsu yang hanya pernah terjadi 1 kali. Jenis kriminalitas seperti pembunuhan, pencurian, kekerasan fisik dan lain-lain masuk ke dalam jenis perkara pidana lain-lain (BPS Kutai Kartanegara, 2021). berikut data banyaknya perkara yang masuk ke Kejaksaan Negeri menurut jenis perkara yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020

Tabel 2.3. Banyaknya Perkara Yang Masuk Di Kejaksaan Negeri Menurut Jenis Perkara Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Perkara Pidana	Jumlah
Ringan/Tilang	5119
Korupsi	7
Narkotika	217
Senjata Tajam	8
Uang Palsu	1
Lain-lain	240

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Tabel 2.4. Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1	Jumlah komunitas minat bakat/hobi/kreatif di daerah	80 komunitas	●		
2	adanya komunitas pengembang/developer perangkat lunak TIK di daerah	Tersedia	●		
3	Adanya digital startup di daerah	Tersedia	●		
4	Adanya perguruan tinggi di daerah	● Akademi Kebidanan Kutai Husada Tenggarong ● Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tenggarong ● Politeknik Sendawar ● Kutai Kartanegara University ● Politeknik Kesehatan Kaltim	●		
5	Jumlah tindakan pelanggaran ketertiban umum dalam satu tahun	5119 kasus (Ringan/Tilang/Pelanggaran) Tahun 2020		●	

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
6	Jumlah angka kriminalitas dalam satu tahun	5592 kasus (meliputi tindakan ringan, narkotika, senjata tajam, uang palsu, dll)			●

Kapasitas sumberdaya manusia yang ada pada suatu wilayah juga dipengaruhi oleh keberadaan tenaga pendidik seperti guru dan jumlah fasilitas pendidikan yang ada. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas yang tersebar di masing-masing kecamatan yang ada. Pendidikan formal merupakan suatu proses yang berjenjang dari SD hingga perguruan tinggi untuk menunjang keberhasilan pembangunan bidang pendidikan. Jumlah Sekolah Dasar Negeri meri]upakan yang terbanyak yaitu berjumlah 438 unit, sedangkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta merupakan sekolah yang jumlahnya paling sedikit yaitu 20 unit (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut data jumlah sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

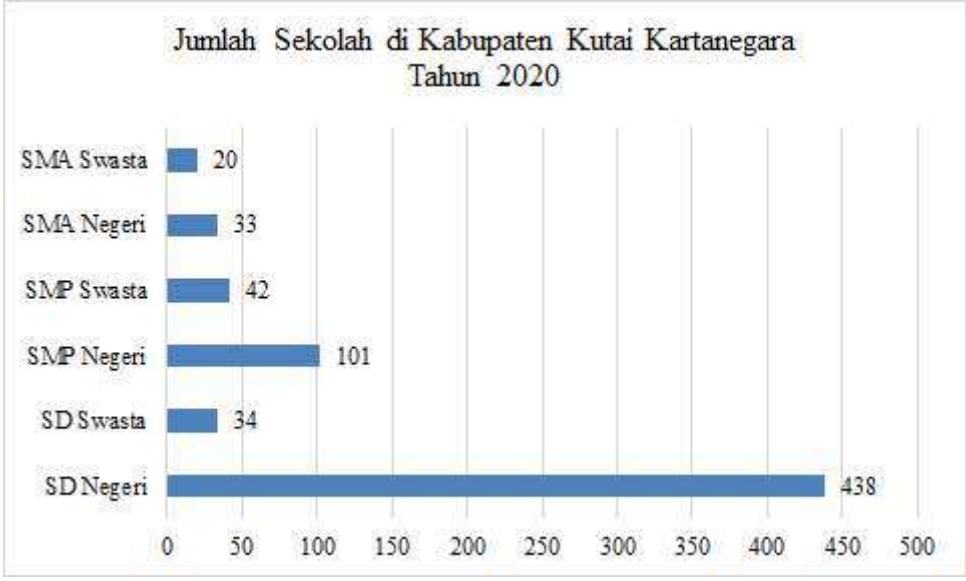

Gambar 2.4. Diagram Jumlah Sekolah Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Kondisi perbandingan antara jumlah guru dan murid menggambarkan seberapa besar beban yang dihadapi seorang guru dalam mengajar. Guru di Kutai Kartanegara untuk semua jenjang pendidikan sudah memadai meskipun pada tingkat Sekolah Dasar (SD) terdapat rasio yang relatif lebih berat dibanding jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan semakin tinggi jenjang pendidikan membutuhkan guru yang menguasai bidang atau ilmu pengetahuan yang diajarkan. Rasio antara murid dan guru pada Sekolah Dasar (SD) Negeri di bawah Diknas pada periode 2020/2021 berkisar antara 14

sampai 15, hal tersebut berarti seorang guru memiliki beban mengajar sebanyak 14 sampai 15 murid. Sedangkan beban yang harus dihadapi oleh seorang guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) juga sekitar 14 sampai 15 murid dan beban yang harus dihadapi guru (Sekolah Menengah Atas) SMA adalah 16 murid.

Kualitas sumberdaya manusia juga ditentukan dengan seberapa besar pelayanan yang bisa didapatkan dan seberapa besar pemenuhan akan kesehatan. Salah satu upaya dalam mewujudkan pemerataan kesehatan yaitu dengan menyediakan sarana kesehatan khususnya puskesmas dan puskesmas pembantu di masing-masing kecamatan yang ada. Jumlah rumah sakit pada tahun 2020 di Kab Kutai Kartanegara tercatat 3 (tiga) buah yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) A.M. Parikesit di Kecamatan Tenggarong Seberang, RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti di Kecamatan Samboja dan Rumah Sakit Dayaku Radja di Kecamatan Kota Bangun. Sedangkan Poliklinik, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang telah dibangun dan tersebar di seluruh kecamatan. Berikut diagram jumlah prasarana kesehatan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

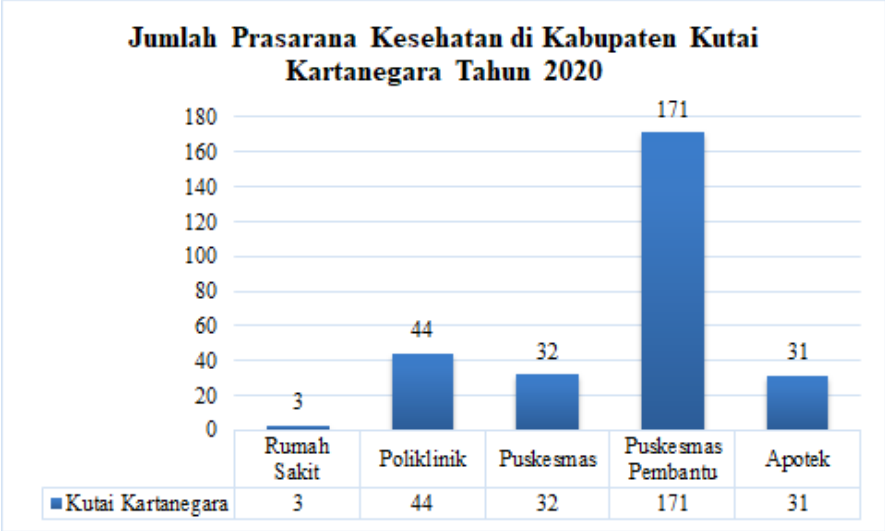

Gambar 2.5 .Diagram Jumlah Prasarana Kesehatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Ketersediaan tenaga kesehatan merupakan faktor penting khususnya dalam pelayanan masyarakat. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki jumlah tenaga kesehatan yang cukup memadai, dimana terdiri dari tenaga medis berupa dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis serta perawat, bidan, farmasi dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga medis merupakan tenaga kesehatan yang jumlahnya paling tinggi yaitu 830 orang dan yang paling sedikit adalah farmasi yaitu 37 orang. Secara lebih rinci jumlah dokter spesialis yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 87 orang, dokter umum 103 orang dan dokter gigi 36 orang (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut diagram jumlah tenaga kesehatan menurut kecamatan di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

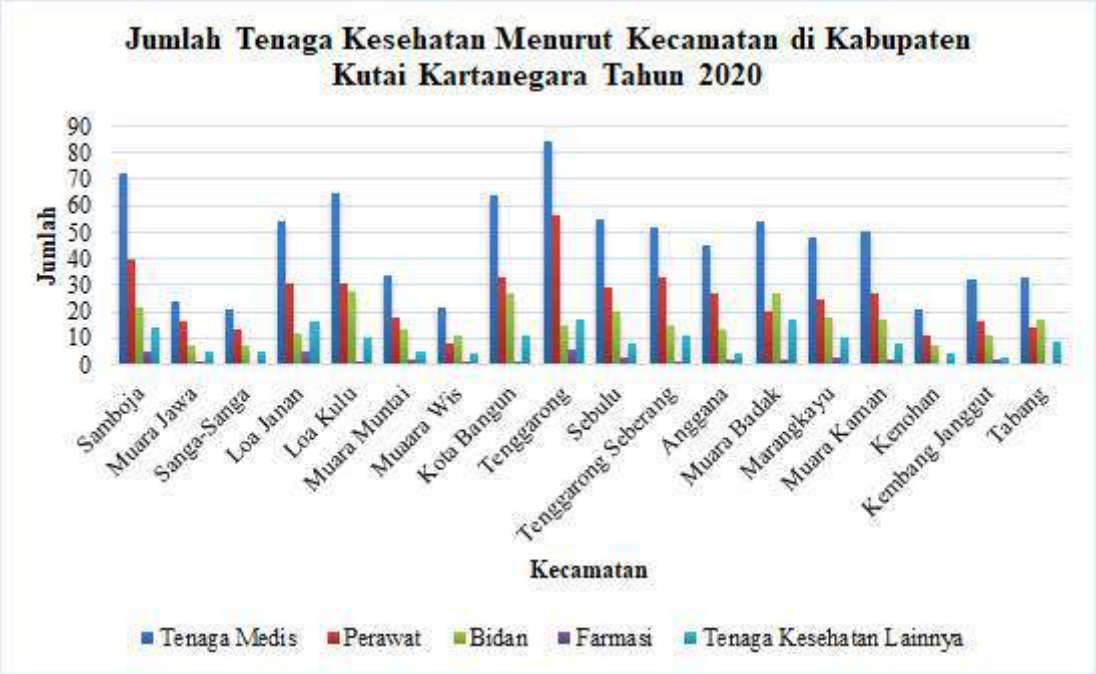

Gambar 2.6. Diagram Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

2.2.2 Kemampuan Birokrasi

Kabupaten Kutai Kartanegara dipimpin oleh seorang Bupati yaitu Drs. Edi Damansyah, M.Si yang dibantu oleh staf Sekretariat Daerah dan Staf Ahli dalam menjalankan roda pemerintahan. Jumlah anggota legislatif yang terdiri dari wakil rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tahun 2020 ada sebanyak 45 orang, dengan 38 laki laki dan 7 perempuan. Kapasitas sumberdaya manusia dan aparatur pemerintah di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong baik dimana mayoritas Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada didominasi oleh tingkat pendidikan SMA ke atas bahkan jumlah Sarjana/Master/Doktor juga sangat tinggi sebesar 5.954 orang (42%) dari total pegawai 14.015 orang, sedangkan untuk pendidikan SMA sebanyak 39% dari total yang ada.. Mayoritas PNS yang ada di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah laki-laki dengan jumlah 7.316 orang dan perempuan sebanyak 6.699 orang. PNS yang ada di dominasi oleh jabatan fungsional tertentu sebanyak 6.595 orang dan fungsional umum sebanyak 5.620 orang, sisanya adalah Eselon IV, III, dan yang paling sedikit adalah Eselon II hanya 34 orang pada tahun 2020 (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

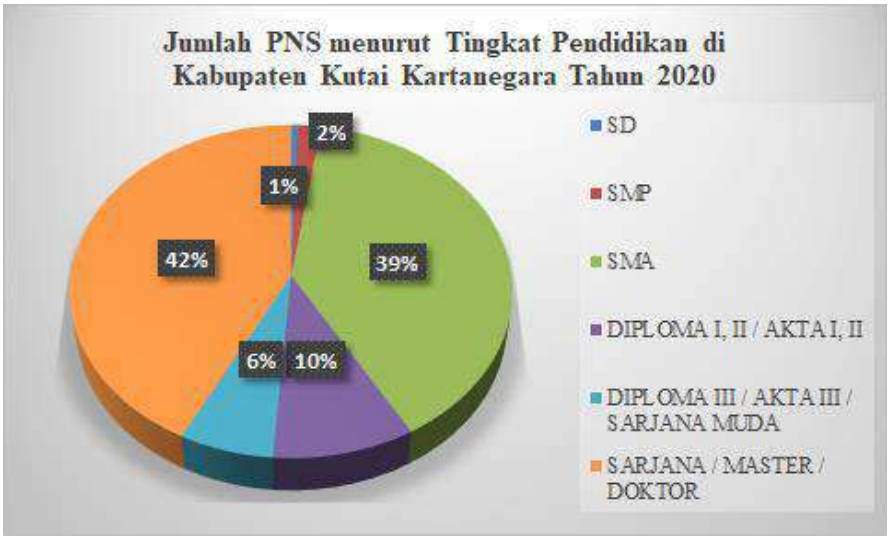

Gambar 2.7. Diagram Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Jumlah pegawai pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Pangkat/Golongannya tahun 2020 didominasi oleh Golongan III sebanyak 6503 orang sedangkan yang terendah merupakan Golongan I sebanyak 134 orang. berikut data mengenai jumlah pegawai pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara menurut pangkat/golongan pada tahun 2020 (BPS Kutai Kartanegara dalam Angka 2021). Berikut diagram jumlah pegawai pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

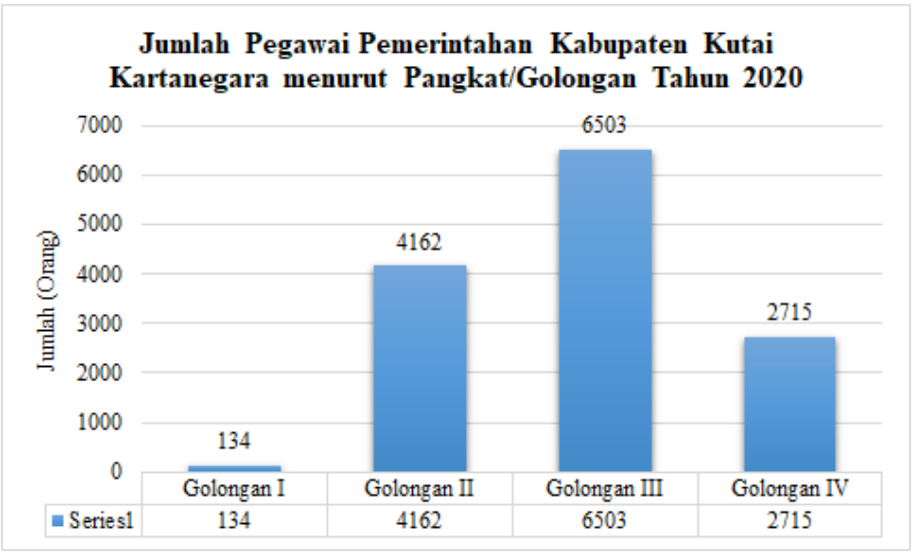

Gambar 2.8. Diagram Jumlah Pegawai Pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Tabel 2.5. Analisis Kualitas Sumberdaya Pemerintah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase pegawai dengan jenjang pendidikan S2 ke atas	(487/13256) 3,46%			●
2	Jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan ilmu komputer/teknik informatika	37 orang		●	
3	Jumlah relawan TIK di daerah	40 orang	●		
4	Persentase jumlah unit komputer (PC & Laptop) terhadap jumlah total pegawai	90%	●		
5	Persentase pegawai berusia 50 tahun ke atas terhadap total jumlah pegawai	(5453/13256) 41,14%	●		
6	Persentase pegawai berusia 40-50 tahun ke atas terhadap total jumlah pegawai	(5787/13256) 43,66%	●		
7	Persentase pegawai berusia 25-40 tahun ke atas terhadap total jumlah pegawai	(2015/13256) 15,20%	●		
8	Jumlah sistem informasi yang digunakan di pemerintah daerah	Hampir semua OPD dan beberapa kecamatan memiliki sistem ataupun aplikasi yang digunakan (80 sistem informasi)	●		
9	Persentase ketersediaan jaringan broadband access terhadap jumlah kantor pemerintahan	Tersedia	●		
10	persentase ketersediaan jaringan LAN/WAN di kantor pemerintah	Tersedia	●		
11	Jumlah lokasi wireless internet (hotspot) di kawasan perkantoran pemerintah	Tersedia	●		
12	Ketersediaan data center (baik yang dikelola sendiri maupun manage service) untuk kepentingan pemerintah	Tersedia	●		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
13	ketersediaan rencana dan SOP mitigasi bencana terhadap data pemerintahan	Belum Tersedia			●
14	ketersediaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang interoperable	● BECIK ● e-RPJMD	●		
15	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang interoperable	● si PELAKKOR (Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Keuangan dan Organisasi)	●		
16	Ketersediaan sistem informasi kantor virtual pemerintah daerah yang interoperable	Masih dalam tahap implementasi awal untuk menggunakan aplikasi SRIKANDI		●	
17	Ketersediaan sistem informasi monitoring dan evaluasi pembangunan daerah yang interoperable	● e-Pantau (Aplikasi e-Pemantauan)	●		
18	ketersediaan sistem informasi pengelolaan kepegawaian daerah yang interoperable	● BIMANTARA (Bimbingan Teknis Mandiri Aparatur Sipil Negara) ● SINTAKU (Sistem Informasi Talenta Kukar) ● SIAP ASN (Sistem Informasi dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara) ● PESTA DARA (Penyusunan Standar Pelayanan Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM) ● SIPROJAS (Sistem Informasi Promosi Jabatan Struktural) ● SIPEKAD (Sistem Informasi Pemantauan Kehadiran Aparatur Daerah)	●		
19	Ketersediaan sistem informasi pengelolaan legislasi daerah yang interoperable	Belum tersedia			●
20	ketersediaan sistem informasi pelayanan publik yang interoperable	● PENTAS KUKAR (Open Dataset Kukar) ● Layanan Online Dukcapil ● Layanan Pengaduan PA' DAMAN (Pangan Dijamin Aman) ● SIMARI (Sistem Informasi Manajemen Admisi Rawat Inap) ● LARASI ONLINE (Layanan permintaan pemeriksaan &	●		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
		pembacaan hasil Laboratorium, Radiologi serta farmasi yang terintegrasi dengan Poliklinik rawat ● jalan secara online) ● MY LIBRARY (Perpustakaan Online Terintegrasi dengan My Simpeg Pegawai) ● SIAP KESBANGPOL (Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan Kesbangpol) ● LAPOR POL PP			

2.2.3 Kemampuan Anggaran

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp. 5.637.742.537.595,95. Porsi terbesar penerimaan tersebut berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai 81,14 persen dari total penerimaan. Pada pos PAD tahun 2019, Penerimaan Lain-Lain memiliki kontribusi terbesar, yakni 65,26 persen dari total keseluruhan PAD. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. Berikut data mengenai realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selama 10 tahun terakhir. Jumlah pendapatan daerah mulai tahun 2010 hingga tahun 2019 mengalami fluktuasi hal ini diakibatkan oleh perubahan pendapatan baik yang berasal dari retribusi ataupun kegiatan perekonomian yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah pendapatan tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yaitu pada tahun 2014 sebesar Rp.6 458 980,000.000. Sedangkan untuk jenis belanja dibedakan menjadi dua yaitu belanja langsung dan tak langsung yang dalam 10 tahun terakhir paling tinggi pada tahun 2013 sebesar Rp. 7 382 595.060.000 (BPS Kutai Kartanegara, 2021). Berikut realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020 sampai dengan 2019.

Tabel 2.6. Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Juta) Tahun 2010 Sampai Dengan 2019

Tahun	Pendapatan (Juta)	Belanja Langsung	Belanja Tak Langsung	Jumlah
2010	4 427 116,39	2 344 700,91	1 522 339,78	3 867 040,69
2011	5 627 043,95	2 403 514,76	1 520 101,30	3 923 616,06

Tahun	Pendapatan (Juta)	Belanja Langsung	Belanja Tak Langsung	Jumlah
2012	6 120 999,41	3 089 640,41	1 829 721,44	4 919 361,85
2013	5 950 667,48	5 226 459,38	2 156 135,68	7 382 595,06
2014	6 458 980,00	4 138 973,00	2 304 135,00	6 443 107,56
2015	5 072 345,15	4 165 582,64	2 600 339,11	6 765 921,75
2016	4 130 498,98	1 676 118,76	2 274 734,04	3 950 852,80
2017	3 402 599,17	1 542 387,77	2 016 701,03	3 559 088,80
2018	3 931 192,28	1 619 284,75	1 955 174,96	3 931,192,28
2019	5 637 742,58	2 877 693,03	1 120 585,46	3 998 278,49

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Jenis penerimaan dibedakan menjadi pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain yang merupakan pendapatan yang sah. Target dari realisasi PAD yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019 sebesar Rp. 4 932 574.570.000 sedangkan realisasi sebesar Rp. 5 365 245.350.000 yang dimana jumlah realisasi lebih besar dibandingkan dengan target yang ada maka dapat dikatakan kondisi pendapatan daerah yang dihasilkan melampau target dan memiliki kondisi perekonomian yang baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) paling tinggi didapatkan dari adanya penerimaan lain-lain yaitu sebesar Rp. 210 641.440.000 sedangkan pada dana perimbangan didominasi oleh bagi hasil pajak dan pada lain-lain yang merupakan pendapatan yang sah didominasi oleh bagi hasil pajak dari provinsi yang besar realisasinya yaitu Rp. 427 906.110.000. Berikut tabel target dan realisasi PAD di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019.

Tabel 2.7. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Juta) Tahun 2019

Jenis Penerimaan	Target (juta)	Realisasi (juta)
Pendapatan Asli Daerah		
Pajak Daerah	60 252,46	73 579,13

Jenis Penerimaan	Target (juta)	Realisasi (juta)
Retribusi Daerah	6 421,16	6 439,08
Laba Perusahaan Daerah	34 120,81	32 120,81
Penerimaan Lain Lain	290 850,69	210 641,44
Dana Perimbangan		
Bagi Hasil Pajak	1 068 758,31	1 016 806,14
Bagi Hasil Bukan Pajak	1 882 615,27	2 653 962,67
Dana Alokasi Umum (DAU)	307 135,95	298 992,91
Dana Alokasi Khusus (DAK)	409 192,97	383 560,98
Lain-lain Pendapatan yang Sah		
Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	434 845,98	427 906,11
Dana Penyesuaian	185 361,77	181 918,33
Bantuan Keuangan	157 935,00	79 317,75
Pendapatan Lainnya	95 084,20	-
Total	4 932 574,57	5 365 245,35

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Penanaman proyek dalam negeri dan asing serta investasi merupakan aspek penting dalam pengembangan wilayah khususnya dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah. Jumlah proyek yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan dan jumlah modal atau proyek paling tinggi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri terjadi pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2017 jumlah proyek pada penanaman modal khususnya pada modal luar negeri merupakan yang tertinggi yaitu terdapat 146 proyek. Berikut grafik jumlah proyek pada penanaman modal dalam negeri dan asing di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2019.

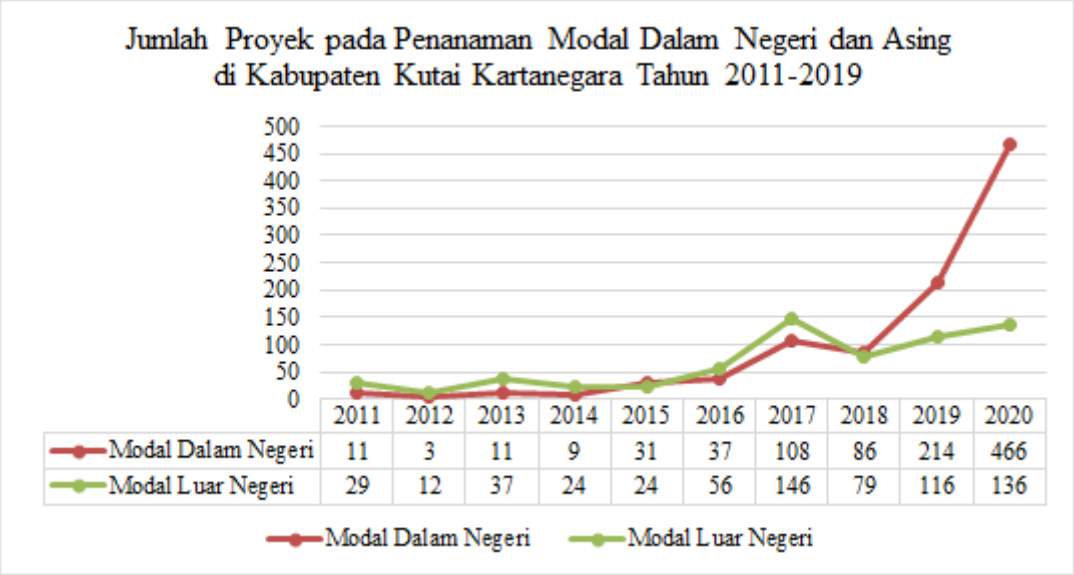

Gambar 2.9. Grafik Jumlah Proyek pada Penanaman Modal Dalam Negeri dan Asing di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011-2019
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Tabel 2.8. Analisis Kapasitas Keuangan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1	Persentase Nilai Pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah	6%		●	
2	Nilai sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun lalu	163M		●	
3	Persentase belanja pegawai terhadap total belanja daerah	48%		●	
4	Persentase belanja infrastruktur terhadap total belanja daerah	15%		●	
5	Nilai investasi masuk yang mendukung pembangunan daerah (dalam dan luar negeri)	Rp. 2,284,878.700.000 (dalam negeri) Tahun 2020 Rp. 947,851.500.000 (Luar negeri) Tahun 2020 Rp. 3.767.319.121.232,00 Tahun 2021	●		

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
6	Jumlah sumber-sumber pendanaan pembangunan alternatif yang dapat digunakan untuk mendukung smart city	APBD	●		

2.3 Infrastruktur

2.3.1 Fisik

Panjang jalan menurut status jalan terdiri dari jalan negara 360,65 km, jalan provinsi 222,24 km, dan jalan kabupaten 2193,02 km pada tahun 2018. Menurut data yang ada jenis jalan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dibedakan berdasarkan jenis permukaan dan kondisinya. Berdasarkan jenis permukaannya terdiri dari jalan Aspal sepanjang 372,641 km; kerikil sepanjang 587,97 km; tanah sepanjang 374,61 km dan beton sepanjang 857,8 km. Berikut diagram panjang jalan menurut jenis permukaan di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018.

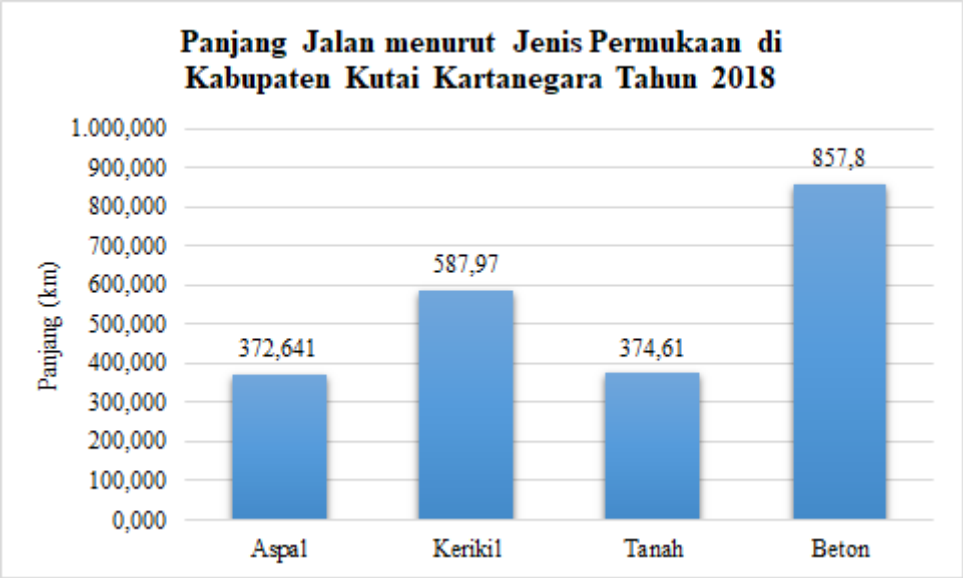

Gambar 2.10. Diagram Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan di di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2020

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2018 mengenai kondisi jalan yang ada dibedakan berdasarkan jenis permukaan dan kondisinya. Mayoritas jalan yang ada memiliki permukaan beton sekitar 39 persen atau (857,8 km dari total keseluruhan panjang jalan yang ada (2193,02 km). Jalan dengan permukaan kerikil masih banyak ditemui yaitu 26,8% atau 587,97 km sedangkan jalan dengan permukaan aspal yaitu 16,9% atau 372,64 km dan jalan yang masih dalam

bentuk tanah sepanjang 374,61 km atau sebesar 17% dari total jalan yang ada. Berdasarkan kondisi jalan dibedakan menjadi 4 (empat) kategori yaitu baik (1159,17 km), sedang (306,77 km), rusak (410,19 km) dan rusak berat (316,89 km). Berdasarkan data tahun 2018 kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh jalan dengan kondisi baik dengan permukaan berupa beton.

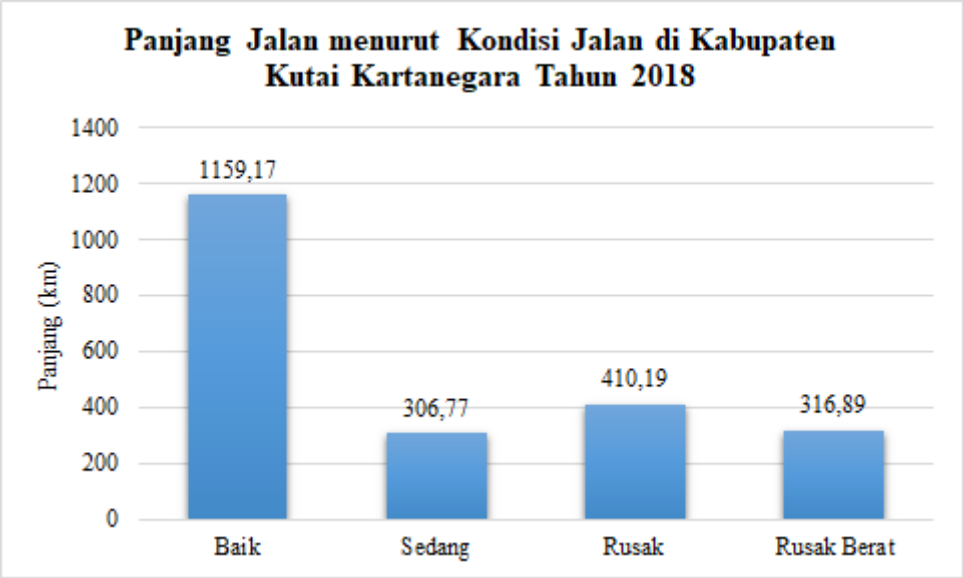

Gambar 2.11. Diagram Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan di di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2020

Tabel 2.9. Analisis Infrastruktur Fisik

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase jalan kabupaten dalam keadaan baik	24,74% di tahun 2020	●		
2	Adanya kawasan perkantoran untuk kegiatan bisnis	Belum Tersedia			●
3.	Adanya kawasan perbelanjaan untuk kegiatan perdagangan masyarakat	Tersedia	●		
4.	persentase sarana dan prasarana pendidikan dalam keadaan baik	100%	●		
5.	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam keadaan baik	100%	●		

2.3.2 Digital

Kondisi fasilitas dan prasarana penunjang infrastruktur digital yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah baik, ditandai dengan adanya jaringan tower telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah yang menghubungkan ke wilayah 18 Kecamatan yang berada wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada lingkup pemerintahan penggunaan jaringan fiber optic sangat penting sebab menunjang kinerja khususnya dalam pertukaran informasi antar sektor dan OPD yang ada. Fiber optic sendiri merupakan sebuah teknologi transmisi sinyal kabel yang menggunakan benang (serat) kaca atau plastik. Jaringan Fiber Optic yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara menghubungkan beberapa daerah seperti yang ada pada gambar berikut

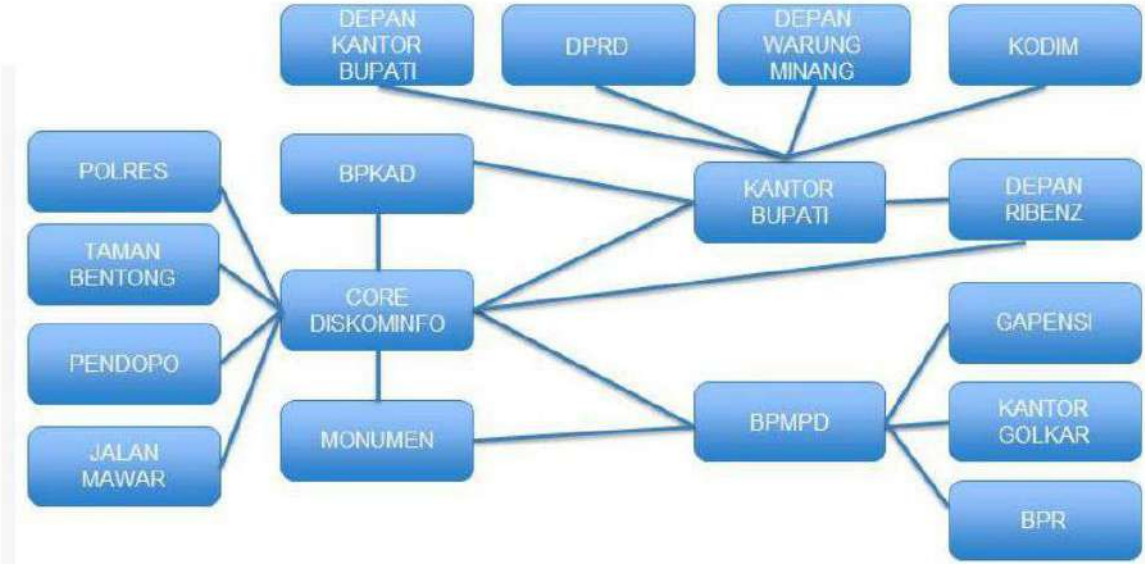

Gambar 2.12. Jaringan Fiber Optic (FO) Kabupaten Kutai Kartanegara
Sumber: Masterplan e-Government 2019

Dalam pemanfaatan teknologi informasi diperlukan sistem backup yang merupakan proses pembuatan data cadangan dengan membuat arsip agar data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan. Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan DC Network dimana terdapat suatu Data Center dan ruangan NOC yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi segala aset yang berhubungan dengan teknologi informasi sekaligus jaringannya. Karena fungsinya, proses backup mengharuskan pengguna menggandakan data, yang akhirnya menghabiskan kapasitas media penyimpanan. Ini mendorong ditemukannya teknologi teknologi untuk mengefisienkan penyimpanan data backup, misalnya deduplikasi dan kompresi. Berikut gambaran dari DC Network yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

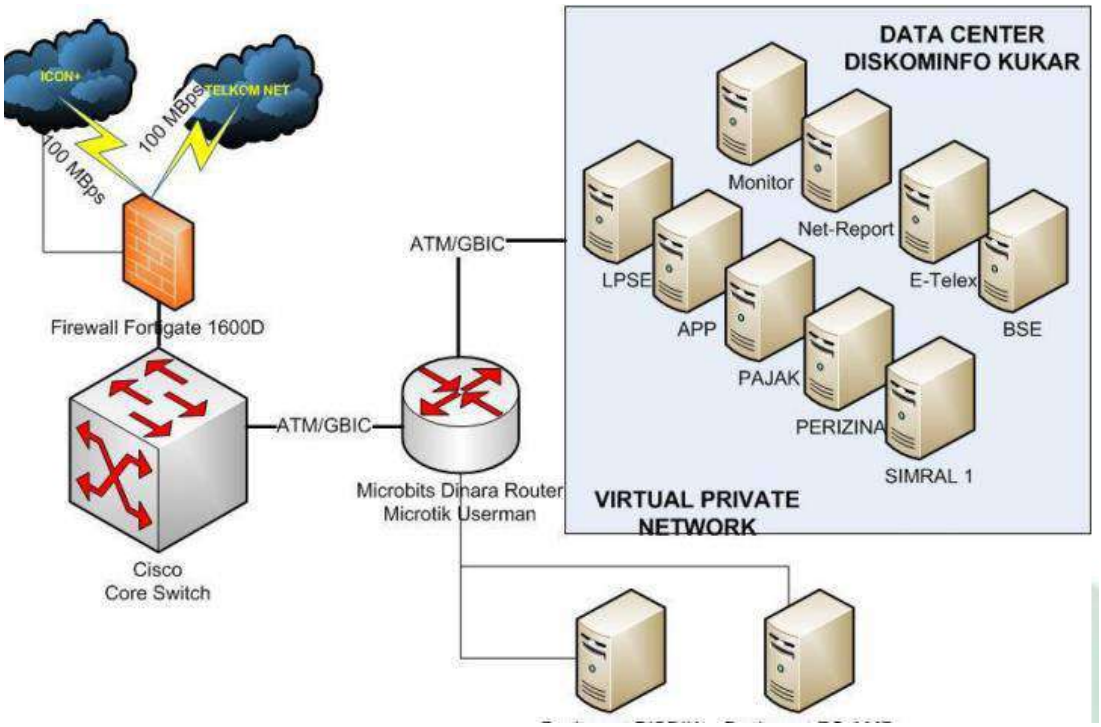

Gambar 2.13. DC Network Kutai Kartanegara
Sumber: Masterplan e-Government 2019

Kondisi jaringan dan sinyal yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah baik dimana sebagian besar wilayah ibukota kabupaten dapat dijangkau oleh berbagai macam operator selular. Ketersediaan infrastruktur TIK didorong oleh peran dari berbagai perusahaan telekomunikasi serta infrastruktur seperti tower seluler, PSTN, fiber optic dan microwave. Terdapat 4 provider seluler, 1 provider PSTN & ADSL yang beroperasional di Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun masih terdapat beberapa daerah blank spot atau wilayah yang belum tercakup oleh layanan seluler diakibatkan oleh jarak dan tidak tersedianya infrastruktur komunikasi seperti BTS (Base Transceiver Station). Berbagai macam aplikasi yang telah digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat, mulai dari Sistem Informasi Pelaporan Kinerja Keuangan dan Organisasi hingga Sistem Informasi dan Pelayanan Aparatur Sipil Negara. Tercatat terdapat hampir semua (Organisasi Perangkat Daerah) OPD dan beberapa kecamatan memiliki sistem ataupun aplikasi yang digunakan dengan jumlah sekitar 80 sistem informasi. Berikut gambaran sistem aplikasi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

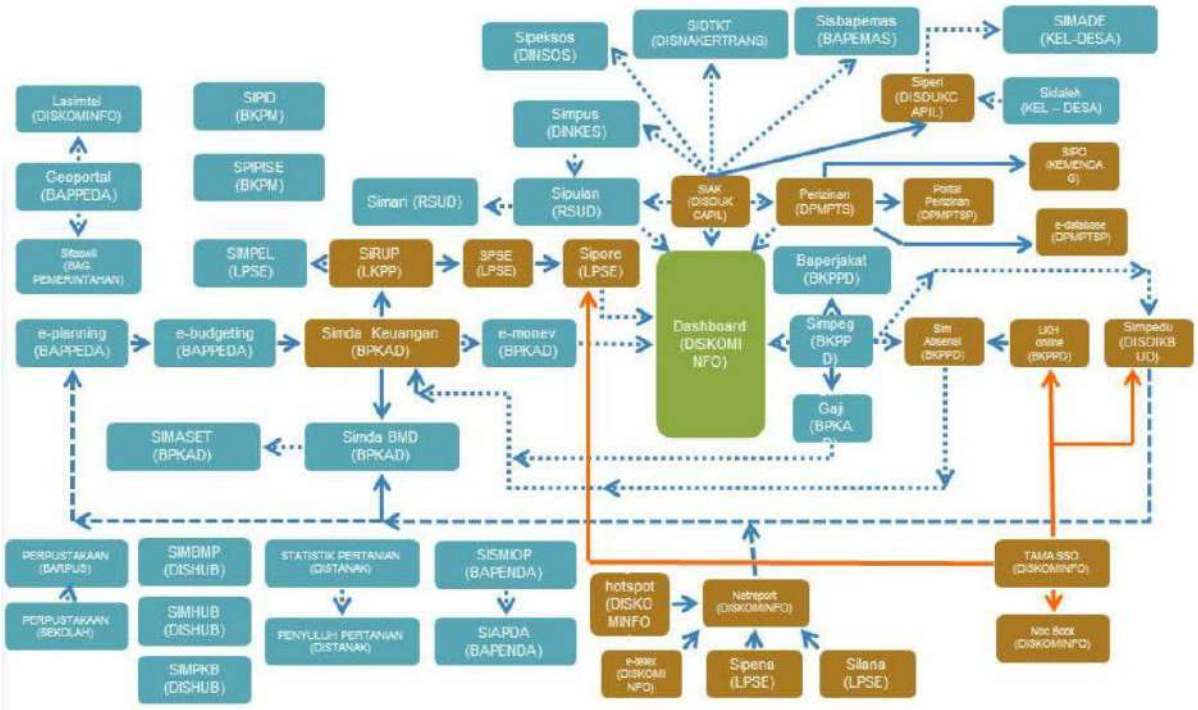

Gambar 2.14. Sistem aplikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara
Sumber: Masterplan e-Government 2019

Tabel 2.10. Analisis Infrastruktur Telekomunikasi

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1.	Persentase luas area dengan jaringan 4G atau 3G	Ada 23 Desa yang masih blank spot			●
2.	tersedianya jaringan *broadband access* untuk masyarakat	Tersedia namun belum merata		●	
3.	jumlah rumah sakit yang menggunakan sistem layanan elektronik/online	3 RSUD		●	

2.3.3 Sosial

Aspek sosial merupakan bagian penting sebab berkaitan dengan hubungan antar masyarakat dan bagaimana masyarakat memanfaatkan lingkungan. Kondisi sosial masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah baik, hal ini ditandai dengan angka partisipasi sekolah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2020 menunjukkan bahwa kelompok usia 7-12 tahun memiliki angka partisipasi sekolah hampir 100 persen, dimana untuk kelompok usia dengan jenis kelamin perempuan yaitu 100 persen dan laki-laki 99,91 persen. Angka partisipasi

sekolah masih rendah khususnya pada kelompok usia 19-24 tahun dimana hanya 20,16 persen untuk jenis kelamin laki-laki dan 20,46 persen untuk jenis kelamin perempuan. Berikut fdiagram angka partisipasi sekolah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

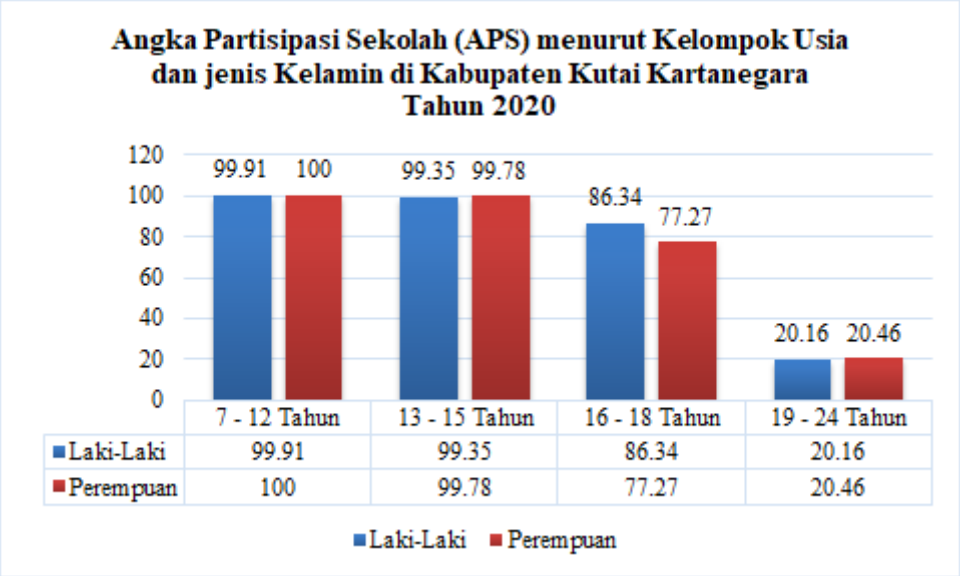

Gambar 2.15. Diagram Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) merupak proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Angka APM pada tingkat sekolah dasar (SD) cukup baik sedangkan untuk APK memiliki jumlah 102 persen. Sekolah menengah pertama merupakan jenjang pendidikan dasar lanjutan dimana Angka APM dan APK memiliki selisih sekitar 10 persen, hal ini berarti bahwa terdapat masyarakat yang bersekolah pada jenjang SMP dengan kriteria umur yang melampaui kelompok umur yang sesuai. Berikut diagram angka partisipasi murni dan kasar yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun ajaran 2020/2021.

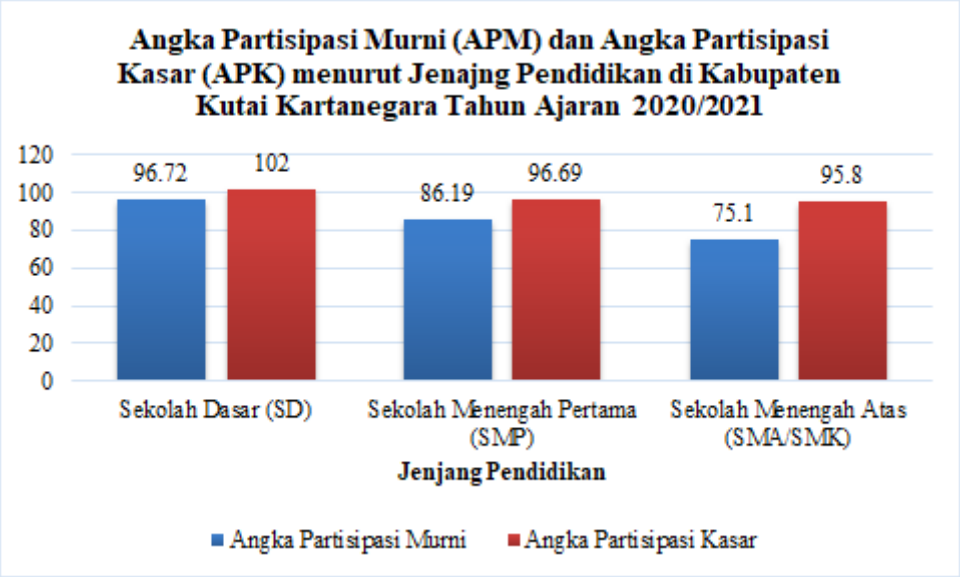

Gambar 2.16. Diagram Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Kelompok Usia Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Saat ini sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menggerakan perekonomian daerah dan menjadi primadona dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu sektor ini juga memberikan banyak peluang mulai dari pengembangan ekonomi dan potensi lokal serta penyerapan lapangan kerja yang secara langsung akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus daerah. Berbagai objek wisata yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari objek wisata alam, wisata buatan serta wisata sejarah. Salah satunya yaitu museum. Jumlah wisatawan pengunjung museum negeri Mulawarman tahun 2020 sebesar 20.572 orang. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebanyak 60.081 orang. Dari sejumlah wisatawan tersebut, 64 orang diantaranya adalah wisatawan asing dan 20.539 orang wisatawan domestik. Jumlah wisatawan mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 hal ini merupakan implikasi dari adanya pandemi Covid-19. Berbagai macam objek wisata mengalami pembatasan kegiatan yang berdampak pada penurunan kunjungan dan mobilitas penduduk yang menurun. Jumlah pengunjung objek wisata paling lima tahun terakhir yaitu pada tahun 2018 yang mencapai 1.381.622 wisatawan. Berikut diagram banyaknya pengunjung objek wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016-2020.

Gambar 2.17. Diagram Banyaknya Pengunjung Objek Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Mayoritas penduduk yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara adalah muslim. Jumlah penduduk yang memeluk agama islam pada tahun 2019 sebanyak 644.254 orang. Berbagai agama yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya yaitu Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lain-lain. Untuk menunjang kegiatan keagamaan dibangun beberapa sarana ibadah bagi setiap kepercayaan yang ada. berikut diagram jumlah penduduk menurut agama yang dianut di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019.

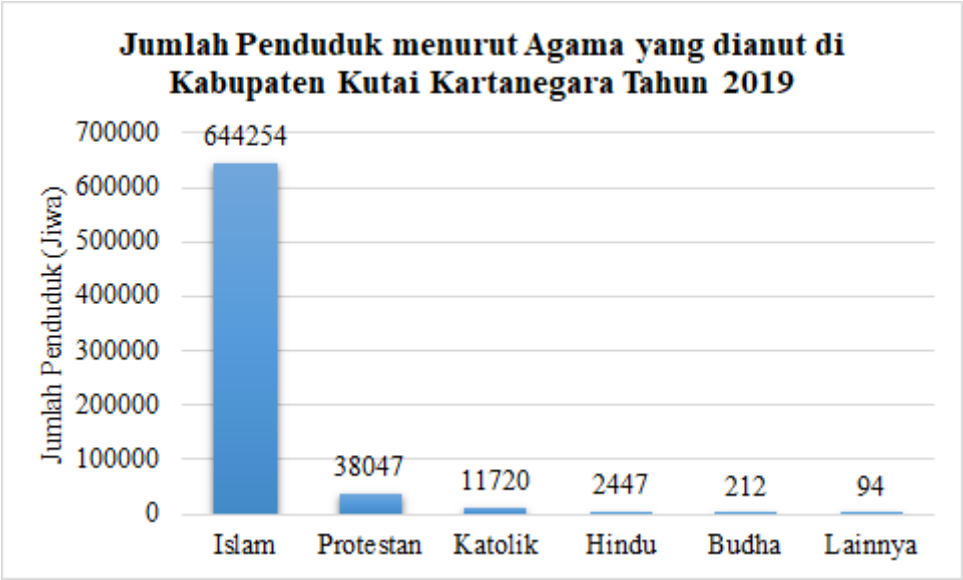

Gambar 2.18. Diagram Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Sarana ibadah yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memadai dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pada tahun 2020 terdapat 779 Masjid, 893 Musholla, 221 Gereja Protestan, 36 Gereja Katolik, dan 15 Pura yang masing-masing tersebar merata hampir di seluruh kecamatan. Selain mendirikan sarana ibadah pemerintah juga mengelola berbagai kegiatan ibadah keagamaan terutama yang berhubungan langsung dengan negara lain misalnya ibadah haji. Jumlah penduduk Kutai Kartanegara yang beragama Islam yang menunaikan ibadah haji (jemaah haji) yang pemberangkatannya dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama. Berikut diagram jumlah tempat peribadatan yang ada di kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020.

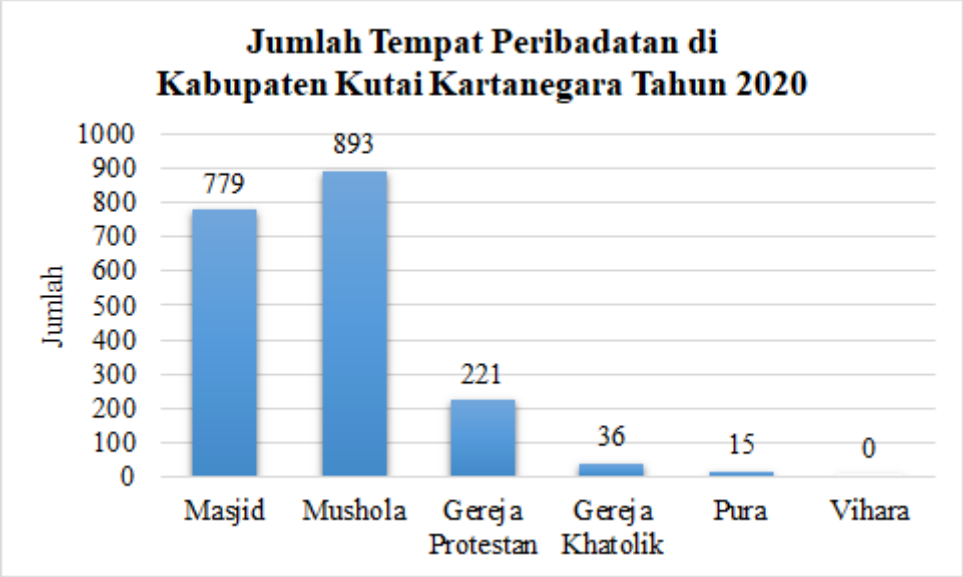

Gambar. 2.19. Jumlah Tempat Peribadatan di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020
Sumber : Badan Pusat Statistik Kab, Kutai Kartanegara 2021

Tabel 2.11. Analisis Infrastruktur Sosial Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1.	Adanya pusat kegiatan belajar masyarakat di tingkat kelurahan/desa	Tersedia	●		
2.	Adanya ruang terbuka publik di tingkat RW	Tersedia	●		
3.	Asanya Aula/balai warga di tingkat kelurahan/desa	Tersedia		●	
4.	Jumlah fasilitas olahraga di tingkat kelurahan/desa	Tersedia		●	
5.	Ketersediaan perpustakaan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah	Tersedia	●		

2.4 Suprastruktur

2.4.1 Kebijakan

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung implementasi (Teknologi, Informasi dan Komunikasi) TIK dalam *business process* Pemerintahan sudah sangat baik, beberapa peraturan telah di tetapkan melalui keputusan DPRD dalam bentuk Perda dan Surat Keputusan Bupati seperti Perda No.7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara telah memuat kebijakan tentang *Smart City*. Bupati Kutai Kartanegara juga telah mengeluarkan 2 SK terkait tim yang akan menjadi Dewan dan Tim Pelaksana Smart City.

Berbagai peraturan-peraturan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Dimensi *Smart City* sebagai berikut :

Smart Governance

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Pelayanan Terpadu satu pintu
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Masterplan Smart City/Smart Regency
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelengaaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Smart Branding

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Smart Economy

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendaftaran Usaha Budidaya Tananaman Perkembunan
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa

Smart Living

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Pnerapan Standar Pelayanan Minimum
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pnegendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2019 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Program bedah Rumah Bagi Rumah Tangga Miskin
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penyelengaaraan gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan Anti Stunting

Smart Society

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 80 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 81 Tahun 2020 tentang Implementasi Pendidikan karakter dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan

Smart Environment

- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
- Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2019-2023

Tabel 2.12. Analisis Kesiapan Kebijakan Dan Kelembagaan

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Peraturan Daerah tentang Dewan Smart City Daerah	ada dalam bentuk SK Bupati	●		
2	Adanya Peraturan Kepala Daerah tentang Tim Pelaksana Smart City Daerah	Tersedia	●		
3	Adanya masterplan smart City Daerah	Tersedia	●		
4	Adanya Peraturan Daerah tentang Masterplan Smart City Daerah	Tersedia dalam bentuk Peraturan Bupati	●		
5	Adanya visi pembangunan Smart City yang selaras dengan visi misi pembangunan daerah	Tersedia	●		
6	Adanya kepastian terhadap keberlanjutan program Smart City dalam jangka panjang	Tersedia	●		
7	Adanya mekanisme evaluasi dan apresiasi kinerja terhadap aparatur dan organisasi yang berprestasi dalam melaksanakan program Smart City	Belum Tersedia			●

2.4.2 Kelembagaan

Pemkab Kukar telah memiliki Dewan Smart City Daerah dan Tim Pelaksanaanya, di dalam dewan dan tim pelaksana ada perwakilan dari OPD dan stake holder lain yang terkait dengan pengembangan Smart Regency Kutai Kartanegara. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah bertanggung jawab dengan baik terhadap pengembangan dan pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK). OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi berdasarkan dimensi *Smart City*:

Smart Government:

- Inspektorat
- Sekretariat Daerah Bagian Kerjasama
- Sekretariat Daerah Bagian PBJ
- Sekretariat Daerah Bagian Hukum
- Sekretariat Daerah Bagian Organisasi
- Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan
- Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan
- Sekretariat Daerah Bagian Umum
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- BAPENDA
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Sekretaris Dewan

Smart Branding:

- Dinas Pariwisata
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Sekretariat Daerah Bagian Protokol Komunikasi Pimpinan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Smart Economy:

- Sekretaris Daerah Bagian Perekonomian
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
- Dinas Koperasi dan UKM
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Pertanian dan Peternakan

- Dinas Kelautan dan Perikanan
- Dinas Ketahanan Pangan
- Dinas Perkebunan
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Smart Living:

- Dinas Kesehatan
- Dinas Pekerjaan Umum
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Dinas Perhubungan
- Dinas Pariwisata
- Dinas Pemuda dan Olahraga
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
- Badan Penelitian dan Kelembagaan Daerah

Smart Society:

- Satuan Polisi Pamong Praja

Tabel 2.13. Susunan Keanggotaan Dewan Smart City Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Ketua
2	Wakil Bupati Kutai Kartanegara	Wakil Ketua
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
6	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
7	Inspektur Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
8	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
9	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
11	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
12	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
13	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
14	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
15	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
16	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
17	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Anggota
18	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun	Anggota
19	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Anggota
20	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
21	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
22	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
23	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
24	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
25	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
26	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
27	Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
28	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
30	Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
31	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
32	Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
33	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
34	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
35	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
36	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
37	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
38	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
39	Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
40	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
41	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
42	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
43	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
44	Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
45	Rektor Universitas Kartanegara Tenggarong	Anggota
46	Kepala Kantor Telkom Area Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
47	Manager PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Tenggarong	Anggota
48	Kepala Kantor Cabang Bankaltimtara Tenggarong	Anggota
49	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	Anggota
50	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
51	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota
52	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
53	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	Anggota
54	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota
55	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
56	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah	Anggota
57	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Anggota
58	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
59	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
60	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
61	Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
62	Camat Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
63	Camat Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
64	Camat Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
65	Camat Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
66	Camat Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
67	Camat Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
68	Camat Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
69	Camat Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
70	Camat Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
71	Camat Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
72	Camat Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
73	Camat Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
74	Camat Sanga - Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
75	Camat Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
76	Camat Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
77	Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
78	Camat Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
79	Camat Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
80	Camat Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

Aspek penting dalam mewujudkan Smart City yaitu berupa tim pelaksanaan Smart City, maka dari itu Kabupaten Kutai Kartanegara membentuk Tim Pelaksana Smart City dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini. Tim pelaksana memiliki beberapa tugas diantaranya yaitu :

1. Menyusun Masterplan Smart City
2. Menyusun Program Percepatan (Quick-wins) Smart City
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kutai Kartanegara.

Apabila dalam keanggotaan Tim terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka pejabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif dan Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara

Tabel 2.14. Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Kutai Kartanegara	Pengarah I
2	Wakil Bupati Kutai Kartanegara	Pengarah II
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Penanggung Jawab
4	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Ketua
5	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	Sekretaris
7	Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Wakil Sekretaris
8	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
9	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
10	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarpras dan Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
11	Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
12	Kepala Bidang Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
13	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
14	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
15	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
16	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
17	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
18	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
19	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
20	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
21	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
22	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
23	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
24	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Tenggarong	Anggota
25	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dayaku Raja Kota Bangun	Anggota
26	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Batara Agung Dewa Sakti Samboja	Anggota
27	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
28	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
29	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
30	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
31	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
32	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
33	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
34	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
35	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
36	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
37	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
38	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
39	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
40	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
41	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan OlahRaga Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
42	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
43	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
44	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
45	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
46	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
47	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
48	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
49	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
50	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
51	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
52	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
53	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
54	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Sekretariat Daerah	Anggota
55	Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana Sekretariat Daerah	Anggota

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
56	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah	Anggota
57	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
58	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
59	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Kenohan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
60	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
61	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
62	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
63	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
64	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
65	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
66	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
67	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
68	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
69	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
70	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Sanga - sanga Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
71	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
72	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
73	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
74	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota

No	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
75	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Kota Bangun Darat Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
76	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara	Anggota
77	Susanti, S.Sos NIP. 19701227 200701 2 018	Anggota
78	Suharriani Nur, S.Kom NIP. 19820913 201001 2 026	Anggota
79	Maizara Dewi Utomo, S.Kom NIP. 19811112 200604 2 022	Anggota
80	Iwan Sarwani, S.Kom NIP. 19740411 201410 1 001	Anggota
81	Fajar Haryadi NIP. 19831231 201001 1 030	Anggota

Tabel 2.15. Analisis Kesiapan Kelembagaan Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Baik	Sedang	Buruk
1	Adanya Dewan Smart City Daerah	Tersedia	●		
2	Adanya tim pelaksana Smart City Daerah	Tersedia	●		
3	Adanya SOP Smart City daerah	Belum Tersedia			●
4	Adanya tata pamong yang bertugas sebagai anggota Tim Pelaksana Smart City Daerah di setiap OPD	Tersedia	●		

Kondisi organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah cukup baik, dimana terdapat lembaga swadaya masyarakat ataupun perkumpulan adat yang bergerak dibidang kemasyarakatan maupun sosial dan bertugas mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyaarakat dan pengembangan budaya, Sedangkan untuk forum-forum swadaya masyaarakat yang bergerak khusus dalam hal *Smart City* masih belum ada, sehingga belum ada dukungan operasional ataupun integrasi antara pemerintah dan masyaarakat dalam mengembangkan hal-hal baik yang berhubungan dengan teknologi ataupun penerapan konsep *Smart City*.

Tabel 2.16. Analisis Kesiapan Organisasi Masyarakat Daerah

No	Komponen	Nilai/Kondisi	Interpretasi		
			baik	sedang	buruk
1	Adanya forum-forum swadaya masyarakat pendukung smart city	Belum Terbentuk			●
2	Jumlah forum swadaya masyarakat pendukung smart city	Belum Terbentuk			●
3	Dukungan operasional pemerintah terhadap forum pendukung smart city	Belum Terbentuk			●
4	Jumlah forum pendukung smart city yang memiliki sekretariat definitif	Belum Terbentuk			●
5	Adanya partisipasi pakar dari perguruan tinggi lokal dalam Dewan Smart City Daerah	Ada	●		

2.5 Culture

2.5.1 Kesiapan Masyarakat

Nilai keberagaman budaya dapat ditemui pada kekayaan arkeolog di Kutai Kartanegara sekaligus menjadi identitas budaya pada masyarakat. Di daerah Kutai Kartanegara juga ditemukan makam ulama dan raja yang memeluk agama Islam pertama di Kalimantan Timur, keberadaan makam ini dijadikan sebagai wisata religi yang biasanya dikunjungi oleh masyarakat baik lokal maupun dari luar daerah. Pada masa sejarah kuno, pusat kerajaan merupakan tempat bersemayam raja yang dianggap sebagai tokoh yang berkuasa dan memiliki kekuatan yang hebat. Pada masa pengaruh kebudayaan Islam, unsur menghormati raja dan sultan masih tetap ada, di mana sultan juga dianggap seorang tokoh yang sangat berpengaruh pada masyarakatnya (DISKOMINFO Kutai Kartanegara, 2017)

Masyarakat Kutai Kartanegara memiliki budaya yang beragam dan menjadi identitas yang melekat sejak adanya dua kerajaan besar di Kutai Kartanegara. Keberadaan warisan sejarah berupa benda-benda arkeologi sebagai warisan budaya dari Kerajaan Mulawarman di Muara Kaman sebagai penanda munculnya peradaban sejarah Nusantara yang bercorak Hindu-Budha dan Kerajaan Kutai Kartanegara yang mendapat pengaruh kebudayaan Islami. Keberadaan dua kerajaan ini menjadi awal terbentuknya masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Mengacu pada makna dalam bentuk simbolis, informasi, dan estetis. Nilai-nilai keragaman budaya yang ada pada sumber daya arkeologi di Kutai Kartanegara dapat menjadi mata rantai yang menghubungkan masa lalu dengan identitas budaya masyarakat sekarang. Sumber daya arkeologi Kutai Kartanegara sebagai hasil penciptaan di masa lalu sudah menentukan identitas budaya. Sumber daya arkeologi Kutai Kartanegara juga mempunyai nilai ekonomis yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata yang selaras dengan tren wisata global.

Keragaman budaya ini pula yang dapat menyatukan perbedaan budaya dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga dapat menjadi landasan dan sikap dalam meminimalisasi dampak negatif pengaruh budaya global. Meningkatnya kunjungan masyarakat dari luar wilayah Kutai Kartanegara ke kawasan ini dengan tujuan untuk mempelajari dan mendapatkan experiences yang baru terhadap nilai keberagaman budaya Kutai Kartanegara, dapat meningkatkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat (DISKOMINFO Kutai Kartanegara, 2017)

Meningkatnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan ditambah dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar baik kesehatan dan pendidikan berdampak pada transformasi budaya. Kerajaan Kutai adalah bukti dimana masyarakat Kutai memulai peradaban modern terstruktur pertama yang tercatat oleh sejarah dengan pembuatan batu-batu prasasti yang terdapat di beberapa tempat. Setelah berdirinya Republik Indonesia, Kerajaan Kutai dan masyarakatnya kembali melakukan perubahan dari model kerajaan ke model demokrasi terpimpin dengan tidak melupakan akar budaya dari Kerajaan Kutai. Sehingga Kerajaan Kutai, Raja dan keturunannya serta para bangsawan kerajaan kutai tetap eksis sampai dengan sekarang. Adanya keturunan dan keluarga penjaga akar budaya Kerajaan Kutai, membuat masyarakat Kutai masih melakukan berbagai kebiasaan turun temurun seperti budaya Erau yang sekarang menjadi festival budaya bertaraf Internasional. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Kutai selain dapat menjaga warisan budaya juga mulai terbuka dengan pihak luar baik dalam maupun luar negeri. Keterbukaan dengan pihak-pihak dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara akan mendorong terjadinya interaksi yang positif seperti perdagangan, pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan mendorong kemajuan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara (DISKOMINFO Kutai Kartanegara, 2017)

BAB III
ANALISIS STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Analisa kesenjangan kesiapan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dinilai berdasarkan enam dimensi *Smart City* yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society,* dan *smart environment*. Analisa kesenjangan disusun menjadi dua bagian yaitu analisis GAP untuk mengidentifikasi kesenjangan antara perbandingan kondisi saat ini dan tren di masa depan, serta analisis SWOT dan TOWS yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kekuatan, kelemahan, potensi, peluang, dan strategi yang dapat diupayakan. Adapun analisis GAP, analisis SWOT dan TOWS sebagai berikut.

3.1 Analisis GAP

Analisis kesenjangan Kabupaten Kutai Kartanegara digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan baik kondisi saat ini dan kondisi di masa depan. Perbedaan atau gap antara kondisi saat ini dengan tren masa depan digunakan sebagai salah satu analisis untuk menetapkan strategi dalam mencapai tujuan *Smart City*. Analisis gap dianalisis berdasarkan enam dimensi *Smart City* yaitu dimensi *smart governance, branding, economy, living, society*, dan *environment*.

Tabel 3.1 Analisis GAP

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
Smart Governance	1. Terdapat 110 sistem elektronik (83 aplikasi pada 25 OPD dan 35 website OPD)	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan good governance	1. Optimalisasi integrasi berbagai sistem layanan publik yang sudah ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dan *single window* yang mudah dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah
	2. Terdapat payung hukum seperti Masterplan Smart City Tahun 2017, Blueprint e-government Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Satu Data	2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	2. Perlu adanya terobosan inovasi khususnya dalam pengembangan berbagai layanan peningkatan kinerja pemerintah

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
	Indonesia Kutai Kartanegara		
	3. Ketercukupan infrastruktur telekomunikasi berupa 21 tower pemerintah, 277 tower provider dimana 214 desa telah terhubung jaringan internet	3. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik	3. Sosialisasi pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik kepada masyarakat
Smart Branding	1. Potensi obyek wisata alam, sejarah, pendidikan dan wisata buatan	1. Pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan	1. Optimalisasi promosi dan pemasaran kepariwisataan daerah yang berkelanjutan
	2. Tersedianya pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik sehingga memudahkan investor dalam memproses perizinan	2. Pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur	2. Melakukan branding wilayah khususnya pada wilayah dengan potensi peluang investasi sebagai daerah penyokong IKN
Smart Economy	1. Belum optimalnya pemasaran produk komoditas di Kutai Kartanegara	1. Berkembangnya sistem transaksi elektronik	1. Pemanfaatan layanan e-commerce dalam pemasaran produk komoditas
	2. Ketersediaan lahan pertanian yang potensial di Kutai Kartanegara	2. Sistem pertanian modern dan program Pemerintah dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)	2. Pengembangan berbagai inovasi di bidang pertanian, serta pembinaan dan pelatihan bagi petani.
	3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan komoditas unggulan desa	3. Pengembangan konsep community development di berbagai sektor	3. Memaksimalkan komoditas unggulan dengan konsep community development sebagai salah satu penggerak perekonomian

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
			masyarakat (membuka lapangan kerja baru)
	4. Potensi sumber daya alam dan sumber daya mineral yang cukup besar sebagai andalan Kabupaten Kutai Kartanegara	4. Pengembangan dan optimalisasi kawasan peruntukan pertanian dan pertambangan	4. Perlu kajian dan perencanaan penataan ruang wilayah untuk pertanian dan pertambangan sehingga tidak menimbulkan masalah sosial dan lingkungan.
	5. Belum kondusifnya iklim investasi dan sektor ekonomi kreatif pengembangan dunia usaha	5. Pengembangan Kawasan Industri di Loa Kulu Seberang yang membantu peningkatan perekonomian daerah 6. Pertumbuhan investasi di sektor sekunder dan tersier	5. Menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi dunia usaha
Smart Living	1. Adanya kawasan Pulau Kumala, potensi wisata alam dan wisata budaya sebagai pusat rekreasi warga	1. Pengembangan konsep perencanaan tata ruang yang harmonis dan *sustainable* dalam penyiapan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur	1. Perlu kajian dan perencanaan penataan ruang sesuai dengan konsep rencana pengembangan IKN
	2. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan publik (pendidikan, kesehatan)	2. Ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik di setiap kecamatan	2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik sehingga lebih memadai
	3. Belum meratanya sarana transportasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	3. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan, jalur kereta api, dan Pengembangan Bandar Udara Loa Kulu yang mendorong pusat kegiatan baru bagi pengembangan	3. Implementasi pembangunan jaringan aksesibilitas dalam meningkatkan konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
		Kabupaten Kutai Kartanegara.	
Smart Society	1. Kurangnya kapasitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas	1. Terciptanya masyarakat cerdas (*smart people*) yang melek teknologi	1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai pelatihan dan sosialisasi literasi digital
	2. Rendahnya kompetensi dan kapasitas tenaga kerja di Kutai Kartanegara	2. Tenaga kerja berkualitas yang mampu berdaya saing dan memiliki nilai jual tinggi	2. Peningkatan keterampilan melalui pembinaan dan pelatihan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan
	3. Sistem keamanan masih tradisional	3. Pemanfaatan sistem keamanan dengan bantuan teknologi	3. Pengembangan sistem *early warning system* dan aplikasi sejenis
Smart Environment	1. Degradasi lingkungan akibat pertambangan dan penggalian	1. Adanya teknologi tambang ramah lingkungan serta kaidah pertambangan yang baik dan benar atau *good mining practices*	1. Mengeluarkan regulasi kebijakan dalam implementasi teknologi tambang ramah lingkungan serta aksi hijau sebagai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan
	2. Belum optimalnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan yang berkelanjutan	2. Adanya Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan Upaya menjaga Ekosistem Perairan yaitu Program Pengembangan 3 Danau.	2. Implementasi program serta optimalisasi Peran dan Fungsi POKMASWAS.
	3. Permasalahan sampah dan limbah	3. Ketersediaan sarana pengelolaan sampah dan limbah	3. Menyediakan lahan akhir pembuangan sampah yang

Dimensi	Kondisi Saat Ini	Tren Masa Depan	Gap/Kesenjangan
			bersifat regional, serta peningkatan aksesibilitas masyarakat dalam pengelolaan limbah sampah

3.2 Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal seperti kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) di Kabupaten Kutai Kartanegara. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan *Smart City* diperlukan agar tujuan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dapat tercapai. Analisis SWOT dilakukan untuk seluruh program pengembangan Smart City di Kabupaten Kartanegara yang dapat terlihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.2 Analisis SWOT

Faktor Internal S dan W **Faktor Eksternal** O dan T	**Kekuatan** 1. Potensi Sumber Daya Alam berupa migas dan pertambangan 2. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang cukup beragam	**Kelemahan** 1. Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Infrastruktur belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Terbatasnya konektivitas antar wilayah 4. Belum kondusifnya iklim investasi dan sektor ekonomi kreatif pengembangan dunia usaha
Peluang 1. Sebagai salah satu calon ibukota negara baru di Indonesia 2. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi	1. Perlu adanya terobosan inovasi khususnya dalam optimalisasi komoditas unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Optimalisasi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah	1. Peningkatan keterampilan melalui pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi literasi digital yang sesuai dengan lapangan pekerjaan 2. Menyiapkan infrastruktur pendukung wilayah dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN 3. Melakukan branding wilayah khususnya pada wilayah dengan potensi peluang

		investasi sebagai daerah penyokong IKN
Ancaman 1. Secara posisi spasial berbatasan dengan Kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang 2. Pengelolaan lahan pasca tambang tanpa pengelolaan lebih lanjut	1. Penguatan daya saing produk dengan konsep *One Village One Product* (OVOP) 2. Memberikan kemudahan layanan dalam proses perizinan baik untuk investor maupun perusahaan dalam negeri dalam berinvestasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang lebih memadai sehingga meningkatkan daya saing 2. Implementasi pembangunan jaringan aksesibilitas dalam meningkatkan konektivitas 3. Mengeluarkan regulasi kebijakan dalam implementasi teknologi tambang ramah lingkungan serta aksi hijau sebagai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan

3.3 Analisis TOWS

Analisis TOWS merupakan salah satu analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal sama seperti dengan SWOT, namun pada analisis TOWS Kabupaten Kutai Kartanegara diidentifikasi berdasarkan 6 dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance, Branding, Economy, Living, Society*, dan *Environment*.

3.3.1 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Governance*

Tabel 3.3 Analisis Kesenjangan *Smart Governance*

Faktor Internal S dan W Faktor Eksternal O dan T	Kekuatan 1. Ketersediaan infrastruktur TIK (fiber optic, tower wireless LAN, dan data center) 2. Terdapat 110 sistem elektronik (83 aplikasi pada 25 OPD dan 35 website OPD) 3. Peraturan Bupati Satu Data Indonesia Kutai Kartanegara	Kelemahan 1. Masih terdapat blankspot di 8 kecamatan dan 23 desa 2. Sistem informasi yang ada di OPD belum seluruhnya terintegrasi sehingga masih terjadi overlapping data. 3. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi 4. Masih kurangnya kesadaran OPD dalam memanfaatkan website sebagai media penyajian data dan penyebarluasan informasi

Peluang 1. Kerjasama dengan K/L/D/I 2. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tak terbatas	1. Terdapat aplikasi pelayanan digital sampai tingkat kecamatan	1. Meningkatkan kesadaran OPD dalam memanfaatkan website melalui pendampingan pembuatan dan/atau pengelolaan website. 2. Meningkatkan jumlah dan kapasitas SDM TIK dengan berkoordinasi pada OPD terkait
Ancaman 1. Berbatasan dengan kota besar yang memiliki sektor unggulan yang relatif sama 2. Tingginya jumlah kepemilikan beberapa perusahaan pada sektor strategis yang berasal dari investor atau perusahaan dari Luar Negeri	1. Memberikan kemudahan layanan proses perizinan pada investor sehingga mampu meningkatkan jumlah investor di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Integrasi Data/Sistem Informasi yang mampu mengurangi duplikasi data.

3.3.2 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Branding*

Tabel 3.4 Analisa Kesenjangan *Smart Branding*

Faktor Internal S dan W **Faktor Eksternal** O dan T	**Kekuatan** 1. Komitmen Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan sistem informasi untuk mewujudkan *Smart City* Kab. Kutai Kartanegara 2. Telah ditetapkannya logo dan jargon *Smart Regency* Kutai Kartanegara 3. Memiliki kawasan wisata alam yang lengkap 4. Adanya museum Mulawarman dan kawasan Pulau Kumala sebagai pusat rekreasi	**Kelemahan** 1. Produk lokal belum memiliki ciri khas yang seragam 2. Masih banyak UMKM yang belum berizin dan belum memiliki label PIRT 3. Belum optimalnya penggunaan TI oleh masyarakat/pengusaha/investor

Peluang 1. Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur 2. Potensi produk lokal Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Menyusun peta potensi wisata daerah sebagai daerah penyokong IKN 2. Setiap produk lokal dari Kabupaten Kutai Kartanegara wajib menyertakan logo atau jargon Smart Regency	1. Meningkatkan kompetensi kemampuan SDM terutama dalam promosi potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Mengoptimalkan layanan TIK di objek wisata untuk mempermudah pengunjung
Ancaman 1. Belum optimalnya infrastruktur pendukung teknologi informasi di beberapa wilayah 2. Persaingan produk sejenis dari luar Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Munculnya tempat rekreasi baru d daerah lain yang relatif bisa dijangkau (jarak dan biaya)	1. Penguatan Infrastruktur pendukung dan pemerataan ketersediaan jaringan internet 2. Fasilitasi UMKM dalam proses perizinan dan label PIRT 3. Meningkatkan promosi dan menggali keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Pembinaan dan pendampingan penggunaan teknologi informasi bagi masyarakat 2. Mengurangi jumlah UMKM yang belum berizin dan meningkatkan jumlah kepemilikan label PIRT 3. Meningkatkan layanan wahana modern seperti Augmented Reality, QR Code, IP Cam dan lain sebagainya

3.3.3 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Economy*

Tabel 3.5 Analisa Kesenjangan *Smart Economy*

Faktor Internal S dan W **Faktor Eksternal** O dan T	**Kekuatan** 1. Terdapat 38.000 UMKM dimana 2.500 UMKM sudah berizin 2. Tersedianya tiga Reservat di Wilayah Perairan Umum. 3. Terbentuknya Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di Beberapa Wilayah	**Kelemahan** 1. Kurangnya Infrastruktur Pengelolaan Sumberdaya Ikan.
Peluang 1. Adanya Program Prioritas Provinsi Kalimantan Timur yang selaras dengan Upaya menjaga Ekosistem Perairan yaitu Program Pengembangan 3 Danau. 2. Adanya Kesepahaman Bersama yang tertuang	1. Mengupayakan pemulihan ekosistem melalui optimalisasi fungsi Reservat, Restocking, dan Pengawasan 2. Optimalisasi Peran dan Fungsi POKMASWAS	1. Meningkatkan Kompetensi Anggota POKMASWAS melalui Bimtek.

dalam Dokumen PKS antara stakeholder Terkait dalam hal Pengawasan Sumberdaya Perikanan.	Melalui penyediaan sarana Pengawasan.	
Ancaman 1. Tekanan terhadap Ekosistem Perairan semakin tinggi sebagai akibat dari meningkatnya eksploitasi Sumberdaya alam.	1. Menyusun Program dan Kegiatan yang terintegrasi untuk Mendukung Program Pengembangan 3 Danau.	1. Sosialisasi terhadap pentingnya menjaga ekosistem perairan. 2. Mendorong Penerapan Pemanfaatan Tata Ruang secara optimal.

3.3.4 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Living*

Tabel 3.6. Analisa Kesenjangan *Smart Living*

Faktor Internal S dan W **Faktor Eksternal** O dan T	**Kekuatan** 1. Infrastruktur TIK (jaringan internet) di 214 desa dari 237 desa di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Ketersediaan lahan	**Kelemahan** 1. Tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kutai Kartanegara. 2. Belum meratanya sarana dan prasarana pelayanan publik (pendidikan, kesehatan) 3. Terbatasnya konektivitas antar wilayah
Peluang 1. Pemindahan ibukota negara ke Kalimantan Timur 2. Perkembangan teknologi digital mendorong IoT dapat dimanfaatkan dalam pelayanan kesehatan, tranportasi serta pengendalian tata ruang	1. Pembangunan infrastruktur dalam penyiapan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur	1. Implementasi pembangunan jaringan aksesibilitas dalam meningkatkan konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara
Ancaman 1. Berbatasan dengan kota besar yang memiliki sektor unggulan yang relatif sama	1. Pembangunan jalan bebas hambatan, jalur kereta api, dan Pengembangan Bandar Udara Loa Kulu.	2. Pembangunan sarana prasarana pelayanan publik terutama di daerah perbatasan kabupaten/kota

3.3.5 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Society*

Tabel 3.7 Analisa Kesenjangan *Smart Society*

Faktor Internal S dan W **Faktor Eksternal** O dan T	**Kekuatan** 1. Penggunaan internet dan daya beli masyarakat untuk ketersediaan perangkat gadget dan akses data di Kabupaten Kutai Kartanegara relatif tinggi. 2. Dukungan Tersedianya tenaga pengelola Program KKBPK sampai tingkat kelurahan / desa 3. Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja di tingkat Sekolah Lanjutan Atas dan Mahasiswa	**Kelemahan** 1. Tidak memiliki forum komunikasi baik antar warga maupun keterlibatan dengan pemerintah 2. Rendahnya pemakaian jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 3. Masih tingginya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak terlayani dalam pemakaian alat / obat kontrasepsi
Peluang 1. Memiliki gedung Pusat Komunitas Kreatif di Sanga-sanga 2. Komitmen Kepala Daerah dan peran lintas sektor dalam bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk dan keluarga berencana 3. Upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Upaya meningkatkan fungsi advokasi serta komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) terhadap program KKBPK	1. Peningkatan sosialisasi literasi digital dalam pemanfaatan internet secara cerdas 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga Penyuluh KB dan Petugas Lapangan KB serta Kader 3. Menyusun grand design kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara 4. Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga	1. Membangun sistem forum interaktif digital antara masyarakat dan pemerintah sebagai kanal informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat
Ancaman 1. Informasi dan berita yang tidak benar sehingga membingungkan masyarakat 2. Konten negatif dampak dari internet	1. Penyaringan konten negatif bekerjasama dengan Kemenkominfo dan provider internet melalui Diskominfo	1. Terus mengkampanyekan pemanfaatan teknologi secara bijak

3.3.6 Analisa Kesenjangan terkait *Smart Environment*

Tabel 3.8 Analisa Kesenjangan *Smart Environment*

Faktor Internal S dan W **Faktor Eksternal** O dan T	**Kekuatan** 1. Adanya dokumen masterplan 2012 dan jakstrada pengelolaan sampah 2. Tersedianya data pelaku usaha pertambangan batu bara, migas, perkebunan, serta data dokumen lingkungan dan data nilai konservasi tinggi (NKT)	**Kelemahan** 1. Integritas dan Komitmen pemda yang masih kurang dalam perencanaan dan kelanjutan kegiatan 2. Belum memiliki sistem peringatan dini bahaya banjir 3. Belum ada proses monitoring dari pemerintah dan/atau pengawasan masyarakat dalam penggunaan lahan pasca tambang
Peluang 1. Kebijakan/regulasi Pemerintah Pusat melalui Peraturan Perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan 2. Daerah memiliki data spasial, dokumen amdal, dan data hasil pengawasan 3. Potensi migas dan nonmigas yang belum dimanfaatkan	1. Melakukan peremajaan data mengenai pelaku usaha dan membuat pengelolaan data digital. 2. Pemanfaatan TIK dalam memonitor dan mendata potensi yang belum dikelola dan dimanfaatkan baik untuk sektor migas maupun non migas	1. Digitalisasi data dan melakukan dokumentasi/pengelolaan/penyimpanan data secara s*oft copy* dan *online* 2. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam optimalisasi potensi SDA di Kabupaten Kutai Kartanegara
Ancaman 1. Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan masih rendah 2. Pertumbuhan Penduduk yang cepat menyebabkan volume timbulan sampah yang semakin besar 3. Belum adanya regulasi terkait penetapan desa ramah lingkungan dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca 4. Pengelolaan lahan pasca tambang tanpa adanya pengelolaan pemulihan dan peralihan menjadi lahan produktif	1. Menyusun kebijakan/regulasi untuk membatasi penggunaan sampah plastik, kertas atau sejenisnya dengan bahan-bahan alami yang mudah terurai. 2. Menyusun Regulasi dan rencana aksi penetapan Desa ramah lingkungan dan GRK 3. Menyusun regulasi kebijakan dalam pemulihan lahan pasca tambang	1. Melakukan kampanye/sosialisasi peduli lingkungan secara berkala, pemahaman sejak dini kepada anak-anak usia sekolah melalui program adiwiyata 2. Menggalakkan penggunaan Tas Belanja lebih dari satu kali pakai sebagai pengganti plastik 3. Inventarisasi, Sosialisasi, dan fasilitasi pembentukan Desa Ramah Lingkungan, serta memberikan penilaian desa ramah lingkungan

		4. Kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam pembuatan sistem *early warning system* khususnya untuk potensi bahaya banjir

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB IV
ANALISIS VISI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis strategi pembangunan melalui analisis SWOT. Analisis Visi Pembangunan *Smart City* bertujuan untuk menyelaraskan visi misi pembangunan daerah termasuk RPJP dan RPJMD daerah dengan Visi Misi Smart City yang akan disusun.

4.1 Visi, Misi, Smart City

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan hasil dari penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, di dalam visi termuat gambaran mengenai arah pembangunan serta kondisi pembangunan di masa depan yang hendak dicapai dalam masa jabatan. Penyusunan visi mempertimbangkan berbagai hal mulai dari kondisi, potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kutai kartanegara, maka dari itu visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 berupa:

MEWUJUDKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN KUTAI KARTANEGARA YANG CERDAS, MAJU DAN INOVATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN BARU IBUKOTA NEGARA

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

Cerdas : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pembangunan yang dilakukan menggunakan cara yang inovatif, efektif, dan efisien sebagai solusi penyelesaian permasalahan. Pembangunan bukan hanya berupa pembangunan fisik infrastruktur, melainkan pembentukan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia serta kesejahteraan masyarakat.

Maju : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

Inovatif : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat membuat inovasi dalam setiap kinerja pemerintahan baik daerah hingga tatanan lokal dengan menyertakan partisipasi masyarakat secara langsung

Berbasis Kearifan Lokal : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat memanfaatkan kekayaan dan kearifan lokal baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia hingga kebudayaan dan adat istiadat yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan dan bertujuan untuk menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Ibukota Negara : Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian daerahnya diarahkan sebagai lokasi pengembangan Ibukota Negara menjadikan pusat pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan cakupan Nasional yang berbasis pada integrasi, efektifitas, efisiensi dan kemajuan teknologi

Berdasarkan visi Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya dapat diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi Smart City. Penekanan misi Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara ditekankan pada peningkatan pelayanan, penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

Misi 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif dan efisien melalui pembangunan fisik, sumberdaya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
Misi 2	Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pelayanan publik dan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan masayarakat dan terintegrasi dengan Pengembangan Ibu Kota Negara
Misi 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan Pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang professional dan transparan
Misi 4	Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan
Misi 5	Mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat

4.2 Sasaran Smart City Daerah

Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan sasaran *Smart City* Daerah. Sasaran *Smart City* Daerah diuraikan dalam bentuk ukuran capaian keberhasilan yang disusun dalam sasaran *Smart City* daerah. Sasaran *Smart City* Daerah merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan *Smart City*.

Tabel 4.1 Dimensi, Sub-Dimensi, Sasaran dan dasar Pemikiran

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART GOVERNANCE	LAYANAN PUBLIK	1. Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik 2. Nilai SAKIP
	BIROKRASI	1. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Terwujudnya Birokrasi yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi
	PERANCANGAN KEBIJAKAN	1. Kebijakan publik yang efisien	2. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik
SMART BRANDING	PARIWISATA	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah 2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
	DAYA SAING BISNIS	1. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM 2. Platform pemasaran bisnis daerah (Business Branding) yang terintegrasi	1. Jumlah UKM 2. Jumlah kunjungan wisatawan

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	WAJAH (TAMPILAN) KOTA	1. Menurunnya kawasan kumuh	1. Persentase rumah layak huni
SMART ECONOMY	EKOSISTEM INDUSTRI	1. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata,perindustrian , pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan terhadap ekonomi daerah	1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Indeks Pembangunan Gender 2. Indikator Indeks Gini 3. indikator Tingkat Pengangguran Terbuka 4. Indeks desa membangun
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Meningkatkan Pendanaan pembangunan daerah	1. Indeks Persepsi Anti Korupsi
SMART LIVING	HARMONISASI TATA RUANG	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
	KESEHATAN	1. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	1. Indeks Kesehatan

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
	TRANSPORTASI	1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah 2. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	1. Indeks Aksesibilitas Wilayah
SMART SOCIETY	INTERAKSI MASYARAKAT	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan
	EKOSISTEM BELAJAR/PENDIDIKAN	1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	1. Indeks Pendidikan dan Indeks Pembangunan Kebudayaan
	KEAMANAN MASYARAKAT	1. Sistem Keamanan Masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi	1. Angka kriminalitas
SMART ENVIRONMENT	PROTEKSI LINGKUNGAN	1. Meningkatnya Ketangguhan Menghadapi Bencana	1. Indeks Risiko Bencana
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	1. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	TATA KELOLA ENERGI	1. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air 2. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	1. Cakupan layanan air bersih

REFERENSI

BAPPENAS. 2021. *Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kaltim dengan Indonesia*. http://sdgs.bappenas.go.id diakses tanggal 09 Agustus 2021 pukul 08.19 WIB

BAPPENAS. 2021. *Indonesia Green Growth Program.* http://greengrowth.bappenas.go.id/ diakses tanggal 10 Agustus 2021 pukul 18.19 WIB.

BPS Kutai Kartanegara. 2020. *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2020.* Kabupaten Kutai Kartanegara. https://kukarkab.bps.go.id/

BPS Kutai Kartanegara. 2021. *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021.* Kabupaten Kutai Kartanegara. https://kukarkab.bps.go.id/

BPS Kutai Kartanegara. 2021. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Kartanegara Menurut Pengeluaran 2016-2020*. https://kukarkab.bps.go.id/

DISKOMINFO Kutai Kartanegara. 2017*. Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara 2017*. Kabupaten Kutai Kartanegara.

DISKOMINFO Kutai Kartanegara. 2020*. Masterplan e-Government 2019*. Kabupaten Kutai Kartanegara.

DISKOMINFO Kutai Kartanegara. 2021*. Presentasi Tugas Diskominfo pada Penjabaran Visi Misi Kukar Idaman dan dalam Rangka Persiapan Penyusunan RPJMD Kukar 2021-2026*. Kabupaten Kutai Kartanegara.

Katadata Insight Center dan Kominfo RI. 2020. *Indeks Literasi Digital Indonesia*. https://databoks.katadata.co.id/ diakses tanggal 09 Agustus 2021 pukul 09.33 WIB

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 39 Tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.*

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang *Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.*

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021*.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).*

BUKU II

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KOMINFO

G-MULTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Penyusunan Buku 2: Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan dokumen inti masterplan *Smart City* yang dijadikan sebagai acuan pembangunan untuk mencapai tujuan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Buku 2 disusun untuk menganalisis arah pembangunan, strategi pembangunan *Smart City*, Rencana Aksi, dan peta jalan (*roadmap*) *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Arah pembangunan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan hasil analisis visi, misi, sasaran, dan indikator utama *Smart City* yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon Kawasan Ibukota Negara. Analisis strategi dan arah pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil identifikasi strategi yang terdapat pada Buku 1 yang kemudian dikelompokkan pada setiap dimensi *Smart City* yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living,* dan *smart environment.* Penyusunan Dokumen Masterplan *Smart City* diharapkan dapat sebagai acuan atau panduan dalam memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam persiapan implementasi *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kawasan Ibu Kota Negara sehingga mampu mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Tim Penyusun Masterplan *Smart City*
Kabupaten Kutai Kartanegara

SAMBUTAN KEPALA DAERAH

Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi memiliki dampak besar dalam perwujudan pembangunan daerah sehingga sangat penting untuk menerapkan aspek yang berkaitan dengan TIK. Dengan melihat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang menjadikan *Smart City* merupakan sistem yang sangat membantu dalam peningkatan pelayanan, integrasi antar instansi pemerintahan hingga hubungan antar pemerintah dan masyarakat.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan kabupaten yang memiliki sumberdaya mulai dari alam dan manusia yang cukup beragam dan memiliki potensi pengembangan yang menjanjikan, selain itu dengan adanya rencana pengembangan Ibukota Negara menjadikan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus bersiap dan mampu menyediakan berbagai pelayanan yang terintegrasi sehingga dengan penyusunan *masterplan Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menjadi pedoman yang mengakumulasikan berbagai perencanaan yang ada menjadi satu kesatuan yang berdampak pada perwujudan pembangunan yang lebih efektif dan efisien.

Penerapan konsep *Smart City* dipercaya dapat meningkatkan layanan masyarakat serta menjadikan kinerja pemerintah lebih terarah dan cerdas. Konsep berpikir cerdas bukan hanya akan diterapkan di pemerintahan namun juga masyarakat dapat meningkatkan inovasi dan kreativitasnya dalam pengembangan potensi lokal. Berbagai dimensi dalam *Smart City* akan diintegrasikan dengan berbagai kegiatan program pemerintahan maka diharapkan seluruh aspek dapat turut terlibat dalam pengimplementasian berbagai program dan kegiatan yang ada agar terwujud Kabupaten Kutai Kartanegara yang cerdas.

Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara

Drs. Edi Damansyah, M.Si.

SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY*

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan, baik dari aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, budaya, dan lain sebagainya. Salah satu konsep yang akan dikembangkan dalam Ibu Kota Negara (IKN) yakni *Smart City. Smart City* merupakan konsep pengelolaan kota cerdas yang bertujuan untuk mencapai Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara yang dikembangkan dalam enam dimensi, yaitu dimensi *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society* dan *smart environment.*

Guna mencapai Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diperlukan strategi, rencana aksi dan program kerja yang mendukung dalam pencapaian visi misi. Program dan rencana aksi yang dibuat dalam Masterplan ini disesuaikan dengan urgensi permasalahan yang ingin diselesaikan serta kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Akhir kata semoga buku masterplan *Smart City* ini dapat menjadi panduan dalam mewujudkan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi kabupaten cerdas.

Sekretaris Dewan *Smart City*

Drs. H. Sunggono, MM.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

SAMBUTAN KEPALA DAERAH 3

SAMBUTAN SEKRETARIS DEWAN *SMART CITY* 4

DAFTAR ISI 5

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 2

1.3. Landasan Hukum 3

1.4. Kerangka Pikir 4

BAB II ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH 12

2.1 Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Daerah 12

2.2. Indikator Utama *Smart City* Daerah 16

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* 19

3.1. *Smart Governance* 19

3.2. *Smart Branding* 20

3.3. *Smart Economy* 22

3.4. *Smart Living* 23

3.5. *Smart Society* 24

3.6. *Smart Environment* 26

BAB IV RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH 28

4.1. Rencana Aksi *Smart City* Daerah 28

4.1.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan 28

4.1.2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung 33

4.1.3. Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak 34

4.1.4. Penguatan Literasi 34

4.1. Rencana Aksi *Smart City* Setiap Dimensi 36

4.1.1. Rencana Aksi *Smart Governance* 36

4.1.2. Rencana Aksi *Smart Branding* 44

4.1.3. Rencana Aksi *Smart Economy* 49

4.1.4. Rencana Aksi *Smart Living* 50

4.1.5. Rencana Aksi *Smart Society* 51

4.1.6. Rencana Aksi *Smart Environment* 54

BAB V PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH 67

5.1. *Smart Governance* 67

5.2. *Smart Branding* 70

5.3. *Smart Economy* 82

5.4. *Smart Living* 89

5.5. *Smart Society* 98

5.6. Smart Environment 104

BAB V PENUTUP 114

REFERENSI 115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Dimensi *Smart City* 4

Gambar 1.2. *Smart Governance* 5

Gambar 1.3. *Smart Branding* 6

Gambar 1.4. *Smart Economy* 7

Gambar 1.8. *Smart Living* 8

Gambar 1.9. *Smart Society* 9

Gambar 1.10. *Smart Environment* 10

Gambar 1.11. Kerangka Keterkaitan antara Sasaran Smart City dengan RPJMD 10

Gambar 1.12. Kerangka Kodifikasi Program Smart City 11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Dimensi, Sub-Dimensi, Sasaran dan dasar Pemikiran 14

Tabel 2.2 Sinkronisasi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Indikator *Smart* 17

Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Governance* 19

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Branding* 21

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Economy* 22

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Living* 24

Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Society* 25

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Environment* 26

Tabel 4.1 Rencana Aksi *Smart Governance* 36

Tabel 4.2. Rencana Aksi *Smart Branding* 44

Tabel 4.3. Rencana Aksi *Smart Economy* 49

Tabel 4.4. Rencana Aksi *Smart Living* 50

Tabel 4.5. Rencana Aksi *Smart Society* 51

Tabel 4.6 Rencana Aksi *Smart Environment* 54

Tabel 5.1 Peta Jalan *Smart Governance* 67

Tabel 5.2 Peta Jalan *Smart Branding* 70

Tabel 5.3 Peta Jalan *Smart Economy* 82

Tabel 5.4 Peta Jalan *Smart Living* 89

Tabel 5.5 Peta Jalan *Smart Society* 98

Tabel 5.6 Peta Jalan *Smart Environment* 104

BAB I
PENDAHULUAN

Buku Masterplan *Smart City* pada Bab 1 menyajikan latar belakang, informasi, serta alasan disusunnya Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu dijelaskan juga tujuan serta informasi landasan kebijakan, regulasi, rujukan hukum, dokumen pendukung yang digunakan dalam penyusunan dokumen masterplan *Smart City.* Lebih lanjut, kerangka pikir dalam Bab 1 berisikan hubungan antara buku Masterplan *Smart City* dengan RPJMD, Renstra OPD, dokumen masterplan atau perencanaan lainnya seperti TIK, e-Gov, SPBE, SNI ISO 37122:2019, dan SDGs.

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis terletak antara 115º26' Bujur Timur dan 117º36' Bujur Timur serta diantara 1º28' Lintang Utara dan 1º08' Lintang Selatan. Secara posisi, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) memiliki kondisi topografi yang beraneka ragam dari dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, dan lain sebagainya. Keragaman topografi di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu keuntungan sendiri terutama pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi sumber daya pertambangan dan penggalian. Optimalisasi potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diwujudkan dalam berbagai program kegiatan pembangunan dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Kutai Negara yaitu "**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**.

Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya sebagai akselerator dalam mencapai visi misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan konsep *Smart City*. *Smart* dalam *Smart City* merupakan konsep cerdas yang diimplementasikan pada suatu wilayah geografi yang menerapkan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui partisipasi untuk pembangunan dan kesejahteraan yang diatur dalam suatu kebijakan dan peraturan. Daerah pintar (*Smart Region*) dapat berbentuk Kota Pintar (*Smart City*), Kabupaten Pintar (*Smart Regency*), atau Provinsi Pintar (*Smart Province). Smart City* didefinisikan sebagai salah satu konsep mengedepankan inovasi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan suatu wilayah menggunakan bantuan teknologi (Yeh, 2017). Berbagai kondisi eksternal yang saat ini berkembang seperti politik, legal, sosial, ekonomi,

lingkungan dan transformasi digital telah mengarahkan pada pengelolaan daerah dengan konsep kota atau kabupaten cerdas (*Smart City*).

Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia mengembangkan banyak solusi inovatif melalui aplikasi berbasis TIK yang dapat membantu orang menjalankan kehidupan sosial dan kemudahan mengakses layanan publik (Rachmawati et al, 2021a). Menurut Dameri (2013), *Smart City* adalah wilayah geografis yang menggunakan teknologi ICT, logistik, produksi energi, dan sebagainya yang saling bersinergi atau bekerja sama untuk menciptakan manfaat bagi warga dalam hal kesejahteraan, inklusi dan partisipasi, kualitas lingkungan, serta kecerdasan perkembangan yang didasarkan oleh aturan dan kebijakan pemerintah kota. Hal ini diperkuat oleh Caragliu dkk (2011), IBM, (2010), Su dkk (2011), dan Piro (2013) yang menyatakan bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam konsep *Smart City.* Adanya perkembangnya TIK dan peran ruang virtual menjadikan ruang absolut (berkaitan dengan tempat, konsentrasi, dan distribusi) menjadi tidak harus ditekankan lagi keberadaanya (Rachmawati, 2014). Teknologi informasi dan komunikasi terutama internet memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih jauh dimasa depan, seperti menyediakan aplikasi dengan layanan terintegrasi yang online, menyediakan akses jaringan yang tersedia di seluruh Indonesia, meningkatkan pola pikir dan pola kerja digital, menyediakan TIK yang murah dan ramah pengguna serta meningkatkan keamanan data (Rachmawati et al, 2021). Berbagai program kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dioptimalkan dengan konsep *Smart City* diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

1.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain yaitu:

1. Sebagai dasar, acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Memberikan arahan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu menuju ke arah *Smart City;*
3. Mendorong Kabupaten melakukan akselerasi pembangunan sebagai Kawasan IKN dengan menggunakan konsep *Smart City* yang efektif dan efisien; dan

4. Menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara yang berkelanjutan dan mendukung peningkatan kualitas hidup warga.

1.3. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
3. Undang Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kota/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 53 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kukar;
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2020 tentang Masterplan *Smart City/Smart Regency*;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 83 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

18. Surat Keputusan Bupati Kukar Nomor 231/SK-BUP/HK/2017 tentang Pembentukan Dewan Kutai Kartanegara *Smart Regency*; dan
19. Surat Keputusan Bupati Kukar Nomor 232/SK-BUP/HK/2017 tentang Tim Pelaksana Kutai Kartanegara *Smart Regency.*

1.4. Kerangka Pikir

Kerangka pikir *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan Buku Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021-Gerakan Menuju 100 *Smart City* yang dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2021. Kesiapan Daerah Pintar atau *Smart City Readiness* dikukur melalui tiga elemen utama yaitu potensi alam (*nature*), struktur daerah (*structure*), infrastruktur (*infrastructure*), suprastruktur (*superstructure*), dan budaya (*culture).* Adapun dimensi dalam *Smart City* terdiri atas enam dimensi *yaitu smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living* dan *smart environment* (Gambar 1.1).

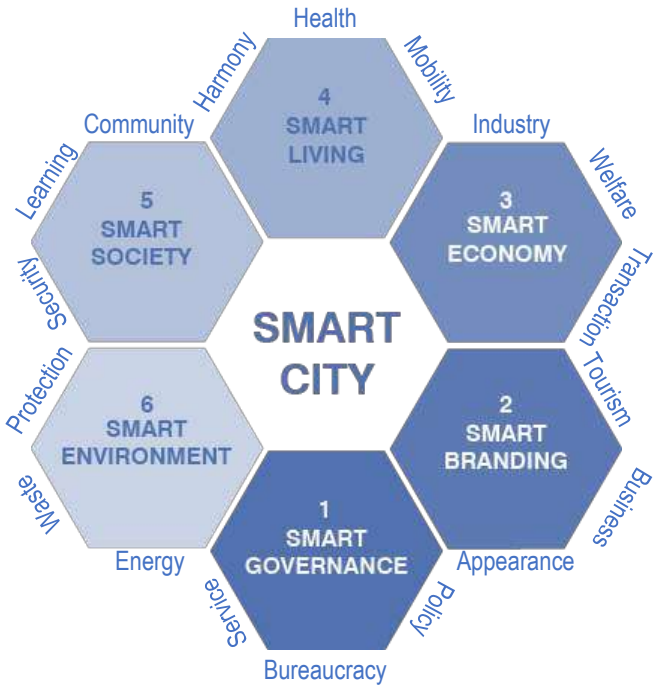

Gambar 1.1. Dimensi *Smart City*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

a. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari pemerintah daerah sebagai institusi yang mengendalikan

sendi-sendi kehidupan kota. Sasaran dari *smart governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang ekfektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu. *Smart governance* harus dapat dimplementasikan ke dalam tiga unsur antara lain yaitu:

- Pelayanan publik (*service*)
- Manajemen birokrasi yang efisien (*bureaucracy*)
- Efisiensi kebijakan publik (*policy*).

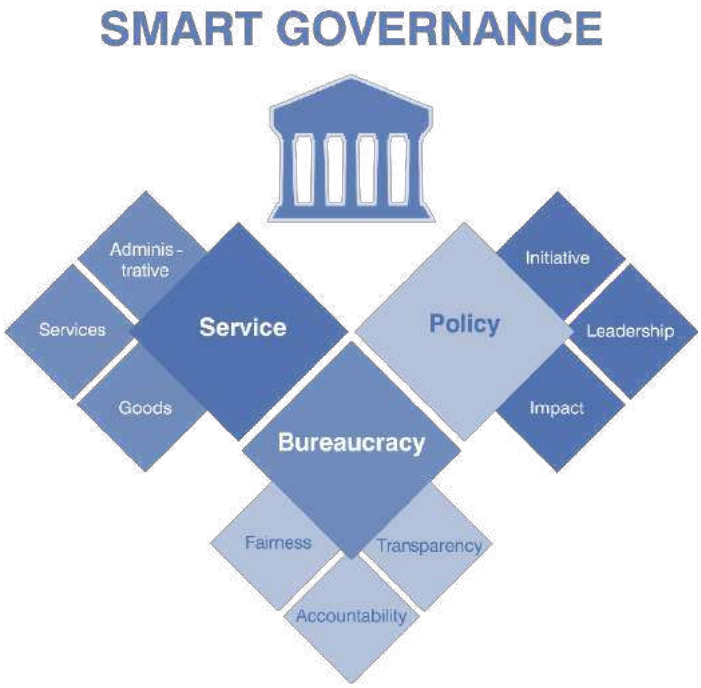

Gambar 1.2. *Smart Governance*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

b. Smart Branding

Smart branding adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembankan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. *Smart branding* menjadi salah satu dimensi dalam *Smart City* karena di dalam era informasi seperti saat ini, sebuah kota tidak lagi harus mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dengan hanya memanfaatkan potensi lokal-nya, tetapi harus juga mampu menarik partisipasi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, serta pelaku bisnis dan investor untuk ikut mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Sasaran dari *smart branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun unsur *smart branding* meliputi tiga hal yaitu:

- Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*)
- Membangun *platform* dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (*business branding*)
- Membangun dan memasarkan wajah kota (*city appearance branding*)

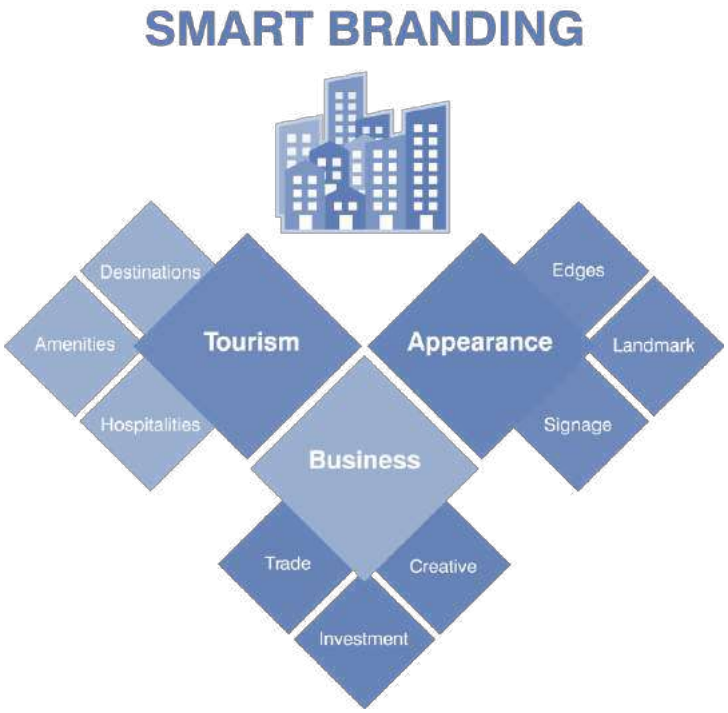

Gambar 1.3. *Smart Branding*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

c. *Smart Economy*

Smart economy dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini. Sasaran dari dimensi *smart economy* di dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society.* Tiga unsur dalam *smart economy* meliputi:

- Membangun ekosistem industri yang berdaya saing (*industry*)
- Mewujudkan kesejahteraan rakyat (*welfare*)
- Membangun ekosistem transaksi keuangan (*transaction*)

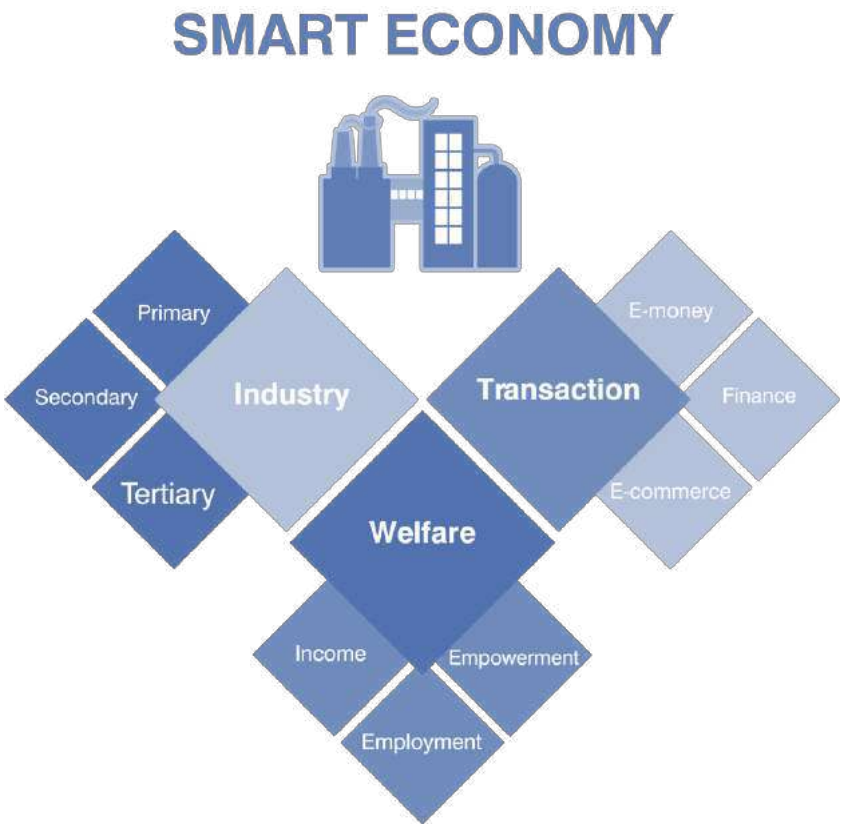

Gambar 1.4. *Smart Economy*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

d. Smart Living

Smart living dalam *Smart City* untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah *Smart City*. Sasaran dari *smart living* di dalam *Smart City* adalah untuk mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman, dan efisien. *Smart living* terdiri atas tiga indikator yang terdiri atas:

- Harmonisasi Tata Ruang Wilayah (*Harmony*).
- Mewujudkan Prasarana Kesehatan (*Health*).
- Menjamin Ketersediaan Sarana Transportasi (*Mobility*).

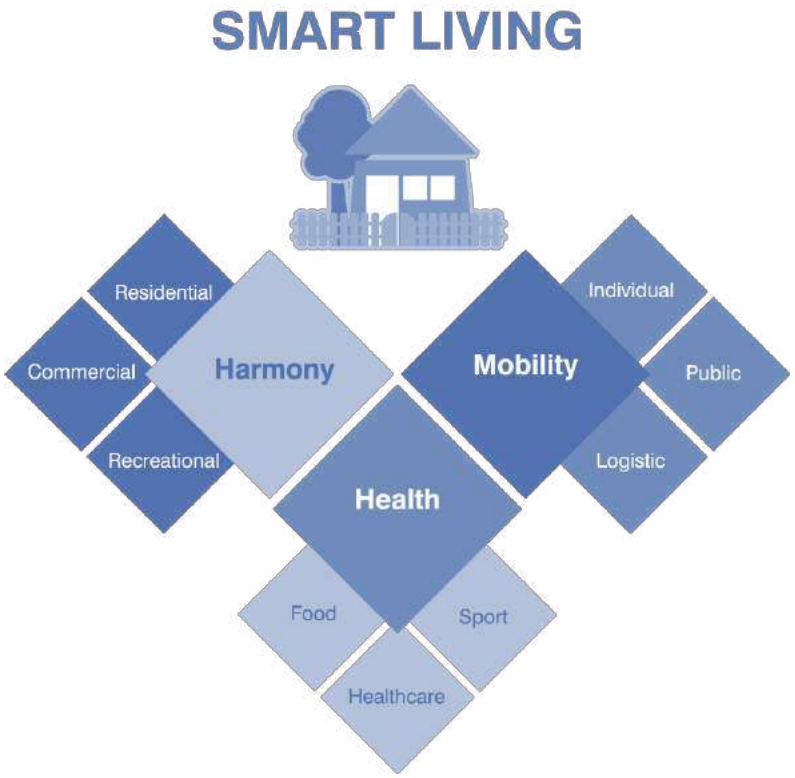

Gambar 1.8. *Smart Living*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

e. *Smart Society*

Smart society merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah *Smart City*, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi. Sasaran dari *smart society* dalam *Smart City* adalah mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Tiga elemen unsur di dalam *smart society*, yaitu:

- Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (*community*)
- Membangun ekosistem belajar yang efisien (*learning*)
- Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (*security*)

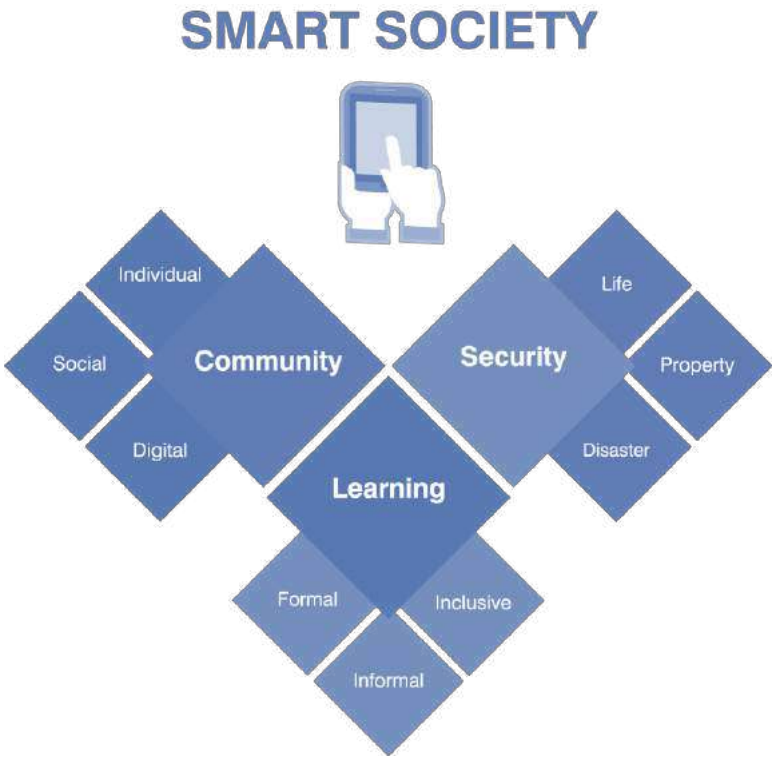

Gambar 1.9. *Smart Society*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

f. Smart Environment

Smart environment merupakan pengelolaan lingkungan yang pintar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sasaran dari *smart environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Adapun unsur dalam *smart environment* meliputi:

- Mengembangkan program proteksi lingkungan (*protection*).
- mengembangkan tata kelola sampah dan limbah (*waste*).
- Mengembangkan tata kelola energi yang bertanggung-jawab (*energy*)

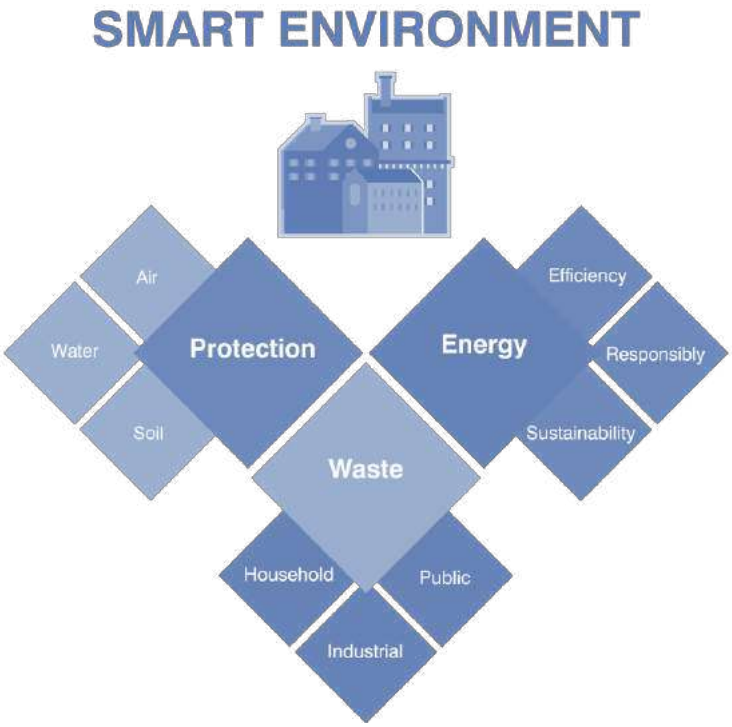

Gambar 1.10. *Smart Environment*
Sumber: Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) dalam Kemenkominfo, 2021

Penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dengan memperhatikan dokumen pembangunan seperti RPJMD, Renstra OPD, dan dokumen perencanaan lainnya. Visi, Misi, dan Arah Kebijakan Pembangunan *Smart City* dibuat selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah termasuk RPJPD dan RPJMD daerah. Pada dokumen RPJMD hubungan keterkaitan antara Masterplan *Smart City* dan RPJMD terletak pada tingkat sasaran, yaitu sasaran *Smart City* dan sasaran RPJMD. Lebih jauh, sasaran *Smart City* perlu dicapai melalui serangkaian strategi dan program *Smart City,* baik program pada Peta Jalan *Smart City*, maupun program pada rencana aksi pembangunan *Smart City.*

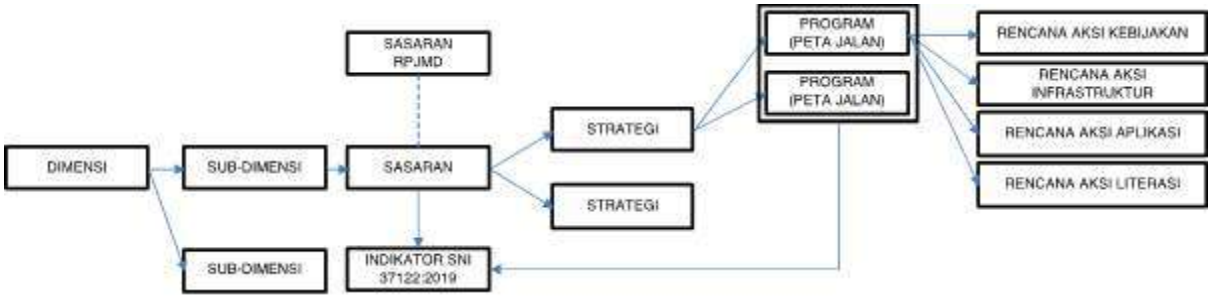

Gambar 1.11. Kerangka Keterkaitan antara Sasaran *Smart City* dengan RPJMD
Sumber: Kemenkominfo, 2021

Di samping itu, untuk memudahkan dalam penyajian sasaran, strategi dan program-program *Smart City* di dalam Masterplan, maka dapat disusun kodifikasi pada pada masterplan *Smart City* mulai dari dimensi *Smart City* dan sub-dimensi *Smart City* sebagaimana relasi-nya dapat dilihat pada Gambar 1.2 di bawah ini.

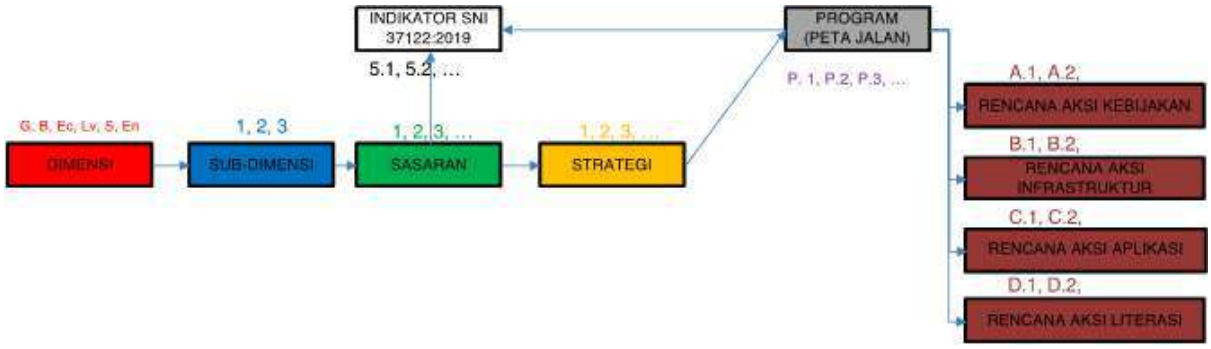

Gambar 1.12. Kerangka Kodifikasi Program *Smart City*
Sumber: Kemenkominfo, 2021

Penyusunan Visi Misi Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Visi Misi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Ditinjau berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), penyusunan Masterplan *Smart City* tersirat dalam tujuan nomor 17 yaitu *sustainable cities and communities* serta tertuang dalam indikator perkotaan dan masyarakat yang berkelanjutan sesuai dengan SNI ISO 37122:2019. *Smart City* dalam hubungannya dengan ISO 37122, dimaksudkan untuk memberikan berbagai indikator dalam mengukur kemajuan ke arah kota pintar. Untuk menjamin implementasi dan keberlanjutan program *Smart City* yang diusulkan, program *Smart City* disesuaikan dengan rencana strategis (Renstra) OPD. Selain itu, dalam analisis kesiapan daerah terutama aspek infrastruktur fisik dan digital, Masterplan *e-Government* menjadi acuan dalam memberikan gambaran terkait dasar dalam penyusunan dokumen masterplan.

BAB II
ARAH PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

Arah Pembangunan *Smart City* pada Bab II disusun untuk mengidentifikasi indikator utama dalam *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun berdasarkan Visi, Misi, dan Sasaran *Smart City* yang sudah dirumuskan sebelumnya. Indikator utama *Smart City* dianalisis untuk setiap masing-masing sub dimensi dalam mencapai tujuan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara.

.

2.1 Visi, Misi dan Sasaran *Smart City* Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, di dalam visi termuat gambaran mengenai arah pembangunan serta kondisi pembangunan di masa depan yang hendak dicapai dalam masa jabatan. Penyusunan visi mempertimbangkan berbagai hal mulai dari kondisi, potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kutai kartanegara, maka dari itu visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 berupa:

MEWUJUDKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN KUTAI KARTANEGARA YANG CERDAS, MAJU DAN INOVATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN BARU IBUKOTA NEGARA

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

Cerdas : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pembangunan yang dilakukan menggunakan cara yang inovatif, efektif, dan efisien sebagai solusi penyelesaian permasalahan. Pembangunan tidak semerta-merta hanya diartikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, melainkan pembentukan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia

Maju : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

Inovatif : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat membuat inovasi dalam setiap kinerja pemerintahan baik daerah hingga tatanan lokal dengan menyertakan partisipasi masyarakat secara langsung

Berbasis Kearifan Lokal : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat memanfaatkan kekayaan dan kearifan lokal baik berupa sumber daya alam, sumber daya manusia hingga kebudayaan dan adat istiadat yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan dan bertujuan untuk menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Ibukota Negara : Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian daerahnya diarahkan sebagai lokasi pengembangan Ibukota Negara menjadikan pusat pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan cakupan Nasional yang berbasis pada integrasi, efektifitas, efisiensi, dan kemajuan teknologi

Berdasarkan Visi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya dapat diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi *Smart City*. Penekanan Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara ditekankan pada peningkatan pelayanan, penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

Misi 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif dan efisien melalui pembangunan fisik, sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
Misi 2	Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pelayanan publik dan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan Pengembangan Ibu Kota Negara
Misi 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan Pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang profesional dan transparan
Misi 4	Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan
Misi 5	Mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat

Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan sasaran *Smart City* Daerah. Sasaran *Smart City* Daerah diuraikan dalam bentuk ukuran capaian keberhasilan yang disusun dalam sasaran *Smart City* daerah. Sasaran *Smart City* Daerah merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan *Smart City*.

Tabel 2.1 Dimensi, Sub-Dimensi, Sasaran dan dasar Pemikiran

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART GOVERNANCE	LAYANAN PUBLIK	1. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Indeks persepsi kualitas pelayanan publik 2. Nilai SAKIP
	BIROKRASI	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks persepsi anti korupsi
	PERANCANGAN KEBIJAKAN	1. Kebijakan publik yang efisien	1. Indeks persepsi kualitas pelayanan publik
SMART BRANDING	PARIWISATA	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah 2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
	DAYA SAING BISNIS	1. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM 2. Platform pemasaran bisnis daerah (*business branding*) yang terintegrasi	1. Jumlah UKM 2. Jumlah kunjungan wisatawan
	WAJAH (TAMPILAN) KOTA	1. Menurunnya kawasan kumuh	1. Persentase rumah layak huni

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART ECONOMY	EKOSISTEM INDUSTRI	1. Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, perindustrian, pertanian, peternakan,perkebunan perikanan, kehutanan terhadap ekonomi daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. Laju pertumbuhan ekonomi kreatif
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Indeks pembangunan gender 2. Indikator indeks gini 3. Indikator tingkat pengangguran terbuka 4. Indeks desa membangun
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah	1. Indeks persepsi anti korupsi
SMART LIVING	HARMONISASI TATA RUANG	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
	KESEHATAN	1. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	1. Indeks kesehatan
	TRANSPORTASI	1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah 2. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	1. Indeks aksesibilitas wilayah

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART SOCIETY	INTERAKSI MASYARAKAT	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di masyarakat	1. Indeks pembangunan kebudayaan
	EKOSISTEM BELAJAR/PENDIDIKAN	1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	1. Indeks pendidikan dan indeks pembangunan kebudayaan
	KEAMANAN MASYARAKAT	1. Sistem keamanan masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi	1. Angka kriminalitas
SMART ENVIRONMENT	PROTEKSI LINGKUNGAN	1. Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana	1. Indeks risiko bencana
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	1. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1. Indeks kualitas lingkungan hidup
	TATA KELOLA ENERGI	1. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air 2. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	1. Cakupan layanan air bersih

2.2. Indikator Utama *Smart City* Daerah

Perwujudan visi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirumuskan dalam lima misi yang mendukungnya dapat dicapai dengan enam indikator utama *Smart City* yakni *smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society,* dan *smart environment* sebagai berikut.

Tabel 2.2 Sinkronisasi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Indikator *Smart City* Daerah

Misi	Misi *Smart City*	Indikator *Smart City*
MISI 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif dan efisien melalui pembangunan fisik, sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi	MISI 1 *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diterjemahkan kedalam indikator *smart governance*, dalam mencapai *good governance* khususnya dalam peningkatan layanan berbasis TIK (Teknologi informasi dan komunikasi)
MISI 2	Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pelayanan publik dan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan Pengembangan Ibu Kota Negara	MISI 2 *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diterjemahkan kedalam indikator *smart living* dan *smart society* yang dimaksudkan untuk mewujudkan pusat pelayanan publik dan infrastruktur dasar guna keberlangsungan hidup masyarakat yang meliputi aspek infrastruktur sosial, ekonomi dan lingkungan
MISI 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang profesional dan transparan	MISI 3 *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diterjemahkan kedalam indikator *smart governance* dan *smart branding* dalam membangun tata kelola pemerintah khususnya dalam mendukung pengembangan Ibu Kota Negara serta membangun citra daerah (dari segi ekonomi, sosial, politik, pariwisata dan budaya)
MISI 4	Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam	MISI 4 *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diterjemahkan kedalam indikator *smart economy* dan *smart environment,* dengan berupaya untuk

Misi	Misi *Smart City*	Indikator *Smart City*
	dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan	meningkatkan perekonomian masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya yang ada, namun tetap menjaga kelestarian lingkungan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan
MISI 5	Mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat	MISI 5 *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diterjemahkan kedalam indikator *smart environment* dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Bab III Strategi Pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil analisis strategi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianalisis berdasarkan hasil analisis kesenjangan (GAP), SWOT, dan TOWS. Strategi pembangunan *Smart City* digunakan sebagai salah satu langkah dalam mencapai Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dimana strategi yang ada disusun berdasarkan masing-masing dimensi yang kemudian dirinci menjadi masing-masing sub dimensi.

3.1. *Smart Governance*

Smart Governance merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan terintegrasi. Dimensi s*mart governance* masuk ke dalam misi *Smart City* yang pertama dan ketiga. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa layanan publik (*public services),* birokrasi *(bureaucracy),* dan perancangan kebijakan *(policy design)*. Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada pembangunan dan perwujudan tata kelola pemerintah khususnya mendukung pengembangan Ibu Kota Negara serta berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart governance* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.1 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Governance*

Sub Dimensi	Strategi
Public Services	● Optimalisasi Pengelolaan dan Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai *Baseline* Penanganan Kemiskinan. ● Pembangunan dan pengembangan layanan masyarakat berbasis teknologi dan digital. ● Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi pembangunan terintegrasi. ● Meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya layanan kependudukan berbasis NIK. ● Menyediakan Aplikasi Survei kepuasan masyarakat.

Sub Dimensi	Strategi
	● Menyediakan Aplikasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi masyarakat. ● Mengelola pelayanan pengaduan publik.
Bureaucracy	● Menyediakan tanda tangan elektronik. ● Menyediakan naskah dinas elektronik. ● Meningkatkan layanan keuangan berbasis digital. ● Meningkatkan pengelolaan arsip. ● Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis digital. ● Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa. ● Menyediakan sistem pengendalian internal pemerintahan berbasis digital.
Policy Design	● Menyusun peraturan sebagai dasar pelayanan publik berbasis elektronik. ● Menyediakan layanan verifikasi dan asistensi APBDes berbasis digital. ● Menyediakan layanan PBB Online. ● Menyediakan layanan pajak daerah *online.* ● Menyediakan layanan *call center* 112.

3.2. *Smart Branding*

Smart Branding merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu membangun *image*/citra Kabupaten Kutai Kartanegara agar membantu dalam proses promosi baik di bidang pariwisata maupun sosial, budaya dan ekonomi. Dimensi s*mart branding* masuk ke dalam misi *Smart City* yang ketiga. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa pariwisata (*tourist),* daya saing bisnis *(Business Competitiveness),* dan wajah (tampilan) kota *(Face of The City)*. Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada pengembangan Ibu Kota Negara serta membangun citra daerah (dari segi ekonomi, sosial, politik, pariwisata dan budaya). Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart branding* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Branding*

Sub Dimensi	Strategi
Tourist	● Membuat *branding* wisata "Kukar Asia Wonder". ● Meningkatkan infrastruktur objek wisata yang dikelola. ● Pembinaan POKDARWIS. ● Promosi dan pameran wisata lokal. ● Membangun *website* dan sosial media berkaitan dengan potensi wisata. ● Menyelenggarakan *event* pariwisata. ● Menyediakan ruang kreatif masyarakat. ● Membina pelaku ekonomi kreatif yang berkaitan dengan pariwisata.
Business Competitiveness	● Peningkatan dan kemudahan pelayanan guna meningkatkan peluang potensi investasi dan pengembangan perekonomian daerah untuk mampu meningkatkan daya saing daerah melalui reformulasi desain investasi menuju hilirisasi SDA. ● Menyediakan ruang kreatif bagi masyarakat berkaitan dengan pengembangan ekonomi. ● Pembinaan pelaku ekonomi kreatif. ● Meningkatkan pelayanan berupa kemudahan dalam perizinan dan berusaha. ● Melakukan promosi dan pameran lokal nasional maupun internasional. ● Pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pemasaran.
Face of The City	● Membangun jaringan komunikasi dengan pimpinan, media dan masyarakat. ● Membangun *website* dan sosial media. ● Meningkatkan keterbukaan informasi publik. ● Meningkatkan upaya penyelesaian masalah publik baik berupa daerah kumuh dan sebagainya serta meningkatkan partisipasi masyarakat. ● Meningkatkan ruang terbuka hijau di pusat kota.

Sub Dimensi	Strategi
	● Melaksanakan *gathering* bersama jurnalis dan KIM.

3.3. *Smart Economy*

Smart Economy dalam *Smart City* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem industri yang mampu beradaptasi sesuai tantangan di era informasi dengan cara yang cerdas dengan faktor lingkungan sehingga mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Dimensi *Smart Economy* Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam misi kedua *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang ingin dicapai antara lain yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan. Sasaran *Smart Economy* dirinci kedalam tiga elemen yaitu ekosistem industri (*industry*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi keuangan (*transaction*). Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart economy* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Economy*

Sub Dimensi	Strategi
Industry	● Membangun industri primer dan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. ● Membangun industri pengolahan dari hasil bahan mentah. ● Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal. ● Meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan dan penguatan kualitas koperasi dan UMKM. ● Optimalisasi ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai kegiatan *e-commerce* dan *marketplace*. ● Mengupayakan pemulihan ekosistem melalui optimalisasi fungsi reservat, restocking, dan pengawasan. ● Optimalisasi peran dan fungsi POKMASWAS melalui penyediaan sarana pengawasan.

Sub Dimensi	Strategi
Welfare	● Menyusun program dan kegiatan yang terintegrasi untuk mendukung program pengembangan 3 danau. ● Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja. ● Melakukan kerjasama antar desa. ● Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. ● Peningkatan kemitraan dengan swasta. ● Meningkatnya ketahanan pangan daerah. ● Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). ● Memfasilitasi pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja melalui berbagai kegiatan atau event terkait.
Transaction	● Meningkatkan kanal-kanal pembayaran non tunai. ● Meningkatkan peran serta pengusaha dalam menggunakan *e-commerce* dan *marketplace.* ● Mengkampanyekan penggunaan *e-money*. ● Meningkatkan infrastruktur pendukung transaksi digital. ● Mendorong pertumbuhan startup dan *fintech* di Kabupaten Kutai Kartanegara

3.4. *Smart Living*

Smart living merupakan salah satu dimensi *Smart City* yang digunakan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dengan tiga elemen utama yaitu kelayakan pola hidup (*harmony*), kelayakan kualitas kesehatan (*health*), dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di suatu daerah (*mobility*). *Smart living* bertujuan untuk menjamin pengelolaan sarana pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan untuk pemerataan pembangunan dan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Dimensi *smart living* tersirat dalam Misi ke-4, yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart living* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.4 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Living*

Sub Dimensi	Strategi
Harmony	● Optimalisasi penerapan pemanfaatan tata ruang secara optimal (monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW). ● Optimalisasi kawasan yang dijadikan ruang kegiatan publik. ● Optimalisasi *Area Traffic Control System* untuk proses manajemen lalu lintas. ● Pembangunan infrastruktur dalam penyiapan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. ● Meningkatkan tata kelola kawasan rekreasi, wisata, dan publik terutama dalam keamanan dan ketertiban.
Health	● Pembangunan sarana prasarana pelayanan publik terutama kesehatan di daerah perbatasan kabupaten/kota. ● Perbaikan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan ● Menerapkan kemajuan teknologi untuk pelayanan kesehatan dasar.
Mobility	● Implementasi pembangunan jaringan aksesibilitas dalam meningkatkan konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. ● Pembangunan jalan bebas hambatan, jalur kereta api, dan pengembangan bandar udara Loa Kulu. ● Penambahan dan perbaikan infrastruktur transportasi.

3.5. *Smart Society*

Smart Society Kabupaten Kutai Kartanegara tersirat pada misi ke tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang profesional dan transparan. Dimensi *smart society* diterjemahkan kedalam indikator membangun masyarakat yang madani dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Strategi dan arah kebijakan pada *smart society* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat

yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Berdasarkan sasaran *smart society* Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu mewujudkan masyarakat yang partisipatif, serta menciptakan sistem lingkungan yang aman, nyaman, dan terintegrasi, maka strategi *smart society* yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Society*

Sub Dimensi	Strategi
Community	● Membentuk komunitas yang produktif dan berkualitas dalam pengembangan SDM. ● Mendorong pendidikan tentang pemanfaatan teknologi informasi. ● Membangun sistem forum atau komunitas interaktif digital antara masyarakat dan pemerintah sebagai kanal informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. ● Membuat program pengembangan kapasitas SDM. ● Menyusun *grand design* kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara. ● Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga. ● Terus mengkampanyekan pemanfaatan teknologi secara bijak.
Learning	● Peningkatan sosialisasi literasi digital dalam pemanfaatan internet secara cerdas. ● Meningkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat. ● Membangun sistem pembelajaran yang cerdas (*e-learning*) sesuai kearifan lokal.
Security	● Meningkatkan program sosialisasi ketahanan keluarga. ● Meningkatkan peran RT dalam mendukung program kegiatan ketertiban dan ketahanan masyarakat. ● Peningkatan pemenuhan hak anak. ● Peningkatan perlindungan khusus anak. ● Peningkatan perlindungan terhadap perempuan. ● Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan ekonomi,sosial,budaya,agama dan ormas.

Sub Dimensi	Strategi
	● Optimalisasi dan integrasi sistem monitoring keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan teknologi. ● Membangun *early warning system, panic button* atau aplikasi pelaporan warga. ● Membangun sistem monitoring keamanan dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (*Internet of Thing*) yang terhubung dengan *City Command Center*. ● Penyaringan konten negatif bekerjasama dengan Kemenkominfo dan provider internet melalui Diskominfo.

3.6. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dimensi s*mart environment* masuk ke dalam misi *Smart City* yang keempat dan lima. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa proteksi lingkungan (*Environmental Protection),* pengelolaan sampah dan limbah *(Waste Management),* dan tata kelola energi *(Energy)*. Beberapa hal yang ditekankan dalam dimensi ini yaitu berupa strategi dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berwawasan lingkungan mulai dari pengaturan regulasi lingkungan hidup hingga pengendalian kualitas sumber daya dan pemanfaatan energi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart environment* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.6 Strategi dan Arah Kebijakan Dimensi *Smart Environment*

Sub Dimensi	Strategi
Environmental Protection	● Mengatur regulasi lingkungan hidup. ● Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. ● Meningkatkan peran swasta dalam mengelola lahan pasca tambang. ● Meningkatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesadaran kelestarian alam.

Sub Dimensi	Strategi
	● Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan. ● Peningkatan kualitas lingkungan hidup. ● Pemulihan ekosistem perairan berbasis kearifan lokal/masyarakat.
Waste Management	● Peningkatan aksesibilitas, kemudahan, kesederhanaan dalam melengkapi data bank sampah. ● Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah. ● Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3. ● Peningkatan layanan laboratorium uji kualitas lingkungan. ● Menyusun regulasi dan rencana aksi penetapan Desa ramah lingkungan dan GRK.
Energy	● Memanfaatkan energi fosil secara efisien dan mengurangi ketergantungan. ● Membuat program konversi energi terbarukan. ● Konektivitas di wilayah IKN.

BAB IV
RENCANA AKSI *SMART CITY* DAERAH

Rencana aksi sebagai wujud langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dibuat berdasarkan dari turunan visi dan misi Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2023. Secara keseluruhan, rencana aksi dikelompokan menjadi 4 bagian yaitu Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengembangan Infrastruktur Pendukung, Pengemangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung *Smart City,* serta Penguatan Literasi *Smart City* Daerah.

4.1. Rencana Aksi *Smart City* Daerah

4.1.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan

Kebijakan dapat diartikan sebagai arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin keberlanjutan sebuah program *Smart City* sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Sedangkan, kelembagaan merupakan perangkat non-fisik dari sisi pengelola kota yang bertujuan untuk mengatur pembagian peran dalam pelaksanaan *Smart City* Daerah. Rencana aksi dalam pengembangan kebijakan dan kelembagaan berperan dalam acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun rencana aksi pengembangan kebijakan dan kelembagaan di Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain yaitu:

4.1.1.1. Kebijakan

a) Penetapan berbagai regulasi pendukung dalam mencapai *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi standar pertukaran data dalam *business process* pemerintahan, standar acuan internasional dalam keamanan sistem informasi, dan lain sebagainya.
b) Penetapan regulasi pelaksanaan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Perda Masterplan *Smart City*, Perda Dewan *Smart City,* Tim Pelaksana *Smart City*,
c) Program *quick wins* ditetapkan sesuai dengan urgensi permasalahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai kerjasama dan sinergitas berbagai *stakeholder*.
d) Penetapan kebijakan program *Smart City* yang disesuaikan dengan perencanaan anggaran tahunan guna menjamin pelaksanaan.

e) Penetapan berbagai regulasi yang menjamin keberlanjutan program masterplan yang mencakup enam dimensi yaitu *smart governance, smart branding, smart living, smart economy, smart society* dan *smart environment* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

f) Kebijakan penyiapan kesiapan daerah dalam multi aspek sebagai katalisator implementasi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara.

g) Monitoring dan evaluasi berkala dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1.1.2. Kelembagaan

a) Pembentukan Tim Perencana dan Pengembang Aplikasi Kutai Kartanegara

Tim Perencana dan Pengembang Aplikasi memiliki fungsi dan tujuan antara lain yaitu:

1) Mengusulkan regulasi untuk pengembangan aplikasi *e-Government*;
2) Memberikan tinjauan terhadap Sistem Informasi atau aplikasi yang dibangun oleh berbagai OPD;
3) Membuat perencanaan pengembangan aplikasi pendukung implementasi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara;
4) Membangun dan mengembangkan aplikasi-aplikasi pendukung implementasi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara;
5) Membangun arsitektur atau mengembangkan API (*Application Programming Interface*) untuk pertukaran data antar Sistem Informasi; dan
6) Mengelola keamanan data dan informasi.

b) Pembentukan Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Kutai Kartanegara

Fungsi dan tujuan Tim Perencana dan Pengelola Infrastruktur Kutai Kartanegara sebagai berikut:

1) Membuat perencanaan pembangunan infrastruktur (TI non TI) untuk pendukung implementasi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara;
2) Melakukan penguatan keamanan infrastruktur; dan
3) Melakukan *maintenance* berkala terhadap infrastruktur.

c) Pembentukan Tim Sosialisasi dan Edukasi Kutai Kartanegara

Tim Tim Sosialisasi dan Edukasi memiliki fungsi dan tujuan antara lain yaitu:

1) Membuat perencanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait Program Kerja Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara;
2) Melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi program kerja *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara di internal pemerintahan dan masyarakat umum di tingkat kelurahan/desa hingga kabupaten melalui berbagai media;
3) Menginformasikan secara rutin program-program kerja *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara di berbagai kanal media sosial; dan
4) Mensosialisasikan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara pada forum-forum ilmiah.

d) Pembentukan Dewan *Smart City* Daerah

Dewan *Smart City* Daerah merupakan lembaga multi-pihak yang berfungsi sebagai wadah partisipasi antar-sektor dan antar-elemen dalam melakukan percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City*. Secara kedudukan, Dewan *Smart City* Daerah dipilih oleh Kepala Daerah dan disahkan melalui Peraturan Kepala Daerah dan berlaku selama lima tahun. Adapun kewenangan, tugas dan kewajiban Dewan *Smart City* antara lain:

Kewenangan Dewan *Smart City* Daerah

1) Menetapkan standar pelayanan *Smart City* di daerah;
2) Melakukan supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan *Smart City* daerah;
3) Memberikan persetujuan dan dukungan bagi usulan kebijakan, rencana kerja dan inisiatif strategis teknologi informasi dalam *Smart City*;
4) Membentuk tim penasehat/pakar sesuai kebutuhan;
5) Menghadirkan personil di luar anggota komite sesuai kebutuhan; dan
6) Melaksanakan kajian dan penelitian dalam rangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;

Tugas dan Kewajiban Dewan *Smart City* Daerah

1) Memberikan arahan aspek strategis Teknologi Informasi dalam *Smart City* dan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi;
2) Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di daerah;
3) Menampung dan membahas usulan, kebutuhan dan aspirasi OPD;
4) Memberikan rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah untuk mendorong terjadinya percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;
5) Menerima saran dan masukan dari masyarakat terkait percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Smart City* di daerah;
6) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* sekurang-kurangnya satu bulan sekali;
7) Membahas hasil asesmen/audit internal dan independen sebagai materi evaluasi; dan
8) Melakukan pelaporan kepada Kepala Daerah terkait perkembangan pelaksanaan *Smart City.*

e) Pembentukan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah

Tim Pelaksana *Smart City* berfungsi sebagai wadah koordinasi antar sektor terkait pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* dan menjamin terjadinya sinkronisasi antara Masterplan *Smart City* Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, maupun Renja SKPD. Secara kedudukan, Tim Pelaksana *Smart City* Daerah dipilih oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Sekretaris Dewan *Smart City* sekaligus penanggung jawab pengelola ekosistem *Smart City* di daerah. Keanggotaan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah disahkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kominfo, dan berlaku selama satu tahun. Adapun tugas dan fungsi, kewenangan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

Kewenangan Tim Pelaksana *Smart City* Daerah

1) Mengusulkan program dan kegiatan *Smart City* untuk dimasukkan ke dalam RKPD dan Renja SKPD kepada setiap OPD; dan
2) Mengusulkan pagu anggaran kegiatan *Smart City* di dalam KUA-PPAS kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Tugas dan Kewajiban Dewan *Smart City* Daerah

1) Menjamin sinkronisasi antara program dan kegiatan *Smart City* di dalam Masterplan (Rencana Induk) *Smart City* Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan di dalam dokumen rencana pembangunan daerah, baik RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD;
2) Menjamin pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* di Daerah;
3) Melakukan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan *Smart City* kepada Kepala Daerah dan Dewan *Smart City* Daerah;
4) Menghadiri rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Dewan *Smart City* Daerah;
5) Melakukan koordinasi dengan OPD dan TAPD terkait perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan *Smart City* di daerah; dan
6) Melaksanakan masukan yang diberikan oleh Dewan *Smart City* Daerah terkait program dan kegiatan *Smart City.*

f) Pembentukan Forum *Smart City* Daerah

Pembentukan forum pendukung *Smart City* di daerah dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dan mengakomodir kepentingan berbagai kalangan terhadap pelaksanaan *Smart City*. Forum pendukung *Smart City* dapat dikembangkan dengan inisiatif pemerintah maupun warga masyarakat. Beberapa forum pendukung *Smart City* meliputi:

- Forum Kota Sehat;
- Forum Budaya;
- Forum Komunikasi UMKM;
- Forum CSR;
- Komunitas Pengembang Piranti Lunak;
- Komunitas Pecinta Sejarah Kota;
- Dan lain sebagainya.

4.1.2. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

Pengembangan infrastruktur pendukung menjadi salah satu faktor utama dalam keberhasilan implementasi *Smart City*. Berbagai pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung terbagi menjadi dua bagian yaitu pengembangan infrastruktur fisik dan pembangunan infrastruktur digital. Adapun rencana aksi pengembangan infrastruktur pendukung di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:

4.1.2.1. Pengembangan Infrastruktur Fisik

1) Penambahan jaringan publik internet hotspot;
2) Penyediaan *bandwidth* internet;
3) Pembangunan *command center*
4) Penyediaan listrik yang stabil dan terjamin suplainya 7x24 jam;
5) Pembangunan dan perbaikan jalan;
6) Pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah;
7) Pemerataan pembangunan infrastruktur fisik di Kabupaten Kutai Kartanegara baik fasilitas umum, sarana prasarana kesehatan, sarana prasarana pendidikan dalam menunjang pemenuhan kebutuhan sebagai Ibukota Negara Baru;
8) Pembangunan dan pengembangan amenitas wisata; dan
9) Pembangunan dan pengembangan jalur transportasi antar wilayah seperti pengembangan bandara, pembangunan jembatan, terminal, pelabuhan, dan lain sebagainya dalam mendukung Kawasan Ibukota Negara.

4.1.2.2. Pengembangan Infrastruktur Digital

1) Pemanfaatan Teknologi *Cloud Computing* (Komputasi Awan) sehingga pengembangan layanan-layanan TIK dapat memangkas waktu dan biasa untuk proses ketersediaan infrastruktur *server* dengan *Service Level Agreement* (SLA). *Cloud Computing* mampu mewujudkan percepatan *e-Government*, memudahkan sharing informasi, dan lain sebagainya;
2) Perluasan dan penguatan akses jaringan internet di seluruh wilayah;
3) Pembangunan jaringan *fiber optic;*
4) Pengembangan *free hotspot* di area public;
5) Pengadaan *server* untuk aplikasi untuk menciptakan efisiensi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
6) Penyiapan *Disaster Recovery System* atau pemulihan sistem dari akibat bencana agar proses penanganan masalah yang terjadi di luar kendali manusia dapat diatas dengan baik.

4.1.3. Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak

Pengembangan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari kebutuhan akan pengembangan aplikasi perangkat lunak, sebab merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang keberlangsungan kinerja pemerintahan hingga pelayanan masyarakat yang lebih efektif dan efisien. Beberapa perangkat lunak pendukung program dan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya:

1. Sistem operasi server
2. *Tool Assessment*
3. *Data Warehouse*
4. Sistem Operasi Server, Aplikasi layanan online SIAK
5. Aplikasi SIRIKA
6. Website, DPPKB, Media sosial DPPKB
7. Antivirus, Firewall, SSL, Domain dan Hosting

Berbagai perangkat lunak tersebut didesain untuk mampu membantu kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih maksimal dalam menjalankan strategi, program dan kegiatan pembangunan yang ada.

4.1.4. Penguatan Literasi

Penguatan literasi merupakan salah satu upaya guna memaksimalkan program kerja dan kegiatan pembangunan khususnya dalam implementasi *Smart City.* Penguatan literasi diharapkan mampu membantu pelaksanaan pembangunan menjadi lebih inovatif dan melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu dengan pengimplementasian program-program yang ada dalam masterplan *Smart City* diharapkan mampu membawa dampak positif baik dalam hal pembangunan ekonomi, sosial, politik dan lingkungan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Terdapat berbagai bentuk penguatan literasi, apabila mengacu pada gerakan literasi nasional maka terdapat enam dasar penguatan yaitu literasi digital, baca tulis, sains, budaya, numerasi dan finansial. Dasar-dasar literasi tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan program yang terdapat dalam masterplan *Smart City.* Berikut beberapa bentuk penguatan literasi yang ada dalam masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara:

1. Sosialisasi menggunakan kanal media massa, sosial, radio komunitas
2. Pendayagunaan PKB/PLKB kader untuk penyebarluasan program KKBPK

3. Sosialisasi terkait pembinaan desa ramah lingkungan *(bio village*) di 71 desa dari 237 desa
4. Akreditasi laboratorium lingkungan hidup
5. Sosialisasi dan bimtek peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan
6. Pendayagunaan komunitas untuk penyebarluasan program
7. Pendataan unit usaha kewirausahaan pedesaan

Pelaksanaan program penguatan literasi dilakukan secara bertahap sebab agar berkelanjutan dan memberikan dampak jangka panjang khususnya bagi masyarakat. Pelaksanaan dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara dan melibatkan keikutsertaan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1. Rencana Aksi *Smart City* Setiap Dimensi

4.1.1. Rencana Aksi *Smart Governance*

Tabel 4.1 Rencana Aksi *Smart Governance*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Layanan Publik	Pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis digital	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	Sistem operasi server	2022-2026	Pelatihan Internal	2022-2026
		1.1. Sub Keg. Pengembangan aplikasi								
		2. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi **(Keg. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati	2022-2026	-	2022-2026	Tool Assessment	2022-2026	Pelatihan Internal Pemerintah[i]	2022-2026
		2.1. Sub Keg. Security assessment								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Peningkatan aksesibilitas data dan informasi pembangunan terintegrasi	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati	2021	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
		1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi satu data								
		2. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi **(Keg. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati tentang Keamanan Informasi	2022	-	-	Tool Assessment	-	-	2022-2026
		2.1. Sub Keg. Security assessment								
	Peningkatan layanan kependudukan berbasis NIK	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
		1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan sistem layanan kependudukan								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		2. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan (Keg. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan serta penyajian database kependudukan)	Peraturan Bupati	2021	PC dan jaringan internet	2021	Data Warehouse	2021	-	-
		2.1. Sub Keg. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan pihak perangkat daerah dan lembaga terkait								
		2.2. Sub Keg. Pelaksanaan penguatan database SIAK	Peraturan Bupati Layanan Online	2022	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022	Sistem operasi server, aplikasi layanan online SIAK	2022	-	-
		3. Program Pengelolaan Profil Kependudukan **(Keg. Penyusunan Profil Kependudukan)**	Pembuatan aplikasi informasi grafis kependudukan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT), Layanan Online Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Bupati	2022	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022	Sistem operasi server, aplikasi layanan online SIAK	2022	-	-
		3.1. Sub Keg. Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Penyediaan aplikasi survei kepuasan masyarakat	**1. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi** **(Keg. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota)** *1.1. Sub Keg. Security assessment*	-	-	-	-	Tool Assessment	2022-2026	-	-
	Pengelolaan pengaduan pelayanan publik	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi terintegrasi SP4N Lapor*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	-	-	-	-	-
	Penyediaan aplikasi BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan bagi masyarakat	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi terintegrasi e-warga*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Menyediakan tanda tangan elektronik	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati	2022-2026	-	-	-	-	-	-
		1.1. Sub Keg. Sosialisasi dan implementasi pemanfaatan tanda tangan elektronik								
		2. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi **(Keg. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota)**	-	-	-	-	Tool Assessment	2022-2026	-	-
		2.1. Sub Keg. Security assessment								
	Meningkatkan layanan keuangan berbasis digital	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)**	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
		1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pendukung transaksi keuangan								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Meningkatkan layanan kepegawaian berbasis digital	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pendukung kepegawaian*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
		2. **Program Kepegawaian Daerah** (Keg. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN) *2.1. Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	Peraturan Bupati	2022	Pengadaan Server	2023	Tool Assessment	2022, 2024	-	-
		3. Program pengelolaan aplikasi informatika **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *3.1. Sub Keg. Sosialisasi dan implementasi aplikasi SRIKANDI*	-	-	Internet	2022-2026	-	-	-	-

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi keuangan desa*	-	-	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
	Menyediakan sistem pengendalian internal pemerintahan berbasis digital	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi manajemen risiko*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
		2. Program pengelolaan aplikasi informatika **(Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)** *2.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pendukung manajemen aset*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		3. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi (Keg. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota) *3.1. Sub Keg. Operasional pengamanan persandian*	Peraturan Bupati	2022-2026	-	-	-	-	-	-
Perancangan Kebijakan	Verifikasi dan asistensi APBDes berbasis digital	**1.Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi** *1. Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi perencanaan desa*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
	Layanan PBB online	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota) *1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pendukung PBB online*	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-
	Layanan pajak daerah online	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan *e-government* di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)	Peraturan Bupati	2022-2026	Antivirus, Firewall, SSL, Domain, Server, Internet	2022-2026	-	-	-	-

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.1. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pajak daerah								

4.1.2. Rencana Aksi *Smart Branding*

Tabel 4.2. Rencana Aksi *Smart Branding*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Pariwisata	Membuat *branding* wisata "Kukar Asia Wonder"	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	Perbup	2022	Pengembangan TIC	2021-2022	Pengembangan berbagai *platform* media eksisting yang sudah ada	2022	*Launching* "Kukar Asia Wonder"	2021
		1.1. Keg. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota)							Sosialisasi	2022
		1.2. Keg. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota								
		1.3. Keg. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Meningkatkan infrastruktur objek wisata yang dikelola	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	-	-	Pengembangan tempat wisata / DTW	2022	QRIS	2021	Sosialisasi di berbagai media yang dikelola dinas pariwisata (visiting Kutai Kartanegara)	2022
		1.1. Keg. Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota					Integrasi QRIS dan Kukar Holiday	2022		
		1.2. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis			Peningkatan fasilitas sarpras umum DTW	2022				
		1.3. Keg. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota								
		1.4. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota								
	Pembinaan POKDARWIS	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	Pembentukan SK Pembentukan Pokdarwis	2022-2026	Pengembangan homestay	2022	Grup WA pengurus	2022	Pembinaan pokdarwis	2022
		1.1. Keg. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota								
		1.2. Keg. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.3. Keg. Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota								
		1.4. Keg. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota								
	Menyelenggarakan *event*	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	-	-	Pengembangan sarana kreatif di seluruh wilayah	2022	-	-	-	-
		1.1. Keg. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota								
		1.2. Keg. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata								
		2. Program pemasaran pariwisata								
		2.1. Keg. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota								
		2.2. Keg. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		2.3. Keg. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota								
		2.4. Keg. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri								
		2.5. Keg. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri								
	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif	**1. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif**	-	-	-	-	Pengembangan berbagai *virtual tour*	2021	-	-
		1.1. Keg. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif								
Wajah kota	Membangun jaringan komunikasi dengan pimpinan, media dan masyarakat	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Perbub BAKOHUMAS	2020	-	-	-	-	Literasi (Sosialisasi)	2022
		1.1. Sub Keg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas								
	Melaksanakan *gathering*	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik**	Perbub KIM	2022	-	-	-	-	Literasi (Sosialisasi)	2022

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	bersama jurnalis dan KIM	(Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota) *1.1. Sub Keg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas*								
	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**)** *1.1. Sub Keg. Pelayanan informasi publik*	Perbub PPID dan aduan publik	2021	-	-	Website	2020	Sosialisasi, Bimtek PPID dan Aduan Publik	2021
	Meningkatkan penyelesaian masalah publik, meningkatnya partisipasi publik	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota**)** *1.1. Sub Keg. Manajemen komunikasi krisis*	Penyusunan Perbub dan SOP Manajemen Komunikasi Krisis	2022	-	-	-	-	Literasi (sosialisasi)	2022

4.1.3. Rencana Aksi *Smart Economy*

Tabel 4.3. Rencana Aksi *Smart Economy*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kemitraan dengan swasta	**1. Program perizinan usaha pertanian (Keg. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota)**	Perbup No. 63/Perbup/2020	2020	1. Pengadaan server untuk mendukung/ *hosting* aplikasi	2020	Pengembangan inovasi BangMUs Kebulan	2022	1. Sosialiasi menggunakan kanal-kanal media sosial	2022
		1.1 Sub Keg. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian			2. Pengembangan sarana akses informasi bagi (open data).	2021-2022			2. Pendayagunaan komunitas untuk penyebarluasan program	2022
		2. Program peningkatan kerjasama desa (Keg. Pembinaan dan pengawasan administrasi desa)	1. Penataan kawasan daerah yang dilembagakan oleh kekuatan hukum 2. MoU dengan pihak desa dan pihak mitra sesuai dengan potensi unggulan desa	2022	-	-	Perlunya aplikasi	2022	-	-
		3. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat (Pemberdayaan lembaga kemsyarakatan)	-	-	-	-	-	-	1. Pelatihan kewirausahaan pedesaan	2022
		3.1. Keg. Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dana pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa							2. Workshop pelatihan	2022

4.1.4. Rencana Aksi *Smart Living*

Tabel 4.4. Rencana Aksi *Smart Living*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Harmonisasi tata ruang	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW	**1. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh** (Keg. Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah kabupaten/kota)	Peraturan Bupati No. 119 Tahun 2016 Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2018	2020	Pengadaan alat pendukung aplikasi dan pengembangan sarana akses aplikasi	2022	Fasilitasi pengembangan sistem aplikasi	2022	1. Sosialisasi menggunakan kanal-kanal media sosial 2. Pendayagunaan komunitas untuk penyebarluasan program	2022
		1.1 Sub. Keg. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha								
		2. Program kawasan permukiman (Keg. Peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha)	Peraturan Bupati No. 119 Tahun 2016 Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2018	2019	Pengadaan alat pendukung aplikasi dan pengembangan sarana akses aplikasi	2022	Fasilitasi pengembangan sistem aplikasi	2022	1. Sosialiasi menggunakan kanal-kanal media sosial 2. Pendayagunaan komunitas untuk penyebarluasan program	2022
		2.1 Sub. Keg. Perbaikan rumah tidak layak huni								
Kesehatan	Perbaikan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan	**1. Program pemenuhan upaya kesehatan** (Keg. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi)	RME rawat jalan, UGD, rawat inap, IBS	2022-2025	Pemutakhiran dan pengembangan perangkat penunjang EMR	2022-2025	Antivirus, firewall, SSL, domain & hosting	2022-2025	-	-
		1.1. Pembangunan aplikasi E-Medical Record								

4.1.5. Rencana Aksi *Smart Society*

Tabel 4.5. Rencana Aksi *Smart Society*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Interaksi masyarakat	Membentuk komunitas yang produktif dan berkualitas dalam pengembangan SDM	**1. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)**	-	-	Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga	2021	-	-	Pendayagunaan PKB/PLKB/Kader untuk penyebar luasan program KKBPK	2021-2022
		1.1. Sub. Keg. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)								
		1.2. Sub Keg. Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)								
		1.3. Sub. Keg. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)								
		1.4. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjut usiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)								

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		2. Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Peningkatan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas	2021	-	-	Aplikasi SIRIKA	2021-2022	1. Sosialisasi menggunakan kanal kanal media masa sosial, radio komunitas 2. Pendayagunaan PKb/PLKB kader untuk penyebarluasan program KKBPK	2021-2022
		2.1. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten / kota								
		2.2. Pelaksanaan Advokasi,komunikasi,Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	Penguatan advokasi serta komunikasi,Informasi, dan edukasi KKBPK	2021	-	-	Website DPPKB, media sosial DPPKB	2021	Sosialisasi menggunakan kanal kanal media masa sosial, radio komunitas	2021-2022
Ekosistem belajar/pendidikan	Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai kearifan lokal	**1. Program pembinaan perpustakaan**	Meningkatkan pembudayaan gemar membaca masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penambahan koleksi buku digital, perluasan gedung perpustakaan untuk ruang diorama, ruang multimedia dan ruang koleksi naskah kuno	2022	Sosialisasi buku digital pada masyarakat Kukar	2022	Perpustakaan digital (IKUKAR)	2022	Sosialiasi dan promosi perpustakaan digital (IKUKAR)	2022
		1.1. Sub. Keg. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat								
		1.2. Sub. Keg. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota			Pengadaan penambahan judul buku digital				Pengadaan buku digitaL	
		1.3 Sub. Keg. Pembangunan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			Pembangunan/perluasan gedung perpustakaan untuk ruang diorama, ruang multi media dan ruang koleksi naskah kuno				Pengembangan literasi berbasis inklusi sosial	

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Ketahanan masyarakat	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan ekonomi,sosial,budaya,agama dan ormas	**1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya** (Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	SK Tim P4GN (Narkotika) dan SK FKUB tingkat Kabupaten dan Kecamatan	2021	-	-	-	-	Penyuluhan pencegahan bahaya narkoba, pembentukan desa bersih narkoba (desa bersinar), pembinaan terhadap FKUB dan masyarakat	2021
		1.1. Sub. Keg. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			-	-	-	-	Monitoring dan analisis kebijakan ketahanan ekonomi Kabupaten Kutai Kartaneagra	2022
		1.2. Sub. Keg. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	SK Tim Ketahanan Ekonomi	2021	-	-	-	-	-	-

4.1.6. Rencana Aksi *Smart Environment*

Tabel 4.6 Rencana Aksi *Smart Environment*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
Proteksi lingkungan	Mengatur regulasi lingkungan hidup	**1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Pengembangan regulasi dan tata kelola serta kelembagaan terkait standar dan tata cara,atau pengaturan dalam pengendalian pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	2022 dan 2024	Penambahan perangkat pendukung pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2022-2026	Aplikasi dan sarana prasarana penunjang	2022-206	Penguatan literasi masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM	-
	Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	*1.1. Keg. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota*	1. Pembentukan kelembagaan/tim teknis dalam rangka pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota 2. Penyusunan kebijakan/regulasi pencegahan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	2022 - 2026	1. Penambahan Jumlah Perangkat *Handy Talkie* (HT), GPS (*Global Positioning System*) , drone dan sarana prasarana laboratorium lingkungan hidup	2022 -2026	1. Pembuatan sistem / aplikasi elektronik 2. Penyediaan sarana akses informasi masyarakat tentang status lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara 3. Peningkatan kapasitas laboratorium lingkungan hidup	2023-2024	Penguatan literasi masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM aparatur	2022 - 2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.1.1. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	1. Pembentukan Tim pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2022 - 2026	1. Penambahan alat pemantau kualitas air secara online dan otomatis (ONLIMO) 2. Penambahan jumlah perangkat *Handy Talkie* (HT), GPS (*Global Positioning System*), drone dan sarana prasarana laboratorium lingkungan hidup	2021 dan 2022	1. Implementasi pemantauan kualitas air secara online dan otomatis 2. Implementasi Aplikasi Siskana (Sistem Kalkulasi IKA-INA) dan Mengintegrasikan ke website PEMDA	2022 - 2026	1. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pencegahan pencemaran terhadap media tanah, air dan udara 2. Workshop dan Pelatihan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH)	2023 dan 2025
		1.1.2. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	1. Penyusunan regulasi terkait rencana aksi penurunan emisi gas rumah kaca 2. Penyusunan regulasi terkait pelaksanaan,penilaian desa ramah lingkungan (*bio village*) 3. Pembentukan tim pelaksana penurunan emisi gas rumah kaca dan desa ramah lingkungan	2021	1. Penyediaan sarana pendukung pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 2. Meningkatkan fungsi radio kalpataru sebagai sumber informasi kepada masyarakat	2022 - 2026	-	-	1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan LSM terkait rencana *bio village* 2. Melakukan kampanye melalui publikasi media massa online dan offline terkait penurunan emisi gas rumah kaca dan desa ramah lingkungan (*bio village*) 3. Membangun sinergitas antara akademisi, pelaku usaha, instansi	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
									vertikal, media dan komunitas mengenai lingkungan hidup	
		1.1.3. Sub Keg. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	1.Melakukan uji profisiensi laboratorium dalam rangka mendapatkan akreditasi laboratorium lingkungan hidup	2021	1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana laboratorium	2022-2026	1. Membangun sistem informasi manajemen laboratorium	2023	Akreditasi laboratorium lingkungan hidup	2021 dan 2022
	Meningkatkan peran serta swasta dalam mengelola lahan pasca tambang	**1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Pengembangan regulasi dan tata kelola serta kelembagaan terkait standar dan tata cara,atau pengaturan dalam pengendalian pencemaran dan/ kerusakan lingkungan hidup	2022-2026	1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 2. Penambahan sistem pemantauan melalui perangkat GPS dan drone	2024	-	-	Penguatan literasi masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM	2023-2024

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.1. Keg. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	1. Kerjasama pengembangan kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan pihak ketiga, antara lain: dengan dunia usaha 2. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar dan tata cara atau pengaturan dalam kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	2022-2026	Penambahan sistem pemantauan melalui perangkat GPS dan drone	2024	-	-	Melakukan sosialisasi, kampanye tentang pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	2023-2024
		1..1.1. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1. Melibatkan dunia usaha/perusahaan dalam gerakan penanaman pohon pada ex-lahan tambang 2. Membuat regulasi terkait mekanisme rehabilitasi dan gerakan penanaman pohon bagi dunia usaha dan atau masyarakat 3. Fasilitasi partisipasi publik dan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam	2022-2026	1. Penanaman 1 Juta pohon pada kawasan ex-tambang dengan melibatkan dunia usaha 2. Melakukan pendataan terkait penanaman pohon (jenis,jumlah, dan luasan hektar)	2022-2026	-	-	Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait pemanfaatan lahan	2022

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
			gerakan rehabilitasi lingkungan							
		2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	1. Penetapan arah dan tujuan pengembangan kelembagaan 2. Menerapkan satu data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah 3. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dengan berpedoman pada target yang telah ditetapkan dalam Renstra DLHK 4. Pengembangan literasi digital	2022-2026	Penyediaan sarana akses informasi masyarakat terintegrasi	2023	Pembuatan aplikasi data base Amdal	2022	Peningkatan kapasitas SDM aparatur	2023-2026
		2.1. Keg. Administrasi umum perangkat daerah	1. Menerapkan satu data dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang meliputi administrasi umum DLHK 2. Pengembangan literasi digital	2022-206	Penyediaan sarana akses informasi masyarakat terintegrasi	2023	Pembuatan apikasi data base amdal	2022	Pelatihan programer dan operator website dan aplikasi data base amdal	2023-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		2.1.1. Sub Keg. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1. Pengembangan Website DLHK (www.dlhk.kukarkab.go.id) 2. Pengembangan database amdal terintegrasi dan evaluasi yang transparan dan berbasis teknologi informasi	2022-2026	1. Pengembangan free hotspot area kantor 2. Pengembangan jaringan internet 3. Penyediaan layanan data terbuka dan berbagi data	2023	Pembuatan aplikasi *data base* amdal	2022	Pelatihan *programer* dan operator website dan aplikasi data base Amdal	2023-2026
	Meningkatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesadaran kelestarian alam	**1. Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	1. Menetapkan arah dan tujuan peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat 2. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dengan berpedoman pada target yang ditetapkan 3. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	2023-2026	-	-	-	-	1. Penguatan literasi masyarakat 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.1. Keg. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Penyusunan regulasi dan kelembagaan dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	2022	-	-	-	-	Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, dan kapasitas SDM aparatur	2022-2026
		1.1.1. Sub Keg. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Pembentukan SK tim peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	2022	-	-	-	-	Pelaksanaan sosialisasi dan bimtek peningkatan kapasitas dan kompetensi sumberdaya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	2022-2026
		1.1.2. Sub Keg. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Pembentukan SK tim pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	2022	-	-	-	-	Pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	2022-2026
		1.1.3. Sub Keg. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Pembentukan SK tim penyuluh dan kampanye lingkungan hidup	2022	-	-	-	-	Pelaksanaan sosialisasi dan Bimtek penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
	Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan	**1. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	1. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar dan tata cara, pemberian penghargaan lingkungan hidup 2. Pembentukan Tim penilaian/verifikasi pemberian penghargaan lingkungan hidup	2021 dan 2022	Penyediaan sarana dan prasarana pendukung	2022-2026	Penggunaan aplikasi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang program kampung iklim	2022-2026	Sosialisasi program penghargaan lingkungan hidup	2021-2026
		1.1. Keg. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Pembentukan Tim pelaksana penghargaan tingkat kabupaten	2021 dan 2022	Penyediaan sarana akses informasi masyarakat terintegrasi	2022-2026	Penggunaan aplikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Program Kampung Iklim	2022-2026	Sosialisasi Program penghargaan lingkungan hidup	2021-2026
		1.1.1. Sub Keg. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1. Pembentukan SK tim penilai dan pengarah tentang desa ramah lingkungan 2. Pembentukan SK tim penilai dan pengarah penghargaan kalpataru 3. Pembentukan SK tim penilai dan pengarah penghargaan	2021	Penyediaan sarana akses informasi masyarakat terintegrasi	2022-2026	Pengembangan penggunaan Penggunaan Sistem Registri Nasional (SRN)	2022-2026	Penguatan kinerja kelembagaan melalui pembagian tugas sesuai dengan SK tim penilai dan pengarah tentang desa ramah lingkungan	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
			adiwiyata							
Pengelolaan sampah dan limbah	Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah	**1. Program pengelolaan persampahan**	1. Penetapan arah dan tujuan pengelolaan persampahan Kabupaten selaras dengan Dokumen Perencanaan RPJMD dan Renstra DLHK 2. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar pengelolaan persampahan 3. Perumusan dokumen masterplan pengelolaan sampah kabupaten 4. Kerjasama pengelolaan persampahan dengan pihak ketiga, antara lain: dunia usaha, masyarakat atau pihak lain sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah 5. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala tentang pengelolaan persampahan	2022-206	Peningkatan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan	2022-2026	-	-	1. Penguatan literasi masyarakat 2. Peningkatan kapasitas SDM aparatur	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.1. Keg. Pengelolaan sampah	1. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait standar pengelolaan persampahan 2. Perumusan Dokumen Masterplan Pengelolaan Sampah Kabupaten 3. Kerjasama pengelolaan persampahan dengan pihak ketiga, antara lain: dunia usaha, masyarakat atau pihak lain sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah 4. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala tentang pengelolaan persampahan 5. Pembentukan Tim Pelaksana Pengelolaan Sampah	2022-2026	Peningkatan sarana prasarana pendukung pengelolaan persampahan	2022-2026	-	-	1. Sosialisasi kepada *stakeholder* terkait pengelolaan sampah 2. Membangun sinergitas antara akademisi, bisnis, pemerintah, media dan komunitas pengelolaan persampahan	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		1.1.1. Sub Keg. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,.pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	1.Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait dan tata cara, standar dalam penanganan sampah 2. Fasilitasi partisipasi publik dan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam komitmen penanganan sampah	2022	Pembangunan bank sampah di setiap kecamatan	2022-2026	Tidak ada	Tidak ada	1. Melakukan workshop penanganan persampahan 2. Melakukan pembinaan rutin terhadap komunitas bank sampah di kabupaten 3. Sosialisasi pemanfaatan dan pendaur ulangan sampah 4. Pelatihan SDM DLHK tentang Penanganan dan pendaur ulangan sampah	2022-2026
	Menggalakan program 3R yaitu reduce, reuse, recycle	*1.1.2. Sub keg. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*	1. Pengembangan regulasi dan tata kelola terkait dan tata cara, standar dalam pengurangan sampah 2. Fasilitasi partisipasi publik dan strategi pelibatan pemangku kepentingan dalam komitmen Pengurangan sampah	2022	Pembangunan bank sampah di setiap kecamatan	2022-2026	Tidak ada	Tidak ada	1. Melakukan workshop penanganan persampahan 2. Melakukan pembinaan rutin terhadap komunitas bank sampah di kabupaten 3. Sosialisasi pemanfaatan dan pendaur ulangan sampah 4. Pelatihan SDM	2022-2026

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
									DLHK tentang Penanganan dan pendaur ulangan sampah	
	Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah	*1.1.3 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota*	1. Kerjasama pengembangan pengelolaan sampah dengan pihak ketiga atau pihak lain yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah Daerah 2. Sinergitas pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat terkait pembiayaan program pengelolaan persampahan 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM	2022-2026	1. Penambahan mobil/alat angkut sampah 2. Pembangunan tempat pembuangan akhir sampah 3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia / tenaga lapangan pengelolaan sampah 4. Pengadaan sarana penunjang kebersihan 5. Pengadaan alat berat pendukung penanganan sampah	2022-2026	Evaluasi, identifikasi dan peninjauan lokasi persyaratan perizinan berusaha pengolahan sampah	2022-2026	-	-
		2. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	Penyuluhan kebijakan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Kutai Kartanegara	2022-2026	Pembangunan depo pengelolaan limbah B3 medis	2021	-	-	-	-

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA AKSI / TAHUN							
			PENGEMBANGAN KEBIJAKAN DAN KELEMBAGAAN	TAHUN	INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	TAHUN	PERANGKAT LUNAK PENDUKUNG	TAHUN	PENGUATAN LITERASI	TAHUN
		2.1. Keg. Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah	Penyuluhan kebijakan pengelolaan limbah B3 Kabupaten Kutai Kartanegara	2022-2026	Pembangunan depo pengelolaan limbah B3 medis	2021	-	-	-	-

BAB V
PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

Bab V Buku Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara berisikan peta jalan pembangunan *Smart City* Daerah yang dibagi berdasarkan dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society,* dan *Smart Environment*. Peta jalan pembangunan *Smart City* disusun dalam rentang waktu Tahun 2022-2026 yang disesuaikan dengan urgensi permasalahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana jangka pendek pada Tahun 2022, jangka menengah Tahun 2023-2024, dan jangka panjang Tahun 2026. Selanjutnya berdasarkan program kegiatan *Smart City* dianalisis indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 sebagai acuan dalam pengukuran keberhasilan program kerja yang akan diimplementasikan.

5.1. *Smart Governance*

Tabel 5.1 Peta Jalan *Smart Governance*

SUB-DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Layanan Publik	Pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis digital	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)	Cakupan aplikasi yang dikelola OPD	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Peningkatan dan Pembaharuan Inovasi Layanan Online Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Diskominfo
		1.2. Sub Keg. Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan			-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	APBD	Diskominfo dan Bagian Organisasi

SUB-DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Keg. Penyusunan Profil Kependudukan)	Persentase penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan			100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)			
		2.1. Sub Keg. Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Jumlah aplikasi informasi grafis kependudukan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Layanan Online Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		Pengadaan infografis yang dapat diakses secara online	1	210,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	APBD	DISDUKCAPIL
	Ducting	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)		Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengadaan informasi berbasis online dan Integrasi dengan aplikasi SAPK BKN, Penandatanganan SK Kepangkatan secara elektronik, pencetakan SK Kepangkatan oleh masing-masing operator unit	-	-	-	-	1	100,000,000	-	-	-	-	APBN	Diskominfo dan DPU
		1.1. Sub Keg. Perencanaan Ducting															

SUB-DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Birokrasi	Penyediaan layanan kepegawaian berbasis elektronik	*1.1. Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	Jumlah Pengembangan Aplikasi SIMPEG			1	100,000,000.00					1	100,000,000.00			APBD	BKPSDM
Perancangan kebijakan	Layanan pajak daerah online	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota) *1.2. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pajak daerah*	Jumlah aplikasi yang dibangun	Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pengadaan system pajak daerah secara online bagi masyarakat luas	1	180,000,000	1	180,000,000	1 Aplikasi	180,000,000	1	180,000,000	1 i	180,000,000	APBD	Diskominfo dan BAPPEDA

5.2. *Smart Branding*

Tabel 5.2 Peta Jalan *Smart Branding*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Pariwisata	Membuat branding wisata "Kukar Asia Wonder"	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**		Presentasi layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Memperkuat daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai keajaiban Asia baik wisata alama dan budaya melalui berbagai platform media, terintegrasi degan visiting Kutai Kartanegara	4	300,000,000	4	300,000,000	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPAR
		1.1. Keg. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota)	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola														
		1.2. Keg. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah perencanaan daya tarik wisata			1	300,000,000	1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPAR dan DPPR
		1.3. Keg. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola			1	600,000,000	1	600,000,000	1	825,000,000	4	950,000,000	10	950,000,000	APBD	DISPAR dan DPPR
	Meningkatkan infrastruktur	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	Jumlah perencanaan kawasan		Pengadaan infrastruktur pendukung	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	-	-	APBD	DISPAR

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	objek wisata yang dikelola	*1.1. Keg. Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota*	strategis pariwisata	Presentasi layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	pengembangan wisata seperti jalan, transportasi dan pemasaran												
		1.2. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis	Jumlah sarana dan prasarana kepariwisataan yang direvitalisasi			-	-	-		1	225,000,000	1	350,000,000	4	950,000,000	APBD	DISPAR
		1.3. Keg. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola			18	3,980,000,000	18	3,980,000,000	17	4,055,000,000	17	3,930,000,000	18	3,930,000,000	APBD	DISPAR
		1.4. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola			4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	APBD	DISPAR
	Pembinaan POKDARWIS	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	Jumlah dokumen evaluasi		Penambahan kegiatan berupa bedah homestay berupa bantuan untuk	1	100,000,000	1	100,000,000	-	-	-	-	10	100,000,000	APBD	DISPAR
		1.1. Keg. Monitoring dan evaluasi pengelolaan															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		destinasi pariwisata kabupaten/kota			menstandarisasi fasilitas homestay												
		1.2. Keg. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pembinaan	Presentasi layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring		10	430,000,000	10	300,000,000	10	530,000,000	10	530,000,000	10	430,000,000	APBD	DISPAR
		1.3. Keg. Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah penetapan destinasi pariwisata yang berkelanjutan			3	225,000,000	3	355,000,000	3	300,000,000	3	175,000,000	3	175,000,000	APBD	DISPAR
		1.4. Keg. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha pariwisata yang direkomendasikan untuk mendapat TDUP			10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	APBD	DISPAR dan DPMPTSP
	Menyelenggarakan event	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	Jumlah dokumen verifikasi yang diusulkan ke DPMPTSP	Jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	Pengelenggaraan event budaya Kabupaten Kutai Kartanegara yang diikuti oleh	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	APBD	DISPAR dan DPMPTSP
		1.1. Keg. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1.2. Keg. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP	Jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	masayarakat dan aparatur pemerintah	50	100,000,000	40	100,000,000	30	100,000,000	20	100,000,000	10	100,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2. Program pemasaran pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata		Promosi wisata melalui platform online dan offline	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.1. Keg. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota															
		2.2. Keg. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah penguatan promosi			4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.3. Keg. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha terfasilitasi			1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.4. Keg. Penyediaan data dan penyebaran informasi	Jumlah penyediaan data dan			4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	penyebaran informasi														
		2.5. Keg. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata			4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
	Penyediaan ruang kreatif	**1. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	Jumlah prasarana yang tersedia		Membangun creative center sebagai posko kreatif bagi masyarakat yang ingin memulai mengembangkan usaha	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	APBD	DISPAR dan DPPR
		1.1. Keg. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berkreasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota															
		1.2. Keg. Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi			3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	APBD	DISPAR dan DPPR

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif	**1. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Pengadaan lomba berbasis ekonomi kreatif	3	450,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		1.1. Keg. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif															
		1.2. Keg. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jumlah komunitas/pelaku kreatif yang difasilitasi		Pemberian bantuan bagi ekonomi kreatif yang memiliki potensi dan memberikan prosepek baik bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun daerah	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		1.3. Keg. Fasilitasi kekayaan intelektual	Jumlah kekayaan intelektual yang terfasilitasi	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan		5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	APBD	DISPAR
		1.4. Keg. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf			1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan ekonomi		Pelatihan dan sosialisasi pengembangan ekonomi	92	8,820,000,000		8,970,000,000	90	8,970,000,000	88	8,970,000,000	87	8,970,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		2.1. Keg. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar	kreatif yang dilaksanakan	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	kreatif berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal												
		2.2. Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.3. Keg. Pelatihan dasar sumber daya manusia kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah peserta			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.4. Keg. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah peserta			20	100,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.5. Keg. Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif	Jumlah fasilitas event/festival			26	6,920,000,000	25	6,920,000,000	24	6,920,000,000	22	6,920,000,000	21	6,920,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2.6. Keg. Fasilitasi pengembangan kompetensi	Jumlah fasilitas terhadap			6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		sumber daya manusia ekonomi kreatif	komunitas/pelaku ekonomi kreatif														
		2.7. Keg. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2.8. Keg. Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah peserta			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
	Penyediaan sarana dan prasarana	**1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan** (Keg. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)	Sarana dan prasarana olahraga		Pengadaan fasilitas pendukung	2	-	2	-	2	-	2	-	1	-	APBD	DISPORA
		1.1. Sub Keg. Pembangunan dan perawatan sarana prasarana olahraga															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Daya saing bisnis	Kemudahan perizinan dan berusaha	**1. Program pelayanan penanaman modal** **(Keg. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)**	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Sistem Informasi One Map One Data (SI OMOD)	87,5	1.100.000.000	87,75	1.100.000.000	88	1.100.000.000	88,5	1.100.000.000	88,75	1.100.000.000	APBD	DPMPTSP
		1.1. Sub Keg. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)	Jumlah izin yang dilayani	-		1130	300.000.000	1135	300.000.000	1140	300.000.000	1145	300.000.000	1150	300.000.000	APBD	DPMPTSP
		1.2. Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah fasilitas/insentif	-		30	300.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	45	300.000.000	50	300.000.000	APBD	DPMPTSP
	Pemanfaatan TI dalam proses pemasaran	**1. Program promosi penanaman modal** **(Keg. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)**	Jumlah Investor	-	Promosi terintegrasi	7	700.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	APBD	DPMPTSP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1.1. Sub Keg. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi digital	-		3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	APBD	DPMPTSP
	Promosi dan pameran lokal nasional dan internasional	**1. Program promosi penanaman modal** **(Keg. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)**	Jumlah Investor	-	Digital Promotion (Digi-Pro)	7	700.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	APBD	DPMPTSP
		1.1. Sub Keg. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota)	Jumlah promosi	-		4	500.000.000	4	750000000	4	750000000	4	750000000	4	750000000	APBD	DPMPTSP
Wajah kota	Membangun website dan sosial media	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	-	Penambahan Sosialisasi Aduan Publik SP4N Lapor !, Meningkatkan diskusi Publik, memberikan reward dan punishment bagi pegelola aduan publik	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	APBD	DISKOMINFO
		1.1. Sub Keg. Monitoring opini dan aspirasi publik															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	Membangun jaringan komunikasi dengan pimpinan, media dan masyarakat	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah Rapat Koordinasi	-	Penambahan kegiatan gathering untuk meningkatkan citra positif pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas anggota KIM	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	APBD	DISKOMINFO
		1.1. Sub Keg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas															
	Melaksanakan gathering bersama jurnalis dan KIM	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah Rapat Koordinasi	-	Penambahan Kegiatan Gathering untuk meningkatkan citra positif pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas anggota KIM												
		1.1. Sub Keg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas				6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	APBD	DISKOMINFO

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota) *1.1. Sub Keg. Pelayanan informasi publik*	Jumlah PPID yang dibina	-	Aplikasi PPID	58	300.000.000	58	500.000.000	58	300.000.000	58	500.000.000	58	500.000.000	APBD	DISKOMINFO
	Meningkatkan penyelesaian masalah publik, meningkatnya partisipasi publik	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota) *1.1. Sub Keg. Manajemen komunikasi krisis*	Jumlah Rapat Koordinasi	-	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara OPD dan stakeholder lainnya (pemilik Kepentingan), mempercepat penyusunan perbub dan SOP manajemen komunikasi krisis	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	APBD	DISKOMINFO

5.3. *Smart Economy*

Tabel 5.3 Peta Jalan *Smart Economy*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
Ekosistem industri	Membangun industri primer dan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	**1. Program pengelolaan perikanan tangkap** (Keg. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi perikanan tangkap	Persentase tahunan dari anggaran kabupaten yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	Penggunaan teknologi dalam kegiatan perikanan tangkap	1	50,000,000	1	100,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	4	50,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Membangun industri pengolahan dari hasil bahan mentah	**2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian** (Keg. Pembangunan prasarana pertanian)	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun (Unit)		Penggunaan teknologi dalam kegiatan pertanian	1	0	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal	**1. Program pengelolaan perikanan budidaya** (Keg. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)	Produksi perikanan budidaya (Jumlah lokasi)		Pengembangan kegiatan monitoring kualitas produk perikanan dan pertanian	0	0	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Keg. Pengelolaan sumber daya genitik (sdg) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota)	Jumlah pengembangan SDG hewan dan tumbuhan	Persentase tahunan dari anggaran kabupaten yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian		1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		2.1. Sub Keg. Menjamin kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	Jumlah pengembangan SDG hewan dan tumbuhan (Komoditi)		Pengembangan kegiatan monitoring kualitas produk perikanan dan pertanian												
		2.2. Sub Keg. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah fasilitas pemanfaatan SDG hewan/tanaman (Fasilitas)			1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
	Meningkatkan produktifitas melalui pemberdayaan dan penguatan kualitas koperasi dan UMKM	**1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)** (Keg. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,	Persentase UMKM yang telah difasilitasi (%)		Mengembangkan konsep pemberdayaan dalam pengembangan UMKM	1,8%		1,8%		1,8%		1,8%		1,8%		APBD	Diskopukm

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan)															
		1.1 Sub Kegiatan, fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha (Unit)		Aplikasi perizinan usaha dan Klinik K-UMKM	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	APBD	Diskopukm
		1.2 Sub Kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Pembentukan dan fasilitasi sarana prasarana klinik K-UMKM (Unit)			1 Klinik	75,000,000	2 Klinik	200,000,000	2 Klinik	200,000,000	3 Klinik	250,000,000	5 Klinik	325,004,943	APBD	Diskopukm
Kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	**1. Program penyuluhan pertanian** (Keg. Pelaksanaan penyuluhan pertanian)	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	Mengencarkan penyuluhan pertanian melalui kegiatan literasi	4,77 %		9,76 %		14,63 %		19,62 %		24,60 %		APBD	Dinas Perkebunan
		1.1 Sub Keg. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	1. Jumlah kelompok tani yang dibina			45 Kelompok	350,000,000	47 Kelompok	400,000,000	46 Kelompok	400,000,000	47 Kelompok	400,000,000	47 Kelompok	400,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
			2. Jumlah pekebun milenial yang dibina		Mengencarkan penyuluhan pertanian melalui	10 orang		20 Orang		30 Orang		40 Orang		50 Orang		APBD	

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
					kegiatan literasi												
	Melakukan kerjasama antar desa	**1. Program peningkatan kerjasama desa** (Keg. Fasilitasi kerjasama antar desa) *1.1 Sub Keg. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan*	Jumlah Kawasan yang difasilitasi	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Mengembangkan program inovasi desa dengan skema kemitraan	2 Kawasan (16 Desa)	100,000,000	2 Kawasan (16 Desa)	400,000,000	1 Kawasan (8 Desa)	100,000,000	0	0	0	0	APBD	Bappeda, Disperkim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koprasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan
		2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat (Keg. Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan) *2.1 Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat*	Jumlah peserta pelatihaan kewirausahan pedesaam			25 orang	170,000,000	40 orang	170,000,000	40 orang	100,000,000	40 orang	100,000,000	40 orang	100,000,000	APBD	DPMD

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		dana pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa															
	Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan	**1. Program penyuluhan pertanian** (Keg.Pelaksanaan penyuluhan)	Persentase kenaikan kelas kelompok tani		Optimalisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan kelompok masyarakat yang secara partisipatif dan efektif dalam mengelola sumberdaya lokal	4,77 %		9,76 %		14,63 %		19,62 %		24,60 %	600,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		1.1. Sub Keg. Pembentukan dan penyelengaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah pekebun peserta pelatihan budidaya, panen/pasca panen			0	0	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	20 Orang	50,000,000	APBD	
		2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Keg. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)	Jumlah mesin pengolahan		Penggunan teknologi dalam pemasaran hasil perikanan	0	0	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Jumlah unit frezeer			50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	APBD	
	Peningkatan kemitraan dengan swasta	**1. Program perizinan usaha pertanian**	Jumlah pemegang tanda daftar budidaya dan izin usaha		Inovasi BangMus Kebulan	211 Pelaku	400,000,000	203 Pelaku	250,000,000	220 Pelaku	300,000,000	210 Pelaku	250,000,000	203 Pelaku	250,000,000	APBD	Dinas Perkebunan

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		(Keg. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota)	perkebunan yang dibina														
		1.1 Sub Keg. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB		Inovasi BangMus Kebulan	200 Surat	400,000,000	200 Surat	250,000,000	200 Surat	300,000,000	200 Surat	250,000,000	200 Surat	250,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
			2. Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)			11 Surat		3 Surat		20 Surat		10 Surat		3 Surat		APBD	
		2. Program penyuluhan pertanian (Keg. pelaksanaan penyuluhan pertanian)	Persentase kenaikan kelas kelompok tani		Kegiatan penyuluhan / literasi digital yang dikemas secara menarik dengan bantuan teknologi	4,77 %		9,76 %		14,63 %		19,62 %		24,60 %	600,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		2.1 Sub Keg. Pembentukan badan usaha milik petani	Jumlah lembaga pekebun yang dibentuk/bermitra			2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	1	150,000,000	APBD	Dinas Perkebunan

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		3. Program administrasi pemerintahan desa (Keg. Pembinaan dan pengawasan administrasi desa)	Jumlah unit usaha Bumdesa		Optimalisasi kegiatan Bumdes melalui penyuluhan atau peningkatan literasi masyarakat	13	100,000,000	15	300,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000	14	150,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** *(Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal)*	1.Kecukupan Konsumsi Energi 2.Kecukupan Konsumsi Protein		Getuk Paman Karman (Gerakan untuk Pemanfaatan Pekarangan yang Aman)	30	600,000,000	30	600,000,000	30	600,000,000	30	600,000,000	30	600,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

5.4. *Smart Living*

Tabel 5.4 Peta Jalan *Smart Living*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
Harmonisasi tata ruang	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW	**1. Program penyelenggaraan penataan ruang** (Keg. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota)	Persentase ketaatan terhadap RTRW	1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar 2. Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	Melakukan monitoring evaluasi berkala dan terukur	65	-	70	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		1.1 Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis			2	485.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh (Keg. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota)	Presentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Penggunaan aplikasi RTLH	7.24	10,340,000,000	7.2	10,340,000,000	7	10,340,000,000	6.7	10,340,000,000	6	10,340,000,000	APBD	DPKP (Dinas Perkim)
			Jumlah rumah yang direnovasi			517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	APBD	DPKP (Dinas Perkim)

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		2.1 Sub. Keg. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direnovasi			517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	APBD	DPKP (Dinas Perkim)
	Menambah kawasan yang dijadikan ruang kegiatan publik	**1. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)** (Keg. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar 2. Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	Optimalisasi program Kahati dengan pengembangan taman literasi	30	2,045,000,000	25	810,000,000	10	810,000,000	25	820,000,000	15	1,325,000,000	APBD	DLHK
		1.1 Sub Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola														
		2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Keg. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum			Penggunaan teknologi dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1,484	325,698,000	1,484	325,698,000	1,849	325,698,000	2,214	325,698,000	2,579	325,698,000	APBD	Satpol PP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)															
		2.1. Sub. Keg. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum														
		2.2. Sub. Keg. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Persentase penindakan gangguan trantibum		Penguatan fungsi dan peningkatan citra Satpol PP	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	APBD	Satpol PP
		2.3 Sub. Keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah regu perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum			25	75,527,500	25	75,527,500	25	75,527,500	25	75,527,500	25	75,527,500	APBD	Satpol PP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		2.4. Sub. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum/Pengadaan dan perawatan CCTV	Jumlah CCTV		Penggunaan teknologi dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	30	600,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	APBN	Satpol PP dan Diskominfo
		2.5. Sub. Keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kesepakatan Kerjasama			5	23,483,300	5	23,483,300	5	23,483,300	5	23,483,300	5	23,483,300	APBD	Satpol PP
		3. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Pengembangan konsep *collaborative justice system*	150	120,000,000	125	120,000,000	100	120,000,000	75	120,000,000	50	120,000,000	APBD	Satpol PP
		3.1. Sub. Keg. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		3.2. Sub. Keg. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti		Pengembangan konsep *collaborative justice system*	150	202,522,400	125	202,522,400	100	202,522,400	75	202,522,400	50	202,522,400	APBD	Satpol PP
Kesehatan	Perbaikan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan	**1. Program pemenuhan upaya kesehatan** (Keg. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi)	Jumlah aplikasi yang dibangun	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Optimalisasi promosi fasilitas kesehatan menggunakan berbagai platform	1		1		1		1		1		BLUD	RSUD AM Parikesit
		1.1. Pembangunan aplikasi E-Medical Record				1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	BLUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
						1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	BLUD	RSUD Dayaku Raja
Transportasi	Penambahan dan perbaikan insfrastruktur transportasi	**1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan**	Jumlah LPJU yang dipasang	Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan	250	1,320,000,000.00	250	700,000,000.00	250	750,000,000.00	250	750,000,000.00	250	750,000,000.00	APBD	DISHUB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		1.1.Sub. Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota			prinsip efektif dan efisien												
		1.2.Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen	Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola komuter	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan prinsip efektif dan efisien	1	275,000,000.00		0		0		0		0	APBD	DISHUB
		1.3. Sub. Kegiatan Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang/perbaiki /pelihara	Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom		200	775,835,000.00	90	400,000,000.00	90	400,000,000.00	90	400,000,000.00	90	400,000,000.00	APBD	DISHUB
		1.4. Sub. Kegiatan Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek	Jumlah dokumen	Persentase jalur transportasi umum yang		1	350,000,000.00		0		0		0		0	APBD	DISHUB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		dilengkapi dengan sistem langsung (real time) yang dapat diakses publik													
		1.5. Sub. Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah ijin penyelenggaraan parkir	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersedian parkir langsung (real-time)	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan prinsip efektif dan efisien	1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	APBD	DISHUB
		1.6. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah lokasi kegiatan pengawasan	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersedian parkir langsung (*real-time*)		5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	APBD	DISHUB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		1.7. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dikembangkan	Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi		2	300,000,000.00	2	350,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	APBD	DISHUB
		2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dokumen	Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	Pengembangan berkelanjutan dalam pola trayek dan perhubungan laut	1	500,000,000.00		0		0		0		0	APBD	DISHUB
		2.1. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau															
		2.2. Sub. Kegiatan Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan Lokal yang dibangun			1	430,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	APBD	DISHUB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		2.3. Sub. Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dipelihara		Pengembangan berkelanjutan dalam pola trayek dan perhubungan laut	1	200,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	APBD	DISHUB
		2.4. Sub. Kegiatan Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang yang dibangun			1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	APBD	DISHUB
		2.5. Sub. Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan Sungai dan Danau yang dipelihara			2	200,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	APBD	DISHUB

5.5. *Smart Society*

Tabel 5.5 Peta Jalan *Smart Society*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Interaksi masyarakat	Membentuk komunitas yang produktif dan berkualitas dalam pengembangan SDM	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah fasilitasi KIM	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditunjukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Program literasi digital masyarakat	70	300,000,000	80	310,000,000	90	320,000,000	100	330,000,000	110	340,000,000	APBD	Diskominfo, DP2KB, DPMD
		1.1. Sub Keg. Kemitraan dengan pemangku kepentingan (Fasilitasi Pembentukan KIM desa kelurahan kecamatan, bimtek, lomba KIM)															
		2. Program peningkatan kerjasama desa (Keg. Fasilitasi kerjasama antar desa)	Jumlah kawasan yang difasilitasi		Mengembangkan program inovasi desa dengan skema kemitraan	2 Kawasan (16 Desa)	100,000,000	2 Kawasan (16 Desa)	400,000,000	1 Kawasan (8 Desa)	100,000,000	0	0	0	0	APBD	DPMD, Bappeda, Disperkim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koprasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan
		2.1. Sub Keg. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan															
		3. Program pemberdayaan dan	Jumlah kerjasama			6	50.000.000	6	350.000.000	4	350.000.000	4	150.000.000	4	100.000.000	APBD	DP2KB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		peningkatan keluarga sejahtera (KS)	dengan mitra dan ormas														
		3.1. Sub. Keg. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)			Pengeolaan kampung KB												
		3.2. Sub Keg. Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)	Jumlah kader yang dilatih			400	400.000.000	433	100.000.000	429	300.000.000	429	200.000.000	429	150.000.000	APBD	DP2KB dan Diskominfo
		3.3. Sub. Keg. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi			300	300.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	50.000.000	APBD	DP2KB dan Diskominfo

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		3.4. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah lomba-lomba			1	100.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	APBD	
		4. Program pembinaan keluarga berencana (KB) *4.1. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten / kota*	Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan		Aplikasi Sirika	40	225,000,000	40	225,000,000	40	225,000,000	40	225,000,000	40	225,000,000	APBN	DP2KB
Ekosistem belajar/pendidikan	Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai kearifan lokal	**1. Program pembinaan perpustakaan** *1.1. Sub. Keg. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat*	Jumlah frekuensi sosialisasi pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Perpustakaan Digital (IKUKAR)	2kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	APBD	Diarpus dan Diskominfo

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1.2. Sub. Keg. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	1. Jumlah layanan perpustakaan elektronik dan perpustakaan digital	Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Perpustakaan Digital (IKUKAR)	2 Aplikasi	110,000,000	2 Aplikasi	110,000,000	2 Aplikasi	110,000,000	2 Aplikasi	25,000,000	2 Aplikasi	25,000,000	APBD	Diarpus dan Diskominfo
			2. Jumlah koleksi buku digital			10000 eksemplar	1,000,000,000	10000 eksemplar	1,000,000,000	10000 eksemplar	1,000,000,000	500 eksemplar	50,000,000	500 eksemplar	50,000,000	APBD	Diarpus dan Diskominfo
	Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai kearifan lokal	*1.3 Sub. Keg. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pemeliharaan Sarana Perpustakaan Umum Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan Sarana Perpustakaan Umum Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kubuku	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	APBD	Diarpus dan Diskominfo
Ketahanan masyarakat	Meningkatkan peran RT dalam mendukung program kegiatan ketertiban dan ketahanan masyarakat	**1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat** (Keg. Pemberdayaan lembaga kemsyarakatan)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketahanan masyarakat	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pengembangan masyarakat tangguh bencana	20 orang	75,000,000	38 orang	100,000,000	40 orang	110,000,000	46 orang	120,000,000	49 orang	120,000,000	APBD	DPMD, Kesbangpol, DP3A, Dinas Sosial, DP2KB
		1.1. Sub. Keg. Fasilitasi penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		dan perlindungan masy. desa															
		2. Program perlindungan dan penyelamatan arsip (Keg. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota)	Jumlah dokumen arsip			500 berkas	50,000,000	500 berkas	75,000,000	500 berkas	75,000,000	500 berkas	75,000,000	500 berkas	75,000,000	APBD	DIARPUS
		2.1. Sub. Keg. Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana															
	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan ekonomi,sosial,budaya,agama dan ormas	**1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya** (Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pengembangan masyarakat tangguh bencana	5 dokumen	730,000,000	5 dokumen	730,000,000	5 dokumen	610,000,000	5 dokumen	620,000,000	5 dokumen	630,000,000	APBD	Kesbangpol
		1.1. Sub. Keg. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan/penyuluhan			600 orang	505,000,000	600 orang	505,000,000	600 orang	500,000,000	600 orang	500,000,000	600 orang	500,000,000	APBD	Kesbangpol

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		kepercayaan di daerah															
		1.2. Sub. Keg. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud			22 laporan	225,000,000	22 laporan	225,000,000	18 laporan	110,000,000	18 laporan	120,000,000	18 laporan	130,000,000	APBD	Kesbangpol

5.6. Smart Environment

Tabel 5.6 Peta Jalan *Smart Environment*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Proteksi lingkungan	Mengatur regulasi lingkungan hidup	**1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Penurunan emisi GRK (CO2 EQ)	Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Inovasi Smart Bio Village berupa pengelolaan sampah 3R, konservasi air, energi air, penghijauan, dan keterlibatan peran masyarakat	19	1,250,000,000	20	1,390,000,000	20	1,487,000,000	20	1,494,000,000	20	1,506,000,000	APBD	DLHK
	Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	*1.1. Keg. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota*	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup			4	1,250,000,000	4	1,390,000,000	4	1,487,000,000	4	1,494,000,000	4	1,506,000,000	APBD	DLHK
		1.1.1. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup			2	400,000,000	2	314,000,000	2	316,000,000	2	320,000,000	2	330,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			dilaksanakan terhadap media tanah, air udara dan laut														
		1.1.2. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		Perencanaan dan pengadaan uji laboratorium terhadap kualitas air dan udara	1	350,000,000	1	330,000,000	1	335,000,000	1	338,000,000	1	340,000,000	APBD	DLHK
		1.1.3. Sub Keg. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah contoh/sampel/parameter uji yang terlayani, jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter			1	500,000,000	1	746,000,000	1	836,000,000	1	836,000,000	1	836,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan														
	Meningkatkan peran serta swasta dalam mengelola lahan pasca tambang	**1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi		Penanaman pohon oleh seluruh lapisan masyarakat guna kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem	200,000	1,000,000,000	200,000	80,000,000	200,000	60,000,000	200,000	65,000,000	200,000	70,000,000	APBD	DLHK
		1.1. Keg. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			1	1,000,000,000	1	80,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1..1.1. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi			1	1,000,000,000	1	80,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	APBD	DLHK
		2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP perangkat daerah		Pengembangan system pelayanan terpadu	59	30,000,000	61		62		64		65		APBD	DLHK
		2.1. Keg. Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah														
		2.1.1. Sub Keg. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah dan			1	30,000,000									APBD	DLHK dan DISKOMINFO

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			pengembangan aplikasi web GIS														
	Meningkatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesadaran kelestarian alam	**1. Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan		Inovasi berupa Pengadaan pelatihan rutin bagi penyuluh lingkungan	0	0	35	575,000,000	35	575,000,000	35	575,000,000	35	725,000,000	APBD	DLHK
		1.1. Keg. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di satu kabupaten/kota			0	0	35	575,000,000	35	575,000,000	35	575,000,000	35	725,000,000	APBD	DLHK
		1.1.1. Sub Keg. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga/masyarakat/institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan			0	0	2	80,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			kompetensi terkait PPLH														
		1.1.2. Sub Keg. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup		Inovasi pengadaan media online dalam kampanye lingkungan	0	0	30	290,000,000	30	295,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	APBD	DLHK
		1.1.3. Sub Keg. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat			0	0	350	205,000,000	350	205,000,000	325	200,000,000	325	200,000,000	APBD	DLHK
	Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan	**1. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat penghargaan desa ramah lingkungan kategori utama dan jumlah		Pengadaan awards bagi pengiat lingkungan	1. - 2. 109	150,000,000	1. 5 2. 109	100,000,000	1. 5 2. 109	100,000,000	1. 5 2. 109	150,000,000	1. 6 2. 109	150,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			penghargaan yang diberikan														
		1.1. Keg. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis penghargaan yang diberikan kepada masyarakat/dunia/usaha/lembaga lainnya			2	150,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	APBD	DLHK
		1.1.1. Sub Keg. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH			124	150,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	124	150,000,000	124	150,000,000	APBD	DLHK
Pengelolaan	Mengembangkan sistem tata kelola	**1. Program pengelolaan persampahan**		1. Persentase pusat	Inovasi pengadaan sistem												

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
sampah dan limbah	untuk limbah dan sampah	*1.1. Keg. Pengelolaan sampah*		pembuangan limbah (kontainer) yang dilengkapi dengan telemetering 2. Persentase jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota 3. Persentase tempat sampah umum yang merupakan tempat sampah yang difungsikan dengan sensor	pengelolaan sampah terpadu dengan mengedepankan *reuse, reduce and recycle*												
		1.1.1. Sub Keg. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,.pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota			59.786,73	750.000.000	60.329,41	1.950.000.000	60.865,60	1.950.000.000	60.529,99	1.950.000.000	61.890,93	2.950.000.000	APBD	DLHK
	Menggalakan program 3R yaitu reduce, reuse, recycle	*1.1.2. Sub keg. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali			1	750.000.000	1	740.000.000	1	380.000.000	1	720.000.000	1	710.000.000	APBD	DLHK
	Mengembangkan sistem tata kelola	**1. Program pengendalian bahan berbahaya dan**	Jumlah dokumen kajian		Inovasi dengan membangun	-	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	untuk limbah dan sampah	**beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	timbunan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara		sistem pelayanan pengolahan limbah berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyaraakat dan memudahkan pengelolaan sampah sampai ke tingkat lokal.												
		1. Keg. Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pelaku usaha														
		1.1. Sub Keg. Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik														

BAB V
PENUTUP

Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat menjadi alat bantu kepada seluruh *stakeholder* terkait dalam implementasi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kawasan strategis Ibukota Negara Baru. Buku Masterplan *Smart City* yang berisikan gambaran umum, arah pembangunan *Smart City* daerah, strategi pembangunan *Smart City* daerah, rencana aksi *Smart City* daerah, dan peta jalan pembangunan *Smart City* Daerah. Masterplan ini diselaraskan dengan dokumen-dokumen pembangunan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 , dan SNI 37122:2019.

Pelaksanaan program kerja pada buku ini masih sangat dimungkinkan untuk terjadi perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dalam implementasinya, dibutuhkan partisipasi, sinergitas, dan kerjasama seluruh stakeholder dalam rangka mensukseskan, mengawasi dan memberikan kontribusi dalam mencapai Visi Misi Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara.

REFERENSI

Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82.*

Dameri, R. P. (2013). Searching for Smart City Definition: A Comprehensive Proposal. *International Journal of Computers & Technology, 11(5), 2544–2551.*

IBM. (2010). *Smarter Thinking for A Smarter Planet.*

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2021). *Buku Panudan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City.* Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Piro, G., Cianci, I., Grieco, L. A., Boggia, G., dan Camarda, P. (2014). Information Centric Services in Smart Cities. *The Journal of Systems and Software*.

Rachmawati, R. (2014). *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachmawati, R.; Sari, A.D., Sukawan, H.A.R., Widhyastana, I.M.A., Ghiffari, R.A. (2021a). The Use of ICT-Based Applications to Support the Implementation of Smart Cities during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Infrastructures*. 6, 119. https://doi.org/10.3390/ infrastructures6090119

Rachmawati, R., Choirunnisa, U.; Pambagyo, Z.A., Syarafina, Y.A., Ghiffari, R.A. (2021b). Work from Home and the Use of ICT during the COVID-19 Pandemic in Indonesia and Its Impact on Cities in the Future. *Sustainability*. 13, 6760.https://doi.org/10.3390/ su13126760

Su, K., Li, J., & Fu, H. (2011). Smart City and The Applications. *In Electronics, Communications and Control (ICECC) International Conference on (pp. 1028–1031).*

Yeh, H. (2017). The Effects of Successful ICT-Based Smart City Services: From Citizens' Perspectives. *Government Information Quarterly*. 34(3), 556– 565. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.001

BUKU III

EXECUTIVE SUMMARY

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KOMINFO

G-MULTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Buku III Ringkasan Eksekutif atau *Executive Summary* merupakan dokumen Masterplan *Smart City* Daerah versi ringkas yang diperuntukkan bagi kalangan tertentu, seperti Kepala Daerah dan kalangan eksekutif lainnya yang membutuhkan penjelasan esensial yang merupakan pokok-pokok utama dari dokumen masterplan. Penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021 Gerakan Menuju *Smart City* (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021). Buku III disusun atas latar belakang, visi *Smart City* Daerah, strategi pembangunan *Smart City*, dan peta jalan *Smart City* Daerah. Penyusunan Buku III: *Executive Summary* disarikan dari Dokumen Masterplan *Smart City* yang diharapkan dapat memberikan gambaran ringkas sebagai acuan atau panduan dalam implementasi *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Kawasan Ibu Kota Negara sehingga mampu mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Tim Penyusun Masterplan *Smart City*
Kabupaten Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I LATAR BELAKANG 5

BAB II VISI *SMART CITY* DAERAH 7

BAB III STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY* 12

3.1. *Smart Governance* 12

3.2. *Smart Branding* 13

3.3. *Smart Economy* 15

3.4. *Smart Living* 16

3.5. *Smart Society* 17

3.6. *Smart Environment* 19

BAB IV PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH 21

4.1. *Smart Governance* 21

4.2. *Smart Branding* 23

4.3. *Smart Economy* 33

4.4. *Smart Living* 39

4.5. *Smart Society* 46

4.6. *Smart Environment* 51

BAB V PENUTUP 59

REFERENSI 60

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Strategi Dimensi *Smart Governance* 12

Tabel 3.2 Strategi Dimensi *Smart Branding* 14

Tabel 3.3 Strategi Dimensi *Smart Economy* 15

Tabel 3.4 Strategi Dimensi *Smart Living* 17

Tabel 3.5 Strategi Dimensi *Smart Society* 18

Tabel 3.6 Strategi Dimensi *Smart Environment* 19

Tabel 4.1 Peta Jalan *Smart Governance* 21

Tabel 4.2 Peta Jalan *Smart Branding* 23

Tabel 4.3 Peta Jalan *Smart Economy* 33

Tabel 4.4 Peta Jalan *Smart Living* 39

Tabel 4.5 Peta Jalan *Smart Society* 46

Tabel 4.6 Peta Jalan *Smart Environment* 51

BAB I
LATAR BELAKANG

Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis terletak antara 115º26' Bujur Timur dan 117º36' Bujur Timur serta diantara 1º28' Lintang Utara dan 1º08' Lintang Selatan. Secara posisi, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) memiliki kondisi topografi yang beraneka ragam dari dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, dan lain sebagainya. Keragaman topografi di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu keuntungan sendiri terutama pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan pariwisata. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai potensi sumber daya pertambangan dan penggalian. Optimalisasi potensi yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara diwujudkan dalam berbagai program kegiatan pembangunan dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Kutai Negara yaitu "**Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"**.

Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya sebagai akselerator dalam mencapai visi misi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan konsep *Smart City*. *Smart* dalam *Smart City* merupakan konsep cerdas yang diimplementasikan pada suatu wilayah geografi yang menerapkan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat melalui partisipasi untuk pembangunan dan kesejahteraan yang diatur dalam suatu kebijakan dan peraturan. Daerah pintar (*Smart Region*) dapat berbentuk Kota Pintar (*Smart City*), Kabupaten Pintar (*Smart Regency*), atau Provinsi Pintar (*Smart Province). Smart City* didefinisikan sebagai salah satu konsep mengedepankan inovasi, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan suatu wilayah menggunakan bantuan teknologi (Yeh, 2017). Berbagai kondisi eksternal yang saat ini berkembang seperti politik, legal, sosial, ekonomi, lingkungan dan transformasi digital telah mengarahkan pada pengelolaan daerah dengan konsep kota atau kabupaten cerdas (*Smart City*).

Gerakan 100 *Smart City* di Indonesia mengembangkan banyak solusi inovatif melalui aplikasi berbasis TIK yang dapat membantu orang menjalankan kehidupan sosial dan kemudahan mengakses layanan publik (Rachmawati et al, 2021a). Menurut Dameri (2013), *Smart City* adalah wilayah geografis yang menggunakan teknologi ICT, logistik, produksi energi, dan sebagainya yang saling bersinergi atau bekerja sama untuk menciptakan manfaat bagi warga dalam hal kesejahteraan, inklusi dan

partisipasi, kualitas lingkungan, serta kecerdasan perkembangan yang didasarkan oleh aturan dan kebijakan pemerintah kota. Hal ini diperkuat oleh Caragliu dkk (2011), IBM, (2010), Su dkk (2011), dan Piro (2014) yang menyatakan bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam konsep *Smart City.* Adanya perkembangnya TIK dan peran ruang virtual menjadikan ruang absolut (berkaitan dengan tempat, konsentrasi, dan distribusi) menjadi tidak harus ditekankan lagi keberadaanya (Rachmawati, 2014). Teknologi informasi dan komunikasi terutama internet memungkinkan untuk dapat dimanfaatkan dan dikembangkan lebih jauh dimasa depan, seperti menyediakan aplikasi dengan layanan terintegrasi yang online, menyediakan akses jaringan yang tersedia di seluruh Indonesia, meningkatkan pola pikir dan pola kerja digital, menyediakan TIK yang murah dan ramah pengguna serta meningkatkan keamanan data (Rachmawati et al, 2021). Berbagai program kerja Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dioptimalkan dengan konsep *Smart City* diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu calon lokasi Ibu Kota Negara (IKN).

BAB II
VISI *SMART CITY* DAERAH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, di dalam visi termuat gambaran mengenai arah pembangunan serta kondisi pembangunan di masa depan yang hendak dicapai dalam masa jabatan. Penyusunan visi mempertimbangkan berbagai hal mulai dari kondisi, potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kutai kartanegara, maka dari itu visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 berupa:

MEWUJUDKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN KUTAI KARTANEGARA YANG CERDAS, MAJU DAN INOVATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN BARU IBUKOTA NEGARA

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

Cerdas : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pembangunan yang dilakukan menggunakan cara yang inovatif, efektif, dan efisien sebagai solusi penyelesaian permasalahan. Pembangunan tidak semerta-merta hanya diartikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, melainkan pembentukan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia

Maju : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

Inovatif : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat membuat inovasi dalam setiap kinerja pemerintahan baik daerah hingga tatanan lokal dengan menyertakan partisipasi masyarakat secara langsung

Berbasis Kearifan Lokal : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat memanfaatkan kekayaan dan kearifan lokal baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia hingga kebudayaan dan adat istiadat yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan dan bertujuan untuk menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Ibukota Negara : Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian daerahnya diarahkan sebagai lokasi pengembangan Ibukota Negara menjadikan pusat pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan cakupan Nasional yang berbasis pada integrasi, efektifitas, efisiensi dan kemajuan teknologi

Berdasarkan Visi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya dapat diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi *Smart City*. Penekanan Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara ditekankan pada peningkatan pelayanan, penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

Misi 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif dan efisien melalui pembangunan fisik, sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
Misi 2	Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pelayanan publik dan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan Pengembangan Ibu Kota Negara
Misi 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan Pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang profesional dan transparan
Misi 4	Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan
Misi 5	Mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat

Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan sasaran *Smart City* Daerah. Sasaran *Smart City* Daerah diuraikan dalam bentuk ukuran capaian keberhasilan yang disusun dalam sasaran *Smart City* daerah. Sasaran *Smart City* Daerah merupakan rangkaian indikator keberhasilan yang menjadi alat ukur dalam evaluasi pelaksanaan *Smart City*.

Tabel 2.1 Dimensi, Sub-Dimensi, Sasaran dan dasar Pemikiran

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART GOVERNANCE	LAYANAN PUBLIK	1. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	1. Indeks persepsi kualitas pelayanan publik 2. Nilai SAKIP
	BIROKRASI	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien 3. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Indeks persepsi anti korupsi
	PERANCANGAN KEBIJAKAN	1. Kebijakan publik yang efisien	2. Indeks persepsi kualitas pelayanan publik
SMART BRANDING	PARIWISATA	1. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah 2. Meningkatnya daya saing pariwisata daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi sektor pariwisata
	DAYA SAING BISNIS	1. Meningkatnya usaha ekonomi koperasi dan UKM 2. Platform pemasaran bisnis daerah (*business branding*) yang terintegrasi	1. Jumlah UKM 2. Jumlah kunjungan wisatawan
	WAJAH (TAMPILAN) KOTA	1. Menurunnya kawasan kumuh	1. Persentase rumah layak huni

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART ECONOMY	EKOSISTEM INDUSTRI	1. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Pedesaan 2. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata, perindustrian, pertanian, peternakan,perkebunan perikanan, kehutanan terhadap ekonomi daerah	1. Laju pertumbuhan ekonomi 2. Laju pertumbuhan ekonomi kreatif
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	1. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan 2. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda 3. Meningkatnya daya saing tenaga kerja	1. Indeks pembangunan gender 2. Indikator indeks gini 3. Indikator tingkat pengangguran terbuka 4. Indeks desa membangun
	EKOSISTEM TRANSAKSI KEUANGAN	1. Meningkatnya realisasi investasi 2. Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah	1. Indeks persepsi anti korupsi
SMART LIVING	HARMONISASI TATA RUANG	1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan penataan ruang	1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang
	KESEHATAN	1. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat	1. Indeks kesehatan
	TRANSPORTASI	1. Meningkatnya aksesibilitas wilayah 2. Meningkatnya konektivitas antar kawasan	1. Indeks aksesibilitas wilayah

DIMENSI	SUB-DIMENSI	SASARAN	DASAR PEMIKIRAN
SMART SOCIETY	INTERAKSI MASYARAKAT	1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat	1. Indeks pembangunan kebudayaan
	EKOSISTEM BELAJAR/PENDIDIKAN	1. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat	1. Indeks pendidikan dan indeks pembangunan kebudayaan
	KEAMANAN MASYARAKAT	1. Sistem keamanan masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi	1. Angka kriminalitas
SMART ENVIRONMENT	PROTEKSI LINGKUNGAN	1. Meningkatnya ketangguhan menghadapi bencana	1. Indeks risiko bencana
	PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH	1. Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	1. Indeks kualitas lingkungan hidup
	TATA KELOLA ENERGI	1. Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air 2. Terpenuhinya kebutuhan energi daerah	1. Cakupan layanan air bersih

BAB III
STRATEGI PEMBANGUNAN *SMART CITY*

Strategi Pembangunan *Smart City* disusun berdasarkan hasil analisis strategi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara yang dianalisis berdasarkan hasil analisis kesenjangan (GAP), SWOT, dan TOWS. Strategi pembangunan *Smart City* digunakan sebagai salah satu langkah dalam mencapai Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dimana strategi yang ada disusun berdasarkan masing-masing dimensi yang kemudian dirinci menjadi masing-masing sub dimensi.

3.1. *Smart Governance*

Smart Governance merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan terintegrasi. Dimensi s*mart governance* masuk ke dalam misi *Smart City* yang pertama dan ketiga. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa layanan publik (*public services),* birokrasi *(bureaucracy),* dan perancangan kebijakan *(policy design)*. Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada pembangunan dan perwujudan tata kelola pemerintah khususnya mendukung pengembangan Ibu Kota Negara serta berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart governance* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.1 Strategi Dimensi *Smart Governance*

Sub Dimensi	Strategi
Public Services	● Optimalisasi Pengelolaan dan Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai *Baseline* Penanganan Kemiskinan. ● Pembangunan dan pengembangan layanan masyarakat berbasis teknologi dan digital. ● Meningkatkan aksesibilitas data dan informasi pembangunan terintegrasi. ● Meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya layanan kependudukan berbasis NIK. ● Menyediakan Aplikasi Survei kepuasan masyarakat.

Sub Dimensi	Strategi
	● Menyediakan Aplikasi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi masyarakat. ● Mengelola pelayanan pengaduan publik.
Bureaucracy	● Menyediakan tanda tangan elektronik. ● Menyediakan naskah dinas elektronik. ● Meningkatkan layanan keuangan berbasis digital. ● Meningkatkan pengelolaan arsip. ● Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis digital. ● Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa. ● Menyediakan sistem pengendalian internal pemerintahan berbasis digital.
Policy Design	● Menyusun peraturan sebagai dasar pelayanan publik berbasis elektronik. ● Menyediakan layanan verifikasi dan asistensi APBDes berbasis digital. ● Menyediakan layanan PBB Online. ● Menyediakan layanan pajak daerah *online.* ● Menyediakan layanan *call center* 112.

3.2. *Smart Branding*

Smart Branding merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu membangun *image*/citra Kabupaten Kutai Kartanegara agar membantu dalam proses promosi baik di bidang pariwisata maupun sosial, budaya dan ekonomi. Dimensi s*mart branding* masuk ke dalam misi *Smart City* yang ke-ketiga. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa pariwisata (*tourist),* daya saing bisnis *(Business Competitiveness),* dan wajah (tampilan) kota *(Face of The City)*. Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada pengembangan Ibu Kota Negara serta membangun citra daerah (dari segi ekonomi, sosial, politik, pariwisata dan budaya). Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart branding* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.2 Strategi Dimensi *Smart Branding*

Sub Dimensi	Strategi
Tourist	● Membuat branding wisata "Kukar Asia Wonder". ● Meningkatkan infrastruktur objek wisata yang dikelola. ● Pembinaan POKDARWIS. ● Promosi dan pameran wisata lokal. ● Membangun *website* dan sosial media berkaitan dengan potensi wisata. ● Menyelenggarakan *event* pariwisata. ● Menyediakan ruang kreatif masyarakat. ● Membina pelaku ekonomi kreatif yang berkaitan dengan pariwisata.
Business Competitiveness	● Peningkatan dan kemudahan pelayanan guna meningkatkan peluang potensi investasi dan pengembangan perekonomian daerah untuk mampu meningkatkan daya saing daerah melalui reformulasi desain investasi menuju hilirisasi SDA. ● Menyediakan ruang kreatif bagi masyarakat berkaitan dengan pengembangan ekonomi. ● Pembinaan pelaku ekonomi kreatif. ● Meningkatkan pelayanan berupa kemudahan dalam perizinan dan berusaha. ● Melakukan promosi dan pameran lokal nasional maupun internasional. ● Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam proses pemasaran.
Face of The City	● Membangun jaringan komunikasi dengan pimpinan, media dan masyarakat. ● Membangun *website* dan sosial media. ● Meningkatkan keterbukaan informasi publik. ● Meningkatkan upaya penyelesaian masalah publik baik berupa daerah kumuh dan sebagainya serta meningkatkan partisipasi masyarakat. ● Meningkatkan Ruang terbuka hijau di pusat kota.

Sub Dimensi	Strategi
	● Melaksanakan gathering bersama jurnalis dan KIM.

3.3. *Smart Economy*

Smart Economy dalam *Smart City* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem industri yang mampu beradaptasi sesuai tantangan di era informasi dengan cara yang cerdas dengan faktor lingkungan sehingga mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Dimensi *Smart Economy* Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam misi kedua *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang ingin dicapai antara lain yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan. Sasaran *Smart Economy* dirinci kedalam tiga elemen yaitu ekosistem industri (*industry*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi keuangan (*transaction*). Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart economy* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.3 Strategi Dimensi *Smart Economy*

Sub Dimensi	Strategi
Industry	● Membangun industri primer dan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. ● Membangun industri pengolahan dari hasil bahan mentah. ● Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal ● Meningkatkan Produktivitas melalui Pemberdayaan dan Penguatan Kualitas Koperasi dan UMKM. ● Optimalisasi ekosistem ekonomi digital di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui berbagai kegiatan e-commerce dan *marketplace*. ● Mengupayakan pemulihan ekosistem melalui optimalisasi fungsi Reservat, Restocking, dan Pengawasan. ● Optimalisasi Peran dan Fungsi POKMASWAS melalui penyediaan sarana pengawasan.

Sub Dimensi	Strategi
Welfare	● Menyusun Program dan Kegiatan yang terintegrasi untuk Mendukung Program Pengembangan 3 Danau. ● Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Angkatan Kerja. ● Melakukan kerjasama antar desa. ● Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan. ● Peningkatan kemitraan dengan swasta. ● Meningkatnya ketahanan pangan daerah. ● Optimalisasi pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). ● Memfasilitasi pencari kerja dengan penyedia lapangan kerja melalui berbagai kegiatan atau event terkait.
Transaction	● Meningkatkan kanal-kanal pembayaran non tunai. ● Meningkatkan peran serta pengusaha dalam menggunakan *e-commerce* dan *marketplace.* ● Mengkampanyekan penggunaan *e-money*. ● Meningkatkan infrastruktur pendukung transaksi digital. ● Mendorong pertumbuhan startup dan *fintech* di Kabupaten Kutai Kartanegara

3.4. *Smart Living*

Smart living merupakan salah satu dimensi *Smart City* yang digunakan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dengan tiga elemen utama yaitu kelayakan pola hidup (*harmony*), kelayakan kualitas kesehatan (*health*), dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di suatu daerah (*mobility*). *Smart living* bertujuan untuk menjamin pengelolaan sarana pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan untuk pemerataan pembangunan dan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Dimensi *smart living* tersirat dalam Misi ke-4, yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan. Adapun strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart living* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.4 Strategi Dimensi *Smart Living*

Sub Dimensi	Strategi
Harmony	● Optimalisasi Penerapan Pemanfaatan Tata Ruang secara optimal (monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW). ● Optimalisasi kawasan yang dijadikan ruang kegiatan publik. ● Optimalisasi *Area Traffic Control System* untuk proses manajemen lalu lintas. ● Pembangunan infrastruktur dalam penyiapan pemindahan Ibukota Negara ke Kalimantan Timur. ● Meningkatkan tata kelola kawasan rekreasi, wisata, dan publik terutama dalam keamanan dan ketertiban.
Health	● Pembangunan sarana prasarana pelayanan publik terutama kesehatan di daerah perbatasan kabupaten/kota. ● Perbaikan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan ● Menerapkan kemajuan teknologi untuk pelayanan kesehatan dasar.
Mobility	● Implementasi pembangunan jaringan aksesibilitas dalam meningkatkan konektivitas antar kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. ● Pembangunan jalan bebas hambatan, jalur kereta api, dan Pengembangan Bandar Udara Loa Kulu. ● Penambahan dan perbaikan infrastruktur transportasi.

3.5. *Smart Society*

Smart Society Kabupaten Kutai Kartanegara tersirat pada misi ke tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang profesional dan transparan. Dimensi *smart society* diterjemahkan kedalam indikator membangun masyarakat yang madani dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Strategi dan arah kebijakan pada *smart society* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat

yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Berdasarkan sasaran *smart society* Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu mewujudkan masyarakat yang partisipatif, serta menciptakan sistem lingkungan yang aman, nyaman, dan terintegrasi, maka strategi *smart society* yang akan dilakukan sebagai berikut:

Tabel 3.5 Strategi Dimensi *Smart Society*

Sub Dimensi	Strategi
Community	● Membentuk komunitas yang produktif dan berkualitas dalam pengembangan SDM ● Mendorong pendidikan tentang pemanfaatan teknologi informasi ● Membangun sistem forum atau komunitas interaktif digital antara masyarakat dan pemerintah sebagai kanal informasi dan penyaluran aspirasi masyarakat. ● Membuat program pengembangan kapasitas SDM. ● Menyusun *grand design* kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara. ● Penyediaan sarana dan prasarana serta operasional kelompok ketahanan keluarga. ● Terus mengkampanyekan pemanfaatan teknologi secara bijak.
Learning	● Peningkatan sosialisasi literasi digital dalam pemanfaatan internet secara cerdas. ● Meningkatkan kompetensi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat. ● Membangun sistem pembelajaran yang cerdas (*e-learning*) sesuai kearifan lokal.
Security	● Meningkatkan program sosialisasi ketahanan keluarga. ● Meningkatkan peran RT dalam mendukung program kegiatan ketertiban dan ketahanan masyarakat. ● Peningkatan pemenuhan hak anak. ● Peningkatan perlindungan khusus anak. ● Peningkatan perlindungan terhadap perempuan. ● Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan ekonomi,sosial,budaya,agama dan ormas

Sub Dimensi	Strategi
	● Optimalisasi dan integrasi sistem monitoring keamanan lingkungan (SISKAMLING) dengan teknologi. ● Membangun *early warning system, panic button* atau aplikasi pelaporan warga. ● Membangun sistem monitoring keamanan dengan memanfaatkan teknologi sensor-sensor digital (*Internet of Thing*) yang terhubung dengan *City Command Center*. ● Penyaringan konten negatif bekerjasama dengan Kemenkominfo dan provider internet melalui Diskominfo.

3.6. *Smart Environment*

Smart Environment merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dimensi s*mart environment* masuk ke dalam misi *Smart City* yang keempat dan lima. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa proteksi lingkungan (*Environmental Protection),* pengelolaan sampah dan limbah *(Waste Management),* dan tata kelola energi *(Energy)*. Beberapa hal yang ditekankan dalam dimensi ini yaitu berupa strategi dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berwawasan lingkungan mulai dari pengaturan regulasi lingkungan hidup hingga pengendalian kualitas sumberdaya dan pemanfaatan energi. Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran *smart environment* Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain:

Tabel 3.6 Strategi Dimensi *Smart Environment*

Sub Dimensi	Strategi
Environmental Protection	● Mengatur regulasi lingkungan hidup. ● Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. ● Meningkatkan peran swasta dalam mengelola lahan pasca tambang. ● Meningkatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesadaran kelestarian alam.

Sub Dimensi	Strategi
	● Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan. ● Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ● Pemulihan ekosistem perairan berbasis kearifan lokal/masyarakat.
Waste Management	● Peningkatan aksesibilitas, kemudahan, kesederhanaan dalam melengkapi data bank sampah. ● Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah. ● Peningkatan kualitas pengelolaan sampah dan limbah B3. ● Peningkatan layanan laboratorium uji kualitas lingkungan. ● Menyusun regulasi dan rencana aksi penetapan Desa ramah lingkungan dan GRK.
Energy	● Memanfaatkan energi fosil secara efisien dan mengurangi ketergantungan. ● Membuat program konversi energi terbarukan. ● Konektivitas di wilayah IKN

BAB IV
PETA JALAN PEMBANGUNAN *SMART CITY* DAERAH

Peta jalan pembangunan *Smart City* Daerah yang dibagi berdasarkan dimensi *Smart City* yaitu *Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society,* dan *Smart Environment*. Peta jalan pembangunan *Smart City* disusun dalam rentang waktu Tahun 2022-2026 yang disesuaikan dengan urgensi permasalahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana jangka pendek pada Tahun 2022, jangka menengah Tahun 2023 -2024, dan jangka panjang Tahun 2026. Selanjutnya berdasarkan program kegiatan *Smart City* dianalisis indikator kinerja dan indikator SNI 37122:2019 sebagai acuan dalam pengukuran keberhasilan program kerja yang akan diimplementasikan.

4.1. *Smart Governance*

Tabel 4.1 Peta Jalan *Smart Governance*

SUB-DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Layanan Publik	Pembangunan dan pengembangan layanan publik berbasis digital	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)	Cakupan aplikasi yang dikelola OPD	Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Peningkatan dan Pembaharuan Inovasi Layanan Online Pendaftaran Penduduk dan Pencatan Sipil	1	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Diskominfo
		1.2. Sub Keg. Pengembangan Aplikasi	Jumlah aplikasi yang dikembangkan			-	-	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	1	50,000,000	APBD	Diskominfo dan Bagian Organisasi
		2. Program Pengelolaan Profil Kependudukan (Keg. Penyusunan Profil	Persentase penyediaan dan pemanfaatan data kependudukan			100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)		100 % (1 Aplikasi)			

SUB-DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		Kependudukan)															
		2.1. Sub Keg. Penyediaan data kependudukan kabupaten/kota	Jumlah aplikasi informasi grafis kependudukan sampai ke tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Layanan Online Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		Pengadaan infografis yang dapat diakses secara online	1	210,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	1	110,000,000	APBD	DISDUKCAPIL
	Ducting	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota)		Persentase layanan kota yang dapat diakses dan yang dapat diminta secara daring	Pengadaan informasi berbasis online dan Integrasi dengan aplikasi SAPK BKN, Penandatanganan SK Kepangkatan secara elektronik, pencetakan SK Kepangkatan oleh masing-masing operator unit	-	-	-	-	1	100,000,000	-	-	-	-	APBN	Diskominfo dan DPU
		1.1. Sub Keg. Perencanaan Ducting															

SUB-DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Birokrasi	Penyediaan layanan kepegawaian berbasis elektronik	*1.1. Sub Keg. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian*	Jumlah Pengembangan Aplikasi SIMPEG			1	100,000,000.00					1	100,000,000.00			APBD	BKPSDM
Perancangan kebijakan	Layanan pajak daerah online	**1. Program pengelolaan aplikasi informatika** (Keg. Pengelolaan e-government di lingkup pemerintahan daerah kabupaten/kota) *1.2. Sub Keg. Pembangunan dan pengembangan aplikasi pajak daerah*	Jumlah aplikasi yang dibangun	Persentase kontrak layanan yang menyediakan layanan kota yang memuat kebijakan data terbuka	Pengadaan system pajak daerah secara online bagi masyarakat luas	1	180,000,000	1	180,000,000	1 Aplikasi	180,000,000	1	180,000,000	1 i	180,000,000	APBD	Diskominfo dan BAPPEDA

4.2. *Smart Branding*

Tabel 4.2 Peta Jalan *Smart Branding*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Pariwisata	Membuat branding wisata	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**		Presentasi layanan rekreasi publik	Memperkuat daya saing Kabupaten	4	300,000,000	4	300,000,000	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPAR

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	"Kukar Asia Wonder"	*1.1. Keg. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota)*	Jumlah daya tarik wisata yang dikelola	yang dapat dipesan secara daring	Kutai Kartanegara sebagai keajaiban Asia baik wisata alama dan budaya melalui berbagai platform media, terintegrasi degan visiting Kutai Kartanegara												
		1.2. Keg. Perencanaan pengembangan daya tarik wisata kabupaten/kota	Jumlah perencanaan daya tarik wisata			1	300,000,000	1	300,000,000	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPAR dan DPPR
		1.3. Keg. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kawasan strategis pariwisata yang dikelola			1	600,000,000	1	600,000,000	1	825,000,000	4	950,000,000	10	950,000,000	APBD	DISPAR dan DPPR
	Meningkatkan infrastruktur objek wisata yang dikelola	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata**	Jumlah perencanaan kawasan strategis pariwisata		Pengadaan infrastruktur pendukung pengembangan wisata seperti jalan, transportasi dan pemasaran	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	1	600,000,000	-	-	APBD	DISPAR
		1.1. Keg. Perencanaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota															
		1.2. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis	Jumlah sarana dan prasarana kepariwisataan yang direvitalisasi			-	-	-		1	225,000,000	1	350,000,000	4	950,000,000	APBD	DISPAR
		1.3. Keg. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola			18	3,980,000,000	18	3,980,000,000	17	4,055,000,000	17	3,930,000,000	18	3,930,000,000	APBD	DISPAR
		1.4. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan	Presentasi layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring		4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	4	3,225,000,000	APBD	DISPAR

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	sarana dan prasarana yang dikelola														
	Pembinaan POKDARWIS	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata** *1.1. Keg. Monitoring dan evaluasi pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota*	Jumlah dokumen evaluasi	Presentasi layanan rekreasi publik yang dapat dipesan secara daring	Penambahan kegiatan berupa bedah homestay berupa bantuan untuk menstandarisasi fasilitas homestay	1	100,000,000	1	100,000,000	-	-	-	-	10	100,000,000	APBD	DISPAR
		1.2. Keg. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah kelompok masyarakat yang diberikan pembinaan			10	430,000,000	10	300,000,000	10	530,000,000	10	530,000,000	10	430,000,000	APBD	DISPAR
		1.3. Keg. Penerapan destinasi pariwisata berkelanjutan dalam pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Jumlah penetapan destinasi pariwisata yang berkelanjutan			3	225,000,000	3	355,000,000	3	300,000,000	3	175,000,000	3	175,000,000	APBD	DISPAR
		1.4. Keg. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha pariwisata yang direkomendasikan untuk mendapat TDUP			10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	10	200,000,000	APBD	DISPAR dan DPMPTSP
	Menyelenggarakan event	**1. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata** *1.1. Keg. Penyediaan layanan pendaftaran usaha pariwisata kabupaten/kota*	Jumlah dokumen verifikasi yang diusulkan ke DPMPTSP	Jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per	Pengelenggaraan event budaya Kabupaten Kutai Kartanegara yang diikuti	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	10	100,000,000	APBD	DISPAR dan DPMPTSP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1.2. Keg. Pembinaan dan pengawasan usaha pariwisata	Jumlah usaha pariwisata yang belum memiliki TDUP	100.000 penduduk	oleh masayarakat dan aparatur pemerintah	50	100,000,000	40	100,000,000	30	100,000,000	20	100,000,000	10	100,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2. Program pemasaran pariwisata	Jumlah pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata	Jumlah pemesan daring untuk fasilitas budaya per 100.000 penduduk	Promosi wisata melalui platform online dan offline												
		2.1. Keg. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota				13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	13	1,125,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.2. Keg. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Jumlah penguatan promosi			4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	4	350,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.3. Keg. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha terfasilitasi			1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.4. Keg. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata provinsi, baik dalam dan luar negeri	Jumlah penyediaan data dan penyebaran informasi			4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	4	250,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO
		2.5. Keg. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Jumlah kerjasama dan kemitraan pariwisata			4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	4	400,000,000	APBD	DISPAR, DPMPTSP dan DISKOMINFO

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	Penyediaan ruang kreatif	**1. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	Jumlah prasarana yang tersedia		Membangun creative center sebagai posko kreatif bagi masyarakat yang ingin memulai mengembangkan usaha	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	APBD	DISPAR dan DPPR
		1.1. Keg. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berkreasi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota															
		1.2. Keg. Pengembangan dan revitalisasi prasarana kota kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi			3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	3	750,000,000	APBD	DISPAR dan DPPR
	Pembinaan pelaku ekonomi kreatif	**1. Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual**	Jumlah ekosistem ekonomi kreatif yang dikembangkan	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Pengadaan lomba berbasis ekonomi kreatif	3	450,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	3	300,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		1.1. Keg. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif															
		1.2. Keg. Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jumlah komunitas/pelaku kreatif yang difasilitasi		Pemberian bantuan bagi ekonomi kreatif yang memiliki potensi dan memberikan	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	2	250,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		1.3. Keg. Fasilitasi kekayaan intelektual	Jumlah kekayaan	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan		5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	APBD	DISPAR

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			intelektual yang terfasilitasi		prosepek baik bagi pertumbuhan ekonomi lokal maupun daerah												
		1.4. Keg. Penyusunan rencana aksi pengembangan ekonomi kreatif	Jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf			1	150,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan ekonomi kreatif yang dilaksanakan			92	8,820,000,000		8,970,000,000	90	8,970,000,000	88	8,970,000,000	87	8,970,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.1. Keg. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar															
		2.2. Keg. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata	Jumlah kemitraan pariwisata	Persentase catatan budaya kota yang telah didigitalkan	Pelatihan dan sosialisasi pengembangan ekonomi kreatif berbasis pemanfaatan sumberdaya lokal	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.3. Keg. Pelatihan dasar sumber daya manusia kepariwisataan bagi masyarakat, guru dan pelajar (mahasiswa dan/atau siswa)	Jumlah peserta			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.4. Keg. Sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja bidang pariwisata	Jumlah peserta			20	100,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	20	250,000,000	APBD	DISPAR, DISTRANSNAKER dan DIDKOPUKM
		2.5. Keg. Fasilitasi proses kreasi, produksi, distribusi	Jumlah fasilitas event/festival			26	6,920,000,000	25	6,920,000,000	24	6,920,000,000	22	6,920,000,000	21	6,920,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif															
		2.6. Keg. Fasilitasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia ekonomi kreatif	Jumlah fasilitas terhadap komunitas/pelaku ekonomi kreatif			6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	6	1,600,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2.7. Keg. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif	Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
		2.8. Keg. Pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan ekonomi kreatif	Jumlah peserta			20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	20	100,000,000	APBD	DISPAR dan DISKOPUKM
	Penyediaan sarana dan prasarana	**1. Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan** (Keg. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)	Sarana dan prasarana olahraga		Pengadaan fasilitas pendukung	2	-	2	-	2	-	2	-	1	-	APBD	DISPORA
		1.1. Sub Keg. Pembangunan dan perawatan sarana prasarana olahraga															
Daya saing bisnis	Kemudahan perizinan dan berusaha	**1. Program pelayanan penanaman modal** **(Keg. Pelayanan perizinan dan non perizinan secara**	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Sistem Informasi One Map One Data (SI OMOD)	87,5	1.100.000.000	87,75	1.100.000.000	88	1.100.000.000	88,5	1.100.000.000	88,75	1.100.000.000	APBD	DPMPTSP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		terpadu satu pintu bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)															
		1.1. Sub Keg. Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)	Jumlah izin yang dilayani	-		1130	300.000.000	1135	300.000.000	1140	300.000.000	1145	300.000.000	1150	300.000.000	APBD	DPMPTSP
		1.2. Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah fasilitas/insentif	-		30	300.000.000	35	300.000.000	40	300.000.000	45	300.000.000	50	300.000.000	APBD	DPMPTSP
	Pemanfaatan TI dalam proses pemasaran	**1. Program promosi penanaman modal** **(Keg. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)**	Jumlah Investor	-	Promosi terintegrasi	7	700.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	APBD	DPMPTSP
		1.1. Sub Keg. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Media Promosi digital	-		3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000	APBD	DPMPTSP
	Promosi dan pameran lokal nasional dan internasional	**1. Program promosi penanaman modal** **(Keg. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota)**	Jumlah Investor	-	Digital Promotion (Digi-Pro)	7	700.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	APBD	DPMPTSP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1.1. Sub Keg. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota)	Jumlah promosi	-		4	500.000.000	4	750000000	4	750000000	4	750000000	4	750000000	APBD	DPMPTSP
Wajah kota	Membangun website dan sosial media	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota) *1.1. Sub Keg. Monitoring opini dan aspirasi publik*	Jumlah laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor	-	Penambahan Sosialisasi Aduan Publik SP4N Lapor !, Meningkatkan diskusi Publik, memberikan reward dan punishment bagi pegelola aduan publik	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	30	200.000.000	APBD	DISKOMINFO
	Membangun jaringan komunikasi dengan pimpinan, media dan masyarakat	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota) *1.1. Sub Keg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas*	Jumlah Rapat Koordinasi	-	Penambahan kegiatan gathering untuk meningkatkan citra positif pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas anggota KIM	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	APBD	DISKOMINFO
	Melaksanakan gathering bersama jurnalis dan KIM	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi	Jumlah Rapat Koordinasi	-	Penambahan Kegiatan Gathering untuk meningkatkan												

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		publik pemerintah daerah kabupaten/kota)			citra positif pemerintah daerah dan peningkatan kapasitas anggota KIM												
		1.1. Sub Keg. Penyelenggaraan hubungan masyarakat, media dan kemitraan komunitas				6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	APBD	DISKOMINFO
	Meningkatkan keterbukaan informasi publik	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah PPID yang dibina	-	Aplikasi PPID	58	300.000.000	58	500.000.000	58	300.000.000	58	500.000.000	58	500.000.000	APBD	DISKOMINFO
		1.1. Sub Keg. Pelayanan informasi publik															
	Meningkatkan penyelesaian masalah publik, meningkatnya partisipasi publik	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah Rapat Koordinasi	-	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara OPD dan stakeholder lainnya (pemilik Kepentingan), mempercepat penyusunan perbub dan SOP manajemen komunikasi krisis	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	APBD	DISKOMINFO
		1.1. Sub Keg. Manajemen komunikasi krisis															

4.3. *Smart Economy*

Tabel 4.3 Peta Jalan *Smart Economy*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
Ekosistem industri	Membangun industri primer dan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan	**1. Program pengelolaan perikanan tangkap** (Keg. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Produksi perikanan tangkap	Persentase tahunan dari anggaran kabupaten yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	Penggunaan teknologi dalam kegiatan perikanan tangkap	1	50,000,000	1	100,000,000	2	50,000,000	3	50,000,000	4	50,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
	Membangun industri pengolahan dari hasil bahan mentah	**2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian** (Keg. Pembangunan prasarana pertanian)	Jumlah prasarana pertanian yang dibangun (Unit)		Penggunaan teknologi dalam kegiatan pertanian	1	0	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal	**1. Program pengelolaan perikanan budidaya** (Keg. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)	Produksi perikanan budidaya (Jumlah lokasi)		Pengembangan kegiatan monitoring kualitas produk perikanan dan pertanian	0	0	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	APBD	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Keg. Pengelolaan sumber daya genitik (sdg) hewan, tumbuhan dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota)	Jumlah pengembangan SDG hewan dan tumbuhan			1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	Dinas Perkebunan

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		2.1. Sub Keg. Menjamin kemurnian dan kelestarian SDG hewan/tanaman	Jumlah pengembangan SDG hewan dan tumbuhan (Komoditi)	Persentase tahunan dari anggaran kabupaten yang dihabiskan untuk inisiatif pertanian	Pengembangan kegiatan monitoring kualitas produk perikanan dan pertanian												
		2.2. Sub Keg. Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	Jumlah fasilitas pemanfaatan SDG hewan/tanaman (Fasilitas)			1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	1	125,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
	Meningkatkan produktifitas melalui pemberdayaan dan penguatan kualitas koperasi dan UMKM	**1. Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)** (Keg. Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan)	Persentase UMKM yang telah difasilitasi (%)		Mengembangkan konsep pemberdayaan dalam pengembangan UMKM	1,8%		1,8%		1,8%		1,8%		1,8%		APBD	Diskopukm
		1.1 Sub Kegiatan, fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro	Jumlah UMKM yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha (Unit)		Aplikasi perizinan usaha dan Klinik K-UMKM	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	140 Umkm	500,000,000	APBD	Diskopukm
		1.2 Sub Kegiatan, koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Pembentukan dan fasilitasi sarana prasarana klinik K-UMKM (Unit)			1 Klinik	75,000,000	2 Klinik	200,000,000	2 Klinik	200,000,000	3 Klinik	250,000,000	5 Klinik	325,004,943	APBD	Diskopukm

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
Kesejahteraan masyarakat	Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja	**1. Program penyuluhan pertanian** (Keg. Pelaksanaan penyuluhan pertanian)	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase angkatan kerja yang bekerja di sektor pendidikan, penelitian, dan pengembangan	Mengencarkan penyuluhan pertanian melalui kegiatan literasi	4,77 %		9,76 %		14,63 %		19,62 %		24,60 %		APBD	Dinas Perkebunan
		1.1 Sub Keg. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	1. Jumlah kelompok tani yang dibina			45 Kelompok	350,000,000	47 Kelompok	400,000,000	46 Kelompok	400,000,000	47 Kelompok	400,000,000	47 Kelompok	400,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
			2. Jumlah pekebun milenial yang dibina		Mengencarkan penyuluhan pertanian melalui kegiatan literasi	10 orang		20 Orang		30 Orang		40 Orang		50 Orang		APBD	
	Melakukan kerjasama antar desa	**1. Program peningkatan kerjasama desa** (Keg. Fasilitasi kerjasama antar desa)	Jumlah Kawasan yang difasilitasi	Tingkat kelangsungan bisnis baru per 100.000 penduduk	Mengembangkan program inovasi desa dengan skema kemitraan	2 Kawasan (16 Desa)	100,000,000	2 Kawasan (16 Desa)	400,000,000	1 Kawasan (8 Desa)	100,000,000	0	0	0	0	APBD	Bappeda, Disperkim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koprasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan
		1.1 Sub Keg. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan															
		2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan	Jumlah peserta pelatihaan kewirausahan pedesaam			25 orang	170,000,000	40 orang	170,000,000	40 orang	100,000,000	40 orang	100,000,000	40 orang	100,000,000	APBD	DPMD

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		Masyarakat Hukum Adat (Keg. Pemberdayaan Lembaga Kemsyarakatan)															
		2.1 Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dana pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa															
	Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan	**1. Program penyuluhan pertanian** (Keg.Pelaksanaan penyuluhan)	Persentase kenaikan kelas kelompok tani		Optimalisasi kegiatan pemberdayaan ekonomi melalui penguatan kelompok masyarakat yang secara partisipatif dan efektif dalam mengelola sumberdaya lokal	4,77 %		9,76 %		14,63 %		19,62 %		24,60 %	600,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		1.1. Sub Keg. Pembentukan dan penyelengaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah pekebun peserta pelatihan budidaya, panen/pasca panen			0	0	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	40 Orang	100,000,000	20 Orang	50,000,000	APBD	
		2. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (Keg. Pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)	Jumlah mesin pengolahan		Penggunan teknologi dalam pemasaran hasil perikanan	0	0	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	APBD	Dinas Pertanian dan Peternakan
			Jumlah unit frezeer			50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	50	500,000,000	APBD	

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
	Peningkatan kemitraan dengan swasta	**1. Program perizinan usaha pertanian** (Keg. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota)	Jumlah pemegang tanda daftar budidaya dan izin usaha perkebunan yang dibina		Inovasi BangMus Kebulan	211 Pelaku	400,000,000	203 Pelaku	250,000,000	220 Pelaku	300,000,000	210 Pelaku	250,000,000	203 Pelaku	250,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		1.1 Sub Keg. Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	1. Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB		Inovasi BangMus Kebulan	200 Surat	400,000,000	200 Surat	250,000,000	200 Surat	300,000,000	200 Surat	250,000,000	200 Surat	250,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
			2. Jumlah Perusahaan yang mendapatkan sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)			11 Surat		3 Surat		20 Surat		10 Surat		3 Surat		APBD	
		2. Program penyuluhan pertanian (Keg. pelaksanaan penyuluhan pertanian)	Persentase kenaikan kelas kelompok tani		Kegiatan penyuluhan / literasi digital yang dikemas secara menarik dengan bantuan teknologi	4,77 %		9,76 %		14,63 %		19,62 %		24,60 %	600,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		2.1 Sub Keg. Pembentukan badan usaha milik petani	Jumlah lembaga pekebun yang dibentuk/bermitra			2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	1	150,000,000	APBD	Dinas Perkebunan
		3. Program administrasi pemerintahan desa (Keg. Pembinaan dan pengawasan administrasi desa)	Jumlah unit usaha Bumdesa		Optimalisasi kegiatan Bumdes melalui penyuluhan atau peningkatan	13	100,000,000	15	300,000,000	13	100,000,000	13	100,000,000	14	150,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
					literasi masyarakat												
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	**1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat** *(Keg. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal)*	1.Kecukupan Konsumsi Energi 2.Kecukupan Konsumsi Protein		Getuk Paman Karman (Gerakan untuk Pemanfaatan Pekarangan yang Aman)	30	600,000,000	30	600,000,000	30	600,000,000	30	600,000,000	30	600,000,000	APBD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

4.4. *Smart Living*

Tabel 4.4 Peta Jalan *Smart Living*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
Harmonisasi tata ruang	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW	**1. Program penyelenggaraan penataan ruang** (Keg. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah kabupaten/kota)	Persentase ketaatan terhadap RTRW	1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar 2. Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	Melakukan monitoring evaluasi berkala dan terukur	65	-	70	-	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		1.1 Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen materi teknis			2	485.000.000	1	400.000.000	-	-	-	-	-	-	APBD	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		2. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh (Keg. Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota)	Presentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)		Penggunaan aplikasi RTLH	7.24	10,340,000,000	7.2	10,340,000,000	7	10,340,000,000	6.7	10,340,000,000	6	10,340,000,000	APBD	DPKP (Dinas Perkim)
			Jumlah rumah yang direnovasi			517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	APBD	DPKP (Dinas Perkim)
		2.1 Sub. Keg. Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh diluar kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direnovasi			517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	517	10,340,000,000	APBD	DPKP (Dinas Perkim)

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
	Menambah kawasan yang dijadikan ruang kegiatan publik	**1. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)** (Keg. Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota)	Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan	1. Persentase rumah tangga dengan pengukur energi pintar 2. Persentase rumah tangga dengan pengukur air pintar	Optimalisasi program Kahati dengan pengembangan taman literasi	30	2,045,000,000	25	810,000,000	10	810,000,000	25	820,000,000	15	1,325,000,000	APBD	DLHK
		1.1 Sub Keg. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola														
		2. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum (Keg. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota)			Penggunaan teknologi dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	1,484	325,698,000	1,484	325,698,000	1,849	325,698,000	2,214	325,698,000	2,579	325,698,000	APBD	Satpol PP
		2.1. Sub. Keg. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum		Penguatan fungsi dan peningkatan citra Satpol PP												
		2.2. Sub. Keg. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui	Persentase penindakan gangguan trantibum			100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	100	50,000,000	APBD	Satpol PP

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa															
		2.3 Sub. Keg. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah regu perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum			25	75,527,500	25	75,527,500	25	75,527,500	25	75,527,500	25	75,527,500	APBD	Satpol PP
		2.4. Sub. Keg. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum/Pengadaan dan perawatan CCTV	Jumlah CCTV		Penggunaan teknologi dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	30	600,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	APBN	Satpol PP dan Diskominfo
		2.5. Sub. Keg. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen kesepakatan Kerjasama			5	23,483,300	5	23,483,300	5	23,483,300	5	23,483,300	5	23,483,300	APBD	Satpol PP
		3. Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah temuan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		Pengembangan konsep *collaborative justice system*	150	120,000,000	125	120,000,000	100	120,000,000	75	120,000,000	50	120,000,000	APBD	Satpol PP
		3.1. Sub. Keg. Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		daerah dan peraturan bupati/wali kota															
		3.2. Sub. Keg. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/wali kota	Jumlah penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditindaklanjuti		Pengembangan konsep *collaborative justice system*	150	202,522,400	125	202,522,400	100	202,522,400	75	202,522,400	50	202,522,400	APBD	Satpol PP
Kesehatan	Perbaikan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan	**1. Program pemenuhan upaya kesehatan** (Keg. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi)	Jumlah aplikasi yang dibangun	Jumlah janji temu medis tahunan yang dilakukan melalui jarak jauh per 100.000 penduduk	Optimalisasi promosi fasilitas kesehatan menggunakan berbagai platform	1		1		1		1		1		BLUD	RSUD AM Parikesit
		1.1. Pembangunan aplikasi E-Medical Record				1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	1	500,000,000	BLUD	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
						1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	1	200,000,000	BLUD	RSUD Dayaku Raja
Transportasi	Penambahan dan perbaikan insfrastruktur transportasi	**1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan**	Jumlah LPJU yang dipasang	Persentase lampu lalu lintas yang cerdas	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan prinsip efektif dan efisien	250	1,320,000,000.00	250	700,000,000.00	250	750,000,000.00	250	750,000,000.00	250	750,000,000.00	APBD	DISHUB
		1.1.Sub. Kegiatan Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten / Kota															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		1.2.Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah dokumen	Persentase rute angkutan umum dengan konektivitas internet yang disediakan kota dan/atau dikelola komuter	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan prinsip efektif dan efisien	1	275,000,000.00		0		0		0		0	APBD	DISHUB
		1.3. Sub. Kegiatan Pengadaan, pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Jumlah perlengkapan jalan yang dipasang/perbaiki /pelihara	Persentase jalan yang sesuai dengan sistem mengemudi otonom		200	775,835,000.00	90	400,000,000.00	90	400,000,000.00	90	400,000,000.00	90	400,000,000.00	APBD	DISHUB
		1.4. Sub. Kegiatan Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen	Persentase jalur transportasi umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real time) yang dapat diakses publik		1	350,000,000.00		0		0		0		0	APBD	DISHUB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		1.5. Sub. Kegiatan Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten /kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah ijin penyelenggaraan parkir	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersedian parkir langsung (real-time)		1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	APBD	DISHUB
		1.6. Sub. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota	Jumlah lokasi kegiatan pengawasan	Persentase ruang parkir umum yang dilengkapi dengan sistem ketersedian parkir langsung (*real-time*)	Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dengan prinsip efektif dan efisien	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	5	200,000,000.00	APBD	DISHUB
		1.7. Sub. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dikembangkan	Persentase kendaraan yang terdaftar di kota yang merupakan kendaraan rendah emisi		2	300,000,000.00	2	350,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	2	300,000,000.00	APBD	DISHUB
		2. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Jumlah dokumen	Persentase jalur transportasi	Pengembangan berkelanjutan	1	500,000,000.00		0		0		0		0	APBD	DISHUB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN	TK	ANGGARAN		
		2.1. Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai Dan Danau		umum yang dilengkapi dengan sistem langsung (real-time) yang dapat diakses publik	dalam pola trayek dan perhubungan laut												
		2.2. Sub. Kegiatan Pembangunan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah pelabuhan pengumpan Lokal yang dibangun			1	430,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	APBD	DISHUB
		2.3. Sub. Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan pengumpan lokal	Jumlah pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dipelihara		Pengembangan berkelanjutan dalam pola trayek dan perhubungan laut	1	200,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	APBD	DISHUB
		2.4. Sub. Kegiatan Pembangunan pelabuhan sungai dan danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang yang dibangun			1	100,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	1	150,000,000.00	APBD	DISHUB
		2.5. Sub. Kegiatan Pengoperasian dan pemeliharaan pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pelabuhan Sungai dan Danau yang dipelihara			2	200,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	1	175,000,000.00	APBD	DISHUB

4.5. *Smart Society*

Tabel 4.5 Peta Jalan *Smart Society*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Interaksi masyarakat	Membentuk komunitas yang produktif dan berkualitas dalam pengembangan SDM	**1. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik** (Keg. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota)	Jumlah fasilitasi KIM	Persentase anggaran kota yang dialokasikan untuk penyediaan program yang ditunjukan untuk menjembatani kesenjangan digital	Program literasi digital masyarakat	70	300,000,000	80	310,000,000	90	320,000,000	100	330,000,000	110	340,000,000	APBD	Diskominfo, DP2KB, DPMD
		1.1. Sub Keg. Kemitraan dengan pemangku kepentingan (Fasilitasi Pembentukan KIM desa kelurahan kecamatan, bimtek, lomba KIM)															
		2. Program peningkatan kerjasama desa (Keg. Fasilitasi kerjasama antar desa)	Jumlah kawasan yang difasilitasi		Mengembangkan program inovasi desa dengan skema kemitraan	2 Kawasan (16 Desa)	100,000,000	2 Kawasan (16 Desa)	400,000,000	1 Kawasan (8 Desa)	100,000,000	0	0	0	0	APBD	DPMD, Bappeda, Disperkim, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Koprasi dan UKM, Dinas Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan
		2.1. Sub Keg. Fasilitasi pembangunan kawasan pedesaan															
		3. Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS)	Jumlah kerjasama dengan mitra dan ormas		Pengeolaan kampung KB	6	50.000.000	6	350.000.000	4	350.000.000	4	150.000.000	4	100.000.000	APBD	DP2KB
		3.1. Sub. Keg. Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakan operasional															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)															
		3.2. Sub Keg. Orientasi/pelatihan teknis pelaksana/kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (bkb, bkr, bkl, pppks, pik-r dan pemberdayaan ekonomi keluarga/uppks)	Jumlah kader yang dilatih			400	400.000.000	433	100.000.000	429	300.000.000	429	200.000.000	429	150.000.000	APBD	DP2KB dan Diskominfo
		3.3. Sub. Keg. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Jumlah kegiatan promosi dan sosialisasi			300	300.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	75.000.000	150	50.000.000	APBD	DP2KB dan Diskominfo
		3.4. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (menjadi orang tua hebat, generasi berencana, kelanjutusiaan serta pengelolaan keuangan keluarga)	Jumlah lomba-lomba			1	100.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	8	75.000.000	APBD	
		4. Program pembinaan keluarga berencana (KB)	Tersedianya alat, obat dan kontrasepsi pada Fasilitas Kesehatan														
		4.1. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan			Aplikasi Sirika	40	225,000,000	40	225,000,000	40	225,000,000	40	225,000,000	40	225,000,000	APBN	DP2KB

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		pelayanan KB di daerah kabupaten / kota															
Ekosistem belajar/pendidikan	Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai kearifan lokal	**1. Program pembinaan perpustakaan** *1.1. Sub. Keg. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat*	Jumlah frekuensi sosialisasi pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Persentase populasi kota yang merupakan pengguna perpustakaan umum yang aktif	Perpustakaan Digital (IKUKAR)	2kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	4kali /Kecamatan	50.000.000	APBD	Diarpus dan Diskominfo
		1.2. Sub. Keg. Pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota	1. Jumlah layanan perpustakaan elektronik dan perpustakaan digital	Jumlah buku perpustakaan umum dan judul e-book per 100.000 penduduk	Perpustakaan Digital (IKUKAR)	2 Aplikasi	110,000,000	2 Aplikasi	110,000,000	2 Aplikasi	110,000,000	2 Aplikasi	25,000,000	2 Aplikasi	25,000,000	APBD	Diarpus dan Diskominfo
			2. Jumlah koleksi buku digital			10000 eksemplar	1,000,000,000	10000 eksemplar	1,000,000,000	10000 eksemplar	1,000,000,000	500 eksemplar	50,000,000	500 eksemplar	50,000,000	APBD	Diarpus dan Diskominfo
	Membangun sistem pembelajaran yang cerdas untuk masyarakat sesuai kearifan lokal	*1.3 Sub. Keg. Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	Jumlah pemeliharaan Sarana Perpustakaan Umum Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan Sarana Perpustakaan Umum Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Kubuku	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	1.050.000.000	1	1.050.000.000	APBD	Diarpus dan Diskominfo

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Ketahanan masyarakat	Meningkatkan peran RT dalam mendukung program kegiatan ketertiban dan ketahanan masyarakat	**1. Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat** (Keg. Pemberdayaan lembaga kemsyarakatan)	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi ketahanan masyarakat	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pengembangan masyarakat tangguh bencana	20 orang	75,000,000	38 orang	100,000,000	40 orang	110,000,000	46 orang	120,000,000	49 orang	120,000,000	APBD	DPMD, Kesbangpol, DP3A, Dinas Sosial, DP2KB
		1.1. Sub. Keg. Fasilitasi penyelenggaraan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masy. desa															
		2. Program perlindungan dan penyelamatan arsip (Keg. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten/kota)	Jumlah dokumen arsip			500 berkas	50,000,000	500 berkas	75,000,000	500 berkas	75,000,000	500 berkas	75,000,000	500 berkas	75,000,000	APBD	DIARPUS
		2.1. Sub. Keg. Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana															
	Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan ketahanan ekonomi,sosial,budaya,agama dan ormas	**1. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya** (Keg. Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya)	Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	Persentase area kota yang dicakup oleh kamera pengintai digital	Pengembangan masyarakat tangguh bencana	5 dokumen	730,000,000	5 dokumen	730,000,000	5 dokumen	610,000,000	5 dokumen	620,000,000	5 dokumen	630,000,000	APBD	Kesbangpol
		1.1. Sub. Keg. Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan/penyuluhan			600 orang	505,000,000	600 orang	505,000,000	600 orang	500,000,000	600 orang	500,000,000	600 orang	500,000,000	APBD	Kesbangpol

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SECTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		dan fasilitasi pencegahan penyalagunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah															
		1.2. Sub. Keg. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud			22 laporan	225,000,000	22 laporan	225,000,000	18 laporan	110,000,000	18 laporan	120,000,000	18 laporan	130,000,000	APBD	Kesbangpol

4.6. *Smart Environment*

Tabel 4.6 Peta Jalan *Smart Environment*

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
Proteksi lingkungan	Mengatur regulasi lingkungan hidup	**1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Penurunan emisi GRK (CO2 EQ)	Persentase air limbah olahan yang digunakan kembali	Inovasi Smart Bio Village berupa pengelolaan sampah 3R, konservasi air, energi air, penghijauan, dan keterlibatan peran masyarakat	19	1,250,000,000	20	1,390,000,000	20	1,487,000,000	20	1,494,000,000	20	1,506,000,000	APBD	DLHK
	Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	*1.1. Keg. Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota*	Jumlah dokumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup			4	1,250,000,000	4	1,390,000,000	4	1,487,000,000	4	1,494,000,000	4	1,506,000,000	APBD	DLHK
		1.1.1. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media			2	400,000,000	2	314,000,000	2	316,000,000	2	320,000,000	2	330,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			tanah, air udara dan laut														
		1.1.2. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim		Perencanaan dan pengadaan uji laboratorium terhadap kualitas air dan udara	1	350,000,000	1	330,000,000	1	335,000,000	1	338,000,000	1	340,000,000	APBD	DLHK
		1.1.3. Sub Keg. Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah contoh/sampel/parameter uji yang terlayani, jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan			1	500,000,000	1	746,000,000	1	836,000,000	1	836,000,000	1	836,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
	Meningkatkan peran serta swasta dalam mengelola lahan pasca tambang	**1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup**	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi		Penanaman pohon oleh seluruh lapisan masyarakat guna kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem	200,000	1,000,000,000	200,000	80,000,000	200,000	60,000,000	200,000	65,000,000	200,000	70,000,000	APBD	DLHK
		1.1. Keg. Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup			1	1,000,000,000	1	80,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	APBD	DLHK
		1..1.1. Sub Keg. Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan restorasi			1	1,000,000,000	1	80,000,000	1	60,000,000	1	65,000,000	1	70,000,000	APBD	DLHK
		2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP perangkat daerah		Pengembangan system pelayanan terpadu	59	30,000,000	61		62		64		65		APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		2.1. Keg. Administrasi umum perangkat daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah														
		2.1.1. Sub Keg. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah dan pengembangan aplikasi web GIS			1	30,000,000									APBD	DLHK dan DISKOMINFO
	Meningkatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesadaran kelestarian alam	**1. Program peningkatan pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat**	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan/penyuluhan		Inovasi berupa Pengadaan pelatihan rutin bagi penyuluh lingkungan	0	0	35	575,000,000	35	575,000,000	35	575,000,000	35	725,000,000	APBD	DLHK
		1.1. Keg. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di satu kabupaten/kota			0	0	35	575,000,000	35	575,000,000	35	575,000,000	35	725,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1.1.1. Sub Keg. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan	Jumlah lembaga/masyarakat/institusi yang terdaftar yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensi terkait PPLH			0	0	2	80,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	2	75,000,000	APBD	DLHK
		1.1.2. Sub Keg. Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup	Jumlah pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup		Inovasi pengadaan media online dalam kampanye lingkungan	0	0	30	290,000,000	30	295,000,000	30	300,000,000	30	300,000,000	APBD	DLHK
		1.1.3. Sub Keg. Penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat			0	0	350	205,000,000	350	205,000,000	325	200,000,000	325	200,000,000	APBD	DLHK
	Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan	**1. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat**	Jumlah desa/kelurahan yang mendapat penghargaan desa ramah lingkungan		Pengadaan awards bagi pengiat lingkungan	1. - 2. 109	150,000,000	1. 5 2. 109	100,000,000	1. 5 2. 109	100,000,000	1. 5 2. 109	150,000,000	1. 6 2. 109	150,000,000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
			kategori utama dan jumlah penghargaan yang diberikan														
		1.1. Keg. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah jenis penghargaan yang diberikan kepada masyarakat/dunia/usaha/lembaga lainnya			2	150,000,000	2	100,000,000	2	100,000,000	2	150,000,000	2	150,000,000	APBD	DLHK
		1.1.1. Sub Keg. Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH			124	150,000,000	100	100,000,000	100	100,000,000	124	150,000,000	124	150,000,000	APBD	DLHK
Pengelolaan sampah	Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah	**1. Program pengelolaan persampahan**		1. Persentase pusat pembuangan limbah (kontainer)	Inovasi pengadaan sistem pengelolaan sampah terpadu												
		1.1. Keg. Pengelolaan sampah															

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
dan limbah		*1.1.1. Sub Keg. Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan,.pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota*	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	yang dilengkapi dengan telemetering 2. Persentase jumlah total sampah plastik yang didaur ulang di kota 3. Persentase tempat sampah umum yang merupakan tempat sampah yang difungsikan dengan sensor	dengan mengedepankan *reuse, reduce and recycle*	59.786,73	750.000.000	60.329,41	1.950.000.000	60.865,60	1.950.000.000	60.529,99	1.950.000.000	61.890,93	2.950.000.000	APBD	DLHK
	Menggalakan program 3R yaitu reduce, reuse, recycle	*1.1.2. Sub keg. Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali*	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali			1	750.000.000	1	740.000.000	1	380.000.000	1	720.000.000	1	710.000.000	APBD	DLHK
	Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah	**1. Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)**	Jumlah dokumen kajian timbunan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara		Inovasi dengan membangun sistem pelayanan pengolahan limbah berbasis elektronik yang dapat diakses oleh masyaraakat dan memudahkan	-	-	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	50	25.000.000	APBD	DLHK

SUB DIMENSI	STRATEGI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR SNI	INOVASI	TARGET KINERJA / ANGGARAN (DALAM JUTA RUPIAH)										SUMBER DANA	LEADING SEKTOR
						2022		2023		2024		2025		2026			
						TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.	TK	ANGG.		
		1. Keg. Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pelaku usaha		pengelolaan sampah sampai ke tingkat lokal.												
		1.1. Sub Keg. Fasilitas pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	Jumlah fasilitas persetujuan/izin penyimpanan sementara limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik														

BAB V
PENUTUP

Buku III: *Executive Summary* diharapkan dapat menjadi alat bantu kepada seluruh *stakeholder* terkait dalam implementasi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu kawasan strategis Ibukota Negara Baru. Buku III disusun atas latar belakang, visi *Smart City* daerah, strategi pembangunan *Smart City*, dan peta jalan *Smart City* Daerah. Pelaksanaan program kerja pada buku ini masih sangat dimungkinkan untuk terjadi perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Dalam implementasinya, dibutuhkan partisipasi, sinergitas, dan kerjasama seluruh *stakeholder* dalam rangka mensukseskan, mengawasi dan memberikan kontribusi dalam mencapai Visi *Smart City* Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

REFERENSI

Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. (2011). Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology, 18(2), 65–82.*

Dameri, R. P. (2013). Searching for Smart City Definition: A Comprehensive Proposal. *International Journal of Computers & Technology, 11(5), 2544–2551.*

IBM. (2010). *Smarter Thinking for A Smarter Planet.*

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City.* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Piro, G., Cianci, I., Grieco, L. A., Boggia, G., dan Camarda, P. (2014). Information Centric Services in Smart Cities. *The Journal of Systems and Software*.

Rachmawati, R. (2014). *Pengembangan Perkotaan dalam Era Teknologi Informasi dan Komunikasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rachmawati, R.; Sari, A.D., Sukawan, H.A.R., Widhyastana, I.M.A., Ghiffari, R.A. (2021a). The Use of ICT-Based Applications to Support the Implementation of Smart Cities during the COVID-19 Pandemic in Indonesia. *Infrastructures*. 6, 119. https://doi.org/10.3390/ infrastructures6090119

Rachmawati, R., Choirunnisa, U.; Pambagyo, Z.A., Syarafina, Y.A., Ghiffari, R.A. (2021b). Work from Home and the Use of ICT during the COVID-19 Pandemic in Indonesia and Its Impact on Cities in the Future. *Sustainability*. 13, 6760.https://doi.org/10.3390/ su13126760

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

Su, K., Li, J., & Fu, H. (2011). Smart City and The Applications. *In Electronics, Communications and Control (ICECC) International Conference on (pp. 1028–1031).*

Yeh, H. (2017). The Effects of Successful ICT-Based Smart City Services: From Citizens' Perspectives. *Government Information Quarterly*. 34(3), 556– 565. https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.05.001

QUICK WIN SMART CITY

MASTERPLAN SMART CITY KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KOMINFO

G-MULTI

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Buku Quickwin Masterplan Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi dokumen pelengkap perencanaan pembangunan *Smart City* yang utamanya terdiri atas Buku Analisis Strategis (Buku 1), Buku Masterplan (Buku 2) dan *Buku Executive Summary (Buku 3). Buku Quickwins* merupakan buku penjelasan dan profil dari masing-masing program *quickwins* daerah. Buku *Quickwins* sebagai program unggulan daerah berisikan informasi atau profil program-program unggulan pembangunan *Smart City* Daerah yang dalam aspek waktu masuk dalam jangka pendek. Program terpilih dalam buku ini adalah program yang memiliki dampak secara langsung kepada *stakeholder* utama kota yaitu masyarakat luas.

Penyusunan Masterplan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Panduan Penyusunan Masterplan *Smart City* 2021 Gerakan Menuju *Smart City* (Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, 2021). Buku ini terdiri dari visi dan prioritas RPJMD, visi dan sasaran *Smart City* Daerah, profil *quickwin Smart City* Daerah, dan manajemen risiko *quickwins*. Visi RPJMD dan *Smart City* disusun berdasarkan hasil analisis Buku Analisis Strategis (Buku 1) dan Buku Masterplan (Buku 2). Sedangkan untuk profil dan manajemen risiko *quickwins* dianalisis berdasarkan kertas kerja yang diisikan oleh *leading sector* program kerja. Profil *quickwin* sendiri berisikan informasi mengenai gambaran umum, keunikan, manfaat dan tantangan, strategi pengembangan dan keberlangsungan, serta kebutuhan sumber daya. Selain itu, analisis manajemen risiko *quickwins* penting dilakukan guna menghapus, menghindari atau meminimalisir risiko yang berpotensi mengganggu efektifitas program unggulan di Daerah sehingga tidak dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Penyusunan sasaran, profil, dan manajemen risiko disusun berdasarkan masing-masing dimensi yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living*, dan *smart environment.*

Tim Penyusun Masterplan *Smart City*
Kabupaten Kutai Kartanegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I VISI DAN PRIORITAS RPJMD 1

1.1. Visi, Misi dan Sasaran RPJMD 1

1.2. Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi *Smart City* 9

BAB II VISI DAN SASARAN SMART CITY DAERAH 15

2.1 Visi *Smart City* Daerah 15

2.2. Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance* 17

2.3. Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding* 18

2.4. Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy* 19

2.5. Sasaran Jangka *Pendek Smart Society* 19

2.6. Sasaran Jangka *Pendek Smart Living* 20

2.7. Sasaran Jangka *Pendek Smart Environment* 21

BAB III PROFIL *QUICK WINS SMART CITY* DAERAH 23

3.1. *Quickwins Smart Governance* 23

3.2. *Quickwins Smart Branding* 30

3.3. *Quickwins Smart Economy* 34

3.4. *Quickwins Smart Society* 44

3.5. *Quickwins Smart Living* 48

3.6. *Quickwins Smart Environment* 51

BAB IV MANAJEMEN RISIKO QUICKWINS 55

4.1. *Quickwins Smart Governance* 55

4.2. *Quickwins Smart Branding* 59

4.3. *Quickwins Smart Economy* 63

4.4. *Quickwins Smart Society* 66

4.5. *Quickwins Smart Living* 69

4.6. *Quickwins Smart Environment* 72

BAB V PENUTUP 76

REFERENSI 77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kondisi Ruang Kerja Sistem Pendataan Terintegrasi BECIK 24

Gambar 3.2 Tampilan Portal Satu Data Kutai Kartanegara 25

Gambar 3.3. Logo Kukar Asia Wonders 30

Gambar 3.4. Pengaplikasian Logo pada berbagai Jenis Merchandise 32

Gambar 3.5. Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Perkebunan Berkelanjutan 35

Gambar 3.6. Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Perkebunan Berkelanjutan 37

Gambar 3.7. Strategi Menjamin Keberlangsungan Inovasi BangMUs Kebulan 39

Gambar 3.8. Pendekatan Inovasi Kidung 45

Gambar 3.9. Tampilan Siruni Via Website 49

Gambar 3.10. Tampilan Siruni Via Smartphone 49

Gambar 3.11. Laman Sistem Registri Nasional (SRN) 52

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 4

Tabel 1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 5

Tabel 1.3 Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 9

Tabel 2.1 Misi Smart City Kabupaten Kutai Kartanegara 16

Tabel 2.2 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Governance* 17

Tabel 2.3 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Branding* 18

Tabel 2.4 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Economy* 19

Tabel 2.5 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Society* 20

Tabel 2.6 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Living* 21

Tabel 2.7 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Environment* 21

Tabel 3.1. Profil *Quickwins Smart Governance* 26

Tabel 3.2. Profil *Quickwins Smart Branding* 32

Tabel 3.3. Profil *Quickwins Smart Economy* 39

Tabel 3.4. Profil *Quickwins Smart Society* 46

Tabel 3.5. Profil *Quickwins Smart Living* 49

Tabel 3.6. Profil *Quickwins Smart Environment* 53
Tabel 4.1. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Governance* 57
Tabel 4.2. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Branding* 61
Tabel 4.3. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Economy* 64
Tabel 4.4. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Society* 67
Tabel 4.5. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Living* 70
Tabel 4.6. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Environment* 74

BAB I
VISI DAN PRIORITAS RPJMD

Visi dan prioritas RPJMD pada Bab I dirumuskan berdasarkan hasil telaah dokumen RPJP dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara. Lebih lanjut, Visi Misi RPJMD kemudian dipetakan berdasarkan Dimensi *Smart City* Daerah. Pemetaan Visi Misi bertujuan untuk menganalisis sinkronisasi antara Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan Dimensi *Smart City*.

1.1. Visi, Misi dan Sasaran RPJMD

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115º26' Bujur Timur dan 117º36' Bujur Timur serta diantara 1º28' Lintang Utara dan 1º08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.

Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur menjadi salah satu wilayah yang dipersiapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki komitmen untuk berkembang menjadi kabupaten cerdas yang mampu memenuhi dan meminimalisir permasalahan kabupaten dengan cara dan solusi alternatif sehingga mampu melayani masyarakat lebih baik, tercapainya kehidupan yang nyaman dan aman bagi masyarakat dan

berkelanjutan. Wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengimplementasikan *Smart City/Smart Regency* sudah terlihat dari Tahun 2017. Melalui Program Gerakan Menuju 100 *Smart City* bersama 24 Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia, Kabupaten Kutai Kartanegara terpilih sebagai salah satu Kabupaten dalam menyusun Masterplan *Smart Regency* Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen rencana induk Masterplan *Smart Regency* ini diperlukan sebagai fondasi awal dalam menerapkan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Masterplan *Smart City* Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara bertujuan sebagai arah pengembangan dan acuan dalam mengelola sumber daya (sumberdaya manusia, alam, teknologi), kesiapan infrastruktur, serta budaya yang ada di masyarakat didasarkan dengan kondisi dan karakteristik wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan Masterplan *Smart City* Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada dokumen pembangunan yang telah dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2026 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selain itu, arah pengembangan Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu juga pada dokumen perencanaan dalam lingkup yang lebih luas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi program kerja pemerintah sehingga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada tahapan terakhir (IV) dari pelaksanaan perencanaan jangka panjang daerah dimana periode pembangunan daerah tahun 2021-2026 akan dilaksanakan. Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Berdasarkan visi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 tersebut menunjukkan bahwa adanya keselarasan dengan konsep *Smart City*, karena dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berbahagia diperlukan upaya pengembangan dan pengelolaan berbagai sumberdaya sebagai potensi yang dapat digunakan untuk mendukung pelayanan publik sehingga memberikan kemudahan bagi Pemerintah dalam memberikan fasilitas pelayanan kepada masyarakat sehingga

terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan berbahagia. Inovasi baik yang bersumber dari Pemerintah atau masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kekuatan dalam pengembangan *Smart City* di Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dibagi menjadi 2 frase (bagian), yaitu Masyarakat yang Sejahtera dan Masyarakat yang Berbahagia yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Masyarakat yang sejahtera**, Batasan pengertian sejahtera, kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang mudah mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan sumber daya ekonomi secara adil dan berkesinambungan. Diharapkan dari kemudahan mendapatkan kebutuhan dasar masyarakat dan perekonomian, masyarakat semakin sejahtera.
- **Masyarakat yang berbahagia**, Kondisi masyarakat Kutai Kartanegara yang harmoni, hidup dengan penuh ketentraman diselimuti rasa kebersamaan, kepedulian, dan gotong-royong berlandaskan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan dari menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat membuat warga Kabupaten Kutai Kartanegara semakin berbahagia.

Belum Optimalnya Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Kutai Kartanegara menjadi salah satu gambaran permasalahan utama pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan permasalahan utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 6 (enam) pokok permasalahan isu strategis seperti: belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, belum optimalnya pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia, belum meratanya kualitas kesejahteraan masyarakat, belum optimalnya pembangunan perekonomian daerah, belum optimalnya pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah; dan tingginya potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Arah Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirumuskan harus mampu menjadi "akhir" dari pencapaian visi "**Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia**". Terlebih lagi dengan adanya perwujudan Ibu Kota Negara Republik Indonesia yang bertempat di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara mengharuskan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki kesiapan sebagai pendukung setiap aktivitas Ibu Kota Negara sebagai pusat pemerintahan. Sebagai daerah yang memiliki wilayah perdesaan cukup banyak dengan daerah-daerah yang jangkauannya sulit, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki "pekerjaan rumah" dalam melaksanakan pembangunan daerah yang merata dengan memfokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan

kesejahteraan masyarakat. Hal ini tentu saja menjadi suatu dorongan dalam penyusunan setiap rumusan perencanaan pembangunan agar memiliki fokus dan arah yang sama dalam menapaki koridor pembangunan baik daerah, Provinsi Kalimantan Timur maupun Nasional. Lebih lanjut, berdasarkan Visi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan kedalam 5 Misi yaitu:

Tabel 1.1 Misi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Urutan Misi	Isi Misi
Misi 1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.
Misi 2	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.
Misi 3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Misi 4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.
Misi 5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.

Lebih jauh lagi, kelima misi di detailkan kembali dalam bentuk tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani.	Meningkatnya manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Nilai SAKIP dengan pencapaian predikat A (80,01) pada akhir tahun 2026	Indeks Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan pencapaian sebesar 7,00 pada akhir tahun 2026.	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik dengan nilai 9,05 pada akhir tahun 2026	
Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya.	Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pendidikan sebesar 0,706 dan Indeks Pembangunan Kebudayaan sebesar 53,00 pada tahun 2026.	Indeks Pembangunan Manusia

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
		Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kesehatan dengan pencapaian sebesar 0,824 pada akhir tahun 2026.	
		Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Gender dengan nilai 79,20 pada akhir tahun 2026.	
	Meningkatnya kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indikator Indeks Gini sebesar 0,270 dan Indeks Desa Membangun sebesar 0,785 pada akhir tahun 2026	Tingkat Kebahagiaan
		Menurunnya pengangguran di masyarakat, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,22% dan PDRB per Kapita sebesar 204,69 (Juta Rupiah) pada akhir tahun 2023	Tingkat Kemiskinan

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 7,5% pada tahun 2026	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata sebesar 4,23% pada tahun 2026.	
		Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif sebesar 7,56% pada tahun 2026.	
		Meningkatnya daya saing investasi daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Tingkat Pertumbuhan Investasi sebesar 1,79% pada tahun 2026.	

Visi: Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan
Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas antar Wilayah.	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur dan Penataan Wilayah	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Cakupan layanan air bersih sebesar 95% dan Persentase rumah layak huni sebesar 91,44% pada akhir tahun 2026.	Indeks Kesulitan Geografis
		Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Aksesibilitas Wilayah sebesar 88,18% pada akhir tahun 2026	Persentase Penurunan Kawasan Kumuh
Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.	Meningkatnya Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 69,10 pada tahun 2026	Persentase Penurunan Emisi GRK
		Meningkatnya ketahanan bencana daerah, tingkat keberhasilan sasaran ini dapat diukur dari Indeks Risiko Bencana sebesar 100 pada tahun 2026	

Sumber: Ranwal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026

1.2. Pemetaan Misi dan Sasaran RPJMD terhadap Dimensi *Smart City*

Tabel 1.3 Sinkronisasi Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan Dimensi *Smart City*

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
1	Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Manajemen Birokrasi yang Efektif, Effisien, Inovatif, Akuntabel, Bersih dan Melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Layanan Publik	✓					
				Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Persepsi Korupsi	✓					
				Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	✓					

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
2	Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan				✓		
				Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	Indeks Pembangunan Gender					✓	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan					✓	
					Indeks Pembangunan Kebudayaan		✓			✓	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
		Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kebahagiaan	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat dan Kualitas Kehidupan Masyarakat	Indeks Gini			✓	✓		
					Indeks Desa Membangun					✓	
			Tingkat Kemiskinan	Menurunnya Pengangguran Di Masyarakat	Tingkat Pengangguran Terbuka			✓		✓	
					PDRB per Kapita			✓			

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
3	Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Pada Sektor Terbarukan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara	Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi		✓	✓			
				Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan			✓			
				Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		✓				

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
				Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif			✓			
4	Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis	Meningkatnya Kualitas Permukiman Masyarakat Dan Ketersediaan Air Bersih	Cakupan layanan air bersih				✓		✓
			Persentase penurunan kawasan kumuh	Meningkatnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah					✓		

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DIMENSI SMART CITY					
						Smart Governance	Smart Branding	Smart Economy	Smart Living	Smart Society	Smart Environment
5	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase penurunan Emisi GRK	Meningkatnya Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana				✓		✓
				Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						✓

BAB II
VISI DAN SASARAN *SMART CITY* DAERAH

Visi dan Sasaran *Smart City* Daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis strategi pembangunan melalui analisis SWOT. Analisis Visi Pembangunan *Smart City* bertujuan untuk menyelaraskan visi misi pembangunan daerah termasuk RPJP dan RPJMD daerah dengan Visi Misi Smart City yang akan disusun.

2.1 Visi *Smart City* Daerah

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari penjabaran visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang terpilih, di dalam visi termuat gambaran mengenai arah pembangunan serta kondisi pembangunan di masa depan yang hendak dicapai dalam masa jabatan. Penyusunan visi mempertimbangkan berbagai hal mulai dari kondisi, potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Kutai kartanegara, maka dari itu visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 berupa:

MEWUJUDKAN AKSELERASI PEMBANGUNAN KUTAI KARTANEGARA YANG CERDAS, MAJU DAN INOVATIF BERBASIS KEARIFAN LOKAL SEBAGAI PUSAT PENGEMBANGAN BARU IBUKOTA NEGARA

Penjabaran makna dari Visi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu:

Cerdas : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pembangunan yang dilakukan menggunakan cara yang inovatif, efektif, dan efisien sebagai solusi penyelesaian permasalahan. Pembangunan tidak semerta-merta hanya diartikan sebagai pembangunan fisik infrastruktur, melainkan pembentukan sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan dan kualitas Sumber Daya Manusia

Maju : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan menuju pada semakin efektifnya pelaksanaan pemerintahan yang bersih dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang responsif, merata, berkualitas, dan berbasis kemajuan teknologi.

Inovatif : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat membuat inovasi dalam setiap kinerja pemerintahan baik daerah hingga tatanan lokal dengan menyertakan partisipasi masyarakat secara langsung

Berbasis Kearifan Lokal : Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk dapat memanfaatkan kekayaan dan kearifan lokal baik berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia hingga kebudayaan dan adat istiadat yang ada dalam penyelenggaraan pembangunan dan bertujuan untuk menurunkan disparitas pembangunan antar wilayah serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup.

Ibukota Negara : Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian daerahnya diarahkan sebagai lokasi pengembangan Ibukota Negara menjadikan pusat pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dengan cakupan Nasional yang berbasis pada integrasi, efektifitas, efisiensi dan kemajuan teknologi

Berdasarkan Visi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya dapat diturunkan lebih lanjut dalam bentuk yang lebih rinci melalui Misi *Smart City*. Penekanan Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara ditekankan pada peningkatan pelayanan, penguatan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain:

Tabel 2.1 Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara

Urutan Misi	Isi Misi
Misi 1	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif dan efisien melalui pembangunan fisik, sumber daya manusia dan pelayanan publik berbasis teknologi, informasi dan komunikasi
Misi 2	Mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat pelayanan publik dan infrastruktur dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan terintegrasi dengan Pengembangan Ibu Kota Negara
Misi 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan Pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola yang profesional dan transparan
Misi 4	Meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan
Misi 5	Mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat

Visi Misi *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan sasaran *Smart City* Daerah. Sasaran *Smart City* Daerah diuraikan dalam bentuk ukuran capaian keberhasilan yang disusun dalam sasaran *Smart City* daerah.

2.2. Sasaran Jangka Pendek *Smart Governance*

Smart Governance merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang efisien, efektif dan terintegrasi. Dimensi s*mart governance* masuk ke dalam misi *Smart City* yang pertama dan ketiga. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa layanan publik (*public services),* birokrasi *(bureaucracy),* dan perancangan kebijakan *(policy design)*. Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada pembangunan dan perwujudan tata kelola pemerintah khususnya mendukung pengembangan Ibu Kota Negara serta berupaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi

Tabel 2.2. Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Governance*

Sub Dimensi	Sasaran
Public Services	● Pembangunan dan pengembangan layanan masyarakat berbasis teknologi dan digital. ● Meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya layanan kependudukan berbasis NIK. ● Mengelola pelayanan pengaduan publik.
Bureaucracy	● Meningkatkan pelayanan kepegawaian berbasis digital. ● Meningkatkan kualitas manajemen keuangan desa. ● Menyediakan sistem pengendalian internal pemerintahan berbasis digital.
Policy Design	● Menyediakan layanan pajak daerah *online.* ● Menyediakan layanan *call center*

2.3. Sasaran Jangka Pendek *Smart Branding*

Smart Branding merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu membangun *image*/citra Kabupaten Kutai Kartanegara agar membantu dalam proses promosi baik di bidang pariwisata maupun sosial, budaya dan ekonomi. Dimensi s*mart branding* masuk ke dalam misi *Smart City* yang ke-ketiga. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa pariwisata (*tourist),* daya saing bisnis *(Business Competitiveness),* dan wajah (tampilan) kota *(Face of The City)*. Strategi dan arah kebijakan difokuskan pada pengembangan Ibu Kota Negara serta membangun citra daerah (dari segi ekonomi, sosial, politik, pariwisata dan budaya).

Tabel 2.3 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Branding*

Sub Dimensi	Sasaran
Tourist	● Membuat branding wisata "Kukar Asia Wonder". ● Meningkatkan infrastruktur objek wisata yang dikelola. ● Pembinaan POKDARWIS. ● Promosi dan pameran wisata lokal. ● Membangun *website* dan sosial media berkaitan dengan potensi wisata. ● Menyelenggarakan *event* pariwisata. ● Menyediakan ruang kreatif masyarakat. ● Membina pelaku ekonomi kreatif yang berkaitan dengan pariwisata.
Business Competitiveness	● Peningkatan dan kemudahan pelayanan guna meningkatkan peluang potensi investasi dan pengembangan perekonomian daerah untuk mampu meningkatkan daya saing daerah melalui reformulasi desain investasi menuju hilirisasi SDA.
Face of The City	● Membangun jaringan komunikasi dengan pimpinan, media dan masyarakat. ● Membangun *website* dan sosial media. ● Meningkatkan keterbukaan informasi publik.

2.4. Sasaran Jangka Pendek *Smart Economy*

Smart Economy dalam *Smart City* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem industri yang mampu beradaptasi sesuai tantangan di era informasi dengan cara yang cerdas dengan faktor lingkungan sehingga mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung-jawab, dan berkelanjutan. Dimensi *Smart Economy* Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam misi kedua *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Tujuan yang ingin dicapai antara lain yaitu mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, berkelanjutan, dan aspek kelestarian lingkungan. Sasaran *Smart Economy* dirinci kedalam tiga elemen yaitu ekosistem industri (*industry*), peningkatan kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan ekosistem transaksi keuangan (*transaction*).

Tabel 2.4 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Economy*

Sub Dimensi	Sasaran
Industry	● Membangun industri primer dan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan. ● Membangun industri pengolahan dari hasil bahan mentah ● Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal ● Meningkatkan produktivitas melalui pemberdayaan dan penguatan kualitas koperasi dan UMKM
Welfare	● Peningkatan kapasitas dan kompetensi angkatan kerja ● Melakukan kerjasama antar desa ● Membuat program pemberdayaan ekonomi kerakyatan ● Peningkatan kemitraan dengan swasta ● Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
Transaction	● Meningkatnya realisasi investasi ● Meningkatkan pendanaan pembangunan daerah

2.5. Sasaran Jangka *Pendek Smart Society*

Smart Society Kabupaten Kutai Kartanegara tersirat pada misi ke tiga yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang mendukung perwujudan pengembangan Ibu Kota Negara melalui tata kelola

yang profesional dan transparan. Dimensi *smart society* diterjemahkan kedalam indikator membangun masyarakat yang madani dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Sasaran dari *smart society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*). Strategi dan arah kebijakan pada *smart society* bertujuan untuk mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi.

Tabel 2.5 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Society*

Sub Dimensi	**Sasaran**
Community	● Membentuk komunitas yang produktif dan berkualitas dalam pengembangan SDM
Learning	● Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat
Security	● Sistem keamanan masyarakat yang partisipatif dan terintegrasi

2.6. Sasaran Jangka *Pendek Smart Living*

Smart living merupakan salah satu dimensi *Smart City* yang digunakan untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat dengan tiga elemen utama yaitu kelayakan pola hidup (*harmony*), kelayakan kualitas kesehatan (*health*), dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di suatu daerah (*mobility*). *Smart living* bertujuan untuk menjamin pengelolaan sarana pelayanan dasar seperti bidang pendidikan, kesehatan untuk pemerataan pembangunan dan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan nyaman. Dimensi *smart living* tersirat dalam Misi ke-4, yaitu meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang diwujudkan dengan pemanfaatan kekayaan sumberdaya alam dan kearifan lokal serta tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Tabel 2.6 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Living*

Sub Dimensi	**Sasaran**
Harmony	● Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian RTRW ● Menambah kawasan yang dijadikan ruang kegiatan publik
Health	● Perbaikan serta peningkatan fasilitas dan pelayanan kesehatan
Mobility	● Penambahan dan perbaikan infrastruktur transportasi

2.7. Sasaran Jangka *Pendek Smart Environment*

Smart Environment merupakan salah satu dimensi dalam *Smart City* yang memiliki tujuan yaitu mewujudkan keseimbangan ekosistem dengan menjaga kualitas lingkungan demi kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat. Dimensi s*mart environment* masuk ke dalam misi *Smart City* yang keempat dan lima. Beberapa sub-dimensi yang ada berupa proteksi lingkungan (*Environmental Protection),* pengelolaan sampah dan limbah *(Waste Management),* dan tata kelola energi *(Energy)*. Beberapa hal yang ditekankan dalam dimensi ini yaitu berupa strategi dalam mewujudkan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berwawasan lingkungan mulai dari pengaturan regulasi lingkungan hidup hingga pengendalian kualitas sumberdaya dan pemanfaatan energi.

Tabel 2.7 Sasaran Jangka Pendek Dimensi *Smart Environment*

Sub Dimensi	**Sasaran**
Environmental Protection	● Mengatur regulasi lingkungan hidup. ● Pengendalian kualitas lingkungan hidup dalam mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. ● Meningkatkan peran swasta dalam mengelola lahan pasca tambang. ● Meningkatkan edukasi akan pentingnya menjaga kesadaran kelestarian alam. ● Memberikan penghargaan terhadap para pejuang lingkungan.

Sub Dimensi	Sasaran
Waste Management	● Peningkatan aksesibilitas, kemudahan, kesederhanaan dalam melengkapi data bank sampah. ● Mengembangkan sistem tata kelola untuk limbah dan sampah
Energy	● Meningkatnya fungsi pelayanan infrastruktur sumber daya air ● Terpenuhinya kebutuhan energi daerah

BAB III
PROFIL *QUICK WINS SMART CITY* DAERAH

Program unggulan atau program prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara terbagi kedalam enam dimensi *Smart City* yaitu *smart governance, branding, economy, society, living,* dan *environment*. Program unggulan atau yang disebut dengan program *quickwins* merupakan program yang disusun berdasarkan urgensi permasalah di Kabupaten baik yang sudah dikerjakan atau belum, dan akan terus dilanjutkan pengembangannya pada kurun waktu satu tahun ke depan.

3.1. *Quickwins Smart Governance*

Sistem pendataan merupakan salah satu hal yang esensial untuk dimiliki oleh sebuah pemerintahan. Menyediakan data yang lengkap dan terintegrasi merupakan salah satu tujuan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berbagai aspek mulai dari pemerintahan hingga pendataan masyarakat memerlukan sistem pendataan yang baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pendataan khususnya yang menjangkau secara keseluruhan dengan mekanisme pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural. Inovasi ini disebut dengan "BECIK" yaitu singkatan dari Bebaya Etam Ciptakan Informasi Kolaboratif Kutai Kartanegara (Satu Data Kutai Kartanegara).

Becik merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka menyediakan sistem pendataan terintegrasi dalam pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural pada masing-masing perangkat daerah dan dapat diintegrasikan ke jenjang kewilayahan. Sistem ini dibangun didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Adapun jenjang tanggung jawab verifikasi secara struktural pada perangkat daerah mulai dari pejabat pengawas (eselon IV) sebagai operator, pejabat administrator (eselon III), sebagai verifikator dan pejabat tinggi pratama (Eselon II) sebagai *signer*, sedangkan distribusi kewilayahan mulai dari, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat RT. Selanjutnya data-data yang diinput ditampilkan secara terbuka di *website* https://becik.kukarkab.go.id yang dikemas secara informatif dalam bentuk data dasar maupun data-data analisis sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan penanggung jawab data (produksi data).

Gambar 3.1. Kondisi Ruang Kerja Sistem Pendataan Terintegrasi BECIK

Sumber: https://becik.kukarkab.go.id/

Aplikasi BECIK sudah berjalan dalam skema uji coba di beberapa OPD, dan aplikasi sudah dapat difungsikan secara baik mulai dari RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, atau dalam skala 90% Aplikasi sudah siap. Selanjutnya tahapan-tahapan yang dilaksanakan antara lain:

1. Penginputan User Role (pengguna/aku penanggung jawab data) (Status: proses); Target Minggu III Oktober 2021
2. Penyusunan Metadata di masing-masing Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan aplikasi e-RPJMD. (Status: Proses); Target Akhir Oktober 2021.
3. Penyusunan SOP Validasi Data oleh Diskominfo sebagai wali data (Status: Proses): Target Minggu III November 2021.
4. Penginputan Data (Status: Belum Berjalan); Target Minggu IV November 2021.
5. Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia (status: Koordinasi); Target akhir Desember 2021.

Manfaat dari aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Internal
    - Sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan target-target pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD dan Renstra.
    - Mendistribusikan penanggung jawab data berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Perangkat Daerah, yang dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi kinerja masing-masing pejabat struktural dalam penyediaan data.
    - Mempermudah proses analisis data dengan data yang terstandar dalam satu sumber, sehingga konsistensi data dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan.
    - Proses input dilaksanakan secara *online*, sehingga dapat dikontrol secara *realtime.*

2. Eksternal
    - Dapat diakses secara terbuka secara online data-data pembangunan dalam kategori data terbuka.
    - Data terpublikasi secara series sehingga seluruh pengguna data dapat melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan

Keunikan dari aplikasi adalah data dapat diakses secara terbuka yang disertai dengan penanggung jawab data secara berjenjang, terintegrasi dengan aplikasi perencanaan (e-RPJMD) dan dapat di *breakdown* dalam pendekatan kewilayahan. Dalam menjalankan konsep satu data, maka data-data yang di*publish* merupakan data-data dalam satu standar data, sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah lainnya, yakni Pemerintah Desa sebagai wilayah administratif kewilayahan terkecil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyediaan data regional, dan Bappenas RI dalam penyediaan Satu Data Indonesia. Adapun rencana pengembangan lebih lanjut nantinya akan diintegrasikan dengan laporan SDG's Kabupaten Kutai Kartanegara, diintegrasikan dengan aplikasi *e-pantau* sebagai laporan kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, serta diintegrasikan dengan Geoportal Kutai Kartanegara dalam penyediaan Satu Data Satu Peta.

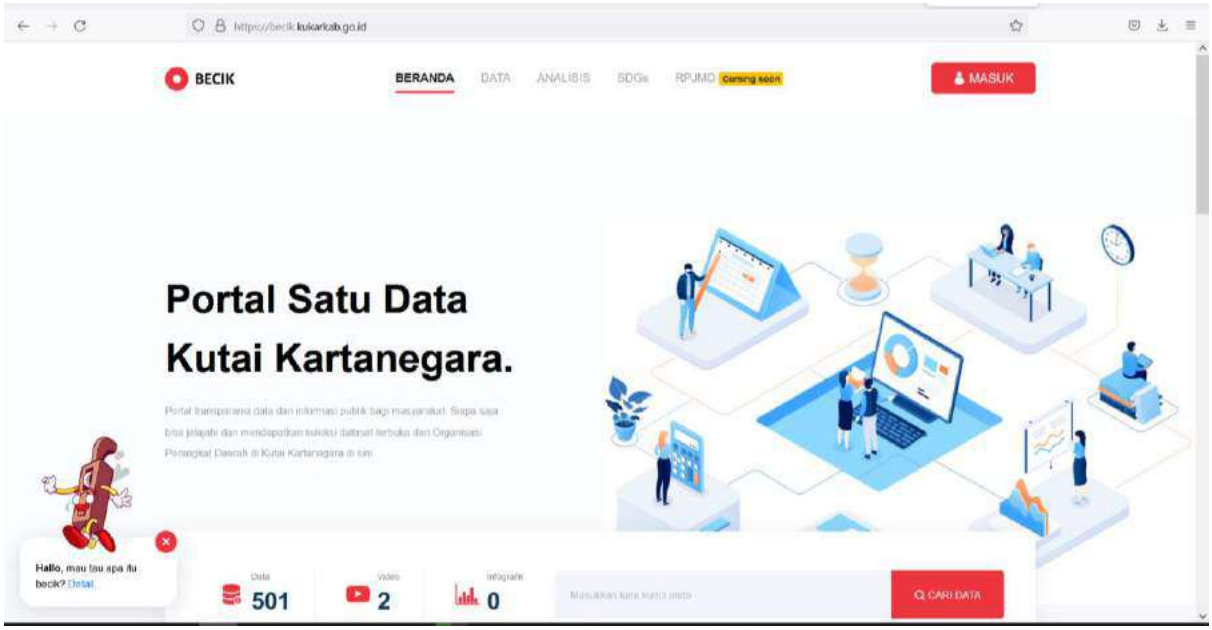

Gambar 3.2. Tampilan Portal Satu Data Kutai Kartanegara

Sumber: https://becik.kukarkab.go.id/

Pembangunan data merupakan upaya terus menerus dan aktual, sehingga dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem dalam penggunaan aplikasi perlu dukungan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati. Sumber daya yang digunakan diupayakan secara mandiri, dengan kolaborasi

kekuatan SDM dari Diskominfo Kutai Kartanegara khususnya Tenaga Ahli IT dan Programer, serta secara teknis untuk pengawalan konten, akan memperkuat personil pengelola data di Kecamatan sebagai persiapan pelaksanaan Kecamatan Pusat Layanan Data dan Informasi, sebagaimana terdapat dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Berbagai aplikasi atau sistem yang ada pasti memiliki resikonya tersendiri. Untuk sistem informasi tersebut memiliki risiko seperti jaringan internet yang tidak sampai ke wilayah-wilayah pelosok desa/RT hingga sarana dan Prasarana IT yang masih terbatas, seperti kapasitas server dan backup data. Selain itu terdapat pula kendala dalam keterbatasan SDM pengelola aplikasi, diantaranya *programmer* masih bersifat tenaga kontrak yang mengakibatkan kadang kala konten tidak sesuai dengan konsep penyusunan data, karena keterbatasan pemahaman para operator dan verifikator data. Sehingga diperlukan mekanisme penanganan dengan melakukan penguatan jaringan internet di lokasi *blank spot*, dan menyiapkan konsep upload data file excel untuk daerah-daerah tertentu yang tidak terlayani internet, dan difasilitasi oleh kecamatan, hingga memastikan server dan pengamanan server di Diskominfo sesuai dengan standar pengamanan server.

Tabel 3.1. Profil *Quickwins Smart Governance*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	**Penjelasan**
1. Nama Singkat Inovasi	**"BECIK"** BEBAYA ETAM CIPTAKAN INFORMASI KOLABORATIF KUTAI KARTANEGARA (SATU DATA KUTAI KARTANEGARA)
2. Penjelasan singkat	Becik merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka menyediakan sistem pendataan terintegrasi dalam pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural pada masing-masing perangkat daerah dan dapat diintegrasikan ke jenjang kewilayahan. Sistem ini dibangun didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Adapun jenjang tanggung jawab verifikasi secara sruktural pada perangkat daerah mulai dari pejabat pengawas (esselon IV) sebagai operator, pejabat administrator (esselon III), sebagai verifikator dan pejabat tinggi pratama (Esselon II) sebagai signer, sedangkan distribusi kewilayahan mulai dari, tingkat kecamatan, tingkat desa/kelurahan hingga ke tingkat RT.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Selanjutnya data-data yang diinput ditampilkan secara terbuka di website https://becik.kukarkab.go.id yang dikemas secara informatif dalam bentuk data dasar maupun data-data analisis sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah berdasarkan penanggung jawab data (produsen data)
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Aplikasi BECIK sudah berjalan dalam skema ujicoba di beberapa OPD, dan aplikasi sudah dapat difungsikan secara baik mulai dari RT, Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten, atau dalam skala 90% Aplikasi sudah siap. Selanjutnya tahapan-tahapan yang dilaksanakan antara lain: 1. Penginputan User Role (pengguna/aku penanggung jawab data) (Status: proses); Target Minggu III Oktober 2021 2. Penyusunan Metadata di masing-masing Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan aplikasi e-RPJMD. (Status: Proses); Target Akhir Oktober 2021. 3. Penyusunan SOP Validasi Data oleh Diskominfo sebagai walidata (Status: Proses): Target Minggu III November 2021. 4. Penginputan Data (Status: Belum Berjalan); Target Minggu IV November 2021. 5. Integrasi dengan Portal Satu Data Indonesia (status: Koordinasi); Target akhir Desember 2021.
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat dari aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu **1. Internal** • Sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan target-target pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD dan Renstra; • Mendistribusikan penanggung jawab data berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Peragkat Daerah, yang dapat digunakan sebagai bagian dari evaluasi kinerja masing-masing pejabat structural dalam penyediaan data; • Mempermudah proses analisis data dengan data yang terstandard dalam satu sumber, sehingga konsistensi data dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan. • Proses input dilaksanakan secara online, sehingga dapat dikontrol secara *realtime*. **2. Eksternal** • Dapat diakses secara terbuka secara online data-data pembangunan dalam kategori data terbuka. • Data terpublis secara *series* sehingga seluruh pengguna data dapat melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
5. Keunikan / kreativitas	Keunikan dari aplikasi adalah data dapat diakses secara terbuka yang disertai dengan penanggung jawab data secara berjenjang, terintegrasi dengan aplikasi perencanaan (e-RPJMD) dan dapat di *breakdown* dalam pendekatan kewilayahan Contoh : 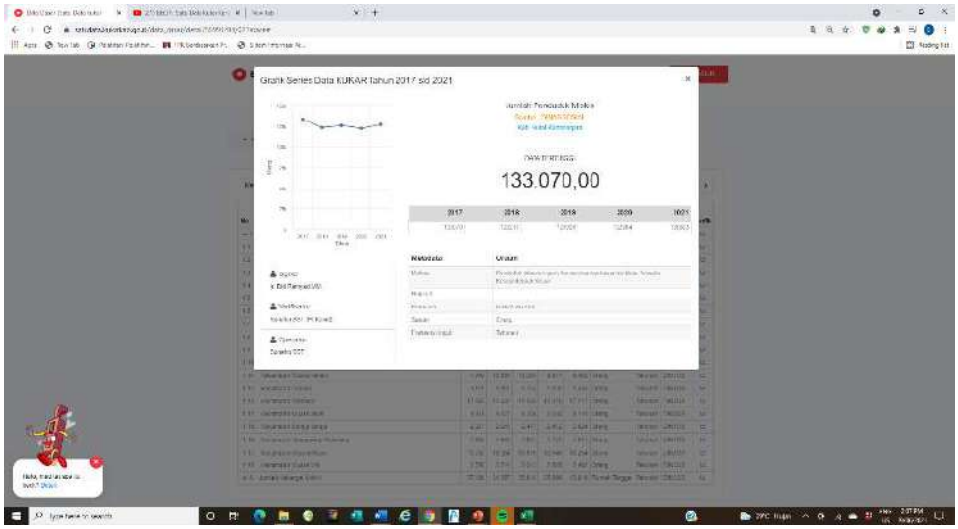

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	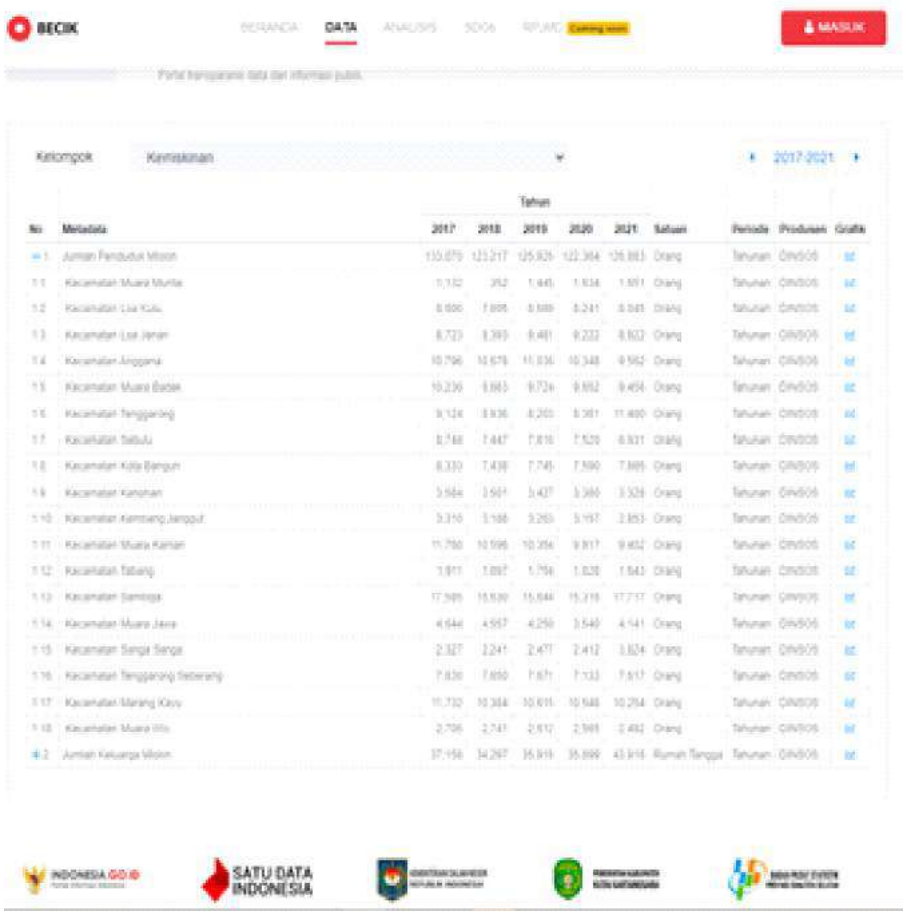
6. Kemitraan	Dalam menjalankan konsep satu data, maka data-data yang dipublis merupakan data-data dalam satu standar data, sehingga dalam pelaksanaannya, diperlukan kolaborasi dan kemiitraan dengan pemerintah lainnya, yakni Pemerintah Desa sebagai wilayah administratif kewilayahan terkecil di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyediaan data regional, dan Bappenas RI dalam penyediaan Satu Data Indonesia.
Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Pengembangan lebih lanjut: 1. Diintegrasikan dengan laporan SDG's Kabupaten Kutai Kartanegara 2. Diintegrasikan dengan aplikasi *e-pantau* sebagai laporan kinerja program/kegiatan/subkegiatan; 3. Diintegrasikan dengan Geoportal Kutai Kartanegara dalam penyediaan Satu Data Satu Peta.
Strategi Menjaga Keberlangsungan	Pembangunan data merupakan upaya terus menerus dan aktual, sehingga dalam rangka menjaga keberlangsungan sistem maka penggunaan aplikasi akan didukung dengan regulasi daerah berupa Peraturan Bupati.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.2. *Quickwins Smart Branding*

Branding dan *image* daerah sangat diperlukan bukan hanya sebagai media promosi pariwisata tetapi juga sebagai citra dan identitas daerah agar lebih mudah untuk diperkenalkan bukan hanya dalam lingkup internal tetapi juga eksternal. Persaingan yang ketat bukan hanya antar daerah tetapi juga sampai ke lingkup global menjadikan identitas sangat penting sebab menggambarkan kondisi dan keunikan dari masing-masing daerah yang ada. Maka dari itu salah satu media promosi daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara diberi nama “Kukar Asia Wonders”.

Identitas ini menggambarkan bagaimana kondisi dan keunikan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pembentukan logo *branding* sangat relevan dengan adanya kekayaan SDM dan SDA Kutai Kartanegara sebagai penunjang keberagaman multikultural dari berbagai segi kehidupan masyarakat pesisir (hilir), kesultanan (tengah) dan pedalaman (hulu) yang masing-masing punya ciri khas yang kuat pada setiap daerahnya dan akan tetap menjadi identitas yang patut untuk dipertahankan. Dengan mengangkat simbol kepercayaan lokal terhadap sosok yang juga diagungkan dalam mitologi dari kerajaan Kutai Ing Martadipura, Lembuswana merupakan penggabungan dari seluruh elemen kekuatan berbagai hewan yang dijadikan satu kesatuan sehingga sangat selaras dengan keanekaragaman suku dan budaya.

Gambar 3.3. Logo Kukar Asia Wonders
Sumber: https://www.facebook.com/kukarasiawonders/

Berbagai upaya dilakukan untuk mengenalkan identitas ini diantaranya yaitu dengan membuat

berbagai *merchandise* seperti buku, botol minum, masker dan seminar kit. Hal ini bertujuan untuk menggalangkan dan mempromosikan identitas agar lebih mudah untuk dikenal oleh masyarakat. Secara tidak langsung dengan adanya identitas tersebut akan memudahkan dalam mempromosikan berbagai kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara baik itu sumber daya alam, manusia hingga pariwisata. Beberapa potensi yang dimiliki oleh kabupaten Kutai Kartanegara diantaranya yaitu:

- Potensi Wisata yaitu objek wisata yang memiliki fungsi edukatif, wisata hiburan untuk keluarga, wisata adat/religi/ kepercayaan, wisata budaya, desa wisata (kampung tematik):
  - Wisata Edukasi yaitu objek wisata yang memiliki fungsi edukatif: Museum (Arkeologi, Seni & Budaya), Kampung Tematik Edukatif
  - Wisata Keluarga yaitu wisata yang sengaja dibuat untuk tujuan wahana hiburan & rekreasi bagi keluarga
  - Wisata Religi yaitu objek wisata yang berhubungan dengan tempat ibadah, tempat-tempat suci - bangunan masjid kuno, makam dan petilasan raja, sunan, dll.
  - Wisata Budaya yaitu event-event atau festival seni budaya contoh berupa pameran kerajinan, carnival, fashion, tari, musik
  - Desa Wisata (Kampung Tematik) yaitu Objek wisata yang berbasis pada potensi lokal & inovasi meliputi: Desa Agro Wisata; Desa Tenun; dan Desa Adat.

- Potensi Budaya harus mengedepankan berbagai aspek seperti:
  - *Friendly People*: masyarakat yang ramah, bersahabat dan toleran.
  - *Creative People*: masyarakat yang terbuka (open mind) dan dinamis yang siap berkolaborasi untuk eksplorasi karya eksperimental dan kontemporer.
  - *Exotic Culture*: seni budaya yang sangat eksotis.
  - *Arts & Crafts*: hasil kriya dan karya seni yang otentik.
  - *Performing Arts Hub*: destinasi pariwisata seni tradisional, seni modern, dan seni kreatifitas (eksperimen).
  - *Cultural Festival Center*: destinasi festival budaya spt carnival, bazar kuliner tradisional, pameran budaya, dll.
  - Kuliner khas lokal: makanan/minuman/jajanan asli lokal

Gambar 3.4. Pengaplikasian Logo pada berbagai Jenis *Merchandise*

Sumber: https://www.facebook.com/kukarasiawonders/

Berbagai bentuk dan upaya pemerintah dalam mengenalkan Kukar Asia Wonders yaitu dengan membuat berbagai *platform* media sosial seperti Facebook, Youtube dan lain sebagainya. Media-media ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, daerah lain dan lingkup global, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam bentuk kegiatan promosi dan *branding* ke berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Berbagai resiko atau tantangan yang sejauh ini dialami yaitu penggunaan logo yang tidak sesuai dan menyalahi kaidah yang ada, maka dari itu perlu diperhatikan dalam proses penyematan logo agar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Tabel 3.2. Profil *Quickwins Smart Branding*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	Kukar Asia Wonders Pembentukan Logo Branding Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Penjelasan singkat	1. Pembentukan logo branding sangat relevan dengan adanya kekayaan SDM dan SDA Kutai Kartanegara sebagai penunjang keberagaman multikultural dari berbagai segi kehidupan masyarakat pesisir (hilir). Kesultanan (tengah) dan pedalaman (hulu), yang masing-masing punya ciri khas yang kuat pada setiap daerahnya dan kan tetap menjadi identitas yang patut untuk dipertahankan, dengan semakin mengangkat simbol kepercayaan lokal terhadap sosok yang juga diagungkan dalam mitologi dari kerajaan Kutai Ing Martadipura. Lembuswana merupakan penggabungan dari seluruh elemen kekuatan berbagai hewan yang dijadikan satu kesatuan sehingga sangat selaras dengan keanekaragaman suku dan budaya.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	1. Telah tersosialisasikannya kepada beberapa kelompok sasaran seperti pelaku yang bergerak di bidang pariwisata. Berbagai bentuk aplikasi brand diberbagai media
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat dari aplikasi ini yaitu Mengangkat, mempromosikan dan mengoptimalkan potensi Kutai Kartanegara • Potensi Alam: Adventure in nature. Tempat-tempat keindahan alam untuk berpetualang. • Potensi Sejarah: Bangunan "PENINGGALAN" bersejarah: Candi & Situs, Rumah Adat, Kraton, Bangunan Kuno. • Potensi Wisata: Objek wisata yang memiliki fungsi edukatif, wisata hiburan untuk keluarga, wisata adat/religi/ kepercayaan, wisata budaya, desa wisata (kampung tematik)

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	• Wisata Edukasi: Objek wisata yang memiliki fungsi edukatif: Museum (Arkeologi, Seni & Budaya), Kampung Tematik Edukatif • Wisata Keluarga: Wisata yang sengaja dibuat untuk tujuan wahana hiburan & rekreasi bagi keluarga • Wisata Religi: Objek wisata yang berhubungan dengan tempat ibadah, tempat-tempat suci - bangunan masjid kuno, makam & petilasan raja, sunan, dll. • Wisata Budaya: Event-event atau festival seni budaya contoh - Pameran Kerajinan, Carnival, Fashion, Tari, Musik • Desa Wisata (Kampung Tematik). Objek wisata yang berbasis pada potensi lokal & inovasi meliputi: a. Desa Agro Wisata b. Desa Tenun c. Desa Adat • Potensi Budaya: friendly people, creative people, exotic culture, arts & crafts, performing arts hub, cultural festival center, authentic culinary.
5. Keunikan / kreativitas	Menjadi identitas daerah yang akan mudah untuk diingat baik oleh masyarakat Kutai Kartanegara maupun masyarakat luar hingga internasional
6. Kemitraan	-
Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	• Promosi • Pemgembangan berbagai produk
Strategi Menjaga Keberlangsungan	1. Mensosialisasi serta menggunakan pada berbagai atribut dan kegiatan daerah
Sumber daya yang digunakan	1. Sumberdaya yang digunakan untuk pengembangan lebih lanjut ialah bentuk-bentuk kegiatan promosi dan branding ke berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat
10. Analisa Risiko	1. Penggunaan logo yang tidak sesuai dan menyalahi kaidah yang ada. Perlu diperhatikan dalam proses penyematan logo agar sesuai dengan ketentuan yang ada.

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.3. *Quickwins Smart Economy*

Komoditas perkebunan menjadi salah satu komoditas utama di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kondisi topografi dan curah hujan yang ada memberikan dampak positif pada perkembangan sektor

perkebunan baik kelapa sawit, karet, lada, kopi, kakao, aren dan kemiri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021, luas area perkebunan kelapa sawit masih mendominasi yaitu sebesar 28291 Ha dengan jumlah produksi sebesar 274235.71 ton. Dilain sisi, jalinan kemitraan yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan karena masih lemahnya posisi tawar perkebunan, belum adanya legalitas usaha perkebunan, belum tersedianya regulasi daerah yang mengatur penyelenggaraan pelayanan pendaftaran usaha perkebunan rakyat, serta masih minimnya pelayanan berbasis teknologi informasi secara online untuk mewujudkan pelayanan yang mudah, cepat dan transparan menjadi permasalahan yang penting untuk segera diselesaikan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Dinas Perkebunan menciptakan terobosan inovasi yang diberi nama BangMUs Kebulan.

Gambar 3.5. Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021a

Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan atau yang sering disebut dengan BangMUs Kebulan merupakan inovasi dalam pengembangan kemitraan usaha perkebunan berkelanjutan melalui legalisasi usaha perkebunan rakyat berbasis sistem informasi manajemen kemitraan. Berbeda dari program lainnya, inovasi BangMUs Kebulan mampu meningkatkan kepercayaan diantara pihak-pihak yang bermitra menuju kemitraan yang saling menguntungkan, saling menguatkan dan berkelanjutan. Dengan adanya legalisasi usaha perkebunan rakyat secara legal, pekebun-pekebun rakyat dituntut untuk mendaftarkan atau memiliki Surat Tanda Pendaftaran Budidaya dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BangMUs Kebulan bertujuan untuk membangun regulasi daerah yang bisa menciptakan iklim usaha yang baik sehingga kemitraan antara perkebunan rakyat dengan perusahaan besar bisa berjalan sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang. Dengan adanya inovasi BangMUs Kebulan, diharapkan pelayanan pendaftaran usaha kebun rakyat dan fasilitasi kemitraan lebih mudah, cepat, transparan dan efisien (berbasis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendaftaran Usaha Perkebunan Rakyat), menciptakan iklim kemitraan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan, dan tersedianya sistem database usaha perkebunan rakyat dan database kemitraan usaha perkebunan. Adapun manfaat dari inovasi ini sebagai berikut.

1. **Internal**
    - Aparat internal merasa terlindungi dan terarahnya dalam memberikan pelayanan karena adanya kepastian hukum dan kejelasan tata kelola.
    - Dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat maka jajaran Dinas perkebunan juga terwujud rasa puas dan bangga serta kinerjanya tinggi.
    - Tercapainya kemudahan dan kelancaran memberikan pelayanan, mengakses data, mendesain rencana dan memecahkan permasalahan-permasalahan.
    - Turut mewujudkan program *Smart City* .
    - Merasa aman dari ancaman penyebaran Covid-19, apabila pandemi Covid-19 masih terus berlangsung

2. **Eksternal**
    - Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kejelasan tata kelola dalam melakukan pendaftaran usahanya.
    - Terwujudnya kemudahan dan kecepatan serta efisiensi dalam pelayanan.
    - Pelanggan juga merasa aman dari ancaman penyebaran Covid-19 apabila pandemi Covid-19 masih terus berlangsung.
    - Tidak terjadinya pungutan liar yang kemungkinan dilakukan oleh oknum petugas.
    - Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Pertanian akan memperoleh kemudahan dalam mengakses dan atau memperoleh data yang lebih akurat.

Berpedoman pada rancangan Peraturan Bupati tentang tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Rakyat serta peraturan perundang-undangan lainnya, perlu dilakukan

perancangan dan uji coba penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (SiDa_RaKAT), yang kontennya mencakup (3) tiga sub aplikasi yaitu untuk:

a) Pengajuan, proses dan pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Untuk Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B online).

   Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B) Online ini ditujukan untuk pekebun yang akan mengajukan STD-B diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk mengajukan permohonannya pemohon dapat mengajukan langsung melalui aplikasi SIDa_RaKaT Dinas Perkebunan Kab. Kutai Kartanegara atau melalui petugas di Kantor Desa.

b) Untuk pengajuan calon pekebun mitra serta proses evaluasi dan penetapan pekebun mitra (CPP Online)

   Adapun syarat pengajuan penetapan Calon Petani Plasma di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu : Surat Permohonan, Pernyataan Bersama (PBS-Koperasi), Perjanjian Bersama (PBS-Koperasi), BA Penetapan Peserta Plasma, Daftar Nama Anggota Koperasi Peserta Plasma, Berita Acara Ploting Lahan/Areal Plasma, Ijin Lokasi (Untuk Inti dan Plasma), dan Rekomendasi Penetapan CPP dari Disperindagkop.

c) Untuk ruang diskusi menyangkut permasalahan yang terkait dengan kemitraan.

   Terdapat berbagai ruang diskusi yang disediakan didalam webiste meliputi forum diskusi perkebunan, tawaran kemitraan, dan pasar komoditi.

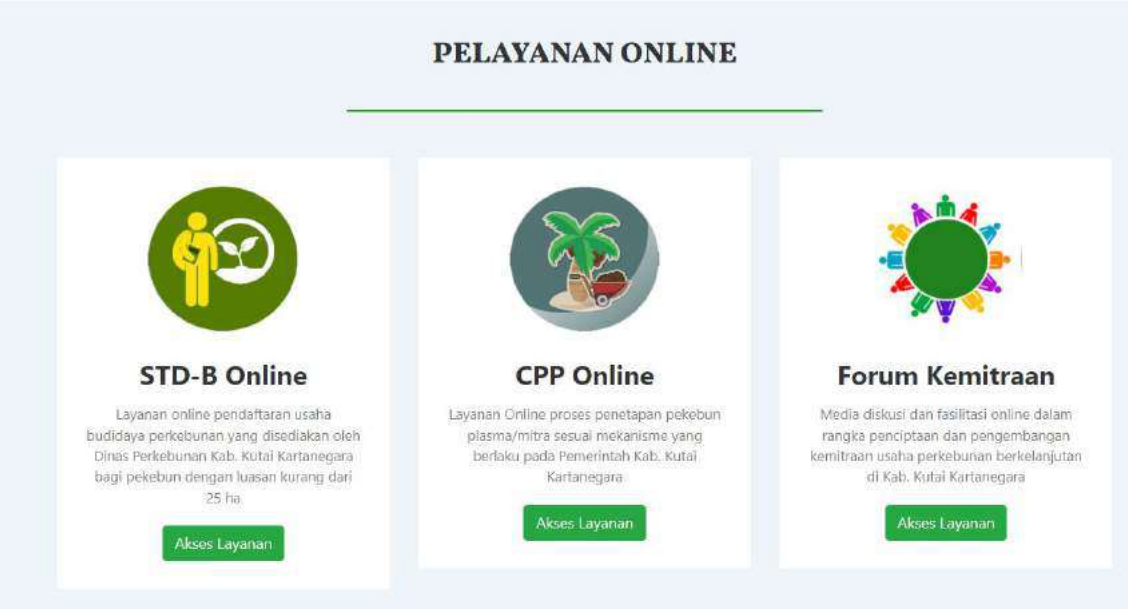

Gambar 3.6. Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Perkebunan Berkelanjutan
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021a

Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan atau BangMUs Kebulan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang meliputi: Para Pekebun Rakyat (khususnya pekebun kelapa sawit sebagai penerima manfaat utama dari implementasi inovasi), Lembaga pekebun rakyat (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Perkebunan, BUMDes), Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Cabang Kab. Kutai Kartanegara, Pemerintah desa/Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kab. Kutai Kartanegara, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kutai Kartanegara, Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, Bagian Sumber Daya Alam Setda Kab. Kutai Kartanegara, Bagian Hukum Kab. Kutai Kartanegara, Kantor Pertanahan/BPN Kab. Kutai Kartanegara, Bagian Pemangku Kesatuan Hutan (BPKH) Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Ditjen Perkebunan, dan Kementerian Pertanian.

Sampai dengan saat ini, BangMUs Kebulan sudah diimplementasikan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Telah dilakukan sosialisasi kepada beberapa kelompok sasaran (Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kab. Kutai Kartanegara, Pengurus Kontak Tani Andalan (KTNA) Kab. Kutai Kartanegara, Beberapa Pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit, serta Pekebun yang tersebar di Kecamatan) tentang pendaftaran usaha budidaya perkebunan rakyat serta pengajuan dan proses penetapan pekebun peserta mitra berbasis aplikasi online. Selain itu, saat ini proses pendaftaran usaha budidaya perkebunan rakyat/penerbitan STD-B dilakukan melalui aplikasi SIDa_RaKAT dimana proses verifikasi dan evaluasi usulan penetapan Pekebun Peserta Mitra/Plasma khususnya untuk skema koperasi sedang proses pengerjaan. Dalam menjamin keberlangsungan inovasi ini, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan enam tahapan sebagai berikut.

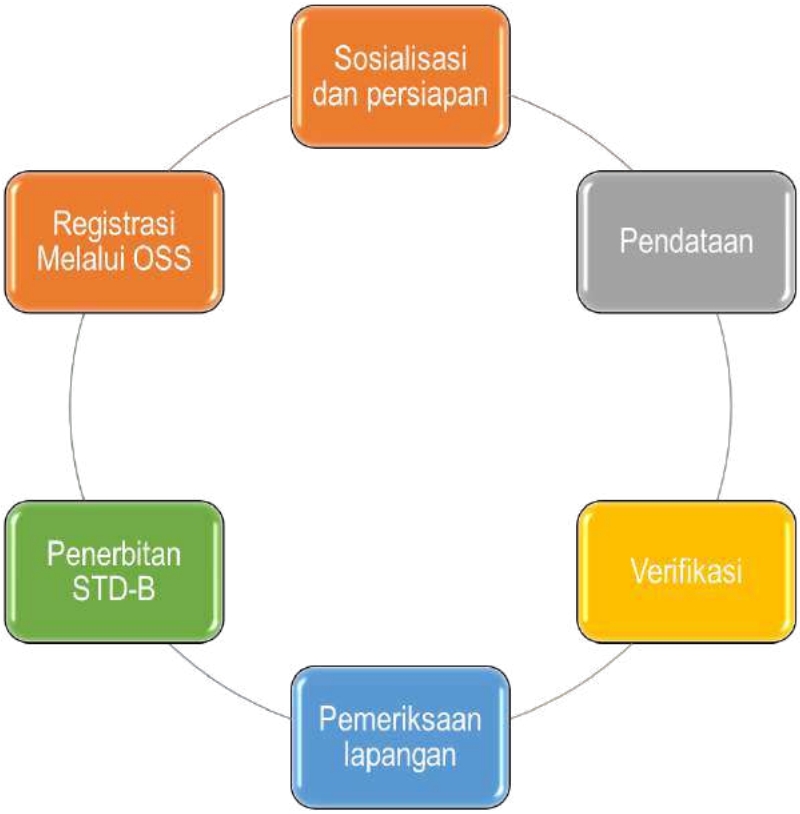

Gambar 3.7. Strategi Menjamin Keberlangsungan Inovasi BangMUs Kebulan

Sumber: Hasil analisis, 2021

Secara umum, inovasi ini memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain yang memiliki potensi usaha perkebunan yang cukup besar, baik perkebunan rakyat maupun usaha perkebunan besar. Lebih jauh, adanya arahan dari Kementerian Pertanian yang mendorong daerah-daerah dengan potensi usaha perkebunan yang relatif besar agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan dalam pendataan usaha perkebunan rakyat, menyediakan sistem informasi yang memadai bagi pelaksanaan pendaftaran usaha perkebunan, dan mewujudkan kemitraan usaha perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan, saling menguatkan dan berkelanjutan mendorong inovasi BangMUS Kebulan untuk dapat di replikasi pada berbagai daerah dengan karakteristik dan permasalahan yang sama.

Tabel 3.3. Profil *Quickwins Smart Economy*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	BangMUs Kebulan

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan
2. Penjelasan singkat	2. Inovasi dimulai dengan upaya percepatan penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Rakyat. Penyiapan konsep naskah Peraturan Bupati dilakukan oleh Tim Internal Dinas Perkebunan kemudian dibahas dengan melibatkan perangkat daerah/instansi terkait serta perwakilan lembaga pekebun dan asosiasi di bidang usaha perkebunan. Peraturan Bupati ini menjadi penting karena akan menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan di Kab. Kutai Kartanegara; 3. Berpedoman pada Peraturan Bupati tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lainnya, dilakukan perancangan dan melakukan uji coba penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (SiDa_RaKAT), yang kontennya mencakup (3) tiga sub aplikasi yaitu untuk : a. Pengajuan, proses dan pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Untuk Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B online), b. Untuk pengajuan calon pekebun mitra serta proses evaluasi dan penetapan pekebun mitra (CPP Online), dan c. Untuk ruang diskusi menyangkut permasalahan yang terkait dengan kemitraan; 4. Implementasi inovasi, yang meliputi pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dan fasilitasi kemitraan usaha perkebunan berbasis aplikasi sistem informasi
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	2. Telah tersosialisasikannya kepada beberapa kelompok sasaran tentang pendaftaran usaha budidaya perkebunan rakyat serta pengajuan dan proses penetapan pekebun peserta mitra berbasis aplikasi online. Kelompok sasaran dimaksud yaitu : a. Pengurus Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Kab. Kutai Kartanegara, b. Pengurus Kontak Tani Andalan (KTNA) Kab. Kutai Kartanegara, c. Beberapa Pengurus Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit, d. Pekebun yang tersebar di Kecamatan. 3. Sedang dilakukan proses pendaftaran usaha budidaya perkebunan rakyat/penerbitan STD-B melalui aplikasi SIDa_RaKAT 4. Sedang dilakukan proses verifikasi dan evaluasi usulan penetapan Pekebun Peserta Mitra/Plasma melalui aplikasi SIDa_RaKAT yang berbentuk koperasi.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat dari aplikasi ini yaitu **1. Internal** • Aparat internal merasa terlindungi dan terarahnya dalam memberikan pelayanan karena adanya kepastian hukum dan kejelasan tata kelola • Dengan meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat maka jajaran Dinas perkebunan juga terwujud rasa puas dan bangga serta kinerjanya tinggi • Tercapainya kemudahan dan kelancaran memberikan pelayanan, mengakses data, mendesain rencana dan memecahkan permasalahan-permasalahan • Turut mewujudkan program *Smart City* • Merasa aman dari ancaman penyebaran *covid 19,* apabila pandemi covid 19 masih terus berlangsung **2. Eksternal** • Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kejelasan tata kelola dalam melakukan pendaftaran usahanya. • Terwujudnya kemudahan dan kecepatan serta efisiensi dalam pelayanan • Pelanggan juga merasa aman dari ancaman penyebaran *covid 19* apabila pandemi covid 19 masih terus berlangsung • Tidak terjadinya pungutan liar yang kemungkinan dilakukan oleh oknum petugas • Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur dan Kementerian Pertanian akan memperoleh kemudahan dalam mengakses dan atau memperoleh data yang lebih akurat
5. Keunikan / kreativitas	Sisi kebaharuan/keunikan nilai tambah, dan keunggulan daya penyelesaian masalah dari inovasi ini meliputi : a. Untuk meningkatkan saling percaya diantara pihak-pihak yang bermitra menuju kemitraan yang saling menguntungkan, saling menguatkan dan berkelanjutan penting dilakukan penguatan aspek legal, yang diantaranya pekebun-pekebun rakyat harus terdaftar atau memiliki Surat Tanda Pendaftaran Budidaya dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu prasyarat dari penerapan aspek ini adalah perlunya diterbitkan regulasi daerah, dalam hal ini Peraturan Bupati yang mengatur tentang pendaftaran usaha Perkebunan rakyat sebagai salah satu landasan bagi terujudnya kemitraan yang baik. Dengan adanya landasan hukum tersebut maka pelaksanaan legalisasi/pendaftaran usaha budidaya perkebunan

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	rakyat akan dapat berjalan dengan baik sesuai amanat peraturan perundang-undangan; b. Selanjutnya, dalam rangka kemudahan dan percepatan legalisasi/pendaftaran usaha perkebunan rakyat tersebut serta kemudahan dan percepatan fasilitasi kemitraan usaha perkebunan akan dibangun aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan berbasis aplikasi web. Dalam aplikasi tersebut terdapat 3 (tiga) ruang, yaitu : • Ruang pendaftaran dan penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B online), • Ruang pengajuan calon dan penetapan mitra (CPP Online), dan • Ruang dialog permasalahan terkait dengan kemitraan perkebunan & penyelesaiannya. Dengan adanya aplikasi tersebut maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan database usaha budidaya perkebunan rakyat dan penetapan pekebun mitra serta penyelesaian permasalahan yang terkait dengan kemitraan dapat lebih mudah mendapatkannya.
6. Kemitraan	Pemangku kepentingan (unsur eksternal) terdiri dari : 1. Para pekebun rakyat, khususnya pekebun kelapa sawit merupakan penerima manfaat utama dari implementasi inovasi, berperan dalam pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi antara lain dengan menyiapkan data-data dalam rangka pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan (STDB), penciptaan dan pengembangan kemiraan usaha dengan perusahaan besar, dan melakukan penginputan data-data ke dalam aplikasi pendaftararan (STDB on line); 2. Lembaga pekebun rakyat (Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Koperasi Perkebunan, BMUDes) berperan dalam perancangan, pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi antara lain dengan melakukan fasilitasi dan atau pendampingan dalam penyiapan data-data dalam rangka pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan (STDB), penciptaan dan pengembangan kemiraan usaha dengan perusahaan besar, dan penginputan data-data ke dalam aplikasi pendaftararan (STDB online) dan Kemitraan (CPP Online); 3. Asosiasi Pekebun Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) Cabang Kab. Kutai Kartanegara berperan dalam perancangan, pelaksanaan dan keberlanjutan inovasi antara lain dengan melakukan fasilitasi dan atau pendampingan dalam penyiapan data-data dalam rangka pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan (STDB), penciptaan dan

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	pengembangan kemiraan usaha dengan perusahaan besar, dan penginputan data-data ke dalam aplikasi pendaftararan (STDB on line) dan Kemitraan (CPP Online); 4. Pemerintah desa/Kelurahan 5. Pemerintah Kecamatan 6. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 8. Bappeda Kab. Kutai Kartanegar 9. Bagian Sumber Daya Alam, Setkab. Kutai Kartanegara 10. Bagian Hukum, Setkab. Kutai Kartanegara 11. Kantor Pertanahan/BPN Kab. Kutai Kartanegara 12. Bagian Pemangku Kesatuan Hutan (BPKH) Provinsi Kalimantan Timur 13. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 14. Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian
Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Inovasi ini memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain yang memiliki potensi usaha perkebunan cukup besar, baik perkebunan rakyat maupun usaha perkebunan besar, karena daerah yang potensi usaha perkebunannya besar khususnya kelapa sawit juga memiliki karakteristik penanganan urusan yang serupa dengan Kab. Kutai Kartanegara antara lain urusan fasilitasi kemitraan usaha dan pendaftaran/pendataan usaha budidaya perkebunan rakyat. Di kabupaten/kota lain yang memiliki potensi perkebunan juga harus menyelenggarakan pendaftaran usaha perkebunan, baik budidaya maupun pengolahan serta sudah barang tentu juga melakukan fasilitasi kemitraan. Hal tersebut menjadi semakin penting manakala belakangan ini Kementerian Pertanian meminta dan mendorong daerah-daerah yang memiliki potensi usaha perkebunan yang relatif besar agar Pemerintah Daerah : (1) melakukan percepatan dalam pendataan usaha perkebunan rakyat melalui mekansime pendaftaran usaha agar dapat diperoleh database nasional yang terintegrasi , (2) menyediakan sistem informasi yang memadai bagi pelaksanaan pendaftaran usaha perkebunan, dan (3) mewujudkan kemitraan usaha perkebunan yang harmonis, saling menguntungkan, saling menguatkan dan berkelanjutan
Strategi Menjaga Keberlangsungan	2. Sosialisasi dan persiapan 3. Pendataan 4. Verifikasi 5. Pemeriksaan lapangan dan pemetaan 6. Penerbitan STD-B; dan 7. Registrasi melalui OSS

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
Sumber daya yang digunakan	2. Tim verifikasi dan evaluasi usulan pendaftran usaha budidaya tanaman perkebunan rakyat yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati nomor : 63 tahun 2020 tentang Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan di Kab. Kutai Kartanegara 3. Pengembangan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya pekebun melenial untuk mengakses aplikasi
10. Analisa Risiko	2. Masih terdapatnya beberapa kekurangan fasilitas yang tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi SiDA_RaKAT. Untuk itu, aplikasi tersebut tetap dilakukan pengembangan-pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan 3. Masih minimnya kemampuan sumber daya pekebun dalam memanfaatkan aplikasi SiDA_RaKAT untuk pengajuan usulan pendaftaran usaha budidayanya, sehingga realisasi pengajuan, verifikasi dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB) melalui aplikasi masih rendah

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.4. *Quickwins Smart Society*

Kekerasan masih menjadi salah satu topik permasalahan baik dalam negeri maupun diluar negeri. Intensitas fenomena kekerasan yang seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan agama menjadi salah satu permasalahan penting yang perlu segera ditangani di daerah termasuk dalam hal ini di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemahaman tentang perilaku kekerasan pada masyarakat umumnya diartikan dengan tindakan yang dilakukan seseorang yang merujuk hanya pada fisik. Namun pada kenyataannya kekerasan yang terjadi tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis atau tak kasat mata. Kondisi tersebut mencerminkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat seperti gunung es yang semakin menyamarkan kasus-kasus kekerasan yang sebenarnya ada.

Menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan organisasi penyelenggara termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui inovasi Kidung merespon amanat Undang-Undang dengan membuka

layanan pengaduan permasalahan perlindungan perempuan dan anak secara langsung dan tidak langsung. Inovasi KIDUNG merupakan bentuk komitmen dan konsistensi yang diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat luas di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan masih terus bertahan untuk tetap menjadi wadah layanan utama yang dipercaya oleh masyarakat luas yang membutuhkan.

Dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-haknya, maka sebagai pelayanan publik sejatinya dapat memfasilitasi layanan yang terpadu untuk menciptakan dan meningkatkan dukungan pada masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kidung atau "Kutai Kartanegara Siap Mendampingi dan Melindungi" merupakan inovasi yang didasarkan dari adanya pendekatan pendampingan dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dan kekerasan pada anak secara proaktif melalui metode penjangkauan dengan memanfaatkan teknologi informasi (4.0) dan transportasi (Mobile) yang direspon secara cepat dan tanggap untuk ditangani. Terobosan inovasi yang ada sebagai langkah responsif untuk menjangkau pihak yang mengalami korban kekerasan yang sulit terjangkau untuk datang ke kabupaten, menggunakan mobil dan motor perlindungan. Inovasi Kidung dikembangkan dengan dua pendekatan yaitu Kasihani (Kami Siap Melayani Perempuan dan Anak dalam Daerah) dan Tangkas (Tanggap aksi nusantara gerakan kepedulian anak sejahtera perempuan dan anak). Harapannya dengan adanya inovasi Kidung, kaum perempuan dan anak dapat terpenuhi hak-haknya dengan memfasilitasi layanan pengaduan kekerasan secara daring sehingga dapat lebih proaktif dan responsif.

Gambar 3.8. Pendekatan Inovasi Kidung
Sumber: Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021b

Inovasi Kidung tidak dapat berjalan tanpa adanya kolaborasi dan sinergitas dari berbagai mitra terkait seperti Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Polres, Kejaksaan, Pengadilan,

Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Lembaga Profesi ,Ormas, LDI, dan lain sebagainya. Kidung memiliki karakter yang fleksibel sehingga berpotensi untuk terus dikembangkan sesuai dinamika problematika yang ada di masyarakat. Selain itu, Kidung juga dapat direplikasi atau diadopsi di instansi atau daerah lain.

Tabel 3.4. Profil *Quickwins Smart Society*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Inovasi Kidung	"KIDUNG" KUTAI KARTANEGARA SIAP MENDAMPINGI DAN MELINDUNGI
2. Penjelasan singkat	**Inovasi Kidung** adalah: Suatu pendekatan pendampingan dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT terhadap Perempuan dan Kekerasan pada anak secara proaktif melalui metode penjangkauan dengan memanfaatkan tekhnologi informasi (4.0) dan transportasi (*Mobile*) agar dapat direspon secara cepat dan tanggap dari laporan yang diterima untuk ditangani memeperhatikan hambatan dan tantangan sebagaimana kondisi geografis daerah serta dinamika perubahan kehidupan masyarakat yang kompleks, penuh desrupsi, terutama antisipasi terhadap Perpindahan ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan organisai penyelenggara termasuk Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPA) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	**Karakter KIDUNG** yang fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan dinamika situasional, maka sangat mungkin dan mudah untuk dapat diadaptasi di instansi atau daerah lain. Dengan adanya koordinasi yang selama ini terjalin dengan perangkat daerah dan instansi-instansi pelayanan publik lainnya dalam penindaklanjutan kasus dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan mengedepankan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-haknya, maka sebagai pelayanan publik sejatinya dapat memfasilitasi layanan yang terpadu untuk menciptakan dan meningkatkan dukungan pada masyarakat dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Kekerasan merupakan topik yang muncul di berbagai media massa, menjadi berita di dalam negeri maupun diluar negeri. Intensitasnya yang semakin meningkat seiring dengan berkembangnya dinamika kehidupan ekonomi, sosial, budaya, agama dan Teknologi 4.0 di tengah masyarakat global dewasa ini.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Pemahaman tentang perilaku kekerasan pada masyarakat umumnya diartikan dengan tindakan yang dilakukan seseorang yang merujuk hanya pada fisik. Namun pada kenyataannya kekerasan yang terjadi tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikis atau tak kasat mata. Kondisi tersebut mencerminkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat seperti gunung es yang semakin menyamarkan kasus-kasus kekerasan yang sebenarnya ada. Pemahaman yang bias tersebut terus berkembang tidak terbendung hingga semakin mengubur kasus kekerasaan lainnya yang terjadi. Inovasi KIDUNG merupakan bentuk komitmen dan konsistensi yang diberikan secara berkelanjutan kepada masyarakat luas di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan masih terus bertahan untuk tetap menjadi wadah layanan utama yang dipercaya oleh masyarakat luas yang membutuhkan.
4. Manfaat dari Inovasi	a. Internal: tersedianya fasilitas utama seperti gedung, "jaringan internet dan website; kendaraan operasional (Molin), SDM yang kompeten dan profesional, SOP, dan petunjuk teknis. b. Ekternal:kerjasama dengan LBH, Psikoloq, Dinas Teknis dan Lembaga Teknis (RSUD, Dinsos, Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) serta dukungan masyarakat. c. Pihak yang membutuhkan layanan dan pihak yang mengalami kekerasan dapat menerima layanan tanpa harus ke Pusat Layanan akan tetapi cukup melaporkan secara Daring dan proses layanan segera di klarifikasi untuk penjangkauan scara Mobile.
5. Keunikan / kreativitas	Lebih proaktif dan *responsive*
6. Kemitraan	Diskominfo, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, satpol PP, Polres, Kejaksaan, Pengadilan, Pengadilan Agama, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Lembaga Profesi, Ormas, LDI(lembaga Dakwah,Dewan Mesjid Indonesia,dll.
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Sangat berpotensi untuk terus dikembangkan sesuai dinamika problematika yang ada di masyarakat
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Terus mengembangkan Inivasi sesuai evaluasi Implementasi dan dengan memanfaatakan tekhnologi Informasi dan sarana prasarana serta SDM yang berkompeten.
9. Sumber daya yang digunakan	Tersedianya pembiayaan sesuai program prioritas OPD dengan dukungan steakholder yang telah terjalin saat ini.

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
10. Analisa Risiko	Diperlukan harmonisasi dan sinergitas kepada seluruh pihak yang terlibat agar proses pelaksanaan dapat berjalan secara terintegrasi, kolaboratif dapat berjalan sesuai targert dan sasaran

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.5. *Quickwins Smart Living*

Siruni atau Sistim Informasi Rumah Layak Huni merupakan aplikasi berbasis web dan *smartphone* yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang belum bisa terverifikasi, pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta membangun Aplikasi Data untuk Rumah Layak Huni. Salah satu keunikannya, aplikasi ini mampu memuat tiga program yaitu Usulan PSU, RTLH, dan Data Hasil Verifikasi DTKS dalam satu wadah aplikasi. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat dalam pendataan Pemenuhan Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Rumah yang Layak huni dan Sehat yang dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi pendataan yang kemudian diinput oleh masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam implementasinya, Siruni bermitra dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Bappeda, Kecamatan, Desa/kelurahan, dan Masyarakat sebagai Penerima Manfaat.

Kedepan, rencana pengembangan Siruni diarahkan pada peningkatan kualitas aplikasi untuk penambahan program pendukung perumahan, serta sinkronisasi dan verifikasi Data DTKS dan eRTLH. Adapun beberapa permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam perumusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan pendataan dan informasi perumahan, penganggaran proses pendataan perumahan, perolehan basis data perumahan, hasil pendataan perumahan, dan mekanisme update data yang digunakan.

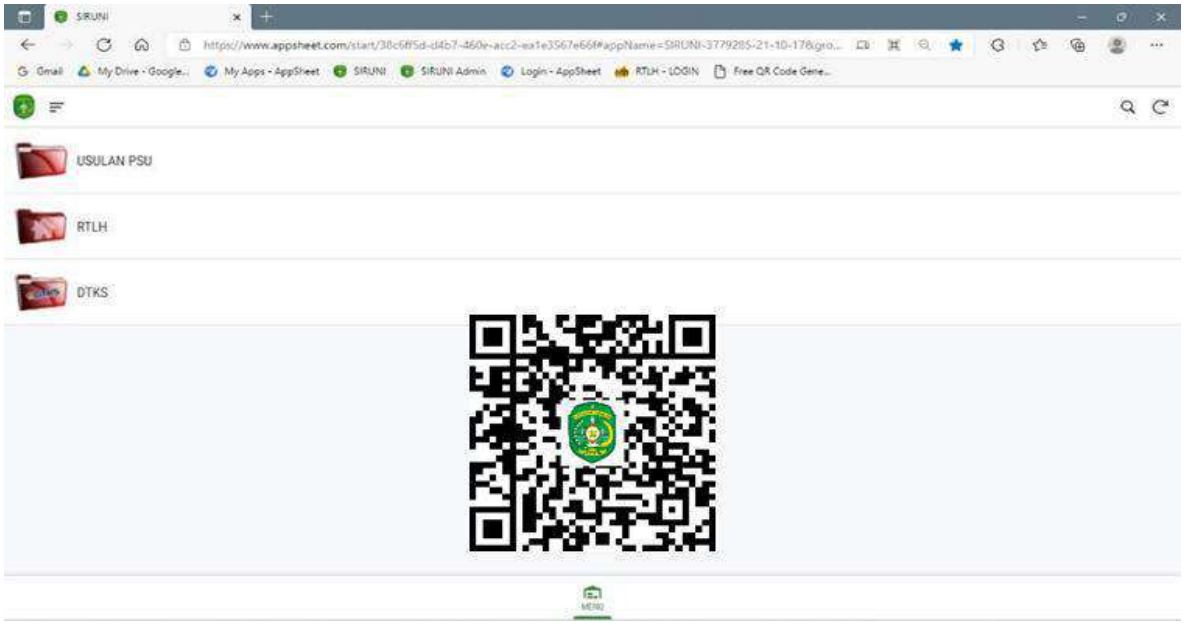

Gambar 3.9. Tampilan Siruni Via Website

Gambar 3.10. Tampilan Siruni Via Smartphone

Tabel 3.5. Profil *Quickwins Smart Living*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
1. Nama Singkat Inovasi	SIRUNI (SISTIM INFORMASI RUMAH LAYAK HUNI)
2. Penjelasan singkat	**Deskripsi** tentang inovasi yang menjelaskannya secara singkat: 1. Apliasi Berbasis web dan Smartphone

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	2. Masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Belum Bisa terverifikasi. 3. Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 4. Membangun Aplikasi Data untuk Rumah Layak Huni.
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Kode Status : 1. Masalah dalam proses perumusan : a. Kebijakan pengelolaan Pendataan dan Informasi Perumahan b. Pengangaran Proses Pendataan Perumahan c. Perolehan Basis Data Perumahan d. Hasil Pendataan Perumahan e. Mekanisme Update Data Yang digunakan 2. Ide/konsep inovasi awal : Mempercepat Peroleh data secara real dan percepatan Pemenuhan Hak Masyarakat Untuk Memperoleh Rumah yang Layak huni dan Sehat 3. Rencana pembangunan/implementasi : a. Metode Perolehan Basis Data Perumahan : - Melakukan sosialisasi pendataan di setiap kecamatan yang dihadiri oleh perangkat kecamatan dan desa/kelurahan yang tersebar di kab. Kutai kartanegara - Penginput data oleh perangkat kecamatan dan desa/kelurahan yang tersebar di Kab. Kutai kartanegara b. Verifikasi Hasil Pendataan 4. Inovasi dan komponen pendukungnya : 1. inovasi : Aplikasi SIRUNI 2. Komponen : Perangkat Komputer/Laptop dan Smarphone 5. Implementasi Inovasi : - Pengembangan Aplikasi Dan Pendataan 6. Evaluasi dan rencana pengembangan : - Singkronisasi dan Verifikasi Data DTKS dan Ertlh Rencana pengembangan: Peningkatan Kualitas Aplikasi untuk penambahan Program pendukung perumahan Persentase Penyelesaian (progres waktu/pekerjaan) 10%

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	Keterangan tambahan status (SIRUNI (appsheet.com)
4. Manfaat dari inovasi	**Penerima manfaat :** Memperoleh Basis data RTLH Kab. Kutai Kartanegara **Dampak/keuntungan/manfaat :** Masyarakat Penerima Manfaat Sesuai program dedikasi
5. Keunikan / kreativitas	Keunikan : Aplikasi bisa berbasis Sistem Smartphone Tanpa Harus membuka Web. Kreativitas : Aplikasi Memuat 3 Program (1. Usulan PSU 2. RTLH 3. Data Hasil Verifikasi DTKS).
6. Kemitraan	1. Dinas Sosial 2. Dinas Kesehatan 3. Diskominfo 4. Bappeda 5. Kecamatan 6. Desa/kelurahan 7. Masyarakat Penerima Manfaat
7. Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Bisa Diakses oleh Masyarakat secara Langsung Melalui Apliasi berbasis Smartphone
8. Strategi Menjaga Keberlangsungan	Membentuk Tim Pelaksana Di tingkat Kecamatan, desa/kelurahan dan Kedepannya Masyarakat Bisa Mengakses Apllikasi ini.
9. Sumber daya yang digunakan	1. SDM Perangkat OPD, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Masyarakat 2. Sarana Pendukung Aplikasi
10. Analisa Risiko	1. Keterbatasan SDM 2. Keterbatasan Jaringan 3. Keterbatasan Anggaran

Sumber: Hasil analisis, 2021

3.6. *Quickwins Smart Environment*

Berbagai permasalahan lingkungan dihadapi oleh setiap daerah, tidak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara. Permasalahan lingkungan meliputi pencemaran akibat dari pembuangan sampah tidak pada tempatnya serta kegiatan-kegiatan lain yang mampu mengganggu keseimbangan ekosistem.

Maka dari itu diperlukan suatu inovasi untuk dapat menjaga kondisi lingkungan agar tetap terjaga berupa "*Smart Bio Village*" yang merupakan Desa Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melibatkan 237 desa/kelurahan dengan target 71 Desa/Kelurahan, untuk saat ini program ini masih dalam proses pembentuk Tim Pelaksana, penyusunan regulasi terkait *role map* dan metode penilaian Desa Ramah Lingkungan. Adapun Manfaat dari inovasi ini, yaitu:

1. Masyarakat
   - Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan hidup.
   - Meningkatkan kemampuan produksi lokal.
   - Lingkungan menjadi asri, bersih dan nyaman.

2. Eksternal/Lingkungan
   - Meningkatkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.
   - Meningkatkan Indeks Lingkungan Hidup.
   - Udara menjadi bersih dan sehat.

Inovasi *Smart Bio Village* berupaya untuk melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dengan cara desa mendaftarkan melalui sebuah aplikasi dan bisa melihat perkembangan status penilaian desanya masing-masing. Pengembangan lebih lanjut yang diharapkan yaitu diintegrasikan dengan Sistem Registri Nasional (SRN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta adanya pengembangkan sistem/aplikasi mandiri milik pemkab Kutai Kartanegara yang dapat diakses oleh seluruh Desa/Kelurahan. Sumber daya yang digunakan diupayakan secara mandiri, dengan kolaborasi kekuatan SDM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas-dinas terkait lainnya.

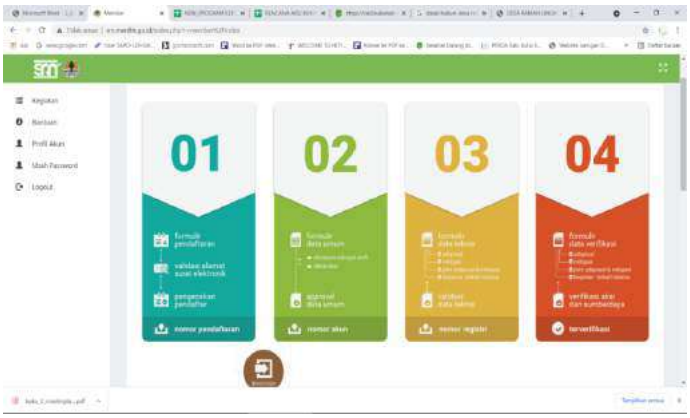

Gambar 3.11. Laman Sistem Registri Nasional (SRN)
Sumber : http://srn.menlhk.go.id/index.php?r=home%2Findex

Berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dilakukan dengan berbagai bentuk, diantaranya

yaitu:

1. Melakukan pembinaan secara intensif kepada desa/kelurahan.
2. Memberikan award kepada Desa/kelurahan yang terus melakukan perbaikan.
3. Melakukan MOU antara Kepala Daerah dan Kepala Desa.
4. Alokasi APBdes yang pro lingkungan.
5. Kerjasama dengan Dunia Usaha melalui CSR.

Lebih jauh, berbagai bentuk inovasi dan program kegiatan memiliki ancaman berupa risiko baik dari internal maupun eksternal. Beberapa risiko yang dihadapi oleh *Smart Bio Village* yaitu berupa stabilitas pendanaan yang kadang kala mengalami gangguan, selain itu menumbuhkan semangat partisipasi masyarakat sedikit sulit karena masyarakat mulai enggan untuk berpartisipasi atau melakukan gotong royong.

Tabel 3.6. Profil *Quickwins Smart Enviornment*

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	**Penjelasan**
1. Nama Singkat Inovasi	**"SMART BIO VILLAGE"**
2. Penjelasan singkat	LATAR BELAKANG DESA RAMAH LINGKUNGAN 1. Kondisi Kebersihan Kab.Kutai Kartanegara 2. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Gotong Royong Masyarakat yang mulai Luntur Desa Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melibatkan 237 desa/kelurahan Dengan target 71 Desa/Kelurahan
3. Status Saat Ini a. Kode status b. Persentase Selesai c. Penjelasan	Proses pembentuk TIM Pelaksana, penyusunan regulasi terkait role map dan metode penilaian Desa Ramah Lingkungan.
4. Manfaat dari inovasi	Manfaat dari inovasi ini, yaitu **1. Masyarakat** • Meningkatkan peran serta aktif masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan hidup; • Meningkatkan kemampuan produksi lokal • Lingkungan menjadi asri, bersih dan nyaman

Butir Pengisian Formulir (termasuk secara online)	Penjelasan
	2. Eksternal/Lingkungan • Meningkatkan penurunan Emisi Gas Rumah Kaca • Meningkatkan Indeks Lingkungan Hidup • Udara menjadi bersih dan sehat
5. Keunikan / kreativitas	Melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat , desa mendaftarkan melalui sebuah aplikasi dan bisa melihat perkembangan status penilaian desanya masing-masing.
6. Kemitraan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Perumahan dan Permukiman, LSM, Organisasi Kemasyarakatan, Pelaku Usaha/Perusahaan,
Potensi untuk pengembangan lebih lanjut	Pengembangan lebih lanjut: 1. Diintegrasikan dengan Sistem Registri Nasional (SRN) milik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2. Mengembangkan Sistem/aplikasi mandiri milik pemkab Kutai Kartanegara yang dapat diakses oleh seluruh Desa/Kelurahan
Strategi Menjaga Keberlangsungan	• Melakukan pembinaan secara intensif kepada desa/kelurahan • Memberikan award kepada Desa/kelurahan yang terus melakukan perbaikan. • Melakukan MOU antara Kepala Daerah dan Kepala Desa • Alokasi APBdes yang pro lingkungan • Kerjasama dengan Dunia Usaha melalui CSR
Sumber daya yang digunakan	Sumber daya yang digunakan diupayakan secara mandiri, dengan kolaborasi kekuatan SDM dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas-dinas terkait lainnya.
10. Analisa Risiko	Analisis Resiko diantaranya adalah : 1. Faktor stabilitas pendanaan 2. Menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat yang mulai pudar termasuk salah satunya keangganan masyarakat untuk mengikuti prosedur penilaian yang diberikan. 3. Minimnya SDM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat

Sumber: Hasil analisis, 2021

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO *QUICKWINS*

Manajemen risiko merupakan usaha untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Dalam hal ini, risiko perlu dikelola demi tercapainya tujuan inisiatif. Selain itu, manajemen risiko juga dilakukan untuk memiliki kesiapan dalam merespon jika risiko tersebut terjadi. Komponen Manajemen risiko *quickwin* terdiri atas informasi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, dan Mitigasi Risiko.

4.1. *Quickwins Smart Governance*

Sistem informasi merupakan salah satu sistem yang rentan terhadap gangguan sebab melibatkan sistem yang kompleks sehingga membutuhkan kontrol atas setiap komponen yang ada. Beberapa analisis dan identifikasi dari risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada sistem informasi satu data (Becik) diantaranya yaitu:

- Jaringan Internet yang tidak sampai ke wilayah-wilayah pelosok desa/RT. Diketahui bahwa masih ada daerah-daerah yang memiliki kondisi internet yang belum stabil, hal tersebut menjadikan proses penyampaian informasi dan penginputan data menjadi terhambat dan terganggu.
- Sarana dan Prasarana IT yang masih terbatas, seperti kapasitas server dan backup data. Semakin banyak data dan informasi yang hendak ditampung menjadikan kebutuhan akan kapasitas server dan *backup* data yang besar. Diketahui bahwa untuk menyediakan server dan *backup* data yang mumpuni membutuhkan anggaran dana yang besar.
- Keterbatasan SDM pengelola aplikasi, diantaranya *programmer* masih bersifat tenaga kontrak. Sumber Daya Manusia sangat penting dalam pengelolaan, perawatan dan pengawasan server dan sistem data. Kualifikasi sumber daya manusia juga harus diperhitungkan sebab tidak semua memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam membentuk dan mengelola suatu sistem berbasis IT.
- Konten tidak sesuai dengan konsep penyusunan data, karena keterbatasan pemahaman para operator dan verifikator data. Pemahaman para operator yang rendah ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia pengelola menjadikan konten dalam penyusunan data tidak sesuai, hal ini berdampak pada susunan data yang tidak teratur dan tidak sesuai dengan komponen yang ada sehingga akan menyulitkan dalam proses penelusuran dan pengaturan data lebih lanjut.

Mitigasi risiko merupakan bentuk penanggulangan yang dilakukan agar suatu ancaman yang ada dapat teratasi, melihat dari berbagai kondisi ancaman dan risiko yang dihadapi oleh Sistem Informasi Satu Data (Becik) maka beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Melakukan penguatan jaringan internet di lokasi *blank spot*, dan menyiapkan konsep *upload* data file excel untuk daerah-daerah tertentu yang tidak terlayani internet, dan difasilitasi oleh kecamatan.
- Memastikan server dan pengamanan server di Diskominfo sesuai dengan standar pengamanan server.
- Membuka ruang untuk ASN *eksisting* yang potensial sebagai *programmer* daerah dan membuka formasi P3K terkait dengan dengan ahli IT.
- Melakukan pengembangan SDM dalam menjaga kualitas konten, baik melalui Bimbingan Teknis, maupun pendampingan di masing-masing wilayah kecamatan dan Perangkat Daerah.

Tabel 4.1. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Governance*

Kota/Kab = Kabupaten Kutai Kartanegara
Dimensi = Smart Governance
Program Quick Win = Sistem Informasi Satu Data (BECIK)
Keterangan = Becik merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka menyediakan sistem pendataan terintegrasi
Manfaat = Membangun data yang seragam antar level pemerintahan

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Infrastruktur	Teknologi	.*Overload capacity* mengakibatkan data tidak tertampung secara keseluruhan	kebutuhan akan kapasitas server dan backup data yang besar.	Sarana dan Prasarana IT yang masih terbatas,	-	1	2	2	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Komunikasi dan Informatika	1 x setahun	APBD dan sumber lainnya		Memastikan server dan pengamanan server di Diskominfo sesuai dengan standar pengamanan server
2	Infrastruktur	Infrastruktur Digital	proses penyampaian informasi dan penginputan data menjadi terhambat	Jaringan Internet yang tidak sampai ke wilayah-wilayah pelosok desa/RT	Akses internet yang tidak merata	-	1	2	2	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Komunikasi dan Informatika	1 x setahun	APBD dan sumber lainnya	Melakukan penguatan jaringan internet di lokasi *blank spot*, dengan penguatan dan pembangunan BTS	menyiapkan konsep *upload* data file excel untuk daerah-yang tidak terlayani internet, dan difasilitasi oleh kecamatan.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			dan terganggu											
3	Struktur	SDM (Pemerintahan) birokrasi	Konten tidak sesuai dengan konsep penyusunan data, karena keterbatasan pemahaman para operator dan verifikator data.	Pemahaman para operator yang rendah ditambah lagi kurangnya sumber daya manusia pengelola menjadikan konten dalam penyusunan data tidak sesuai	Keterbatasan SDM pengelola aplikasi, diantaranya programmer masih bersifat tenaga kontrak	-	2	1	2	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Komunikasi dan Informatika	1 x setahun	APBD dan sumber lainnya		Membuka ruang untuk ASN eksisting yang potensial sebagai programmer daerah dan membuka formasi P3K terkait dengan dengan ahli IT. menjaga kualitas konten, baik melalui Bimbingan Teknis, maupun pendampingan di masing-masing wilayah kecamatan dan Perangkat Daerah.

4.2. *Quickwins Smart Branding*

Membangun sebuah citra daerah sangat penting sebab diera-global saat ini diperlukan ciri khas yang membedakan dengan daerah lain. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki *brand* atau logo daerah guna promosi di berbagai bidang baik ekonomi, wisata, dan lain sebagainya yang disebut dengan Kukar Asia Wonders. Hal ini tidak luput pada berbagai resiko dan ancaman. Berbagai bentuk ancaman dan risiko tersebut diantaranya yaitu:

- Pengenalan logo yang masih belum diketahui oleh masyarakat luas. Meskipun sudah ada berbagai media sosial yang dimanfaatkan guna memperkenalkan logo dan *brand* yang dimiliki oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, namun masih belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, karena tidak semua masyarakat menggunakan media sosial.
- Penyalahgunaan logo yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaan. Dalam penggunaan logo harus memperhatikan kaidah yang sudah ditetapkan, pengaplikasian pada berbagai bentuk juga sudah memiliki aturannya tersendiri. Namun harus diantisipasi penggunaan logo atau *brand* yang menyalahi aturan karena terdapat potensi dalam penggunaan logo yang salah sebab peraturan penggunaan logo masih sedikit masyarakat yang mengetahuinya. Instansi-instansi pemerintahan juga harus memahami kaidah dalam pengaplikasian logo tersebut dalam setiap bentuk kegiatan yang ada.

Mitigasi risiko merupakan bentuk penanggulangan yang dilakukan agar suatu ancaman yang ada dapat teratasi, melihat dari berbagai kondisi ancaman dan risiko yang dihadapi Kukar Asia Wonders maka beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Sosialisasi penerapan *brand* dan logo pada seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari berbagai instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai kartanegara, selain itu pelibatan sektor swasta juga sangat penting dalam mempromosikan hal ini. Sektor-sektor yang dapat dilibatkan dan sangat penting yaitu sektor yang bergerak pada bidang pariwisata. Selain itu berbagai lembaga baik sosial, pendidikan juga perlu untuk memahami penggunaan berbagai logo yang ada, agar dalam setiap kegiatan yang ada mampu mengaplikasikan secara benar.
- Memberikan pedoman yang jelas khususnya dalam penggunaan logo pada berbagai bentuk. Pedoman ini tidak terbatas hanya pada penggunaan pada kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintah tetapi juga dalam pengaplikasian pada berbagai bentuk *merchandise*.
- Membangun citra daerah melalui produksi berbagai bentuk *merchandise* yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini secara langsung akan membantu dalam memperluas pengenalan terhadap

Kukar Asian Wonders ke berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti lomba di bidang pariwisata juga dapat membantu dalam mempromosikan brand yang ada.

Tabel 4.2. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Branding*

Kota/Kab = Kabupaten Kutai Kartanegara
Dimensi = Smart Branding
Program Quick Win = Kukar Asia Wonders
Keterangan = Program pembentukan logo/brand daerah yang menjadi ciri khas dan gambaran keunikan
Manfaat = Guna promosi di berbagai bidang baik ekonomi, wisata, dan lain sebagainya

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
	Struktur	SDM	Terjadi perubahan makna dan ketidak sesuaian penggunaan logo akibat dari kurangnya pengetahuan masyarakat	Pergeseran makna logo dan citra yang dibangun oleh pemerintah	Penyalahgunaan logo yang tidak sesuai dengan kaidah penggunaan	-	1	1	1	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan infromatika	1 x setahun	-	Pengadaan *merchandise* yang terjangkau bagi masyarakat. Hal ini secara langsung akan membantu dalam memperluas pengenalan terhadap Kukar Asian Wonders ke berbagai lapisan masyarakat. Berbagai kegiatan seperti lomba di bidang pariwisata juga dapat	Sosialisasi penerapan brand dan logo pada seluruh lapisan masyarakat yang dimulai dari berbagai instansi pemerintahan yang ada di Kabupaten Kutai kartanegara

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
													membantu dalam mempromosikan brand yang ada.	Memberikan pedoman yang jelas khususnya dalam penggunaan logo pada berbagai bentuk.

4.3. *Quickwins Smart Economy*

Ekonomi cerdas dalam membangun sebuah ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan membentuk ekosistem transaksi keuangan berbasis elektronik menjadi salah satu tantangan global. Kemudahan dalam membangun iklim industri yang berdaya saing dengan melibatkan berbagai mitra potensial sangat diperlukan. Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan atau BangMUs Kebulan merupakan inovasi dalam pengembangan kemitraan usaha perkebunan berkelanjutan melalui legalisasi usaha perkebunan rakyat berbasis sistem informasi manajemen kemitraan. Adapun beberapa identifikasi dan analisis risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada inovasi BangMUs Kebulan diantaranya yaitu:

- Kurangnya fasilitas yang tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi SiDA_RaKAT. Terbatasnya fasilitas atau fitur yang tersedia berpengaruh dalam kelengkapan layanan yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai pengguna.
- Terbatasnya kemampuan sumber daya pekebun dalam memanfaatkan aplikasi SiDA_RaKAT terutama untuk pengajuan usulan pendaftaran usaha budidaya, sehingga realisasi pengajuan, verifikasi dan proses penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STDB) melalui aplikasi masih rendah.

Mitigasi risiko merupakan bentuk penanggulangan yang dilakukan agar suatu ancaman yang ada dapat teratasi, melihat dari berbagai kondisi ancaman dan risiko yang dihadapi oleh BangMUs Kebulan maka beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Pengembangan aplikasi dan fitur penunjang dalam SiDA_RaKAT yang terdapat dalam program BangMUs Kebulan. Pengembangan aplikasi dan fitur berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi berkala menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
- Sosialisasi program BangMUs Kebulan melalui berbagai *platform* sebagai upaya pengenalan dan promosi inovasi BangMUs Kebulan.
- Penetapan regulasi BangMUs Kebulan sebagai bentuk penguatan legalitas dalam implementasi program yang sudah direncanakan.

Tabel 4.3. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Economy*

Kota/Kab = Kabupaten Kutai Kartanegara
Dimensi = Smart Economy
Program Quick Win = Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan atau BangMUs
Keterangan = Inovasi dalam pengembangan kemitraan usaha perkebunan berkelanjutan melalui legalisasi usaha perkebunan rakyat berbasis sistem informasi manajemen kemitraan
Manfaat = Pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dan kejelasan tata kelola dalam melakukan pendaftaran usahanya.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Nature	Lingkungan	Lahan perkebunan tidak terdata	Pengembangan kemitraan usaha perkebunan menjadi tidak optimal	Masyarakat tidak memanfaatkan aplikasi SIDA RAKAT	-	3	3	9	Pemerintah Kabupaten, Dinas Perkebunan, serta Dinas Terkait	1 x setahun	1) Pemerintah 2) Masyarakat 3) Mitra Usaha	1)Pengembangan aplikasi dan fitur penunjang dalam SiDA_RaKAT yang terdapat dalam program BangMUs Kebulan. 2) Sosialisasi program BangMUs Kebulan melalui berbagai platform sebagai upaya pengenalan dan promosi inovasi BangMUs Kebulan.	1) Kebijakan, Regulasi, SOP
2	Struktur	SDM	User dalam hal ini pengguna tidak mengetah	Aplikasi tidak dimanfaatkan	Terbatasnya kemampuan sumber daya pekebun dalam	-	2	2	4					

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			ui cara pengguna an sistem		memanfaatkan aplikasi SiDA_RaKAT								3)Penetapan regulasi BangMUs Kebulan sebagai bentuk penguatan legalitas dalam implementasi program yang sudah direncanakan.	
3	Infrastruktur	Infrastruktur Digital	Minimnya pemanfaatan sistem oleh masyarakat	Fitur tidak optimal	Kurangnya fasilitas yang tersedia dalam aplikasi Sistem Informasi SiDA_RaKAT	-	2	1	2					

4.4. *Quickwins Smart Society*

Membangun masyarakat yang madani dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dalam *Smart Society* diwakilkan dalam program upaya pendampingan dan perlindungan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya perempuan dan anak dalam tindak kekerasan. Kidung atau "Kutai Kartanegara Siap Mendampingi dan Melindungi" merupakan inovasi yang didasarkan dari adanya pendekatan pendampingan dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dan kekerasan pada anak secara proaktif melalui metode penjangkauan dengan memanfaatkan teknologi informasi (4.0) dan transportasi (Mobile) yang direspon secara cepat dan tanggap untuk ditangani. Adapun beberapa identifikasi dan analisis risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada inovasi Kidung diantaranya yaitu:

- Terbatasnya fasilitator atau pendamping berkualitas sesuai bidang keahliannya. Kekerasan perempuan dan anak selain berdampak secara fisik juga berdampak pada kesehatan psikis korban, oleh karena itu diperlukan pendampingan atau *treatment* yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- Sikap korban yang tidak mau terbuka dengan kondisinya sehingga menyulitkan bagi fasilitator untuk dapat membantu permasalahan yang terjadi.

Mitigasi risiko merupakan bentuk penanggulangan yang dilakukan agar suatu ancaman yang ada dapat teratasi, melihat dari berbagai kondisi ancaman dan risiko yang dirasakan oleh inovasi Kidung maka beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Diperlukan harmonisasi dan sinergitas kepada seluruh pihak yang terlibat agar proses pelaksanaan dapat berjalan secara terintegrasi, kolaboratif dapat berjalan sesuai target dan sasaran.
- Sosialisasi dan pengenalan adanya program Kidung melalui berbagai *platform* media serta sosialisasi tentang penyadaran masyarakat terkait dampak dan akibat tindak kekerasan perempuan maupun anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 4.4. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Society*

Kota/Kab = Kabupaten Kutai Kartanegara
Dimensi = Smart Society
Program Quick Win = Kidung atau "Kutai Kartanegara Siap Mendampingi dan Melindungi"
Keterangan = Inovasi yang didasarkan dari adanya pendekatan pendampingan dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT terhadap perempuan dan kekerasan pada anak
Manfaat = Memfasilitasi kaum perempuan dan anak agar dapat terpenuhi hak-haknya dengan memfasilitasi layanan pengaduan kekerasan secara daring sehingga dapat lebih proaktif dan responsif.

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Structure	SDM	Korban kekerasan tidak mendapatkan pendampingan yang optimal	Gangguan mental, meninggal	Terbatasnya fasilitator atau pendamping berkualitas sesuai bidang keahliannya.	-	1	3	3	Pemerintah Kabupaten, DP3A, serta Dinas Terkait	1 x setahun	1) Fasilitator 2) Masyarakat	1) Harmonisasi dan sinergitas kepada seluruh pihak yang terlibat agar proses pelaksanaan dapat berjalan secara terintegrasi, kolaboratif dapat berjalan sesuai target dan sasaran 2) Sosialisasi dan pengenalan adanya program	1) Kebijakan, Regulasi, SOP
					Sikap korban yang tidak mau terbuka dengan	-	1	2	2					

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
					kondisinya sehingga menyulitkan bagi fasilitator untuk dapat membantu permasalahan yang terjadi.								Kidung melalui berbagai platform media serta sosialisasi tentang penyadaran masyarakat terkait dampak dan akibat tindak kekerasan perempuan maupun anak di Kabupaten Kutai Kartanegara	
2	Infrastruktur	Infrastruktur Fisik	Program tidak berjalan optimal	Terbatasnya sarana prasarana transportasi yang digunakan dalam implementasi program Kidung	Terbatasnya anggaran	-	1	2	2	Pemerintah Kabupaten, DP3A, serta Dinas Terkait	1 x setahun	Anggaran Pemerintah Kabupaten		

4.5. *Quickwins Smart Living*

Pengelolaan sarana pelayanan dasar guna mencapai pemerataan pembangunan dan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak dan nyaman menjadi salah satu sasaran dari Dimensi *Smart Living*. Siruni atau Sistem Informasi Rumah Layak Huni adalah program untuk mengidentifikasi Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni sehingga dapat dianalisis upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat berdasarkan indikator perumahan tidak layak huni. Adapun beberapa identifikasi dan analisis risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada Sistem Informasi Rumah Layak Huni diantaranya yaitu:

- Tidak ada atau terbatasnya data dari kecamatan & Desa/Kelurahan yang disebabkan karena terbatasnya kualitas sumber daya manusia di Kecamatan & Desa/Kelurahan yang mampu memverifikasi rumah layak huni dan tidak layak huni sehingga bantuan tidak tepat sasaran serta tidak terlaksananya kegiatan bantuan rumah tidak layak huni.
- Kerusakan data pada database aplikasi yang disebabkan karena *human error* dan atau terbatasnya infrastruktur penunjang yang mampu mem-*backup* server. Banyaknya data yang akan disimpan sebanding dengan besaran kebutuhan kapasitas server yang diperlukan.
- Keterbatasan anggaran terutama dalam peningkatan infrastruktur penunjang sebagai salah satu upaya dalam mengantisipasi atau mengurangi dampak dari risiko menjadi salah satu faktor dalam menunjang kelancaran implementasi Siruni.
- Terbatasnya jaringan internet terutama pada lokasi-lokasi *blank spot* menyebabkan sistem informasi rumah layak huni (Siruni) tidak dapat diakses oleh petugas input maupun verifikator. Tentunya hal ini menjadi salah satu penghambat dalam pengumpulan database rumah layak huni di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mitigasi risiko merupakan bentuk penanggulangan yang dilakukan agar suatu ancaman yang ada dapat teratasi, melihat dari berbagai kondisi ancaman dan risiko yang dihadapi oleh program Siruni, maka beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Sosialisasi tentang Pendataan Rumah Layak Huni dan Tidak Layak Huni di setiap Kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait program Siruni, sosialisasi dilakukan guna menyamakan persepsi antar seluruh *stakeholder* terlibat.
- Melakukan pendataan dan verifikasi langsung di lapangan sehingga data yang terinput dan terverifikasi seragam dan lebih sesuai apabila dilakukan oleh ahlinya.
- Perlunya penganggaran yang berkaitan pendataan dan bantuan peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni

Tabel 4.5. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Living*

Kota/Kab = Kabupaten Kutai Kartanegara
Dimensi = Smart Living
Program Quick Win = Siruni atau Sistem Informasi Rumah Layak Huni
Keterangan = Program ini diluncurkan untuk mengetahui berapa rumah layak huni dan tidak layak huni, dimana masyarakat mendaftar dan terverifikasi melalui Aplikasi Siruni agar bantuan tepat sasaran
Manfaat = Penanggulangan kemiskinan masyarakat berdasarkan indikator perumahan tidak layak huni menjadi rumah layak huni

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Structure	SDM	Penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran	Rumah layak dan tidak layak huni tidak bisa terverifikasi	Keterbatasan verifikator dari kecamatan &desa/kelurahan	-	2	2	4	Pemerintah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Terkait	1 x setahun	1) Perangkat kecamatan dan desa/kelurahan 2) Masyarakat	1) Sosialisasi tentang pendataan rumah layak huni dan tidak layak huni di setiap kecamatan dan desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara 2) Langsung mendata dan memverifikasi kebenaran data dilapangan 3) Perlunya	1) Kebijakan, Regulasi, SOP
			Tidak terlaksananya kegiatan bantuan rumah tidak layak huni	Anggaran kegiatan tidak terserap		-	2	2	4					

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
2	Infrastruktur (Aplikasi)	Infrastruktur Digital	Kerusakan data pada database	Tidak bisa mengakses aplikasi	Listrik mati, human eror	-	1	2	2	Pemerintah Kabupaten, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Terkait	1 x setahun	1) Perangkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan 2) masyarakat	penganggaran yang berkaitan pendataan dan bantuan peningkatan kualitas rumah menjadi layak huni	
			Hardisk penuh		Data dan file ganda atau duplikat	-	1	2	2					
		Infrastruktur Fisik	Jaringan terganggu		Tidak adanya jaringan	-	2	3	3					

4.6. *Quickwins Smart Environment*

Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting, mengingat saat ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran dan ketidakseimbangan ekosistem. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berupaya untuk membuat suatu inovasi berbasis lingkungan yang disebut dengan *Smart Bio Village*, dimana inovasi ini merupakan salah satu inovasi yang diperuntukan untuk menjaga kelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat. Berbagai tantangan dan risiko yang dihadapi diantaranya dapat dianalisis dan diidentifikasi sebagai berikut:

- Faktor stabilitas pendanaan. Pendanaan merupakan hal yang penting dalam menjalankan sebuah program pembangunan. Ketidakstabilan pendanaan berdampak pada ketidak lancaran program sehingga tujuan yang diharapkan kadang bergeser dan tidak sesuai dengan harapan.
- Menumbuhkan kembali semangat gotong royong masyarakat yang mulai pudar termasuk salah satunya keengganan masyarakat untuk mengikuti prosedur penilaian yang diberikan. Masyarakat yang semakin kompleks dan memiliki kesibukan masing-masing menjadi salah satu faktor penurunan angka partisipatif pada setiap kegiatan yang dilakukan baik di tingkat RT hingga yang lebih tinggi.
- Minimnya SDM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat. Sumber Daya Manusia yang bertugas untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat harus memiliki kompetensi dan kapasitas yang sesuai agar dapat menyampaikan materi yang sesuai dan mampu diterima oleh masyarakat. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada pergerakan dan proses yang lambat dan membuat program kurang efektif sebab tenaga kerja yang minim.

Mitigasi risiko merupakan bentuk penanggulangan yang dilakukan agar suatu ancaman yang ada dapat teratasi, melihat dari berbagai kondisi ancaman dan risiko yang dihadapi oleh program *Smart Bio Village*, maka beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya yaitu:

- Membentuk integrasi antar berbagai komponen yang memiliki konsen terhadap pelestarian lingkungan. Mulai dari Pemerintah, CSR, investor hingga masyarakat agar mampu membantu dalam hal pendanaan dan pengelolaan lebih lanjut.
- Peningkatan semangat masyarakat melalui berbagai program yang meningkatkan minat seperti perlombaan dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat bukan hanya kalangan dewasa tetapi juga remaja hingga anak-anak. Selain itu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat seperti Ketua RT dan RW agar memudahkan dalam mengawasi dan melihat keterlibatan masyarakat.

- Pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki tupoksi terhadap pengelolaan dan pengawasan program *Smart Bio Village*, khususnya bagi ASN yang berada di Dinas Lingkungan Hidup. Pengadaan sumber daya manusia yang bertugas pada pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat penting untuk ditingkatkan. Beberapa hal seperti pelatihan bagi para aparatur pemerintah sangat penting dilakukan khususnya yang bertugas langsung dan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Pemberian pelatihan khusus tersebut akan membantu peningkatan kapasitas ASN sehingga akan memudahkan dalam proses pembinaan kepada masyarakat sebab sudah memiliki kemampuan yang didapatkan dari hasil pelatihan dan peningkatan kapasitas.

Tabel 4.6. Manajemen Risiko Smart City Dimensi *Smart Environment*

Kota/Kab = Kabupaten Kutai Kartanegara
Dimensi = Smart Environment
Program Quick Win = Smart Bio Village
Keterangan = Salah satu inovasi yang diperuntukan untuk menjaga kelestarian lingkungan berbasis partisipasi masyarakat.
Manfaat = Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan merupakan hal yang sangat penting, mengingat saat ini banyak isu-isu yang berkaitan dengan pencemaran dan ketidakseimbangan ekosistem

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
1	Struktur	Keuangan Daerah	ketidak lancaran program	tujuan yang diharapkan kadang bergeser dan tidak sesuai dengan harapan	. Ketidakstabilan pendanaan	-	1	1	1	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Lingkungan Hidup	1 x setahun	APBD	-	Membentuk integrasi antar berbagai komponen yang memiliki konsen terhadap pelestarian lingkungan. Mulai dari Pemerintah, CSR, investor hingga masyarakat agar mampu membantu dalam hal pendanaan dan pengelolaan lebih lanjut
2	Kultur	Sosial	keenggan an masyarakat untuk mengikuti	Ketercapaian program yang tidak maksimal	Menurunnya minat dalam berpartisipasi dalam	-	1	1	1	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 x setahun	APBD		Peningkatan semangat masyarakat melalui berbagai program yang meningkatkan minat seperti perlombaan dan

No	IDENTIFIKASI RISIKO (RISK IDENTIFICATION)						ANALISA RISIKO (RISK ANALYSIS)			PENANGANAN RISIKO (RISK TREATMENT)			MITIGASI RISIKO	
	Kategori	Sub kategori	Risiko	Dampak Risiko	Kerawanan (Penyebab Risiko)	Opportunity (Risiko Positif)	Nilai Kemungkinan	Nilai Dampak	Nilai Risiko	Penanggung Jawab	Target Waktu / Frekuensi	Kebutuhan Sumber Daya	Struktural	Non Struktural
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16
			prosedur penilaian yang diberikan		kegiatan pemerintah dan rendahnya minta bergotong royong					dan Dinas Lingkungan Hidup				kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat bukan hanya kalangan dewasa tetapi juga remaja hingga anak-anak.
3	Struktur	SDM Pemerintah Birokrasi	Minimnya tenaga kerja terampil khususnya yang berasal dari pemerintah yang terjun langsung ke masyarakat	pergerakan dan proses yang lambat dan membuat program kurang efektif.	Minimnya SDM untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat.	-	1	1	1	Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Dinas Lingkungan Hidup	1 x setahun	APBD		Pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang memiliki tupoksi terhadap pengelolaan dan pengawasan program Smart Bio Village, khususnya bagi ASN yang berada di Dinas Lingkungan Hidup. Pengadaan sumber daya manusia yang bertugas pada pemberdayaan dan pembinaan terhadap masyarakat penting untuk ditingkatkan

BAB V
PENUTUP

Buku *Quickwins* Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan dapat menjadi alat bantu kepada *stakeholder* terkait dalam implementasi program unggulan *Smart City* Kabupaten Kutai Kartanegara. Buku *Quickwins* berisikan visi dan prioritas RPJMD, visi dan sasaran *Smart City* Daerah, profil *quickwin Smart City* Daerah, dan manajemen risiko *quickwins*. Penyusunan profil dan analisis manajemen risiko menjadi hal utama yang perlu diperhatikan dan diantisipasi dalam program unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penyusunan sasaran, profil, dan manajemen risiko disusun berdasarkan masing-masing dimensi yaitu *smart governance, smart branding, smart economy, smart society, smart living*, dan *smart environment.*

REFERENSI

BAPPEDA Kutai kartanegara. 2021. *BECIK Portal Satu Data Kutai Kartanegara*. https://becik.kukarkab.go.id/ diakses tanggal 30 November 2021 pukul 17.45 WIB.

BPS Kutai Kartanegara. 2021. *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021.* Kabupaten Kutai Kartanegara. https://kukarkab.bps.go.id/

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021a). *SIDa_RaKat*. https://sidarakat.kukarkab.go.id/ diakses tanggal 30 November 2021 pukul 16.45 WIB.

Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara. (2021b). *Project Perubahan Disbun Kukar "BANGMUS KEBULAN".* *https://www.youtube.com/watch?v=4V6pGF2Uop4* diakses tanggal 30 November 2021 pukul 17.00 WIB.

DISKOMINFO Kabupaten Kutai Kartanegara. 2021. *Branding Kukar Asia Wonder.* https://www.facebook.com/kukarasiawonders/ diakses tanggal 30 November 2021 pukul 17.59 WIB.

Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Buku Panduan Penyusunan Masterplan Smart City 2021 Gerakan Menuju Smart City.* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Kementerian Lingkungan Hidup RI. 2021. *Laman Sistem Registri Nasional (SRN).* http://srn.menlhk.go.id/index.php?r=home%2Findex diakses tanggal 30 November 2021 pukul 17.40 WIB.

Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2026.

MASTERPLAN
SMARTCITY KAWASAN IBUKOTA NEGARA BARU REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021

Kabupaten - Kabupaten
Kawasan Ibu Kota Negara Baru

Penyelenggara
dan Tim Tenaga Ahli Smart City

KOMINFO

G-MULTI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT atas selesainya buku Master Plan Smart City Kawasan Ibukota Negara Baru Republik Indonesia Tahun 2021 ini. Buku ini adalah salah satu luaran dari kegiatan Penyusunan Master Plan Smart City Kawasan Ibukota Negara Baru yang dilaksanakan oleh PT Gama Multi Usaha Mandiri dengan dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Kegiatan Penyusunan Master Plan Smart City Kawasan Ibu Kota Negara Baru bertujuan menyiapkan kabupaten-kabupaten pendukung dalam menyongsong kehadiran ibu kota negara (IKN) baru. Dalam kegiatan ini, Tim Penyusun Masterplan Smart City Kawasan Ibukota Negara baru melakukan serangkaian kegiatan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat, termasuk melaksanakan empat kali bimbingan teknis yang melibatkan segenap organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten terkait dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam kegiatan-kegiatan tersebut Tim Penyusun menampung aspirasi dan pemikiran dari para peserta, serta mengumpulkan data dan informasi pendukung lainnya.

Kegiatan Penyusunan Masterplan Smart City Kawasan Ibukota Negara Baru menghasilkan 4 dokumen untuk setiap kabupaten (Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat) dan 1 dokumen untuk Kawasan, sehingga total dokumen yang dihasilkan adalah sebanyak 13 dokumen. Dokumen untuk setiap kabupaten terdiri dari: Buku Analisis Strategis Smart City, Buku Masterplan Smart City Kabupaten Paser, Buku Executive Summary, dan Buku Program QuickWin Smart City Kabupaten terkait. Untuk tingkat kawasan, dokumen luarannya adalah Buku Masterplan Smart City Kawasan Ibukota Negara Baru.

Dokumen-dokumen perencanaan smart city tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten di Kawasan Ibu Kota Negara Baru dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan secara “cerdas”, berbasis pada inovasi-inovasi yang didukung oleh penerapan teknologi. Konsep pembangunan secara cerdas yang diusung oleh pendekatan smart city menjadi opsi yang menarik mengingat karakteristiknya yang sesuai dengan kemajuan jaman, komprehensif dan holistik, serta menekankan pada keselarasan, kesinambungan, dan keberlanjutan. Dengan pendekatan ini, diharapkan setiap kabupaten dalam Kawasan Ibu Kota

Negara Baru dapat menghadapi tantangan-tantangan baru yang muncul dari kehadiran IKN dengan sebaik-baiknya. Secara lebih khusus, buku Masterplan Smart City Kawasan Ibu Kota Negara ini bertujuan menjadi inspirasi bagi ketiga kabupaten yang terlibat untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi dalam merencanakan dan menjalankan program-program pembangunan smart city untuk menangani isu-isu bersama di kawasan IKN. Diharapkan pula pada masa yang akan datang, kerja sama dan kolaborasi ini tidak hanya sekedar melibatkan 3 kabupaten saja, namun juga melibatkan kabupaten/kota lain yang juga berada di kawasan IKN.

Tim Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bupati danWakil Bupati setiap Kabupaten, Ketua danWakil Ketua DPRD setiap Kabupaten, para pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang telah mendukung dan membantu sehingga semua tugas dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih secara khusus disampaikan kepada Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat beserta segenap jajarannya yang sejak awal telah menjadi mitra yang luar biasa sehingga semua kegiatan dapat berjalan dengan sukses. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan kepada PT Gama Multi Usaha Mandiri dalam melaksanakan pekerjaan ini. Semoga apa yang kita lakukan bersama ini memberikan berkah yang melimpah bagi banyak pihak. Aamiin.

Yogyakarta, 23 Desember 2021

Tim Penyusun

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ii
Daftar Tabel vi
Daftar Gambar vii
BAB 1 PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Sasaran 5
1.3. Landasan Hukum 6
1.4. Kerangka Pikir 7
BAB 2 GAMBARAN UMUM KAWASAN 13
2.1. Kondisi Umum Wilayah 13
2.1.1. Kabupaten Paser 14
2.1.2. Kabupaten Kutai Kartanegara 15
2.1.3. Kabupaten Kutai Barat 17
2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan 17
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 18
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023 19
Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota 20
2.3. Analisis SWOT Kawasan 25
BAB 3 TEMA PEMBANGUNAN SMART CITY KAWASAN IKN 28
3.1 Tantangan Bagi Kawasan IKN 28
3.2 Tema-Tema Pembangunan 30
BAB 4 PROGRAM PEMBANGUNAN SMART CITY KAWASAN IKN 33
4.1 Program Smart Governance Kawasan 33

4.2 Program Smart Branding Kawasan 36
4.3 Program Smart Economy Kawasan 38
4.4 Program Smart Living Kawasan 39
4.5 Program Smart Society Kawasan 40
4.6 Program Smart Environment Kawasan 42
BAB 5 KERANGKA PENDANAAN 44
5.1 Indikasi Kebutuhan Anggaran dan Sumber Dana 44
5.2 Strategi Pendanaan 50
BAB 6 PENUTUP 52
REFERENSI 53

Daftar Tabel

Tabel 2. 1 Indikasi Target Rencana pembangunan Ibukota Negara 18
Tabel 2. 2 Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023 20
Tabel 2. 3 Arah Kebijakan dan Fokus Antar Kabupaten 21
Tabel 2. 4 Analisis SWOT 25
Tabel 4. 1 Program *smart governance* kawasan IKN 33
Tabel 4. 2 Program smart branding kawasan IKN 36
Tabel 4. 3 Program smart economy kawasan IKN 38
Tabel 4. 4 Program smart living kawasan IKN 39
Tabel 4. 5 Program smart society kawasan IKN 40
Tabel 4. 6 Program smart environment kawasan IKN 42
Tabel 5. 1 Indikasi Kebutuhan Anggaran dan Sumber Dana 44

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Lokasi Calon Ibukota Negara Baru 4
Gambar 2. 1 Peta Kawasan Outline Provinsi Kalimantan Timur 14

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keputusan politik untuk memindahkan Ibukota Negara (IKN) Indonesia telah tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020-2024. Kebijakan pemerintah ini diawali dengan pengumuman yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2019, bahwa dengan berbagai pertimbangan ekonomi makro untuk menyeimbangkan dan memeratakan pembangunan di Indonesia, ibukota negara perlu dipindahkan ke luar Pulau Jawa. Faktor sejarah, kondisi geografis serta persebaran penduduk memang selama ini masih mengakibatkan ketimpangan dalam pembangunan di Indonesia. Pulau Jawa yang luasnya hanya tujuh persen dari seluruh luas daratan ternyata harus menampung 61,7 persen penduduk Indonesia. Maka, lokasi lokasi ibukota negara baru yang telah dipilih adalah di luar Jawa, yaitu di Provinsi Kalimantan Timur atau tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pembangunan kawasan inti ibukota negara baru ini akan berlangsung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dan akan terus berlangsung sampai beberapa tahun kemudian [1]. Karena keadaan tidak terduga oleh pandemi Covid-19, rencana tersebut sedikit tertunda. Tetapi jika situasi pandemi sudah relatif terkendali, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan rencana pemindahan ibukota negara tersebut.

Ada beberapa alasan yang mendasari pemindahan di Provinsi Kalimantan Timur, antara lain adalah: risiko bencana alam yang kecil, lokasi yang berada di tengah Indonesia, lokasi berada di dekat kota Balikpapan dan Samarinda yang sudah berkembang, infrastruktur yang relatif lengkap, dan tanah seluas 180 hektar yang sudah dikuasai oleh pemerintah [2]. Pemindahan ibu kota negara ini tentu akan membawa konsekuensi yang luar biasa bagi daerah-daerah di sekitar lokasi calon pusat pemerintahan NKRI ini. Ada harapan yang besar dari pemerintah dan masyarakat agar calon ibukota negara baru ini nantinya memiliki ciri-ciri kota yang modern, cerdas, dan berstandar internasional, dan dengan itu maka ia akan dapat memberikan lingkungan terbaik bagi para warganya yang hidup dan bekerja di kota tersebut. Ketika ciri-ciri ini ditetapkan sebagai kriteria

[1]https://money.kompas.com/read/2019/05/09/184859926/kepala-bappenas-pemindahan-ibu-kota-masuk-rpjmn-2020-2024.

[2] https://tirto.id/alasan-jokowi-pilih-penajam-kutai-jadi-ibu-kota-baru-ganti-jakarta-eg2i.

kota baru yang akan dibangun, maka penetapan ini menjadi tantangan besar bagi kabupaten/kota yang kelak akan menjadi lokasinya. Kabupaten/kota ini harus dapat mentransformasikan dirinya agar dapat menjadi wilayah yang memenuhi kriteria tersebut.

Untuk dapat mendorong transformasi kabupaten/kota di kawasan inti maupun kawasan penyangga calon ibukota negara baru, banyak hal yang harus dipersiapkan sejak awal. Persiapan tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, namun juga tatakelola pemerintahan maupun berbagai hal yang menyangkut sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, proses transformasi menjadi daerah atau wilayah yang modern dan cerdas ini perlu dijalankan dengan pendekatan yang holistik, sistematis, dan terukur. Guna memenuhi proses transformasi dan mengakomodasi pendekatan tersebut, konsep *smart city* (kota cerdas, kota pintar) sangat diperlukan untuk dimanfaatkan dan dilaksanakan secara konsisten.

Dalam upaya untuk menciptakan kawasan ibukota negara baru dengan sistem tatakelola yang modern, responsif, dan ramah lingkungan, Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan menjadi lokomotif penggerak dalam sebuah *smart city*, namun "kecerdasan" yang sebenarnya muncul dari inovasi-inovasi dalam berbagai domain yang membuat kota atau daerah tersebut dapat menyediakan *well-being* yang berkualitas bagi warganya. Boyd Cohen mendefinisikan 6 domain yang merepresentasikan area-area strategis dalam pengembangan kota cerdas: *smart government*, *smart living*, *smart economy*, *smart mobility*, *smart environment*, dan *smart people*. Dalam kerangka definisi menurut Boyd Cohen, pengembangan *smart city* dapat dikatakan sebagai pengembangan domain-domain ini berdasarkan inovasi-inovasi dengan sentuhan teknologi.

Konsep dan implementasi dari *smart city* pada kabupaten-kabupaten di daerah lokasi calon ibu kota negara baru adalah sebuah proses yang kompleks. Persoalan dan tantangan yang muncul pada tataran struktur, infrastruktur, maupun suprastruktur hanya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang komprehensif dan sistematis. Dalam konteks ini, perencanaan *(planning)* berfungsi vital untuk memastikan kejelasan arah, tujuan, strategi dan program, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Karena proses transformasi menjadi smart city tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, maka keberadaan perencanaan jangka panjang yang bersifat strategis *(masterplan)* menjadi sangat diperlukan. Daerah yang akan mengembangkan *smart city* perlu berbekal masterplan yang akan berperan sebagai pedoman bagi perencanaan kegiatan-

kegiatan implementasi. Keberadaan *masterplan smart city* akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Memberikan kejelasan tentang arah pengembangan.
- Menjadi panduan dalam merencanakan program, kegiatan, anggaran, dan sumber daya lain yang diperlukan.
- Mengurangi resiko-resiko yang mungkin muncul selama pembangunan *smart city* dijalankan.
- Sebagai alat kontrol untuk memantau kemajuan *(progress)* implementasi *smart city*.

Pembangunan *smart city* cenderung bersifat multisektoral atau lintas kewilayahan. Banyak contoh yang mengkonfirmasi pernyataan ini, misalnya persoalan transportasi di perimeter daerah urban yang mencakup dua atau lebih wilayah administrasi yang berbeda, atau eradikasi kantung-kantung kemiskinan yang melibatkan sektor-sektor ekonomi, sosial, dan infrastruktur, atau penanganan bencana alam yang sering kali bersifat lintas wilayah sekaligus lintas sektoral. Karakteristik *cross-cutting* seperti ini perlu diakomodasi dengan pendekatan yang komprehensif pula.

Oleh sebab itu, perencanaan pengembangan kota cerdas pun perlu menggunakan pendekatan yang integratif: perlu ada perspektif yang lebih luas dalam memandang isu-isu yang akan diselesaikan dalam kerangka pengembangan *smart city*. Oleh karena itu, selain *masterplan smart city* yang berorientasi pada masing-masing kabupaten di lokasi calon ibu kota negara, diperlukan pula sebuah *masterplan* yang memandang wilayah calon ibu kota negara tersebut sebagai sebuah kawasan terpadu. *Masterplan* kawasan ini berfokus pada pandangan yang lebih holistik terhadap isu-isu bersama yang dihadapi oleh kabupaten-kabupaten di wilayah tersebut dan mengembangkan pendekatan-pendekatan yang bersifat integratif dan kolaboratif dalam mencari solusinya.

Karena pentingnya kebutuhan Rencana Induk Kota Pintar (*smart city master-plan*) baik untuk kabupaten-kabupaten di lokasi calon ibu kota negara maupun yang bersifat kawasan integratif, maka Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia telah melaksanakan kegiatan penyusunan kedua jenis *masterplan* tersebut pada tahun 2021 ini. Laporan ini disusun berdasarkan kegiatan Bimbingan Teknis dan pendampingan yang telah dilaksanakan di kabupaten

yang menjadi lokasi calon ibukota negara baru melalui serangkaian kegiatan yang diberi tajuk "Penyusunan Buku Rencana Induk Smart City Kabupaten/Kota di Kawasan Ibu Kota Negara Baru". Pada periode tahun 2021, Ditjen Aptika Kementrian Kominfo RI telah menetapkan 3 kabupaten sebagai sasaran: Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat. Bimbingan teknis dan pendampingan yang telah dilakukan di ketiga kabupaten ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ada setidaknya enam daerah yang akan menjadi wilayah penting bagi pengembangan ibukota negara baru, yaitu:

1. Kota Balikpapan
2. Kota Samarinda
3. Kabupaten Kutai Kartanegara
4. Kabupaten Penajam Paser Utara
5. Kabupaten Kutai Barat
6. Kabupaten Paser.

Gambar 1.1 menunjukkan ilustrasi kawasan ibukota negara baru yang telah diwacanakan oleh pemerintah sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada awal tahun 2019.

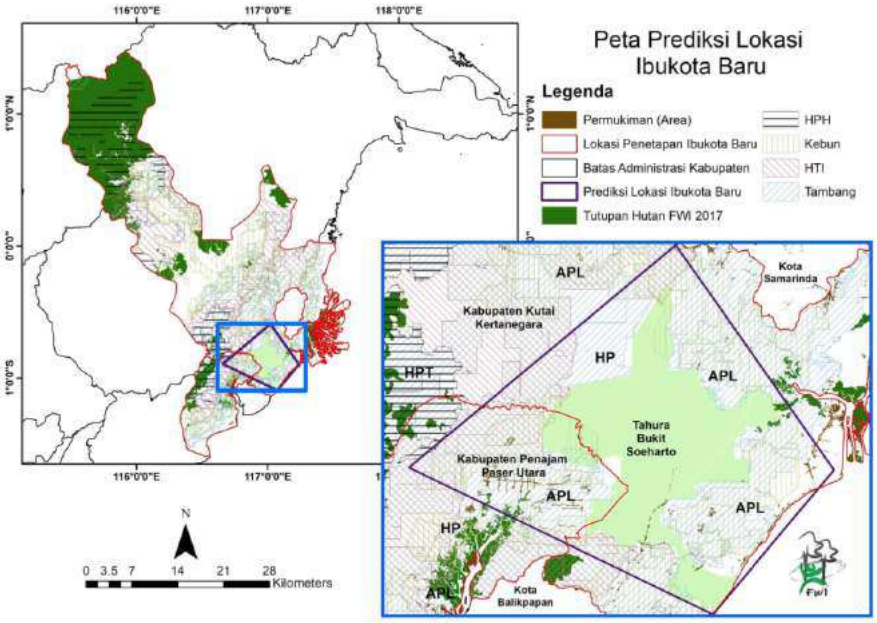

Gambar 1. 1 Lokasi Calon Ibukota Negara Baru

Sumber: Forest Watch Indonesia, 2019

Meskipun kegiatan Bimbingan Teknis sebanyak tiga periode masih terpusat di tiga kabupaten (Kutai Kartanegara, Paser, dan Kutai Barat), dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terarah (FGD) sudah melibatkan juga para perumus kebijakan dari Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Bahkan sudah terdapat beberapa kesepakatan awal untuk menindaklanjutinya dengan forum-forum pembahasan yang lebih intensif, penyampaian proposal dari setiap kabupaten/kota, hingga gagasan untuk membentuk Sekretariat Bersama yang akan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Laporan ini diharapkan menjadi awal dari penyusunan Rencana Induk *Smart City* dari kawasan ibukota negara baru yang lebih komprehensif dan selanjutnya dapat dilaksanakan secara konsisten.

1.2 Tujuan dan Sasaran

Ada banyak rumusan tujuan bagi pentingnya pemindahan ibukota dari DKI Jakarta ke kawasan ibukota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Namun secara umum dapat dijabarkan tujuan dari pemindahan ibukota tersebut seperti yang diungkapkan oleh Dr. Bambang Brojonegoro yang ketika itu menjabat sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas. Dijelaskan bahwa pemindahan ibu kota diperlukan karena enam alasan utama, yakni:

1. Mengurangi beban Jakarta dan Jabotabek.
2. Mendorong pemerataan pembangunan ke wilayah Indonesia bagian timur.
3. Mengubah mindset pembangunan dari Jawa Centris menjadi Indonesia Centris.
4. Memiliki ibu kota negara yang merepresentasikan identitas bangsa, kebhinekaan dan penghayatan terhadap Pancasila.
5. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan pusat yang efisien dan efektif.
6. Memiliki Ibu kota yang menerapkan konsep *smart, green, and beautiful city* untuk meningkatkan kemampuan daya saing (*competitiveness*) secara regional maupun internasional.

Kecuali itu, tujuan umum dari dirumuskannya Rencana Induk *Smart City* yang digagas oleh Kementerian Kominfo ini adalah untuk memberikan pedoman teknis yang relatif komprehensif terkait dengan rencana induk di kawasan ibukota negara baru. Sesuai dengan Tanggapan atas Kerangka Acuan Kerja (KAK), pada tahapan teknis tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada pihak pemerintah di 3 (tiga) kabupaten (Paser, Kutai Kartanegara, dan Kutai Barat) dan pemangku kepentingan lain yang menjadi sasaran kegiatan, dengan cakupan: (a) sosialisasi *smart city*, (b) penggalian isu-isu prioritas pembangunan dan analisis kesenjangan, (c) identifikasi program-program pengembangan, (d) penyusunan roadmap dan rencana aksi, dan (e) penentuan program-program *quick win*.
2. Mengoptimalkan hasil bimbingan yang diharapkan langsung bermanfaat kepada daerah-daerah di kawasan calon ibukota negara baru, yang dimaksudkan untuk: (a) memberikan pemahaman kepada pemerintah kabupaten dan para pemangku kepentingan tentang cara menyusun rendana induk *smart city*, (b) mendapatkan dukungan yang diperlukan dalam proses penyusunan rencana induk *smart city*, dan (c) mendapatkan bahan (arahan, ide, pemikiran, dokumen, dan data) yang diperlukan untuk menyusun dokumen rencana induk *smart city*.
3. Menyusun dokumen rencana induk *smart city* sebagai landasan perencanaan pembangunan di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat, baik di wilayah masing-masing maupun dalam satu kawasan pendukung calon ibu kota negara baru.

1.3. Landasan Hukum

Sebagian dari ketentuan mengenai ibukota negara baru dan rencana induk *Smart City* terdapat di dalam peraturan perundanan sebagai berikut:

1. Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
3. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Sistem Pemerintahan Daerah Indonesia.
4. Peraturan Presiden No. 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
5. Peraturan Presiden No. 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
6. Peraturan Presiden No.18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
7. Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan *Electronic Government.*
8. Sejumlah Perda (Peraturan Daerah) yang mengatur tentang pengembangan Kota Cerdas atau Kota Pintar di seluruh Indonesia.

1.4. Kerangka Pikir

Tujuan dari pengembangan kota pintar (*smart city*) adalah terciptanya sebuah kota atau kawasan yang dengan pemanfaatan teknologi dapat memecahkan masalah-masalah pelayanan publik yang modern dengan tetap mempertimbangkan kelestarian lingkungan (Cocchia, 2014). Urbanisasi terus meningkat drastis selama beberapa tahun terakhir ini dan prediksi di masa mendatang secara global akan terus meningkat. Kebutuhan untuk tinggal di kota mengandung implikasi positif jika urbanisasi dapat menjadi katalisator perkembangan masyarakat perkotaan dan menunjang pertumbuhan ekonomi secara agregat. Namun implikasi negatifnya adalah meningkatnya polusi, kemacetan lalu-lintas, emisi gas buang, pencemaran karena limbah, serta meningkatnya kasus kriminalitas.

Definisi tentang kota pintar memang masih sangat beragam dan mencakup berbagai sudut pandang dalam literatur. Sifat dari predikat pintar atau cerdas (*smart*) seringkali juga disebut dengan cara yang berbeda-beda seperti kota intelijen, kota pengetahuan, kota terkoneksi, atau sekadar kota digital. Dengan demikian label kota pintar menjadi konsep yang sering digunakan tanpa ukuran yang pasti. Salah satu definisi kota pintar yang paling sering dikutip adalah dari Giffinger, yang mengatakan kota pintar sebagai "Sebuah kota yang berfungsi dengan baik, dibangun di atas kombinasi sejumlah komponen yang 'pintar' yakni: kontribusi teknologi dan aktivitas masyarakat yang independen, sadar, dan berkemampuan". Sementara itu, Caragliu et al mengatakan bahwa sebuah kota disebut pintar jika "Investasi dalam sumberdaya manusia, modal sosial, transportasi, tradisi dan infrastruktur komunikasi modern mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumberdaya alam bijaksana melalui pemerintahan partisipatoris".

Literatur lain menguraikan rumusan tentang kota pintar melalui unsur-unsur inti yang terdapat di dalamnya, yaitu: tanah, infrastruktur, rakyat, dan pemerintah. Untuk menjadi kota pintar, sebuah kota harus mengembangkan kecerdasan komponen intinya yang berupa efektivitas layanan, pertimbangan serius pada kelestarian lingkungan, serta inovasi yang berkelanjutan. Kota yang dimaksud harus memiliki kapasitas dalam menyediakan layanan publik dan privat secara efektif bagi berbagai subjek meliputi penduduk (pelajar, pekerja, orangtua, pria dan wanita), perusahaan swasta, dan organisasi nirlaba. Dalam hal lingkungan, pemerintah perlu mengambil pertimbangan atas ketahanan dan kualitas lingkungan dalam proses pengembangan kota. Kota

pintar perlu menanggulangi beberapa masalah lingkungan perkotaan, seperti konsumsi energi, polusi air dan udara, kemacetan, dan konsumsi lahan untuk mempertahankan kualitas lingkungan. Komponen selanjutnya adalah inovasi, yang artinya bahwa kota pintar harus menggunakan teknologi yang relatif baru untuk meningkatkan kualitas unsur-unsur intinya, untuk memberikan layanan yang lebih baik dan meminimalkan dampak buruk bagi lingkungan (Dameri, 2014). Biasanya kota pintar memiliki perkakas teknologi yang terdistribusi secara luas untuk mengawasi lingkungan perkotaan secara faktual agar dapat bereaksi tepat waktu, mengadakan kontrol secara otomatis, mengumpulkan informasi bagi pengambilan keputusan secara cerdas serta memfasilitasi berbagai pelayanan dan meningkatkan kualitas kehidupan perkotaan (Yuan He, 2015). Secara keseluruhan, hasil nyata dari kota pintar berarti kawasan, air, dan udara yang lebih bersih, penggunaan lahan yang efisien untuk gedung-gedung baru, reklamasi lingkungan yang berkelanjutan, dan sebagainya.

Selanjutnya, infrastruktur yang pintar bermakna lebih bersih, lebih efektif dalam melayani penduduknya, dan mampu merespon kebutuhan perangkat TIK dan perangkat nirkabel yang berteknologi tinggi untuk menyebarkan informasi dan layanan elektronik secara efisien. Masyarakat yang pintar berakrti penduduk yang lebih terinformasi dan lebih peka terhadap tujuan kota dan fungsi teknologi dalam mengembangkan kualitas lahan, infrastruktur dan layanan publik. Pemerintah yang pintar artinya mampu menggunakan TIK dan semua teknologi terbaru untuk menerapkan *e-governance* dan *e-democracy*, mengembangkan kualitas dan aksesabilitas layanan publik dan kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, definisi tentang kota pintar hendaknya dipahami bukan sekadar penggunaan TIK secara luas, tetapi pemanfaatan TIK tersebut untuk memecahkan berbagai masalah riil dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Gambaran kota pintar atau *smart city* tak hanya dipahami sebagai kota dengan operasional berbasis TIK semata, namun pintar atau *intellegent* dimaknai sebagai upaya mewujudkan perkotaan yang kreatif (*creative city*) dan berkelanjutan (*suistainable city*). TIK dalam konteks *smart city* hanya merupakan satu dari banyak komponen atau piranti dalam bentuk infrastruktur pada konsepsi *smart city* (Lombardi et al, 2012).

Pada tahun 1990-an, ketika kemajuan teknologi dan pertumbuhan ekonomi menyumbang peningkatan kesejahteraan yang luar biasa, mulai dirasakan munculnya efek samping yang sifatnya negatif. Timbulnya masalah baru seperti kemacetan, polusi, dan mahalnya fasilitas umum

mendorong semakin luasnya gagasan kota pintar. Secara internasional, konsep kota pintar muncul dari Protokol Kyoto yang kemudian diadopsi oleh berbagai institusi dunia seperti Komisi Eropa, Setis-EU, dan OECD yang awalnya diberi label sebagai inisiasi cerdas dan proyek yang relevan untuk ketahanan kota. Seiring dengan perkembangan teknologi nirkabel dan meluasnya penggunaan internet, dimensi gagasan kota pintar juga semakin meluas dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan dari polusi dan efek konsumsi energi fosil semakin disadari secara global (Dameri, 2014).

Trend *smart city* dalam konteks global memperlihatkan bagaimana dunia telah berkembang secara pesat. Kota Songdo, Korea Selatan mevisualisasikan bagaimana trend masyarakat urban yang telah hidup berdampingan dengan jaringan *big data* dan *artificial intellegent* (AI) untuk mengupayakan kota yang berkelanjutan. Penyedia jaringan telah menanamkan sistem AI pada jalan raya, bangunan, serta aset lainnya di Songdo untuk mengumpulkan informasi dari tiap individu dan mengolahnya melalui sistem big data yang bertujuan untuk menghitung penggunaan air dan sumber daya lainnya, mengetahui inefisiensi penggunaan sumber daya dri tiap individu, kemudian mengupayakan kesadaran masyarakat untuk kehidupan yang berwawasan lingkungan (Halpern, 2015). Di Sydney, Australia *smart city* dalam bentuk teknologi menciptakan penginderaan dengan skala kecil maupun besar untuk memberikan informasi pada publik terkait ketersediaan tempat parkir. Di Melbourne, Wyndhan, dan Greater Geelong, juga telah memprakarsai *smart city* dengan baik pada struktur otoritas pemerintahan lokal. Strategi tersebut dalam bentuk smart development (pembangunan cerdas),dimulai dengan proses perencanaan dan rencana anggaran operasional (Dowling et al., 2019). London dan Barcelola menggunakan piranti Big Data secara lebih efisien (Fuchs & David, 2019). Trasport for London (TfL) menangkap dan menganalisis 20 juta kartu perjalanan Oyster per hari untuk mengelola arus lalu lintas dan inovasi transportasi. Di Barcelona, lebih dari 20.000 smart meter dipasang di tempat sampah, lampu jalan, dan infrastruktur lainnya untuk mengumpulkan big data.

Landasan argumentasi bagi terbentuknya kota pintar di negara berkembang menyangkut situasi yang tidak terhindarkan karena pertumbuhan kota serta pentingnya menjaga stabilitas seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Karena urbanisasi, ada berbagai macam persoalan yang harus dipecahkan secara cerdas jika masyarakat perkotaan tidak menginginkan munculnya berbagai dampak negatif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi seringkali menghasilkan

dampak destabilisasi yang membawa kemungkinan turunnya kualitas hidup justru ketika banyak hal sudah tersedia di kawasan perkotaan.

Urbanisasi merupakan fenomena global yang tidak mungkin terhindarkan. Ketika masyarakat membutuhkan berbagai bentuk layanan publik yang lebih variatif, maka urbanisasi akan terjadi sekarang dan terus akan berlanjut di masa depan. Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat sekitar 53 persen penduduk dunia yang tinggal di kawasan perkotaan dan diperkirakan bahwa angka ini akan mencapai 70 persen pada tahun 2050. Dengan demikian, kota memegang peranan yang semakin penting dalam perkembangan peradaban manusia. Karena pertumbuhan populasi kota yang terus terjadi, makan kebutu8han terkait kehidupan perkotaan menjadi semakin tinggi, mulai dari sistem pemerintahan yang modern, lingkungan yang semakin sehat, keamanan publik yang tinggi, perencanaan kota yang antisipatif, fasilitas industri yang mendukung terpenuhinya berbagai barang konsumtif, pemanfaatan sumberdaya yang efisien, konservasi energi, pengaturan lalu-lintas, tele-medicine, perawatan rumah, komunikasi inter-personal, aktivitas sosial dan fasilitas hiburan yang semakin lengkap.

Untuk itu, gagasan kota pintar muncul sebagai solusi atas berbagai masalah dan tantangan bagi layanan di perkotaan tersebut. Advokasi dan solusi yang biasanya ditawarkan adalah penggunaan TIK bagi terciptanya kualitas hidup yang lebih baik dengan cara meningkatkan kualitas lingkungan tanpa memperlambat perkembangan sosial dan ekonomi. DSemia kota yang mampu menerapkan solusi cerdas akan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Beberapa kota modern di Eropa, misalnya, telah berhasil meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan bagi pria dan wanita, meningkatkan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan level investasi, mengurangi emisi gas rumah-kaca, meningkatkan level pendidikan dan mempromosikan inklusivitas sosial dengan cara mengurangi kemiskinan dan risiko kemiskinan (Batagan, 2011). Maka menjadi jelas bahwa implementasi kota pintar akan sangat membantu pemecahan masalah yang timbul akibat urbanisasi dan membantu daya lenting untuk menciptakan kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat yang lebih tinggi dan berkelanjutan.

Kecuali itu, pengembangan kota pintar juga akan menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap stabil dan berkelanjutan. Peningkatan taraf kualitas penduduk akan mampu meningkatkan performa pekerjaan penduduk dan selanjutnya akan menciptakan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan TIK bagi berbagai sektor penggerak ekonomi seperti

perbankan dan lembaga finansial akan menciptakan efisiensi proses transaksi diantara berbagai unsur masyarakat. Berbagai masalah di kawasan perkotaan akan bisa mengurangi kualitas hidup rakyatnya. Tanpa adanya solusi yang jelas dan nyata bagi berbagai masalah perkotaan, produktivitas ekonomi dan kualitas hidup akan berhenti atau bahkan mengalami penurunan. Namun melalui sistem transaksi yang efisien, biaya produksi akan dapat ditekan, kendala bagi interaksi yang produktif akan dapat dikurangi dan selanjutnya keuntungan secara kolektif akan terus dapat ditingkatkan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengembangan kota pintar merupakan solusi bagi berbagai masalah di banyak kawasan perkotaan yang sedang tumbuh, yang kebanyakan terdapat di negara-negara berkembang. Berkaca dari pengalaman di negara-negara maju di Eropa Barat dan Amerika Utara, kota pintar merupakan strategi yang efektif untuk mencegah kemunduran kualitas hidup di perkotaan dan sekaligus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduknya. Dalam hal ini perlu disadari bahwa kebutuhan untuk menciptakan kota pintar bukan hanya dimaksudkan bagi kawasan ibukota atau berbagai kota primer yang sifatnya sudah sangat metropolitan, tetapi juga kota-kota sekunder yang akan menjadi tumpuan bagi peningkatan kualitas hidup dalam sistem peradaban modern.

Pengalaman menarik di negara-negara yang ekonominya bisa tumbuh sangat pesat adalah pengembangan kota-kota sekunder sebagai pusat pertumbuhan baru dengan mengembangkan konsep kota pintar. Dong Guan dan Suzhou adalah contoh dua kota sekunder yang berhasil dikembangkan dengan sangat baik di China. Menduduki peringkat ketiga dan keempat dalam volume ekspor, kedua kota tersebut memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi China yang cepat dan berkelanjutan. Kedua kota ini berkontribusi sebanyak 87 persen dari keseluruhan *Foreign Direct Investment* ke China dan 75 persen dari nilai ekspor negara itu (Airriess, 2008). Jika keputusan untuk membuat ibukota baru Indonesia dengan kawasan perkotaan di provinsi Kalimantan Timur sudah ditindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur yang lengkap, kota-kota sekunder sekitarnya harus dipersiapkan untuk menjadi kota pintar yang mendukungnya. Penyiapan kawasan sekunder melalui konsep kota pintar diperlukan untuk mengalihkan arus urbanisasi ke kota-kota primer di kawasan ibukota. Hendaknya dipahami bahwa motivasi utama dari migrasi penduduk desa ke kota primer atau ibukota adalah untuk mendapatkan standar hidup yang lebih baik dan untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah tinggi yang mustahil mereka

dapatkan di desa atau wilayah yang belum berkembang. Maka, saat kota-kota sekunder ikut dikembangkan, arus urbanisasi dapat didistribusikan dari kota primer ke kota-kota sekunder atau kawasan penyangga tersebut.

BAB 2
GAMBARAN UMUM KAWASAN

2.1. Kondisi Umum Wilayah

Rencana pemindahan Ibukota Negara di Provinsi Kalimantan Timur tentunya akan berdampak pada Kabupaten/Kota di sekitar wilayah calon Ibukota. Daerah penyangga Ibukota Negara atau yang disebut dengan Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) khususnya dalam Penyusunan Masterplan *Smart City* terdiri dari tiga kabupaten yaitu Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi salah satu kabupaten terdekat dengan calon lokasi Ibukota Negara, dimana salah satu Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Kecamatan Samboja masuk dalam kawasan ring 2 Ibukota Negara. Lebih jauh, Kecamatan Loa Janan, Loa Kulu, dan Muara Jawa direncanakan untuk dijadikan sebagai kawasan penyokong Kawasan IKN. Sedikit berbeda dengan kabupaten lainnya sebagai Kawasan Penyangga IKN, Bupati Kutai Kartanegara menyebut Kutai Kartanegara sebagai Mitra IKN. Secara posisi, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser berada di sebelah Selatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara fungsinya, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser dalam Kawasan Ibukota Negara memiliki fungsi sebagai hinterland kawasan dan kawasan pendukung IKN.

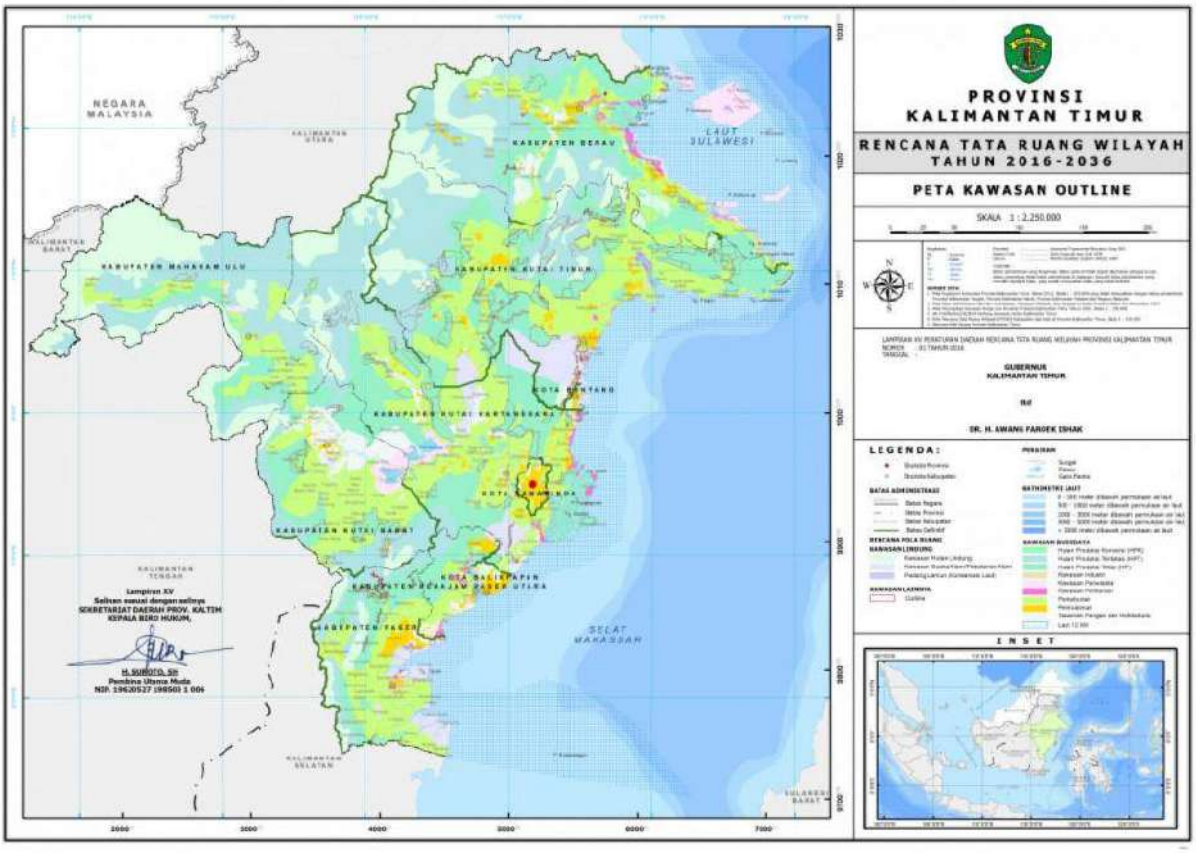

Gambar 2. 1 Peta Kawasan Outline Provinsi Kalimantan Timur

Sumber: RTRW Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036

2.1.1. Kabupaten Paser

Kabupaten Paser terletak di wilayah paling selatan dari Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya pada posisi 00 45'18,37" - 20 27'20,82" LS dan 1150 36'14,5" -1660 57'35,03" BT. Luas daerahnya kira-kira 11.603,94 km^2. Secara topografi, bagian timur Kabupaten Paser terdiri dari dataran rendah berupa rawa dan daerah aliran sungai, sementara di bagian baratnya lebih bergelombang dengan adanya bukit-bukit dan beberapa gunung. Di sebelah utara, Kabupaten Paser berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara, sementara di sebelah selatan dibatasi oleh Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Di sisi barat, Kabupaten Paser bersisian dengan Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Barito Utara, sementara di sisi timur terbujur Selat Makassar yang membatasinya.

Secara demografi, jumlah penduduk di Kabupaten Paser Tahun 2020 mencapai 275,45 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,75 (BPS Kabupaten Paser, 2021). Berdasarkan persebarannya, jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Tanah Grogot yaitu sebesar 76.34 ribu dan terendah berada di Kecamatan Muara Samu yaitu 6.86 ribu. Ditinjau berdasarkan jenis kelamin, terdapat 143.647 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 131.805 penduduk berjenis kelamin perempuan.

Kabupaten Paser memiliki sumber daya alam yang cukup kuat. Di sektor perkebunan, kelapa sawit menjadi komoditas yang paling diunggulkan. Lebih dari 91% dari keseluruhan areal perkebunan di Kabupaten Paser adalah kebun sawit. Kelapa sawit menghasilkan 99% dari total produksi sektor perkebunan dan menyerap lebih dari 50 ribu tenaga kerja. Sektor pertanian dan perkebunan berkontribusi 10,5% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser. Meskipun sektor pertanian dan perkebunan menyumbang cukup besar bagi PDRB, namun pendapatan daerah sebagian besar berasal dari sektor pertambangan. Kontribusi sektor ini sebesar 73,2% dari total PDRB dengan batubara sebagai komoditi utamanya. Sektor-sektor lain yang mengandalkan sumber daya alam seperti pertanian non-perkebunan dan pariwisata masih belum banyak berperan dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Paser.

Bertitik tolok dari permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu-isu strategis daerah Kabupaten Paser, maka disusunlah Visi Kabupaten Paser untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2021-2026), yaitu: “Menuju Kabupaten Paser Maju, Adil, dan Sejahtera”

2.1.2. Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara secara geografis terletak antara 115º26’ Bujur Timur dan 117º36’ Bujur Timur serta diantara 1º28’ Lintang Utara dan 1º08’ Lintang Selatan. Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah Utara, Selat Makassar sebelah Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah Selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah Barat. Secara posisi, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai calon Ibu Kota Negara (IKN) memiliki kondisi topografi yang beraneka ragam dari dataran rendah, dataran tinggi, pesisir pantai, dan lain sebagainya.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2020 sebanyak 729.382 jiwa (BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021). Persebaran penduduk yang ada tersebar di masing-masing kecamatan dan jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Tenggarong sebanyak 106.480 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Muara Wis dengan jumlah 9.398 jiwa. Proporsi antara jumlah penduduk perempuan dan laki-laki cenderung seimbang namun jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi yaitu sebesar 380.560 jiwa dan perempuan 348.822 jiwa. Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kelompok usia muda dan produktif dan kepadatan penduduk sekitar 27 jiwa/km^2 (BPS Kutai Kartanegara, 2021).

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki sumber daya alam yang beragam dan melimpah. Sumberdaya tersebut terdiri dari sumber daya alam seperti pertambangan, minyak dan gas alam. Kondisi hutan yang luas menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa hutan baik berupa cagar alam, taman nasional, taman hutan raya dan hutan lindung. Kondisi topografi dan curah hujan yang ada memberikan dampak positif pada perkembangan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Terdapat berbagai macam jenis komoditas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara mulai dari tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan biofarmaka dan tanaman hias.

Berdasarkan Arahan Bupati Kutai Kartanegara, Kota Tenggarong akan dioptimalkan sebagai Kota Budaya. Selain itu, kedepan perlu optimalisasi publik space dan pengembangan penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik, kedepan seluruh sistem elektronik harus mendapat rekomendasi dari Diskominfo (didaftarkan di pse.kukar.go.id). Arah pengembangan Kawasan IKN Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu juga pada dokumen perencanaan dalam lingkup yang lebih luas, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Hal ini bertujuan untuk terciptanya sinkronisasi program kerja pemerintah sehingga selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah. Arah Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang dirumuskan harus mampu menjadi "akhir" dari pencapaian visi "Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

2.1.3. Kabupaten Kutai Barat

Kabupaten Kutai Barat adalah salah satu dari 10 kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis Kabupaten Kutai Barat terletak antara 114°44'59,05"-116°07'15,23" Bujur Timur, 00°07'54,50" Lintang Utara dan 01°08'58,18" Lintang Selatan. Luas kabupaten Kutai Barat adalah 20 384,6 km2 (BPS Kabupaten Kutai Barat, 2021. Wilayah terluas adalah kecamatan Bongan sedangkan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sekolaq Darat. Secara administratif, Kabupaten Kutai Barat berbatasan dengan Kabupaten Mahakam Ulu di bagian utara, di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Paser dan di Bagian Barat Berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah, lebih tepatnya di Kabupaten Barito Timur Kabupaten Kutai Barat sendiri merupakan wilayah terluas keempat di Provinsi Kalimantan Timur setelah Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan Berau.

Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Barat adalah 165 938 penduduk. Dengan penduduk paling banyak ada di kecamatan Barong Tongkok dengan 31 746, yang berarti 19,13 persen penduduk di kabupaten kutai Barat berlokasi di Barong Tongkok. Sedangkan Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah kecamatan Bentian Besar dengan 3 213 orang. Menurut data dari Dinas Ketenagakerjaan, pada tahun 2020 ada 2 644 orang yang mencari kerja. 1 920 diantaranya merupakan lakilaki dan hanya ada 724 perempuan yang mencari pekerjaan. Para pencari kerja ini paling banyak merupakan Lulusan SMA, yakni sebanyak 823 orag, kemudian disusul oleh lulusan SMK yakni sebanyak 805 orang.

Secara keseluruhan, Visi Kabupaten Kutai Barat yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kutai Barat 2016-2021 antara lain : "Terwujudnya Kutai Barat Yang Semakin Adil, Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Ekonomi Kerakyatan Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia".

2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan

Strategi dan arah kebijakan merupakan instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara intervensi pembangunan dan permasalahan utama yang ada di pada pembangunan kawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024

Major Project Pemindahan Ibukota Negara keluar pulau Jawa untuk memeratakan kesejahteraan masyarakat antar wilayah. Guna menjamin pembangunan berkelanjutan, maka pembangunan pusat pertumbuhan perlu mengutamakan mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana. Pengembangan Kawasan Perkotaan berupa Pemindahan Ibukota Negara merupakan target RPJMN tahun 2019-2024.

Tabel 2. 1 Indikasi Target Rencana pembangunan Ibukota Negara

Tahun	Indikasi Target
2020	- Perencanaan IKN - Penyusunan Matek RTR KSN IKN, RDTR Pusat Pemerintahan IKN, RDTR Pusat Ekonomi IKN - Penyiapan Kerangka Regulasi dan Kebijakan serta Lembaga Pelaksana - Perencanaan Teknis
2021	- Pengadaan lahan (Tahap I) - Peninjauan Kembali dan Revisi PP RTRWN dan RTR Pulau Kalimantan - Pembangunan akses dan infrastruktur dasar
2022	- Pembangunan Istana Negara - Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI-POLRI, gedung perkantoran, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap I) - Pengadaan lahan (Tahap II) - Penetapan PP RTRWN - Penyusunan Perpres RDTR BWP IKN
2023	- Pembangunan rumah dinas dan sarana kesehatan (Tahap I) - Pembangunan jaringan jalan makro, Bangunan TNI POLRI, gedung perkantoran, rumah dinas, sarana penunjang bidang PUPR dan listrik (Tahap II)
2024	- Pembangunan jaringan jalan mikro dan RTH - Pembangunan sarana pendidikan, sarana kesehatan (Tahap II), rumah dinas (Tahap III dan IV), listrik (Tahap III).
● Penyiapan Regulasi dan Kerangka Kebijakan tentang Ibu Kota Negara (Bappenas, ATR/BPN, Kemendagri, Setneg, Kemenkeu) ● Perencanaan Ibu Kota Negara (Masterplan, RTR, RDTR, KLHS) – (Bappenas,	

Tahun	Indikasi Target
	ATR/BPN, KLHK, PUPR) ● Penyusunan Grand Design Rencana Mobilisasi dan Insentif Pemindahan ASN, TNI, POLRI (Kementerian PANRB, BKN) ● Pembangunan Infrastruktur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (Kementerian PUPR, Kemenhub, Kominfo, ESDM, PLN) ● Pembangunan Infrastruktur markas besar dan pangkalan militer TNI AD, AL, AU dan POLRI (Kemhan, TNI, POLRI)

Sumber: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur periode 2018–2023 berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi dan tahapan pembangunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Rencana Pembangunan Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Timur "Terwujudnya Masyarakat yang Adil dan Sejahtera dalam Pembangunan Berkelanjutan dengan didukung melalui misi daerah. Pemaparan strategi dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur dibagi berdasarkan lima misi yaitu:

1. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing tinggi dan berakhlak mulia
2. Mewujudkan struktur ekonomi yang handal dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya
3. Mewujudkan pelayanan dasar bagi masyarakat secara merata dan proporsional
4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum
5. Mewujudkan pembangunan yang terpadu dan serasi dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Tabel 2. 2 Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019-2023

Tahun	Arahan Tematik Tahunan
2019	Memperkuat daya saing investasi untuk mempercepat hilirisasi industri
2020	Pengembangan kompetensi sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi dan infrastruktur wilayah yang mendukung nilai tambah ekonomi
2021	Menumbuhkan industri hilir yang mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan
2022	Peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas unggulan untuk mengurangi kesenjangan dan memperluas pasar komoditas
2023	Penguatan pasar produk-produk unggulan untuk menampung hasil produksi Kalimantan Timur

Sumber: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020

Arah Kebijakan dan Fokus Pembangunan Kabupaten/Kota

Berdasarkan deskripsi kondisi fisik wilayah, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki daya tarik investasi yang cukup besar. Selaras dengan hal tersebut, sebagian besar penggunaan lahan di Kalimantan Timur didominasi oleh investasi dari sektor-sektor yang memiliki keterkaitan dengan pemanfaatan ruang, baik izin dari sektor pertambangan dan penggalian, sektor kehutanan, maupun sektor perkebunan.

Tabel 2. 3 Arah Kebijakan dan Fokus Antar Kabupaten

Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan	Fokus
Kabupaten Paser	Peningkatan produktivitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui pola kemitraan
	Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan rakyat (kopi, aren, sagu, kelapa, kakao, sawit)
		Pengembagnan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian
	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan air bersih, listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
	Peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengendalian kawasan budidaya perikanan pada kawasan cagar alam teluk adang teluk apar
	Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan mini ranch melalui pola kemitraan
Kabupaten Kutai Barat	Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan karet rakyat
		Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian

Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan	Fokus
	Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis	Rehabilitasi kresik luway dan kawasan eks galian tambang
	Peberdayaan masyarakat sekitar hutan	Pengembangan usaha ekonomi produktif melalui pengembangan hasil hutan non kayu
	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan mini ranch melalui pola kemitraan
Kabupaten Kutai Kartanegara	Peningkatan upaya rehabilitasi lahan kritis	Rehabilitasi kawasan eks galian tambang dan kawasan lindung
	Peningkatan produktivitas pertanian pangan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan pertanian pangan produktif pada areal konsesi perkebunan, pertambangan dan hutan produksi melalui kemitraan
	Peningkatan nilai tambah dan pengembangan pasar komoditi unggulan	Peningkatan nilai tambah produk perkebunan rakyat
		Pengembangan pusat pemasaran produk pengolahan hasil pertanian pangan, perkebunan rakyat dan perikanan
	Peningkatan pelayanan infrastruktur di kawasan sentra produksi	Peningkatan fungsi jaringan irigasi, pengembangan listrik dan jaringan telekomunikasi, jalan produksi
	Pengembangan kawasan peternakan	Pengembangan mini ranch melalui pola kemitraan
	Peningkatan produktivitas budidaya perikanan	Intensifikasi dan pengamanan kawasan produktif budidaya perikanan

Kabupaten/ Kota	Arah Kebijakan	Fokus
	Pengembangan industri pariwisata	Peningkatan infrastruktur pelayanan wisata budaya

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016-2036

Sistem pusat kegiatan di Kabupaten Paser meliputi:

- PKW berada di perkotaan Tana Paser di Kecamatan Tanah Grogot.
- PKL meliputi:
  - perkotaan Long Kali di Kecamatan Long Kali.
  - perkotaan Long Ikis di Kecamatan Long Ikis
  - perkotaan Kuaro di Kecamatan Kuaro
  - perkotaan Muara Komam di Kecamatan Muara Komam
  - perkotaan Batu Kajang di Kecamatan Batu Sopang
- PPK meliputi:
  - perkotaan Pasir Belengkong di Kecamatan Pasir Belengkong
  - perkotaan Kerang di Kecamatan Batu Engau
  - perkotaan Muser di Kecamatan Muara Samu
  - perkotaan Tanjung Aru di Kecamatan Tanjung Harapan.
  - Pusat Kegiatan perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi:
  - PKN berupa kawasan perkotaan Balikpapan - Tenggarong - Samarinda - Bontang
- PKL meliputi:
  - Perkotaan Kota Bangun
  - Perkotaan Muara Badak
  - Perkotaan Muara Jawa
  - Perkotaan Kembang Janggut
  - Perkotaan Samboja
  - Perkotaan Tenggarong Seberang
- PPK meliputi:
  - Perkotaan Sanga Sanga

- Perkotaan Loa Janan
- Perkotaan Loa Kulu
- Perkotaan Muara Muntai
- Perkotaan Muara Wis
- Perkotaan Sebulu
- Perkotaan Anggana
- Perkotaan Marang Kayu
- Perkotaan Muara Kaman
- Perkotaan Kenohan
- Perkotaan Tabang

Pusat kegiatan perkotaan di Kabupaten Kutai Barat meliputi:

- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Sendawar
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi:
  - Linggang Bigung di Kecamatan Linggang Bigung
  - Long Bagun di Kecamatan Long Bagun
  - Long Iram Kota di Kecamatan Long Iram.
  - Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi:
  - Bongan
  - Bentian Besar
  - Muara Lawa
  - Mook Manaar Bulatn.
  - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berada di Tiong Ohang Kecamatan Long Apari
- Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi:
  - Muara Pahu
  - Long Pahangai
  - Long Hubung
  - Siluq Ngurai
  - Nyuatan
  - Tering
  - Laham

- Penyinggahan
- Jempang
- Damai.

2.3. Analisis SWOT Kawasan

Analisis SWOT Kawasan dilakukan untuk menganalisis faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dari tiap kabupaten/kota yang termasuk dalam kawasan Ibu Kota Negara (Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat).

Tabel 2. 4 Analisis SWOT

Internal / **Eksternal**	**Kekuatan**	**Kelemahan**
	1. Potensi berbagai jenis objek wisata unggulan dan beberapa tempat wisata yang berpotensi dikembangkan. 2. Potensi lahan cukup luas. 3. Potensi lahan produktif seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan. 4. Penduduk yang multikultur (heterogen)	1. Infrastruktur belum merata di seluruh wilayah Kabupaten 2. Minimnya sarana dan prasarana pelayanan publik (pendidikan, kesehatan) 3. Terbatasnya konektivitas antar wilayah 4. Sarana dan prasarana TPA yang belum memadai 5. Ketersediaan data/informasi dan sistem informasi penyelenggaraan pemerintahan belum memadai. 6. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi teknis dan sertifikasi

		7. Kuantitas dan kualitas SDM masih terbatas dan belum merata
Peluang 1. Sebagai salah satu daerah penyangga calon ibukota negara baru di Indonesia 2. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi 3. Kebijakan Pemerintah (regulasi yang sudah ada)	1. Pemanfaatan inovasi teknologi dalam optimalisasi komoditas unggulan 2. Melakukan branding wilayah khususnya pada wilayah dengan potensi peluang investasi sebagai daerah penyokong IKN 3. Pengembangan energi terbarukan 4. Optimalisasi penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintah 5. Pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama 6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Air	1. Peningkatan keterampilan melalui pembinaan, pelatihan, dan sosialisasi literasi digital 2. Menyiapkan infrastruktur pendukung wilayah dalam mendukung pembangunan infrastruktur IKN 3. Kerjasama antara semua stakeholder pariwisata dalam pengembangan destinasi pariwisata. 4. Perlunya regulasi pengelolaan sampah 5. Melakukan desain kebijakan kelembagaan dan kebutuhan SDM 6. Penguatan aspek teknokratik dari pembangunan melalui keterlibatan dari berbagai stakeholder utamanya perguruan tinggi 7. Perencanaan strategis SDM di sektor pendidikan dan kesehatan

Ancaman 1. Aktivitas pertambangan atau pembebasan lahan yang tidak berwawasan lingkungan dan tanpa pengelolaan lebih lanjut 2. Migrasi pengembangan IKN memberikan ancaman terhadap lingkungan (pengelolaan sampah, limbah, dll) 3. Peningkatan laju migrasi penduduk lokal	1. Menjalin kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Kalimantan Timur dalam promosi. 2. Kebijakan pengelolaan sampah 3. Peningkatan daya saing masyarakat	1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pelayanan publik yang lebih memadai sehingga meningkatkan daya saing 2. Implementasi pembangunan jaringan aksesibilitas dalam meningkatkan konektivitas 3. Mengeluarkan regulasi kebijakan dalam implementasi teknologi tambang ramah lingkungan serta aksi hijau sebagai keberlanjutan lingkungan untuk masa depan

Sumber: Hasil Analisis, 2021

BAB 3
TEMA PEMBANGUNAN SMART CITY KAWASAN IKN

3.1 Tantangan Bagi Kawasan IKN

Dalam draf RUU Ibu Kota Negara (IKN) pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa IKN memiliki visi sebagai kota yang dibangun dan dikelola dengan tujuan untuk menjadi kota berkelanjutan di dunia, kota penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, serta kota yang menjadi simbol identitas nasional dan merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia[3]. Ciri sebagai kota berkelanjutan *(sustainable city)* mensyaratkan pengelolaan berbagai sumber daya dengan prinsip-prinsip 'hijau' *(green)* dan menyediakan berbagai layanan publik secara efisien dan ramah lingkungan. Letak IKN sendiri yang berada di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Timur menekankan pentingnya konservasi lingkungan hidup yang ketat.

Sebagai kota penggerak ekonomi, IKN akan menjadi kota yang progresif, inovatif, dan kompetitif dalam berbagai aspek kehidupannya: tata kota, kehidupan sosial, dan penggunaan teknologi. Menurut kajian INDEF, dampak jangka pendek dan panjang dari pemindahan IKN terhadap pertumbuhan ekonomi pulau Kalimantan sebesar 3,61 persen, dan 2,85 persen pada jangka panjang. Dampak jangka pendek terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,83 persen, dan 4,58 persen untuk jangka panjang[4]. Pertumbuhan ini dicapai melalui strategi tata ruang yang komprehensif yang mendefinisikan peran IKN sebagai *'superhub'* yang menjadi penghubung dan katalisator untuk sinergi antara tenaga kerja, infrastruktur, dan sumber daya lainnya untuk merealisasikan potensi-potensi besar penciptaan nilai *(value creation)* berbasis jaringan.

Dalam paparannya yang berjudul "Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara", Bappenas menyampaikan bahwa pemerintah akan mengembangkan beberapa sektor industri baru seperti industri teknologi bersih (biodiesel dan tenaga surya), industri manufaktur oleokimia, dan industri digital & inovasi[5]. Selain itu, sektor-sektor industri yang sudah ada juga akan tetap didorong

[3] https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211019103239-20-709546/ruu-ikn-ibu-kota-baru-kaltim-jadi-kota-di-dalam-hutan.
[4] https://ekonomi.bisnis.com/read/20210416/9/1382249/indef-pemindahan-ibu-kota-tidak-akan-kontribusi-banyak-ke-pertumbuhan-ekonomi
[5] Bappenas. Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara (materi paparan). Mei 2021.

dengan pendekatan baru, misalnya industri pertanian dan pertambangan yang berkelanjutan serta ekowisata.

Terkait dengan fungsi sebagai simbol identitas nasional, IKN diharapkan menjadi kota yang mewujudkan jati diri, karakter sosial, persatuan, dan kebesaran bangsa yang mencerminkan kekhasan Indonesia. Pembangunan IKN harus menyertakan dimensi sosial budaya agar tercipta harmoni dalam keberagaman, ciri yang selama ini melekat pada bangsa Indonesia.

Arah dan strategi pembangunan ibu kota negara baru seperti diuraikan sebelumnya akan membawa implikasi yang besar bagi kawasan di sekitarnya. Arah dan strategi itu sendiri akan memaksa daerah-daerah di kawasan IKN untuk menyesuaikan diri. Konsep ekonomi jejaring *(network economy)* akan mempropagasi apa yang terjadi dan dilakukan di IKN ke kawasan di sekitarnya, dan dengan daya dan pengaruhnya yang amat besar, semua pihak dalam kawasan tersebut "dipaksanya" untuk beradaptasi. Mau tidak mau, kabupaten/kota dalam kawasan IKN harus merespon secara sesuai dan selaras apa yang dilakukan oleh IKN. Sebagai contoh, pembangunan sektor industri tentu tidak bisa dijalankan secara terisolasi di IKN saja, namun akan meluas ke kabupaten/kota di sekitarnya. Kebijakan tata ruang yang ditempuh IKN untuk melestarikan lingkungan hidup, tentu juga harus dijalankan oleh kabupaten/kota di sekitarnya. Pada akhirnya berbagai langkah adaptasi ini perlu dilakukan oleh kabupaten/kota di kawasan IKN untuk meminimalkan *gap* sehingga kawasan IKN dapat membentuk satu kesatuan spasial utuh, yang meskipun secara administrasi terbagi menjadi beberapa pemerintahan daerah yang berbeda, namun mampu bergerak dalam kesamaan prinsip, arah, dan strategi pembangunan.

Adaptasi yang dilakukan oleh kabupaten/kota di kawasan IKN bukan hanya dalam konteks "pasif": kabupaten/kota mengikuti apa yang dilakukan oleh IKN. Adaptasi yang dilakukan dapat juga berkonteks "aktif", berbentuk pemanfaatan peluang atau mengantisipasi dampak-dampak buruk dari pembangunan IKN. Sebagai contoh, IKN akan menarik banyak pendatang baru. Pendatang tidak hanya aparatur sipil negara (ASN) saja, namun juga keluarga dan pelaku ekonomi lainnya yang tertarik melihat peluang yang ditawarkan IKN. Dalam rencana pemindahan ASN, berkembang dua skenario yang memperkirakan perpindahan sebesar 182.462 orang ASN dan 118.513 orang ASN (jika dibatasi umur hingga 45 tahun). Perpindahan ASN tersebut akan diikuti dengan keluarga dan pelaku ekonomi lainnya, yang diperkirakan sebesar 1,5 sampai dengan 2 juta orang di masa mendatang.

Kehadiran pendatang dalam jumlah besar tersebut membuka banyak peluang baru, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan penduduk baru tersebut. Kabupaten/kota di sekitar kawasan IKN dapat menjadi penyedia utama bagi kebutuhan pangan, tempat tinggal, kesempatan berusaha, berekreasi, dan sebagainya.

Di sisi lain, bertambahnya jumlah penduduk di kawasan IKN berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru. Problem lingkungan hidup, transportasi, kesehatan masyarakat, kesenjangan sosial, dan keamanan perlu diantisipasi dengan baik agar integrasi kehidupan masyarakat yang berkeadilan dapat terjadi sehingga manfaat pembangunan IKN dirasakan oleh seluruh masyarakat Kalimantan Timur khususnya dan Indonesia umumnya.

3.2 Tema-Tema Pembangunan

Tiga kabupaten yang berada di kawasan IKN telah mengadopsi pendekatan smart city dalam perencanaan pembangunan jangka menengahnya. Kabupaten-kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Paser telah menyusun master plan smart city yang menjadi panduan pembangunan smart city di daerahnya masing-masing. Master plan smart city ini disusun dengan berpedoman pada dokumen RPJMD masing-masing, memastikan bahwa arah dan strategi pembangunan smart city sesuai dengan kondisi, visi, misi, dan fokus masing-masing daerah.

Ketika dihadapkan pada isu-isu kawasan IKN, ketiga kabupaten ini perlu melihat konteks yang lebih luas. Mereka tidak hanya harus melihat ke dirinya sendiri, namun juga menempatkan kepentingan kabupatennya dalam konteks kawasan dan melihat isu-isu besar yang juga dihadapi oleh kabupaten-kabupaten tetangganya. Hal ini mutlak diperlukan karena cukup banyak isu-isu kawasan yang muncul akibat kehadiran IKN yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh sebuah kabupaten. Penanganan bencana alam, pelestarian lingkungan, promosi pariwisata, dan penyediaan layanan publik adalah beberapa contoh isu-isu kawasan IKN yang memerlukan kolaborasi antar kabupaten. Kemampuan untuk mengidentifikasi isu-isu bersama ini menjadi penting ketika kabupaten-kabupaten tersebut harus beradaptasi dalam menghadapi kehadiran IKN.

Dengan demikian, dalam merencanakan pembangunan smart citynya, ketiga kabupaten ini perlu meluaskan horizonnya, tidak hanya memperhatikan isu dan kepentingan internal di kabupatennya, namun juga mencakup isu dan kepentingan kawasan. Untuk itu diperlukan tema-

tema pengikat yang dapat menghubungkan isu dan kepentingan tiap kabupaten dengan isu dan kepentingan kawasan. Tema-tema pembangunan smart city kawasan ini diidentifikasi melalui:

- Kajian terhadap hasil-hasil bimtek yang dilakukan pada tiap kabupaten
- Hasil-hasil FGD yang melibatkan kabupaten/kota di sekitar kawasan IKN, tentang isu-isu bersama yang dihadapi

Dari kajian-kajian tersebut dapat ditentukan tema-tema pembangunan smart city kawasan IKN sebagai berikut:

1. **Akses layanan publik yang berkualitas dan lebih menjangkau masyarakat.**

Tema ini didasari setidaknya oleh dua alasan mendasar: 1) peningkatan kualitas layanan publik, dan 2) penyampaian layanan publik bagi masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari ibu kota kabupaten/kota. Alasan pertama bersifat universal dan menjadi tujuan dari tiap kabupaten/kota. Alasan kedua secara spesifik dialami oleh beberapa kabupaten yang wilayahnya luas dan belum semuanya terjangkau oleh sarana transportasi yang memadai. Penyediaan layanan publik yang berkualitas dan lebih bisa dijangkau oleh masyarakat akan membawa kabupaten/kota di kawasan IKN bisa *"leveling up"* dengan IKN nantinya.

2. **Pemberdayaan ekonomi lokal dan masyarakat melalui peningkatan peran pelaku ekonomi lokal (UMKM) yang didukung oleh peningkatan kualitas SDM guna memenuhi kebutuhan IKN.**

Tema ini membidik peluang pemenuhan lonjakan kebutuhan IKN yang disebabkan karena perpindahan penduduk dalam jumlah besar dan kegiatan-kegiatan ekonomi yang dibawanya. Pelaku-pelaku ekonomi dari kabupaten/kota di kawasan IKN dapat memanfaatkan peluang ini dengan berperan sebagai penyedia/pemasok berbagai kebutuhan tersebut dan menjalankan aktivitas-aktivitas produktif yang menggerakkan sektor ekonomi lokal.

Untuk dapat menjalankan peran sebagai penyedia/pemasok kebutuhan, kabupaten/kota di kawasan IKN juga perlu melengkapi SDM tenaga kerjanya dengan ketrampilan-ketrampilan spesifik yang diperlukan dalam menjalankan peran tersebut. Hal ini menjadi urgen mengingat karakteristik kontemporer yang dibawa oleh berbagai kebutuhan tersebut (misal: energi bersih,

pertanian dan perikanan sehat dan berkelanjutan, dan sistem-sistem cerdas). Kabupaten/kota perlu mengembangkan sistem-sistem pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja yang relevan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi SDM ini.

3. **Kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan wilayah berkelanjutan melalui pemanfaatan tata ruang dan pengelolaan resiko bencana alam yang terintegrasi.**

Dalam persiapan pembangunan IKN, terlihat sekali keinginan untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup. Keberadaan IKN yang "menyatu" dengan hutan di sekitarnya menjadi salah satu penanda yang jelas. Arah dan kebijakan konservasi ini perlu didukung oleh daerah di sekitar kawasan IKN dengan semangat dan gerak yang sama. Dimulai dari penataan ruang yang taat azas dan implementasinya yang konsisten, pembangunan wilayah kawasan IKN dilakukan dengan prinsip berkelanjutan oleh tiap kabupaten/kota.

Kawasan IKN juga perlu menyiapkan diri dalam menghadapi bencana alam. Secara alamiah, penanganan bencana alam tidak dapat dilakukan secara sektoral dan parsial. Mengingat kawasan IKN juga memiliki resiko bencana alam yang cukup besar (banjir dan kebakaran hutan), tiap kabupaten/kota perlu berkolaborasi dalam upaya memitigasinya.

4. **Peningkatan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi dinamika terkait dengan kehadiran IKN.**

Pertambahan penduduk dalam jumlah besar tentu akan membawa ekses sosial. Hal ini diperkuat pula dengan karakteristik IKN sebagai "pusat" dari berbagai hal. Dalam era keterhubungan yang tinggi, ekses-ekses sosial budaya dapat dengan cepat meluas ke daerah-daerah di sekitar IKN. Untuk itu perlu upaya untuk menguatkan ketahanan sosial masyarakat agar dapat bertahan dari gempuran pengaruh buruk yang muncul akibat perubahan sosial di IKN dan sekitarnya.

Tema-tema pembangunan *smart city* kawasan IKN di atas menjadi landasan dalam menyusun program-program *smart city* yang dikolaborasikan antara kabupaten/kota yang berada di kawasan IKN.

BAB 4
PROGRAM PEMBANGUNAN SMART CITY KAWASAN IKN

4.1 Program Smart Governance Kawasan

Program smart governance yang diusulkan untuk kawasan IKN dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Program *smart governance* kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
G1	Layanan Kependudukan (diawali dengan Kios Layanan Publik yang segera akan diluncurkan oleh Pemkab Kukar dan dapat diakses pada level desa).	Pelayanan kependudukan merupakan salah satu layanan publik yang esensial sebab berkaitan langsung dengan pendataan dan administrasi kependudukan. Layanan-layanan publik lainnya sangat membutuhkan data kependudukan yang valid agar program kerja pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat, maka dari itu hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan harus selalu up to date. Mengingat banyak warga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari ibu kota kabupaten, maka penyediaan layanan ini, dan juga layanan-layanan publik lainnya, perlu didorong untuk mendekati para warga tersebut sehingga bisa diakses di kecamatan atau bahkan di desa.	Pelayanan Publik	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, dan PPU	Disdukcapil, Diskominfo

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		Karena layanan kependudukan dan beberapa layanan publik pada dasarnya mirip, maka penyediaan aplikasinya dapat dilakukan secara bersama-sama.			
G2	Layanan Kepegawaian	Perencanaan program dan kegiatan perlu untuk disusun secara sinergis agar mampu memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah layanan kepegawaian sebab berkaitan langsung dengan kinerja dan kapasitas sumberdaya yang ada. Keberadaan IKN memerlukan keberadaan sumber daya kepegawaian yang berkualitas, maka sangat penting untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitasnya. Inisiatif ini dapat diusulkan untuk dijalankan di semua kabupaten/kota di kawasan IKN.	Manajemen birokrasi yang efektif	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	BKPSDM
G3	Layanan Pajak Online	Pajak merupakan hal yang krusial sehingga diperlukan sistem khusus untuk mengelolanya terlebih pada aspek layanan masyarakat. Kemajuan teknologi, informasi	Perancangan kebijakan	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Bapenda, Diskominfo

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		dan komunikasi memberikan kemudahan bagi masayarakat, sehingga sangat penting untuk dapat memberikan layanan pembayaran pajak secara online agar masyarakat mampu mengakses dimanapun dan kapanpun, kemudahan tersebut secara langsung akan membuat masyarakat lebih tertib dalam membayar pajak			
G4	Pengembangan aplikasi terintegrasi perizinan usaha di kawasan IKN	Pembentukan IKN akan mendorong banyaknya investor dan aktivitas usaha baru sektor industri. Untuk memudahkan prosedur perizinan maka aplikasi perizinan kawasan IKN akan mempermudah OPD terkait untuk memeriksa daftar dokumen dan kesesuaian persyaratan izin usaha	Efisiensi birokrasi perizinan di kawasan IKN	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, dan PPU	DPMPTSP, Diskominfo
G5	Pengembangan aplikasi e-musrenbang di kawasan IKN	Pengembangan aplikasi e-musrenbang akan lebih banyak menyerap masukan dari masyarakat secara langsung.Ini akan lebih merepresentasikan suara masyarakat dibandingkan dengan metode perwakilan pada musrenbang yang	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Bappeda, Diskominfo, Kecamatan-kecamatan di kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		konvensional. Dengan diversitas saran dan suara masyarakat dengan jumlah yang banyak maka perencanaan pembangunan akan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat			

4.2 Program Smart Branding Kawasan

Program smart branding yang diusulkan untuk kawasan IKN dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Program smart branding kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
B1	Pengembangan investasi daerah	Berbagai potensi kabupaten di kawasan IKN tidak hanya bergerak di bidang pariwisata namun berbagai kekayaan alam berupa pertambangan, pertanian dan perkebunan merupakan hal yang penting untuk dikembangkan terlebih pada aspek investasi. Kondisi sumberdaya yang baik dan didukung oleh birokrasi yang mendukung akan membangun iklim investasi dan secara langsung akan membawa dampak postiif pada pembangunan daerah. Kabupaten/kota di kawasan IKN dapat berkolaborasi dalam memasarkan potensi daerahnya kepada calon-calon investor melalui sebuah platform yang terintegrasi.	Peningkatan investasi melalui platform dan pemasaran ekosistem bisnis daerah	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	DPMPTSP

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
B2	Pengembangan dan promosi pariwisata	Terdapat peluang sektor pariwisata baik wisata alam maupun buatan yang ada di kabupaten/kota di kawasan IKN sehingga sangat perlu untuk dioptimalkan. Potensi pariwisata yang ada perlu didukung dengan adanya pemasaran yang baik dari segi digital maupun non digital agar mampu meningkatkan nilai kunjungan dan secara tidak langsung memberikan pendapatan terhadap daerah. Beberapa obyek wisata yang terletak berdekatan, meskipun berada dalam wilayah kabupaten yang berbeda, dapat dipromosikan dalam satu kesatuan paket wisata. Upaya promosi pariwisata dapat dikaitkan pula dengan promosi produk-produk lokal.	Peningkatan kunjungan wisatawan melalui upaya promosi yang tepat sasaran	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	DPPR, Dispar, Diskominfo
B3	Penyediaan ruang kreatif	Berbagai jenis usaha kecil dan menengah yang ada di kabupaten/kota di kawasan IKN menjadikan sangat penting untuk mengembangkan dari sisi inovasi, pemasaran dan pemberdayaan pelaku usaha. Maka dari itu diperlukan ruang-ruang dan pelatihan guna meningkatkan kapasitas masyarakat khususnya dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada menjadi bidang usaha yang mampu meningkatkan ekonomi masyarakat	Peningkatan kinerja ekonomi lokal melalui pengembangan ekonomi kreatif	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Dispar, DiskopUKM

4.3 Program Smart Economy Kawasan

Program smart economy yang diusulkan untuk kawasan IKN dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Program smart economy kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
E1	Perwujudan peran sebagai penyangga pangan (pertanian dalam arti luas) melalui pengembangan rantai pasok pangan dengan dukungan aplikasi TIK	Beberapa kabupaten di kawasan IKN merupakan daerah penghasil produk pertanian, perkebunan, dan perikanan. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberadaan IKN, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi warga IKN. Untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan ini, perlu dibangun rantai pasok pangan yang lebih besar dan melibatkan lebih banyak pihak.	Pemenuhan kebutuhan pangan IKN dari kabupaten di sekitarnya	Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, dan PPU	Distanak, Dislutkan, Disbun, Disketapang
E2	Pembangunan ekosistem rantai pasok industri kecil yang melibatkan pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro tanpa melihat batas kewilayahan.	Pembangunan rantai pasok (supply chain) industri kecil/rumah tangga dengan lingkup lintas kabupaten. Inisiatif ini dapat membangun ketahanan industri kecil secara lokal guna mendukung pemenuhan berbagai kebutuhan IKN.	Peningkatan produktivitas UMKM dengan produk-produk lokal	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Disperindagkop dan Dinas PUPR di ketiga kabupaten
E3	Gerakan pembudayaan transaksi non-tunai pada UMKM dan instansi pemerintah	Di masa depan, transaksi non-tunai akan menjadi mode pembayaran yang umum dilakukan. Pembudayaan transaksi pembayaran non-tunai perlu dijadikan gerakan bersama dalam skala yang lebih luas untuk mendapatkan dampak yang signifikan. Salah satu target pentingnya	Tumbuhnya ekosistem transaksi keuangan yang mengarah pada mode *cashless*	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Diskominfo sebagai eksekutor, perbankan sebagai mitra, BI sebagai regulator.

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		adalah UMKM karena mereka adalah pelaku mayoritas roda ekonomi di daerah. Institusi pemerintah juga menjadi target karena mereka perlu memberikan contoh bagi masyarakat.			

4.4 Program Smart Living Kawasan

Program smart living yang diusulkan untuk kawasan IKN dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Program smart living kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
L1	Pengembangan konektivitas dan transportasi	Banyak wilayah di Provinsi Kalimantan Timur yang belum terjangkau oleh sarana transportasi yang layak. Kendala konektivitas ini berpengaruh pada mobilitas masyarakat dan kelancaran logistik untuk mendukung kehidupan masyarakat. Untuk mengimbangi keberadaan IKN, kabupaten/kota di sekitarnya perlu memperbaiki sarana transportasi guna membangun konektivitas antar titik yang lebih baik.	Keterjangkauan masyarakat oleh sarana transportasi yang layak	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	DPUPR, Dishub
L2	Program penyediaan air bersih	Peningkatan jumlah penduduk berjalan linier dengan kebutuhan dasar masyarakat salah satunya air bersih. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan daerah dalam penyediaan air bersih. Persiapan kebutuhan dasar seperti air bersih sangat penting untuk menunjang kehidupan di Ibukota Negara. Pengelolaan air bersih dapat	Ketersediaan air bersih yang layak pakai bagi masyarakat	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Disperkim

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		dilakukan secara kolaboratif antar daerah.			
L3	Program penguatan kapasitas puskesmas dan layanan telemedicine	Jauhnya jarak dan keterbatasan infrastruktur transportasi menyebabkan layanan kesehatan tidak dapat dijangkau dengan mudah oleh beberapa kelompok warga masyarakat. Mendekatkan beberapa layanan kesehatan yang semula hanya dapat diakses di RSUD di ibukota kabupaten ke puskesmas-puskesmas akan sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu. Sistem layanan telemedicine dapat dikembangkan dan digunakan secara bersama, untuk memanfaatkan sumber daya kesehatan (keahlian dokter) secara bersama pula.	Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Dinkes dan RSUD di tiap kabupaten.

4.5 Program Smart Society Kawasan

Program smart society yang diusulkan untuk kawasan IKN dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Program smart society kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
S1	Peningkatan ketahanan masyarakat dan keluarga	Perlu adanya kesiapan daerah dalam menghadapi dampak dari *cultural shock* dan sosial budaya pada masyarakat lokal dengan masuknya budaya baru akibat kehadiran IKN. Kabupaten/kota di kawasan IKN perlu membangun ketahanan masyarakat melalui upaya-upaya yang berakar pada kondisi sosial dan budaya	Peningkatan ketahahan sosial, budaya, dan moral masyarakat	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Kesbangpol, Dinas Kebudayaan

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		masyarakat yang ada. Masyarakat Kalimantan Timur pada dasarnya memiliki akar sosial budaya yang mirip, sehingga upaya ini perlu dilaksanakan secara terpadu dan serentak pada tiap kabupaten/kota.			
S2	Pengembangan layanan ketenagakerjaan di kawasan IKN	Pembentukan ibu kota negara baru berpotensi memunculkan kebutuhan lapangan kerja yang besar. Peluang ini tidak akan memberikan manfaat jika tidak diantisipasi dengan pengelolaan ketenagakerjaaan yang baik. Salah satu persoalan yang akan timbul adalah bagaimana mempertemukan penyedia lapangan kerja dan pencari kerja secara lebih efektif. Persoalan ini akan lebih efektif bila diselesaikan pada tingkat kawasan, tidak secara parsial pada tiap kabupaten/kota. Salah satu solusi adalah melalui aplikasi ketenagakerjaan yang dijalankan secara terpadu oleh kabupaten/kota di kawasan IKN	Peningkatan angka serapan tenaga kerja usia produktif dan pengurangan prosentase angka pengangguran.	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Disnakertrans, Disperindag, DPMPTSP, Diskominfo
S3	Pembentukan pusat-pusat pelatihan kompetensi masa depan	Keberadaan IKN dengan ciri modern, berkelanjutan, dan menjadi model ibukota masa depan membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang memiliki ketrampilan masa depan pula. Banyak ketrampilan baru yang perlu dikuasai oleh masyarakat di sekitar IKN, terutama angkatan kerjanya. Pemerintah daerah perlu membangun pusat-pusat pelatihan vokasional terkait kompetensi masa depan ini (atau mengubah balai-balai pelatihan kerja yang ada saat ini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan jaman). Tiap kabupaten di daerah IKN dapat	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan ketrampilan masyarakat	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	Disnakertrans

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi fokus pelatihan, dan menyelenggarakan pelatihan ketrampilan yang terbuka bagi masyarakat di daerah sekitar IKN tanpa harus terbatas pada domisili.			

4.6 Program Smart Environment Kawasan

Program smart environment yang diusulkan untuk kawasan IKN dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Program smart environment kawasan IKN

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
N1	Pengelolaan sampah secara terpadu dan kolaboratif.	Semakin meningkatnya jumlah penduduk akibat dari pengembangan pusat pertumbuhan baru di IKN memberikan dampak pada peningkatan volume sampah baik organik maupun anorganik. Untuk dapat menampung dan mengelola limbah/sampah yang ada maka diperlukan infrastruktur pendukung yang berfokus pada pengelolaan sampah agar tidak mencemari lingkungan yang berdampak pada kerusakan ekosistem. Infrastruktur pengelolaan sampah ini dapat dibangun atas dasar prinsip kolaborasi antar daerah.	Pengelolaan sampah dan limbah yang lebih ramah lingkungan dan produktif	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	DLHK
N2	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Peran masyarakat sangat penting dalam pengelolaan lingkungan khususnya menjaga agar lingkungan tetap bersih dan terjaga keseimbangannya. Maka dari itu diperlukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan	Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	DLHK

No	Program	Rasional	Sasaran	Pemerintah Daerah yang Bekerjasama	OPD yang Terlibat
		kapasitas diri dan pengetahuan baik dalam bentuk pendiidkan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup. Selain itu, adanya pengembangan Ibukota Negara menjadikan masyarakat harus berperan aktif dalam menjaga lingkungan agar tercipta pembangunan yang berkelanjutan.			
N3	Pengembangan kampung iklim di kawasan IKN	Besarnya aktivitas industri yang berpotensi menyebabkan bencana alam di kawasan ibu kota negara memerlukan koordinasi lintas kawasan untuk mitigasi sekaligus menangani bencana alam yang sedang terjadi. Selain itu, kampung iklim dapat diwujudkan melalui program-program berwawasan lingkungan lainnya misalnya bank sampah antar kawasan IKN	Peningkatan kualitas udara dan penanggulangan kerusakan lingkungan	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	DLHK
N4	Sistem deteksi dan mitigasi bersama secara terpadu dan kolaboratif. Program yang dapat dikolaborasikan misalnya sistem deteksi bencana (banjir atau kebakaran hutan) dengan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT).	Penanganan bencana alam dengan skala yang cukup luas (misal: banjir atau kebakaran hutan) perlu dilakukan secara terpadu dan holistik karena dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat pada cakupan area yang luas pula. Strategi pengendalian dan mitigasi bencana perlu didiskusikan dan dibicarakan secara bersama antar kabupaten. Penggunaan teknologi mitigasi juga bisa dilakukan secara berbagi-pakai *(sharing)*.	Terciptanya sistem mitigasi bencana secara holistik	Semua kabupaten/kota di kawasan IKN	BPBD

BAB 5
KERANGKA PENDANAAN

5.1 Indikasi Kebutuhan Anggaran dan Sumber Dana

Tabel 5.7 menjelaskan tentang indikasi kebutuhan anggaran untuk semua usulan program yang tercantum dalam Tabel 5.1 sampai dengan Tabel 5.6. Selain itu disampaikan pula indikasi sumber dana yang bisa dimanfaatkan.

Tabel 5. 1 Indikasi Kebutuhan Anggaran dan Sumber Dana

No	Program	Anggaran dan Pembiayaan			Tahun
		Indikasi Kebutuhan Pembiayaan	Indikasi Sumber Dana	Indikasi Nilai Kebutuhan Dana	
Smart Governance					
G1	Layanan kependudukan (diawali dengan Kios Layanan Publik yang segera akan diluncurkan oleh Pemkab Kukar dan dapat diakses pada level desa).	• Infrastruktur jaringan internet ke kecamatan dan/atau desa • Pengembangan & pemeliharaan aplikasi • Pelatihan dan pendampingan bagi operator • Sosialisasi bagi masyarakat	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,5 M/tahun untuk aplikasi, pelatihan, dan sosialisasi pada tiap kabupaten. Untuk infra struktur sangat tergantung pada lokasi.	2022 – 2026
G2	Layanan Kepegawaian	• Pengembangan & pemeliharaan aplikasi • Pelatihan dan pendampingan bagi operator	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,3 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2022
G3	Layanan Pajak Online	• Pengembangan & pemeliharaan aplikasi	APBD masing-masing kabupaten	Rp 0,3 M/tahun untuk tiap kabupaten.	2022 – 2026

		• Pelatihan dan pendampingan bagi operator	untuk semua jenis pembiayaan		
G4	Pengembangan aplikasi terintegrasi perizinan usaha di kawasan IKN	• Pengembangan & pendampingan aplikasi • Pelatihan dan pendampingan bagi operator	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,3 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023
G5	Pengembangan aplikasi e-musrenbang di kawasan IKN	• Pembangunan infrastruktur jaringan komputer dan konektivitas Internet • Pengembangan & pemeliharaan aplikasi e-musrenbang	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,2 M/tahun untuk tiap kabupaten. Untuk infra struktur sangat tergantung pada lokasi.	Mulai 2023
Smart Branding					
B1	Pengembangan investasi daerah	• Pengembangan & pemeliharaan platform pemasaran potensi daerah bagi calon investor • *Business match-making* dengan mendatangkan calon investor ke daerah	• APBD untuk pengembangan aplikasi • Kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendatangkan calon investor	Rp 0,5 M/tahun untuk platform pemasaran potensi daerah di tiap kab. Rp 0,5 M/tahun untuk *business match making*	Mulai 2022
B2	Pengembangan dan promosi pariwisata secara terpadu	• Pengembangan paket-paket wisata terpadu • Promosi pariwisata melalui berbagai saluran (media	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,5 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2022

		digital, *travel fair*, dsb)			
B3	Penyediaan ruang kreatif	• Pengembangan ruang-ruang kreatif *(creative spaces)* dalam berbagai bentuk • Pelatihan, workshop, dan lomba-lomba kreativitas dan inovasi	• APBD untuk pengembangan ruang-ruang kreatif • Kerja sama dengan pihak ketiga untuk penyelenggaraan event-event kreatif	Rp 1 M/tahun untuk tiap kabupaten	Mulai 2022
Smart Economy					
E1	Perwujudan peran sebagai penyangga pangan (pertanian dalam arti luas) melalui pengembangan rantai pasok pangan dengan dukungan aplikasi TIK	• Pengembangan & pemeliharaan aplikasi e-commerce lokal untuk membangun rantai pasok pertanian • Pelatihan dan pendampingan bagi pengguna (UMKM)	• APBD untuk pengembangan aplikasi e-commerce • Kerja sama dengan pihak ketiga untuk perluasan jejaring rantai pasok	Rp 0,5 M/tahun untuk tiap kabupaten	Mulai 2023
E2	Pembangunan ekosistem rantai pasok industri kecil yang melibatkan pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro tanpa melihat batas kewilayahan.	• Pengembangan aplikasi e-commerce lokal untuk membangun ekosistem ekonomi lokal • Pelatihan dan pendampingan bagi pengguna (UMKM)	• APBD untuk pengembangan aplikasi e-commerce • Kerja sama dengan pihak ketiga untuk perluasan jejaring rantai pasok	Rp 1 M/tahun untuk ketiga kabupaten. Biaya dapat dibagi antara ketiga kabupaten.	Mulai 2023
E3	Gerakan pembudayaan transaksi non-tunai	• Pembangunan infrastruktur pembayaran non-tunai	• APBD untuk sosialisasi dan pendampingan	Rp 1,5 M/tahun untuk tiap kabupaten (di luar biaya	Mulai 2023

	pada UMKM dan instansi pemerintah	• Sosialisasi dan pendampingan bagi pengguna (UMKM)	• Kerja sama dengan pihak ketiga (bank) untuk pembiayaan infrastruktur pembayaran non-tunai	infrastruktur finansial yang disediakan bank)	
Smart Living					
L1	Pengembangan konektivitas dan transportasi	• Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan dan jembatan) • Penyediaan sarana transportasi publik	• APBD (provinsi & kabupaten/kota) dan APBN untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur • Partisipasi swasta untuk penyediaan sarana transportasi publik	Rp 200 M/tahun untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur transportasi di tiap kabupaten. Untuk penyediaan sarana transportasi publik oleh pihak swasta.	Mulai 2024
L2	Program penyediaan air bersih	Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur penyediaan air bersih	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 30 M untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023
L3	Program penguatan kapasitas puskesmas dan layanan telemedicine	• Pembangunan infrastruktur jaringan komputer dan konektivitas Internet • Penyediaan & pemeliharaan perangkat akses • Pelatihan bagi operator	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 2 M/tahun untuk perangkat akses dan pelatihan operator, untuk tiap kabupaten.	Mulai 2024

Smart Society					
S1	Peningkatan ketahanan masyarakat dan keluarga	• Pengembangan materi promosi budaya • Penyelenggaraan event-event sosial dan budaya	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,5 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023
S2	Pengembangan layanan ketenagakerjaan di kawasan IKN	• Pengembangan aplikasi layanan ketenagakerjaan (bursa kerja) • Pelatihan bagi operator • Sosialisasi bagi masyarakat (tenaga kerja) dan penyedia lapangan kerja • Penyelenggaraan event bursa tenaga kerja	• APBD untuk pengembangan aplikasi, pelatihan, dan sosialisasi • Kerja sama dengan pihak ketiga (event organizer) untuk penyelenggaraan event bursa kerja	Rp 0,5 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023
S3	Pembentukan pusat-pusat pelatihan kompetensi masa depan	• Pembangunan fasilitas pelatihan dan perlengkapannya • Penyiapan SDM instruktur dan pelatih • Penyiapan kurikulum dan materi pelatihan • Sosialisasi bagi masyarakat (tenaga kerja)	• Kerja sama dengan pihak ketiga (industri atau perusahaan besar) untuk pembangunan fasilitas pelatihan dan penyiapan SDM serta kurikulum & materi pelatihannya • APBD untuk sosialisasi bagi masyarakat	Rp 0,5 M/tahun untuk penyiapan SDM, kurikulum, dan sosialisasi di tiap kabupaten.	Mulai 2023

Smart Environment					
N1	Pengelolaan sampah secara terpadu dan kolaboratif.	• Pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu • Pengembangan aplikasi pengelolaan sampah (bank sampah) • Sosialisasi kepada masyarakat	• Cost-sharing APBD masing-masing kabupaten atau APBN untuk pembangunan fasilitas pengelolaan sampah terpadu dan pengembangan aplikasi bank sampah • APBD masing-masing kabupaten/kota untuk sosialisasi	Rp 1 T untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu. Rp 0,2 M untuk aplikasi dan sosialisasi.	Mulai 2023
N2	Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	• Pengembangan materi penyuluhan dan pelatihan • Sosialisasi kepada masyarakat	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,1 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023
N3	Pengembangan kampung iklim di kawasan IKN	• Pembangunan kampung iklim • Sosialisasi kepada masyarakat	APBD masing-masing kabupaten untuk semua jenis pembiayaan	Rp 0,5 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023
N4	Sistem deteksi dan mitigasi bersama secara terpadu dan kolaboratif. Program yang dapat dikolaborasikan misalnya sistem deteksi bencana (banjir atau kebakaran hutan) dengan	• Pembangunan dan pemeliharaan sistem monitoring dini bencana alam • Sosialisasi kepada masyarakat	• Cost-sharing APBD masing-masing kabupaten untuk pembangunan sistem monitoring bencana alam • APBD masing-masing	Rp 1 M/tahun untuk tiap kabupaten.	Mulai 2023

	menggunakan teknologi Internet of Things (IoT).		kabupaten/kota untuk sosialisasi		

5.2 Strategi Pendanaan

Program-program smart city kawasan yang dijelaskan pada subbab V.1 adalah program-program yang dijalankan dalam skema kolaborasi. Kolaborasi dapat terjadi antara dua atau lebih kabupaten/kota di kawasan IKN, ataupun melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah kabupaten/kota tersebut. Untuk merealisasikan program-program tersebut, tersedia beberapa strategi pendanaan yang dapat dipilih yang paling sesuai.

Bila kolaborasi terjadi antar pemerintah kabupaten/kota saja, maka dapat ditempuh strategi-strategi pendanaan sebagai berikut:

1. **Pembiayaan program sepenuhnya dijalankan oleh masing-masing kabupaten/kota secara independen.**

Pilihan strategi ini dapat ditempuh bila kolaborasi program bersifat ‘longgar’ *(loose)*, dalam arti kolaborasi terjadi pada tingkat konsep sampai dengan desain umum, sementara implementasinya dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam program tersebut dapat dijalankan secara independen di masing-masing kabupaten/kota.

2. **Pembiayaan program dijalankan dengan mekanisme *cost-sharing* antar kabupaten/kota yang berkolaborasi.**

Pilihan ini sesuai bila dalam program kolaboratifnya terdapat komponen-komponen yang dapat digunakan secara bersama oleh beberapa kabupaten/kota. Contoh tipikal untuk skema ini adalah pengembangan aplikasi atau sistem informasi untuk sebuah layanan publik. Dalam domain penyelenggaraan pemerintahan daerah, proses bisnis layanan publik pada umumnya sama, kalaupun ada perbedaan hanyalah bersifat minor. Untuk situasi seperti ini, pemerintah daerah dapat mengembangkan sebuah aplikasi komputer atau sistem informasi generik yang dapat dikustomisasi. Biaya pengembangan aplikasi atau sistem informasi ini dapat ditanggung oleh pihak-pihak yang berkolaborasi.

3. **Pembiayaan program memanfaatkan sumber dana eksternal (dana pemerintah pusat, hibah yang tidak mengikat, bantuan luar negeri, dan sebagainya).**

Beberapa program smart city kawasan memerlukan dana yang besar karena melibatkan pembangunan fasilitas/infrastruktur yang besar pula. Sebagai contoh adalah pembangunan tempat pengolahan sampah terpadu regional, atau sistem deteksi bencana banjir yang dipasang sepanjang alur sungai yang melintasi beberapa kabupaten/kota. Untuk program-program berskala besar seperti ini, pemerintah daerah dapat mengakses sumber-sumber dana eksternal yang sesuai dengan misi program smart city tersebut.

Bila kolaborasi terjadi dengan melibatkan pihak-pihak di luar pemerintah kabupaten/kota, maka ada satu opsi tambahan yang dapat dipilih:

4. **Kerja sama kemitraan, dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) oleh perusahaan swasta/BUMD/BUMN, atau bentuk kerja sama kemitraan lain yang saling menguntungkan.**

Kunci keberhasilan dalam mengakses dana dari pihak di luar pemerintah daerah ini adalah kesesuaian visi, misi, dan program, serta kemampuan dalam membangun sebuah rantai nilai *(value chain)* yang memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam skema ini, program kolaborasi dikemas dalam alur yang menghubungkan semua pihak yang terlibat, di mana tiap pihak menjalankan peran masing-masing dan memetik manfaat *(value)* dari apa yang mereka lakukan. Contoh yang sering dipraktekkan adalah pengelolaan bank sampah yang melibatkan masyarakat (rumah tangga) sebagai pemasok sampah, pengelola bank sampah, perusahaan pendaur-ulang sampah, dan institusi pemerintah. Pihak-pihak ini saling terhubung, masing-masing menjalankan perannya, dan masing-masing memperoleh manfaat dari apa yang dilakukannya.

Selain beberapa strategi pembiayaan di atas, dalam berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat, selalu ada peluang dan kesempatan untuk menggali sumber pembiayaan secara mandiri dari masyarakat.

BAB 6
PENUTUP

Buku ini menjelaskan tentang program-program smart city yang dijalankan dalam konteks kawasan IKN. Program-program ini disusun dengan memperhatikan kepentingan bersama dari kabupaten/kota yang berada di kawasan IKN, dan dijalankan dengan skema kolaborasi. Meskipun masih berupa desain umum yang perlu dielaborasi lebih jauh, program-program ini diharapkan dapat menjadi solusi dari beberapa isu dan masalah yang muncul sebagai dampak atas kehadiran IKN di Provinsi Kalimantan Timur.

Ada dua catatan penting yang perlu diperhatikan terkait program-program smart city kawasan IKN yang dijelaskan dalam buku ini. Yang pertama adalah tingkat kematangan dari program-program yang diusulkan dalam dokumen master plan ini. Program-program ini diidentifikasi dan disusun berdasarkan pengetahuan tentang konsep implementasi IKN yang masih sangat terbatas. Tidak banyak dokumen tentang IKN yang di-*release* untuk publik, sehingga informasi yang dapat digunakan sebagai platform untuk merencanakan program-program smart city kawasan menjadi terbatas. Sekiranya pada masa yang akan datang informasi tentang IKN semakin jelas dan lengkap, maka ada kemungkinan program-program smart city ini perlu ditinjau kembali. Dengan demikian, dokumen master plan smart city kawasan IKN ini adalah sebuah dokumen perencanaan yang terbuka untuk direvisi mengikuti perkembangan implementasi IKN.

Catatan kedua terkait dengan implementasi dari program-program smart city yang diusulkan dalam dokumen master plan ini. Saat ini belum ada forum komunikasi dan koordinasi yang dapat mengkonsolidasikan pemerintah kabupaten/kota yang terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut. Forum ini memiliki fungsi yang sangat penting, sehingga perlu segera dibentuk. Sebagai inisiator dan fasilitator bagi forum komunikasi dan koordinasi ini diusulkan instansi pada level Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Sebagai penutup, buku Master Plan Smart City Kawasan IKN ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi kabupaten/kota di kawasan IKN untuk merespon kehadiran IKN melalui langkah-langkah cerdas yang efektif. Pada akhirnya harapan yang paling besar adalah buku ini dapat membantu kabupaten/kota di kawasan IKN untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, dan berjalan seiring seirama dengan tumbuh dan berkembangnya IKN.

REFERENSI

BPS Kabupaten Kutai Barat. 2021. *Kabupaten Kutai Barat dalam Angka 2021*. Kabupaten Kutai Barat. https://kubarkab.bps.go.id.

BPS Kabupaten Kutai Kartanegara. 2021. *Kabupaten Kutai Kartanegara dalam Angka 2021*. Kabupaten Kutai Kartanegara. https://kukarkab.bps.go.id/

BPS Kabupaten Paser. 2021. *Kabupaten Paser dalam Angka 2021*. Kabupaten Paser. https://paserkab.bps.go.id/

Celino, I.S.K. (2013). *Smart Cities*. IEEE Computer Society, Los Alamitos.

Dameri, R.P. (2014). *Smart City: How to Create Public and Economic Values with High Technology in Urban Space*, Springer International Publishing, Switzerland.

Frank, M., Roehrig, P. & Pring, D.B. (2018). *Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Mesin Melakukan Semuanya*. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Friedman, T.L. (2008). *Hot, Flat, and Crowded: Why the World Needs A Green Revolution, and How We Can Renew Our Global Future*. Penguin Books, London.

He, Y.I.S (2014). "Smart City", *International Journal of Distributed Sensor Networks*, p.1-3.

Kasali, R. (2017). *Disruption: Tak Ada Yang Bisa Diubah Sebelum Dihadapi, Motivasi Saja Tidak Cukup*. Gramedia, Jakarta.

Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., Yousef, W., Lombardi, P., Giordano, S., Farouh, H., & Yousef, W. (2012). *Modelling the smart city performance*. *1610*. https://doi.org/10.1080/13511610.2012.660325

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036*.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2019 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023*

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2020 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*.

Permadi, D. (2015). *Menuju Kota-kota Sekunder Pintar: Pemetaan Pemanfaatan TIK Dalam Pelayanan Publik di 12 Kota Indonesia*. The Habibie Center, Jakarta.

Rudito, P. & Sinaga, M.F.N. (2017). *Digital Mastery: Membangun Kepemimpinan Digital untuk Memenangkan Era Disrupsi*. Gramedia, Jakarta.

Widiyastuti, I., Nupikso, D., Putra, N.A., Zaini, N., Intanny, V.A., Darmanto (2018). *Teknologi dan Perubahan Sosial*. BPSDMP Kominfo & Gava Media, Yogyakarta.

.

Buku Masterplan Smartcity
Kawasan Ibukota Negara Baru Republik Indonesia
Tahun 2021